PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KAPUAS HULU HEBAT

FRANSISKUS DIAAN, S.H
BUPATI KAPUAS HULU

RPJMD

KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021-2026

WAHYUDI HIDAYAT, S.T
WAKIL BUPATI KAPUAS HULU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2031.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

(2) RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
   a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah;
   b. pedoman bagi BAPPEDA dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
   c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah; dan
   d. bahan evaluasi pencapaian kinerja RPJPD tahun 2011-2031.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD meliputi :
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
   c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
i. BAB IX : PENUTUP

(2) Uraian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5/2021);

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mempergunakan pendekatan:

a. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi dan kesetaraan para pemangku kepentingan serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
c. Pendekatan Politis, yaitu bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD; dan
d. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Tahapan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 terdiri atas:

a. persiapan penyusunan RPJMD;
b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
c. penyusunan rancangan RPJMD;
d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Materi muatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 terdiri atas:

a. visi, misi, dan program kepala daerah;
b. arah kebijakan keuangan daerah;
c. strategi pembangunan daerah;
d. kebijakan umum;
e. program perangkat daerah;

f. program lintas perangkat daerah;

g. program kewilayahan;

h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan

i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 99

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4	Maksud dan Tujuan	I-10
1.5	Sistematika Penulisan	I-11
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II-1**
2.1	Aspek Geografi Dan Demografi	II-2
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-38
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-163
2.5	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	II-172
BAB III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu	III-37
3.3	Kerangka Pendanaan	III-40
BAB IV	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**	**IV-1**
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2	Isu Strategis	IV-16
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**	**V-1**
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-9
BAB VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	**VI-1**
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-12
BAB VII	**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**	**VII-1**
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**VIII-1**
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
8.2	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-33
8.3	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VIII-36
BAB IX	**PENUTUP**	**IX-1**
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Kelurahan dan Desa beserta Luas Wilayahnya (Km2) Kabupaten Kapuas Hulu	II-3
Tabel II.2	Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Sek Rasio Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II	II-5
Tabel II.3	Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021	II-12
Tabel II.4	Perbandingan Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-13
Tabel II.5	Perbandingan Luas Areal Panen dan Produksi Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-14
Tabel II.6	Data Danau Lindung di Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu	II-18
Tabel II.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016—2020	II-22
Tabel II.8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016—2020	II-23
Tabel II.9	IPM dan Komponen Penyusunnya	II-26
Tabel II.10	Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020Persentase Partisipasi Jenis Budaya Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu	II-35
Tabel II.11	Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan	II-37
Tabel II.12	Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2020	II-41
Tabel II.13	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan	II-41
Tabel II.14	Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2020	II-42
Tabel II.15	Panjang Jalan Sebagai Status Ruas Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan dan Kondisi (Km) Kabupaten Kapuas Hulu, 2020	II-46
Tabel II.16	Data Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-58
Tabel II.17	Data Desa Rawan Bencana Per Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021	II-71
Tabel II.18	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Upaya Penegakan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-78
Tabel II.19	Capaian Pelayanan Terhadap Pmks Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-80
Tabel II.20	Data Pencari Kerja Tahun 2016-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-81
Tabel II.21	Data Pelatihan Calon Tenaga Kerja Tahun 2016-2021	II-82
Tabel II.22	Data Penempatan Tenaga Kerja 2016-2020 Berdasarkan	II-83

	Posisi Jabatan	
Tabel II.23	Data Penempatan Tenaga Kerja 2016-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-84
Tabel II.24	Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020	II-84
Tabel II.25	Perkembangan UMK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013-2020	II-87
Tabel II.26	Capaian Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-87
Tabel II.27	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Realiasi Sektor Pangan	II-89
Tabel II.28	Jumlah Tanah Bersertifikat Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015-2019	II-90
Tabel II.29	Jumlah Penduduk,Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Sex RasioMenurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II	II-93
Tabel II.30	Nama Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021	II-96
Tabel II.31	Realisasi Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020	II-103
Tabel II.32	Jumlah terminal di Kabupaten Kapuas Hulu	II-105
Tabel II.33	Jumlah Armada Darat (Bus) yang beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu	II-106
Tabel II.34	Jumlah Rambu-rambu lalu lintas darat yang terpasang	II-107
Tabel II.35	Jumlah Pju yang terpasang tahun 2018-2020	II-108
Tabel II.36	Jumlah Dermaga di Kabupaten Kapuas Hulu	II-109
Tabel II.37	Daftar Penyebrangan Sungai di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	II-109
Tabel II.38	Sarana Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	II-109
Tabel II.39	Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu (Keadaan per 31 Desember 2020)	II-112
Tabel II.40	Jumlah Akses Internet Berdasarkan Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (Keadaan per 31 Desember 2020)	II-113
Tabel II.41	Daftar Koperasi dan UMKM yang Aktif dan Tidak Aktif	II-115
Tabel II.42	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kapuas Hulu	II-116
Tabel II.43	Dokumen Perizinan yang di Terbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu	II-117
Tabel II.44	Jumlah Organisasi Pemuda Dan Kelompok Pemuda	II-119

	Kabupaten Kapuas Hulu	
Tabel II.45	Keikutsertaan Kabupaten Kapuas Hulu Pada Event Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional	II-120
Tabel II.46	Perolehan Medali pada Kegiatan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Provinsi Kalimantan Barang Di Pontianak Tahun 2019	II-121
Tabel II.47	Data Gelangan dan Lapangan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu	II-121
Tabel II.48	Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Tahun Kabupaten Kapuas Hulu	II-126
Tabel II.49	Produksi Ikan Perairan Umum Berdasarkan Potensial Tangkapan Kabupaten Kapuas Hulu	II-127
Tabel II.50	Pokmaswas yang sudah terbentuk dari tahun 2016 hingga tahun 2020	II-129
Tabel II.51	Produksi Budidaya Perikanan di Kolam Kabupaten Kapuas Hulu	II-131
Tabel II.52	Produksi Budidaya Perikanan di Keramba Kabupaten Kapuas Hulu	II-133
Tabel II.53	Produksi Budidaya Perikanan di Minapadi Kabupaten Kapuas Hulu	II-133
Tabel II.54	Produksi Ikan Hias di Kolam Kabupaten Kapuas Hulu	II-134
Tabel II.55	Produksi Benih Ikan di UPT BI (Benih Ikan) Kelansin Kabupaten Kapuas Hulu	II-135
Tabel II.56	Produksi Hasil Olahan Perikanan Menurut Jenisnya Kabupaten Kapuas Hulu	II-136
Tabel II.57	Data Usaha Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Per 2 Juni 2021	II-138
Tabel II.58	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Realisasi Sektor Pertanian	II-139
Tabel II.59	Pasar Rakyat Yang Tersebar Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	II-140
Tabel II.60	Perkembangan Pelaku Industri Kecil Dan Menenggah Di Kabupaten Kapuas Dari Tahun 2016 S/D 2020	II-143
Tabel II.61	Data Penempatan Kawasan Satuan Transmigrasi Yang Telah Dibina Dan Difasilitasi Pembangunan Di Kabupaten Kapuas Hulu	II-147
Tabel II.62	Tabel Pejabat yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	II-157
Tabel II.63	Tabel Penelitian Tahun 2017-2021 di Kabupaten Kapuas Hulu	II-158
Tabel II.64	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019	II-164
Tabel II.65	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Berkerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Perkerjaan Utama di Kabupaten Kapuas Hulu,2020	II-165
Tabel II.66	Jumlah Pelangan dan Banyaknya Air Minum Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019	II-170
Tabel II.67	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021	II-173
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-2
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2020	III-3

Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (Jutaan)	III-7
Tabel III.4	Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)	III-11
Tabel III.5	Realisasi Penggunaan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)	III-15
Tabel III.6	Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)	III-17
Tabel III.7	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020	III-26
Tabel III.8	Rasio Lancar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)	III-32
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)	III-33
Tabel III.10	Rasio Hutang Terhadap Total aset Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan Rupiah)	III-34
Tabel III.11	Rasio Perputaran Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan Rupiah)	III-35
Tabel III.12	Rasio Perputaran Total Aset Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016– 2020 (dalam jutaan Rupiah)	III-36
Tabel III.13	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam jutaan Rupiah)	III-38
Tabel III.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-40
Tabel III.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-40
Tabel III.16	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026	III-44
Tabel III.17	Proyeksi Belanja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)	III-49
Tabel III.18	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-51
Tabel III.19	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)	III-53
Tabel III.20	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam Jutaan)	III-58
Tabel IV.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-7
Tabel IV.2	Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-13
Tabel IV.3	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	IV-15
Tabel IV.4	Kelompok Pilar dan Isu Strategis KLHS Kabupaten Kapuas Hulu	IV-43
Tabel IV.5	Program Utama RTRW Periode Jangka Menengah II dan III Kabupaten Kapuas Hulu	IV-46
Tabel IV.6	Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	IV-51
Tabel V.1	Inidikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	V-11
Tabel V.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	V-19

Tabel VI.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VI-3
Tabel VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VI-16
Tabel VI.3	Matriks Indikasi Program Kabupaten Kapuas Hulu PJM II	VI-26
Tabel VI.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VI-34
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021-2026 (Juta Rupiah)	VII-2
Tabel VII.2	Program Prioritas Yang Disertai Pendanaan Kabupaten Kapuas Hulu	VII-5
Tabel VIII.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VIII-1
Tabel VIII.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel VIII.3	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VIII-6
Tabel VIII.4	Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VIII-34
Tabel VIII.5	Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	VIII-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar I.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Anggaran	I-7
Gambar I.3	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Pendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	I-10
Gambar II.1	Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu	II-4
Gambar II.2	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016-2020	II-5
Gambar II.3	Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, 2020	II-7
Gambar II.4	Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Miliar Rupiah)	II-21
Gambar II.5	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Juta Rupiah)	II-24
Gambar II.6	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)	II-27
Gambar II.7	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu, 2015-2020 (Tahun)	II-28
Gambar II.8	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)	II-28
Gambar II.9	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH tahun 2017 – 2020	II-29
Gambar II.10	Garis Kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 (Rupiah) Perkapita Perbulan	II-30
Gambar II.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020	II-31
Gambar II.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)	II-33
Gambar II.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)	II-33
Gambar II.14	Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Kapuas Hulu (%), 2020	II-34
Gambar II.15	Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Kapuas Hulu, 2020	II-39
Gambar II.16	Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Kapuas Hulu, 2019-2020	II-39
Gambar II.17	Angka Melek Huruf Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 (Persen)	II-40
Gambar II.18	Fasilitas Kesehatan Kapuas Hulu, 2020	II-42
Gambar II.19	Panjang Jalan Sebagai Status Ruas Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis (Km), Tahun 2020	II-44
Gambar II.20	Panjang Jalan Sebagai Status Ruas Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi (Km), Tahun 2020	II-45
Gambar II.21	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016-2020	II-93
Gambar II.22	Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, 2020	II-95
Gambar II.23	Pertumbuhan investasi periode tahun 2016-2020 di Kabupaten Kapuas Hulu	II-118
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam miliar)	III-4

Gambar IV.1	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026	IV-3
Gambar IV.2	Penyelesaian Tindak Pidana Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-5
Gambar IV.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-8
Gambar IV.4	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-9
Gambar IV.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-10
Gambar IV.6	Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-11
Gambar IV.7	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019	IV-12
Gambar VI.1	Tema Pembangunan Tahun 2021-2026 Kabupaten Kapuas Hulu	VI-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor:10/PL.02.7.Pu/6106/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020 pada 22 Januari 2021 bahwa pasangan Fransiskus Diaan, SH dan Wahyudi Hidayat ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Periode pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu akan berakhir pada tahun 2021 dimana pada Desember 2020 ini telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu sebagai langkah awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah diemban pada periode sebelumnya diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perwujudan visi pembangunan jangka panjang pada tahun 2025 "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan". Pada periode selanjutnya, perlu dirumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang akan meningkatkan capaian target pembangunan daerah sehingga mampu mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu koridor pembangunan yang terus dijaga pada setiap tahapan pembangunan Kapuas Hulu adalah penetapan sebagian besar wilayah Kapuas Hulu sebagai daerah konservasi yang menjadikan Kapuas Hulu memiliki sisi strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kawasan konservasi yang dimiliki oleh Kapuas Hulu merupakan kawasan koservasi yang ditetapkan sebagai *Heart of Borneo* dan Cagar Biosfer. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan Cagar Biosfer Kapuas Hulu akan ditunjukan dengan adanya keselarasan hubungan antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu, perlu adanya *concern* pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi pencapaian Pemerintah Kapuas Hulu dan Pemerintah Pusat saat ini.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta Visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2005 - 2025. Maka dengan terpilihnya **Fransiskus Diaan, S.H. sebagai Bupati dan Wahyudi Hidayat, S.T. sebagai Wakil Bupati** yang mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Kapuas Hulu agar masyarakatnya lebih sejahtera. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD 2021-2026.

"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL"

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dilaksanakan pada periode pembangunan 2021-2026. Sebagai upaya dalam memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Implementasi pasal tersebut, tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 3 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarfungsi Pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara~~n~~ Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~~0~~7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan akan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan.

Hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

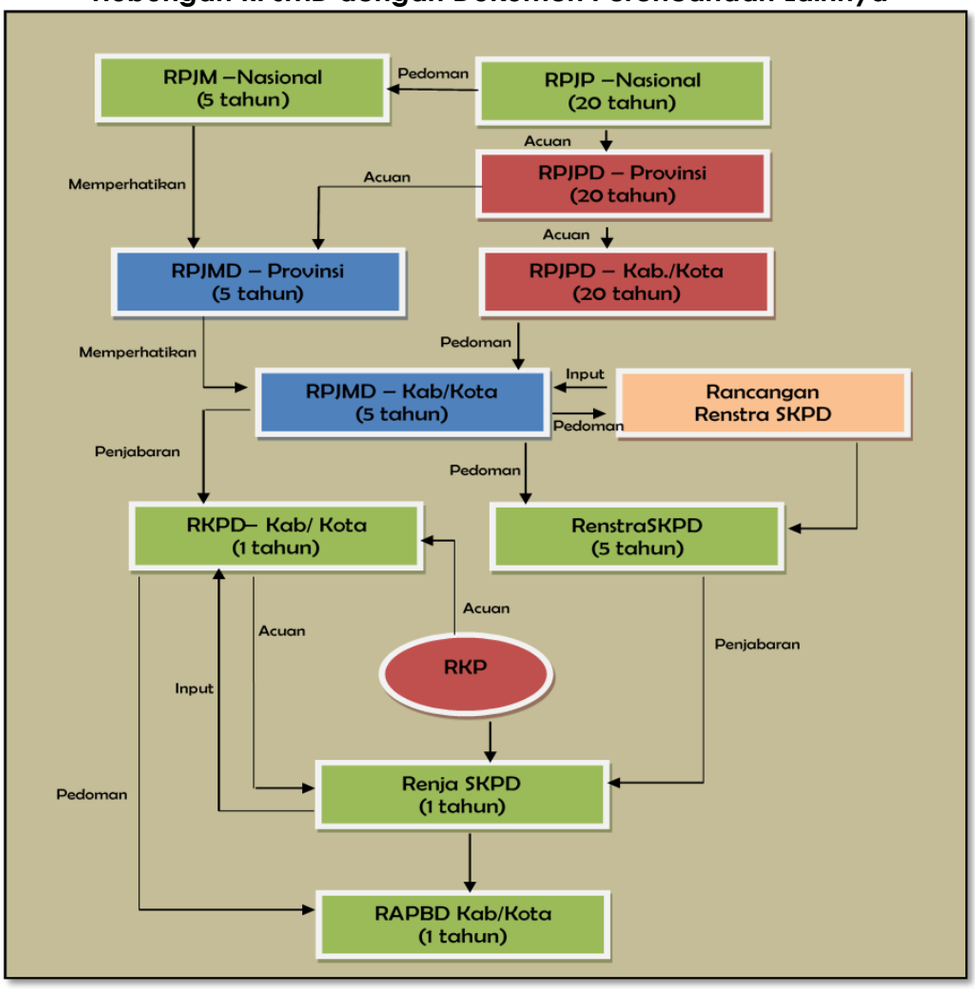

Secara garis besar, RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat ditunjukkan sesuai gambar berikut:

Gambar I.2.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Anggaran

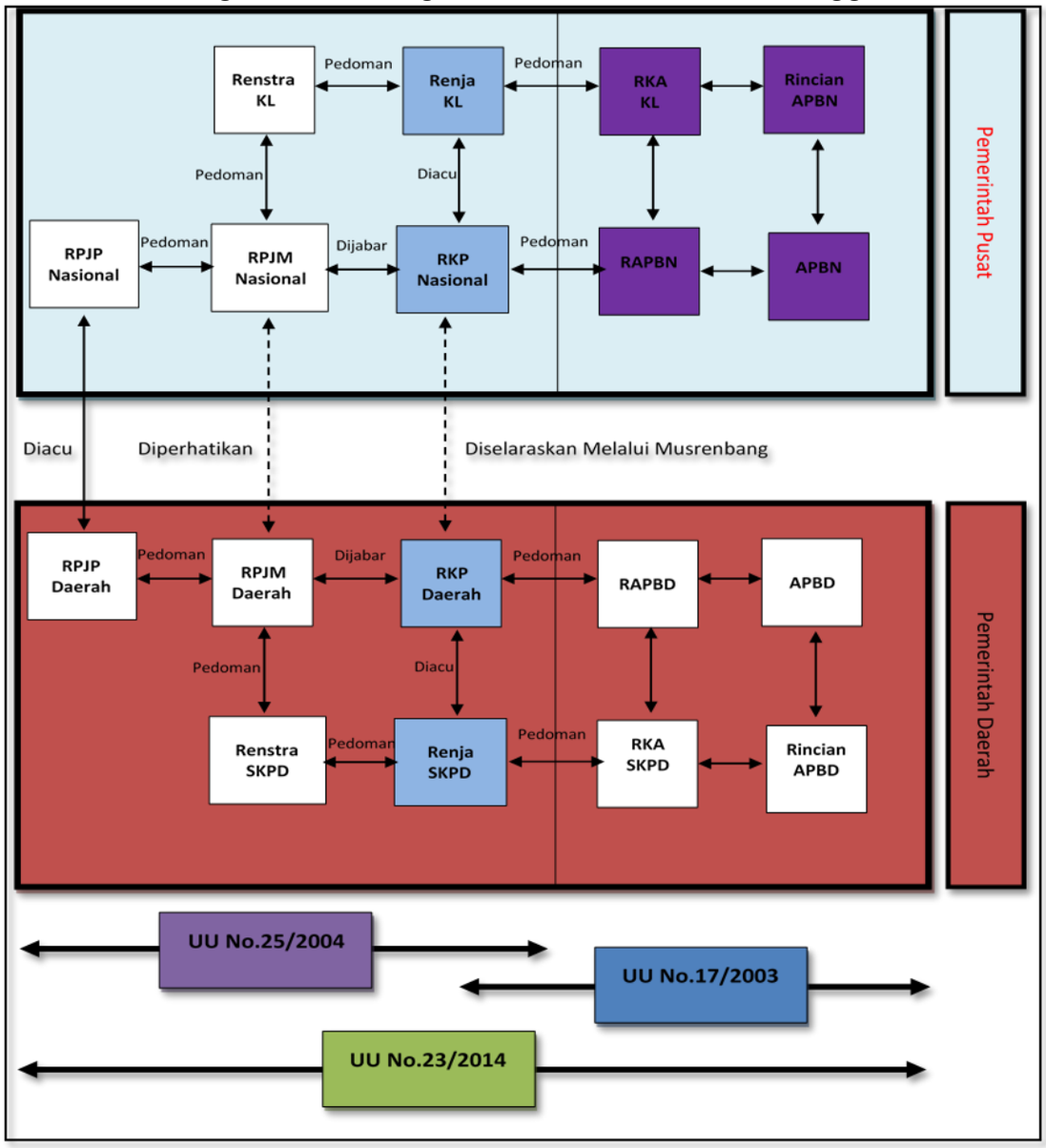

Dengan melihat gambar di atas dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan

Pemerintah Pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan:

a. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2025 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025 tahap terakhir (keempat). RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2025 merupakan perencanaan lanjutan dari tahap ketiga dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahap keempat ini, berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

b. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kabupaten Kapuas Hulu

Renstra OPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dituangkan di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang secara kelembagaan harus berjalan secara efektif dan efisien.

Bupati Kapuas Hulu bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Secara hierarki, staf/eselon 4 (kepala seksi/kepala subbagian) akan berfokus pada pencapaian output, eselon 3 (kepala bidang/kepala bagian) pada outcome, eselon 2 (kepala dinas/kepala badan) pada *impact* dan kemudian memberikan benefit pada tingkat kabupaten dalam pencapaian visi dan misi bupati.

c. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus

terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

d. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Kapuas Hulu, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

e. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

f. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Barat sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat

outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk sinkronisasi kebijakan.

Gambar I.3.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Pendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

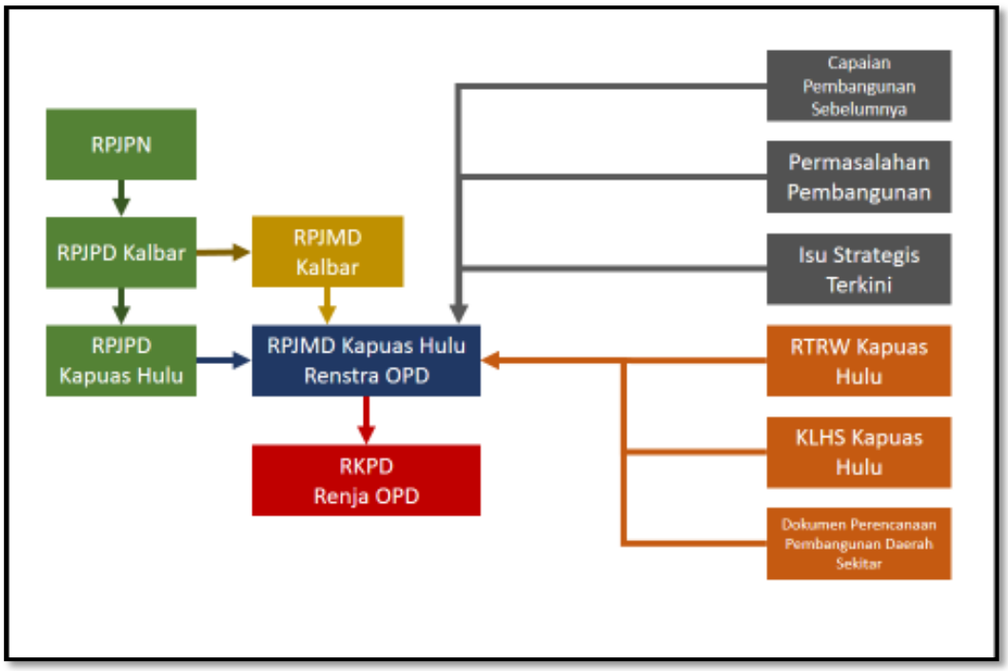

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program, dan pagu indikatif dalam kurun waktu lima tahun. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;

b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
c. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
e. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2026 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
f. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. Ditetapkannya dokumen sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
h. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun.
i. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembagunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.
j. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN,** menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,** menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kapuas Hulu secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH,** menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH,** Dalam bab ini disajikan Permasalahan Pembangunan dan Isu strategis dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,** menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH,** pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah menggambarkan keselarasan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH,** memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,** berisi penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX **PENUTUP**, Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki cukup banyak daerah terpencil dan termasuk wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara tetangga yakni Malaysia, khususnya Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur). Dalam melaksanakan pembangunan daerah selama ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Saat ini, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu telah memasuki memasuki tahap akhir pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025. Dalam iringan pelaksanaan pembangunan selama ini, berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi oleh segenap elemen pembangunan daerah baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perencanaan pembangunan yang nantinya akan dirumuskan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026, memiliki posisi penting dalam perwujudan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pijakan analisis kebijakan pembangunan untuk kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan. Pijakan analisis kebijakan dalam pembangunan adalah potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah. Dalam rumusan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu ini, gambaran umum kondisi daerah lebih ditekankan kepada berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan dibangun sehingga memiliki fokus dalam merancang program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu untuk kemudian akan dilaksanakan secara terstruktur agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Berikut gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Penjabaran kondisi geografis akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Berikut penjabaran kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Secara administratif posisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Utara dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Bagian Malaysia
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sintang dan Provinsi kalimantan Tengah
- Sebelah Barat : Negara Bagian Malaysia dan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas ± 29,842,03 km², atau mencakup 20,33 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, yang secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 703 dusun.

Untuk lebih jelasnya tentang data Kecamatan, jumlah Kelurahan, jumlah Desa dan luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel II.1.
Jumlah Kelurahan dan Desa beserta Luas Wilayahnya (Km²)
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Desa	Luas (KM²)
1	Putussibau Utara	2	17	5.204,80
2	Putussibau Selatan	2	14	5.352,33
3	B i k a	-	8	392,16
4	Kalis	-	17	1.853,84
5	Mentebah	-	8	771,26
6	Boyan Tanjung	-	16	822,00
7	Pengkadan	-	11	531,20
8	Hulu Gurung	-	15	431,90
9	Seberuang	-	15	570,80
10	Semitau	-	12	562,70
11	Suhaid	-	11	462,91
12	Selimbau	-	17	1.143,88
13	Jongkong	-	14	442,50
14	Bunut Hilir	-	11	882,10
15	Bunut Hulu	-	15	1.118,14
16	Embaloh Hilir	-	9	784,30
17	Embaloh Hulu	-	10	3.452,60
18	Batang Lupar	-	10	1.332,90
19	Badau	-	9	700,00
20	Empanang	-	6	543,15
21	Puring Kencana	-	6	257,66
22	Silat Hilir	-	13	1.167,10
23	Silat Hulu	-	14	1.061,80
	Jumlah	**4**	**278**	**29.842,03**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Bagian Pemerintahan(Permendagri 137 Tahun 2017)

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 390.000 Ha (± 3.900 km²) merupakan daerah perairan atau tergenang (13,7 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas ± 2.594.200 ha (± 25.942 km²) merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 1.677.601 ha atau ± 56,21 % merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Taman Nasional Betung Kerihun : 816.693,40 ha
2. Taman Nasional Danau Sentarum : 127.393,40 ha
3. Hutan Lindung : 628.973 ha

Gambar II.1.
Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu

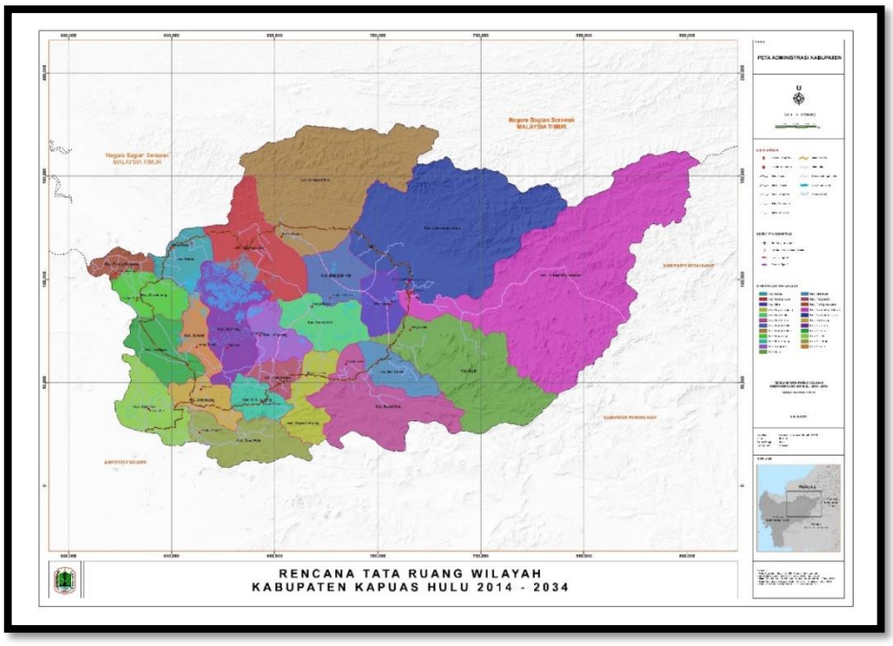

Sumber: Perda No 1 tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Kapuas Hulu

Demografi atau kependudukan mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan)penduduk. Kondisi demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Perkembangan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu dari karakteristik demografi yang terdiri dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Jumlah penduduk kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 255,298 jiwa pada tahun 2020 Semester II. Angka tersebut mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3,45 persen dari tahun sebelumnya yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 246.772 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2020 rata-rata persentase pertumbuhannya sebesar 2,34 persen seperti dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar II.2.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016-2020

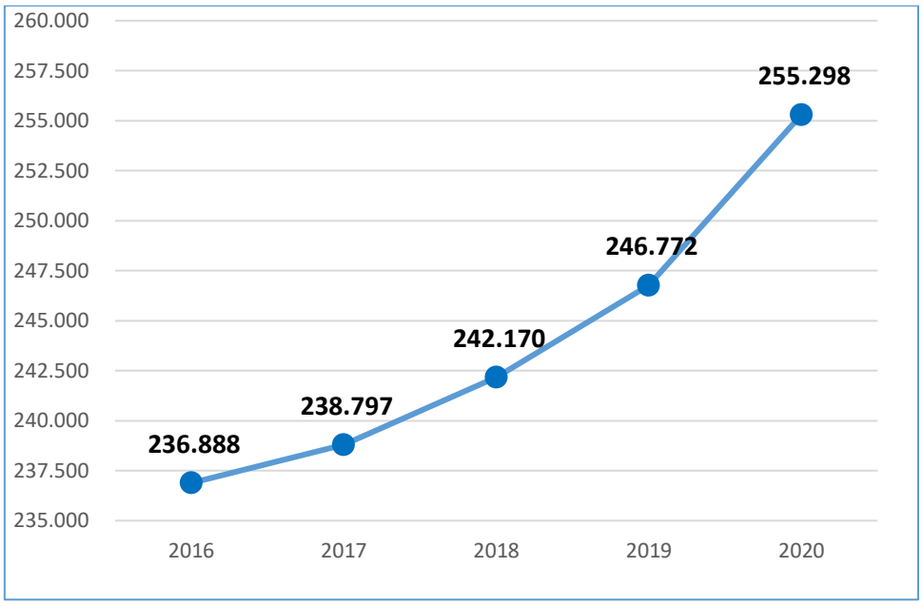

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kapuas Hulu 2020 Semester II

Tabel II.2.

Jumlah Penduduk,Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan				
1	Putussibau Utara	13,812	13,358	27,170	5,204.8	5.22	103.40%
2	Bika	2,389	2,254	4,643	395.2	11.75	105.99%
3	Embaloh Hilir	3,079	2,917	5,996	786.3	7.63	105.55%
4	Embaloh Hulu	2,667	2,572	5,239	3,457.6	1.52	103.69%
5	Bunut Hilir	4,385	4,300	8,685	844.1	10.29	101.98%
6	Bunut Hulu	7,498	7,129	14,627	1,118.1	13.08	105.18%
7	Jongkong	5,641	5,521	11,162	422.5	26.42	102.17%
8	Hulu Gurung	7,174	6,912	14,086	432.9	32.54	103.79%
9	Selimbau	6,923	6,750	13,673	1,153.9	11.85	102.56%
10	Semitau	4,850	4,516	9,366	562.7	16.64	107.40%
11	Seberuang	5,952	5,527	11,479	573.8	20.01	107.69%
12	Batang Lupar	2,784	2,714	5,498	1,332.9	4.12	102.58%
13	Empanang	1,859	1,734	3,593	547.1	6.57	107.21%
14	Badau	3,535	3,388	6,923	700.0	9.89	104.34%
15	Silat Hilir	10,452	9,646	20,098	1,177.1	17.07	108.36%
16	Silat Hulu	5,804	5,327	11,131	1,061.8	10.48	108.95%
17	Putussibau Selatan	11,900	11,481	23,381	5,352.3	4.37	103.65%
18	Kalis	7,069	6,602	13,671	1,857.8	7.36	107.07%
19	Boyan Tanjung	6,656	6,187	12,843	824.0	15.59	107.58%

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan				
20	Mentebah	5,587	5,228	10,815	781.3	13.84	106.87%
21	Pengkadan	4,833	4,615	9,448	531.2	17.79	104.72%
22	Suhaid	4,812	4,631	9,443	465.9	20.27	103.91%
23	Puring Kencana	1,221	1,107	2,328	258.7	9.00	110.30%
Jumlah		**130,882**	**124,416**	**255,298**	**29,842.0**	**8.55**	**105.20%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II

Dengan luas wilayah 29,842.0km, jumlah penduduk geografis di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020 mencapai 255,298 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 130,882 jiwa dan perempuan sebanyak 124,416 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni Kecamatan Putusibau Utara yang mencapai 27,170 jiwa dengan persentase sebesar 10.64 persen dari total penduduk Kapuas Hulu. Angka ini disusul domisili penduduk terbanyak di Kecamatan Putusibau Selatan sebanyak 23,381 jiwa dengan persentase sebesar 9.16 persen. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Puring Kecana dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 2,328 jiwa.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Hulu Gurung dengan kepadatan penduduk sebesar 32.54 Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yakni Kecamatan Embaloh Hulu dengan kepadatan penduduk sebesar1.52 Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka sebagin besar penduduk Kapuas Hulu berjenis kelamin laki-laki sebesar 130,882 jiwadan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 124,416 jiwa.

Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Jika dilihat persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, sebagian besar penduduk Kapuas Hulu berada pada usia muda dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk umur anak-anak juga cukup tinggi yang

mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya program yang terarah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan utamanya jangka panjang.

Gambar II.3.
Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

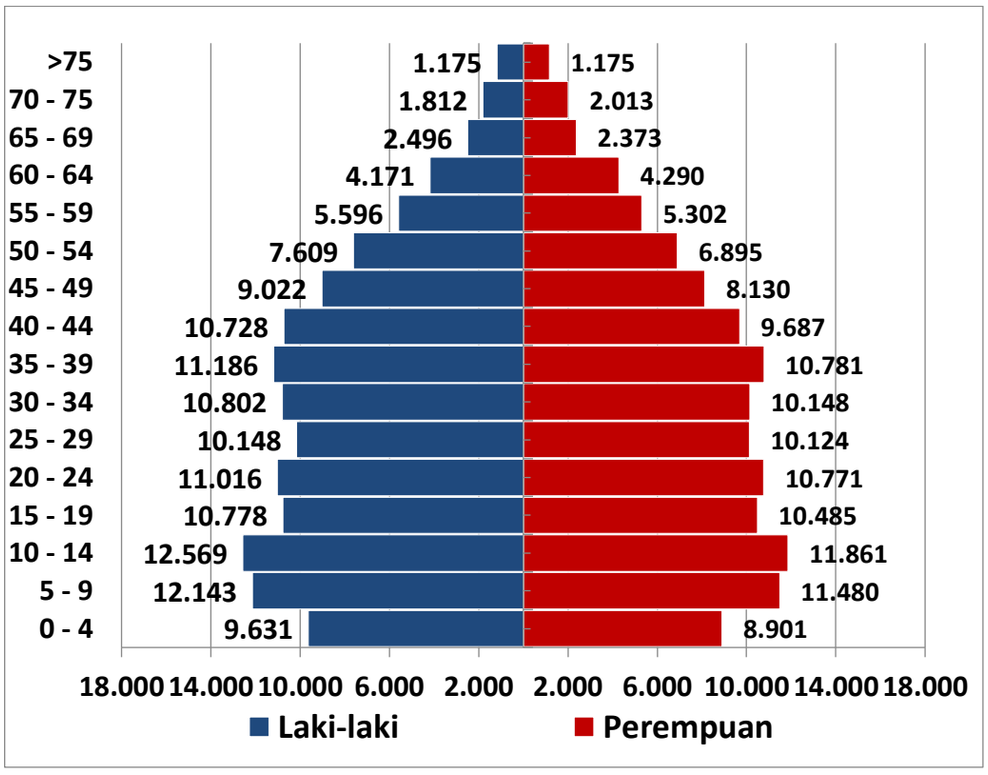

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II

2.1.1.2. Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas yang memiliki beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya seperti Sungai Embaloh, yang berhulu di bagian utara, Sungai Mandai, selain itu terdapat 8 anak sungai lainnya yang penting di mana peranannya sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari kabupaten ke kota dan kecamatan. Dataran-dataran di sekitar perbatasan DAS

ini dianggap sebagai suatu zona sumber batubara dan minyak bumi. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pengunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu keadaan topografinya bervariasi dari sistem dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Bentuk permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang

bagian Utara. mempunyai kemiringan 2% - 15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15% - 40%.

2.1.1.3. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang ± 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Selain sungai tersebut, terdapat delapan anak sungai yang sangat penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan transportasi barang dan penumpang dari Ibu Kota Kabupaten ke kota-kota kecamatan di daerah pedalaman dan sebaliknya.

Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban (basin) dan Danau Oxbow di daerah- daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di beberapa wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh HiLir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau. Keberadaan danau tersebut sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.

2.1.1.4. Klimatologi

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Jumlah curah hujan adalah ukuran jumlah curahan air yang turun/keluar dari awan yang mencapai bumi dinyatakan dengan mm (milimeter), jumlah curah hujan 1 mm adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar tidak meresap, tidak menguap, tidak

mengalir artinya pada setiap 1 m2 lapisan tanah dengan jumlah curah hujan 1 mm mempunyai volume 1 liter.

Jumlah curah hujan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi pada Tahun 2019 dengan rata-rata curah hujan sebanyak 300 mm dengan curah hujan terkecil terjadi pada bulan September (89 mm) dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (628 mm). Hal tersebut menyebabkan setiap bulannya memiliki hari hujan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari per bulannya.

Di Kapuas Hulu hanya dikenal dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata yang cukup tinggi dari hasil catatan Stasiun Meteorologi Pangsuma pada Tahun 2019. Secara rata-rata, suhu tertinggi berada pada bulan Mei dengan besaran suhu 28,20^{0}C dan suhu terendah berada pada bulan Desember dengan besaran suhu 26,60^{0}C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

2.1.1.5. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasanbudidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisatadan permukiman. Sedangkan Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan fisik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung denganpesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Pembangunan fisik di Kapuas Hulu terus mengalamiperkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung pemerintah ataupun swasta, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur lainnya.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas HuluTahun 2014 –

2034, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
b. Kawasan Ekowisata Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi; dan
c. Kawasan Koridor Taman Nasional Danau Sentarum dengan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan.

Selain Kawasan strategis di atas, terdapat kawasan pola rencana tata ruang wilayah Di kabupaten kapuas hulu meliputi :

a. Kawasan lindung
    - kawasan hutan lindung;
    - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    - kawasan perlindungan setempat;
    - kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
    - kawasan rawan bencana alam; dan
    - kawasan lindung lainnya.
b. Kawasan budidaya
    - kawasan peruntukan hutan produksi;
    - kawasan peruntukan pertanian;
    - kawasan peruntukan perikanan;
    - kawasan peruntukan pertambangan;
    - kawasan peruntukan industri;
    - kawasan peruntukan pariwisata;
    - kawasan peruntukan permukiman; dan
    - kawasan peruntukan lainnya.

Secara geografis dan administratif Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi Pengembangan Wilayah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 potensi pengembagan wilayah meliputi rencana kawasan lindung dankawasan budidaya.

2.1.3. Wilayah rawan bencana

Kejadian bencana alam di Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahun lebih banyak didominasi oleh bencana banjir dan kebakaran hutan. Banjir sering terjadi di wilayah pesisir sungai terutama pada puncak musim penghujan. Sedangkan bencana alam yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan perekonomian adalah kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun. Titik api yang terdapat di kabupaten Kapuas Hulu bukanlah karena kebakaran hutan dan lahan yang disengaja, tetapi pada umumnya akibat pembukaan lahan pertanian oleh penduduk dimusim tanam padi.

Tabel II.3.
Rekapitulasi Data Kejadian Bencana
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1	Banjir	15
2	Banjir Bandang	2
3	Kebakaran Permukiman	9
4	Kebakaran Hutan Dan Lahan	28
5	Puting Beliung	1
6	Tanah Longsor	3
7	Pohon Tumbang/Cuaca Ekstrem	1
Total Jumlah		59

2.1.4. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi yang didukung oleh letak geografis seperti perbukitan, pegunungan dan wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas yang terhampar luas. Dari sekian potensi yang sudah ada maupun yang bisa dikembangkan lebih prospektif antara lain sebagai berikut:

2.1.4.1. Perkebunan

Di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikembangkannya berbagai komoditi perkebunan, antara lain: Kelapa sawit, karet, kopi, lada. Tanaman produktif untuk komoditi perkebunan secara umum menunjukkan angka yang bervariasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4.
Perbandingan Luas Areal dan Produksi Perkebunan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2020

No	Komoditi Tanaman Perkebunan	Luas Areal	Produksi /Tahun	Satuan
1	Kelapa Sawit	87.400,03 Ha	1.259.264,12	Ton
2	Karet	47.342 Ha	12.686	Ton
3	Kopi	23,5 Ha	1,60	Ton
4	Lada	48 Ha	12,75	Ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Komoditas utama sektor perkebunan adalah kelapa sawit. Kelapa Sawit dengan Produksi sebesar 1.259.264,12 ton dengan luas areal 87.448,90 ha hasil ini meningkat dari Tahun 2019 yang hanya mencapai 954.224,8 ton dengan luas areal tanaman menghasilkan 37.367 ha. Meningkatnya produksi sawit karena bertambahnya areal luas penanaman perkebunan, banyaknya tenaga kerja, pengaruh faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

2.1.4.2. Pertanian

Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah cukup luas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan. Adapun jumlah produksi komoditi tanaman pangan sebagai berikut:

Tabel II.5.
Perbandingan Luas Areal Panen dan Produksi Pertanian
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2020

No	Jenis Komoditi Tanaman Pangan	Luas Areal Panen	Produksi	Satuan
1	Padi	24.568 Ha	27.732,31	Ton
2	Jagung	523 Ha	1.023,60	Ton
3	Ubi Kayu	476 Ha	17.937,06	Ton
	Jumlah	25.567Ha	46.692,97	Ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan rata-rata hasil produksi beberapa komoditas tanaman pangan yaitu pada komoditas padi memiliki nilai produksi yang paling banyak sebesar 27.732,31 ton. Selain itu juga diikuti oleh tanaman ubi kayu dengan jumlah produksi sebesar 17.937,06 ton dan memiliki luas serta diikuti oleh komoditi unggulan lainnya. Data ini memberikan gambaran bahwa tanaman padi sawah bukan sawah masih mendominasi sektor pertanian. Untuk Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kapuas Hulu diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

2.1.4.3. Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki berbagai potensi pariwisata baik alam (nature tourism) maupun budaya (culture tourism) serta potensi wisata petualangan (adventure tourism). Adapun potensi ketiga wisata tersebut di Kabupaten Kapuas Hulu secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Wisata Budaya

Obyek wisata budaya ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau kehidupan manusia dan wujud dari obyek budaya. Wisata budaya di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Upacara Adat Upacara adat ini ada dari dua suku yaitu suku Melayu (pernikahan, tolak bala, khitanan, memandikan bayi, memandikan pengantin, akikah) dan dari suku Dayak (pamelo beo dari suku Dayak Embaloh, Dange dari suku Dayak Kayan Mendalam, Gawai Memandung

dan Mamasi dari suku Dayak Taman, Gawak Batu, Bekali ke Tanah dan Makai Taun dari Suku Kantuk, serta Gawak Kenyalang, Gawak Nyape Tanah, Nike Benih dan Adat Nin Karumah Panjae dari Suku Dayak Iban).

b. Rumah Adat Merupakan perkampungan tradisional dengan ciri Kapuas Hulu rumah tinggal yang masih tradisional berupa Rumah Adat Betang Panjang. Rumah Adat Betang Panjang yang masih unik dari Suku Dayak antara lain Rumah Betang Panjang Malapi Patamuan, Rumah Betang Panjang Semangkok, Rumah Betang Panjang Sungulok Apalin, Rumah Betang Panjang Bakung, Rumah Betang Banua Tengah, Rumah Betang Sungai Utik, Rumah Betang Nanga Nyabau dan Rumah Betang Lunsa Hilir. Selain rumah adat dari suku Dayak juga ada rumah adat melayu di Kecamatan Kedamin. Di Kabupaten Kapuas Hulu juga terdapat rumah rumah peninggalan Kerajaan Melayu Kapuas Hulu antara lain Kerajaan Selimbau, Kerajaan Bunut, Kerajaan Suhaid, Kerajaan Jongkong dan Kerajaan Piasak.
c. Kuburan Tua Merupakan kuburan tua yang masih dirawat antara lain kuburan tua (Kulambu) Semangkok dan kuburan raja raja selimbau, Bunut, Suhaid, Silat, Jongkong dan Piasak.
d. Situs Neolithikum Merupakan penemuan peninggalan zaman neolithikum di Nangan Balang.
e. Kerajinan Khas Merupakan hasil kerajinan tangan dengan corak khas Kapuas Hulu yaitu jenis kerajinan berupa tenunan, gelang resam, anyam-anyaman, manik-manik, ukir ukiran, pandai besi dan seni ukir serta patung.
f. Tarian Tradisional, Sastra Lisan dan Alat Musik Tradisional Tarian tradisional dari Kabupaten Kapuas Hulu antara lain tari jepin manis, tari belangkah, tari lesung, ngajat perang, ngajat besirang, ngajat terima tamu, daria soksoak, daria manyialo, dan daria balien. Sedangkan untuk sastra lisan khas Kabupaten Kapuas Hulu yang masih dijaga hingga saat ini yaitu Betimang, Bejandeh, Baranangis, Bersyair, Malimongan dan Manyombang. Selain itu ada alat musik tradisional antara lain Sape', Keledi', Balikan, Runding, Satum, Gambus, Tar, Rebana, Kangkuang, Gong, Tawak, Bebenda dan Gendang.

g. Tradisi Sistem pengobatan suku Dayak (Besampai, Belian, Bemamang), Sistem bercocok tanam (beambik ari), Sistem menangkap ikan (ngerinan, mesat, nabin, menjermal, masang bubu, nyuluh, mukat, nyala).
h. Lokasi religi Bukit Tulang sebagai bukit sakral masyarakat Dayak di hulu sungai Mandai, Masjid Tua Baiturrahman Naga Bunut, Masjid Jami' Selimbau, Gereja Santo Fidelis Tanjung. Batu Kapal di Boyan Tanjung, Beta Puja di Semitau, Loang Injuluan di Hulu Sibau, Bukit Bai Sampe di Urangunsa, Batu Dato'.

2. Wisata Alam

Wisata alam merupakan salah satu potensi unggulan di Kapuas Hulu. Kegiatan wisata alam dapat dilakukan di kawasan hutan adat dan hutan lindung serta kawasan TNBK-TNDS dan beberapa lokasi lain seperti di Kecamatan Mentebah, Bunut Hulu, Kalis, Jongkong, Hulu Gurung dan Seberaung. Adapun beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan antara lain:

a. Berkemah dikawasan hutan adat dan hutan lindung serta kawasan TNBK-TNDS.
b. Memancing di sungai Kapuas, sungai Embaloh, sungai Sibau, sungai Mendalam serta danau
c. Susur sungai/ Susur Danau (canoeing/boating/crusing) disepanjang sungai Kapuas, sungai Sibau, Mendalam, Embaloh, Tawang dan Kawasan Danau Sentarum.
d. Fotografi, pengamatan tanaman obat dan anggrek
e. Pengamatan satwa liar di kawasan hutan adat dan hutang lindung, danau lindung serta kawasan TNBK-TNDS.

3. Wisata Petualangan

Kabupaten Kapuas Hulu dengan letak geografis di perhuluan Sungai Kapuas dengan hutan primer yang masih asli, banyak memiliki potensi wisata petualangan seperti:

a. Arung jeram dikawasan Taman Nasional Betung Kerihun seperti di Wilayah perhuluan sungai Kapuas, sungai Bungan, dan sungai Embaloh. Diperhuluan Sungai Keriau, Sungai Mandai, dan Sungai Suruk.
b. Penjelajahan gua-gua diperhuluan sungai Bungan, perhuluan sungai Keriau dan wilayah Kecamatan Hulu Gurung.

c. Body refting di sungai kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, Sungai Suai, Sungai Kalis, Sungai Mandai, Sungai Suruk, dan Sungai Labian-Leboyon.
d. Panjat tebing di Bukit Semujan Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, Bukit Tilung, Bukit Belang, Gunung-gunung di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun.
e. Pendakian gunung dikawasan hutan lindung dan hutan adat, TNBK, TNDS, jajaran Bukit Madi dan Bukit Sunan.
f. Trekking dikawasan hutan adat dan hutan lindung serta kawasan TNBK-TNDS.
g. Rute trekking Kapuas-Mahakam Contoh trekking yang tersedia saat ini adalah cross Borneo, Kalbat-Kaltim.
h. Cross Country Indonesia-Malaysia Cros Borneo Contoh trekking yang tersedia saat ini adalah cross Borneo, Kalbar-Kaltim.

2.1.4.4. Perikanan

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi perikanan air tawar yang cukup besar, khususnya perairan umum yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Potensi tersebut didukung pula oleh tingkat keanekaragaman hayati ikan (biodiversity) yang tinggi dan sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri dan memasok ikan dipasar dunia, sehingga merupakan sumber PAD Kapuas Hulu dan devisa bagi negara dari sektor perikanan, hal ini didukung letak georafis Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keunggulan komparatif karena itu memudahkan transportasi ekspor ke pasar internasional. Luas Kabupaten Kapuas Hulu 31.162.75 Ha, sedangkan luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari danau-danau dan sungai-sungai sekitar 450.257 Ha (sudah termasuk luas Taman Nasional Danau Sentarum kurang lebih 130.940 Ha) atau 3,27% dari luas perairan umum Indonesia (13,3 Juta Ha).

Tercatat lebih 297 jenis ikan, diantaranya jenis-jenis ikan ekonomis penting seperti Arwana, Gabus, Jelawat, Toman, Belida, Betutu, Tambakan, Lais, Patin, baung, tapah, Cat fish, Botia, Ringau dan lain-lain. Pengembangan ikan spesifik lokal ini selain untuk usaha budidaya/pembesaran juga sebagai upaya pelestarian plasma nuftah ikan asli perairan Kapuas Hulu. Perkiraan optimistik ini cukup logis ditunjang dari potensi, trend, peluang dan keunggulan yang dimiliki.

Jenis usaha yang bisa dikembangkan adalah perikanan tangkap dan budidaya (salah satu dari peluang usaha yang bisa dimanfaatkan yaitu usaha pengembangan budidaya untuk jenis-jenis ikan spesifik lokal yang bernilai ekonomis tinggi).

Kabupaten Kapuas Hulu juga mempunyai suatu kawasan/danau yang dilindungi, dijaga oleh masyarakat, mempunyai aturan adat dan dikukuhkan dengan Keputusan Bupati ada sebanyak 27 Danau. Selain dari 27 danau tersebut masih ada danau-danau lain yang diatur secara adat/kearifan lokal. Pengeksploitasian habitat yang berada di dalamnya dikenai sangsi sesuai hukum adat setempat (kearifan lokal).

Tabel II.6.
Data Danau Lindung di Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA DANAU LINDUNG	NO DAN TANGGAL SK	KECAMATAN
1.	Empangau	No. 6 Tahun 2001 31 Januari 2001	Bunut Hilir
2.	Aur	No. 141 Tahun 2004 16 Agustus 2004	Bunut Hilir
3.	Jongkong Kiri Hilir	No. 79 Tahun 2004 26 Mei 2004	Jongkong
4.	Pulau Bagansar/Bagot	No. 79 Tahun 2004 26 Mei 2004	Bunut Hilir
5.	Pilin	No. 79 Tahun 2004 26 Mei 2004	Bunut Hilir
6.	Sentajau	No. 79 Tahun 2004 26 Mei 2004	Bunut Hilir
7.	Pekayu Siawan	No. 79 Tahun 2004 26 Mei 2004	Bunut Hilir
8.	Terduata	No. 138 Tahun 2004 16 Agustus 2004	Boyan Tanjung
9.	Pulau Danau	No. 138 Tahun 2004 16 Agustus 2004	Bunut Hilir
10.	Pengulan	No. 69 Tahun 2004 11 Mei 2004	Selimbau
11.	Sadong	No. 77 Tahun 2004 26 Mei 2004	Putussibau Utara
12.	Perantu	No.142 Tahun 2004 16 Agustus 2004	Embaloh Hilir
13.	Marsedan	No. 55 Tahun 2004 28 April 2004	Semitau
14.	Vega	No. 70 Tahun 2004 11 Mei 2004	Selimbau
15.	Penemur Bersatu	No. 176 Tahun 2007 28 Juni 2007	Boyan Tanjung
16.	Pauh	No.288 Tahun 2007 10 Oktober 2007	Jongkong
17.	Pengelang	No. 314 Tahun 2007 22 November 2007	Bunut Hilir
18.	Selogan	No. 193 Tahun 2007 29 Juni 2007	Jongkong
19.	Tanjung Petak	No. 232 Tahun 2007 27 Juli 2007	Jongkong
20.	Sabu	No. 287 Tahun 2007 10 Oktober 2007	Bunut Hilir
21.	Basau Darat Nelayan	No.210 Tahun 2007 16 Juli 2007	Jongkong
22.	Basau Darat	No.60 Tahun 2008 12 Maret 2008	Jongkong
23.	Keliling	No. 356 Tahun 2014 01 Oktober 2014	Bunut Hilir
24.	Sunjung	No. 544 Tahun 2017 17 Oktober 2017	Bunut Hilir
25.	Sinau	No.61/DLH/2020 24 Januari 2020	Putussibau Selatan
26.	Entakau	No. 564 Tahun 2020 24 November 2020	Jongkong
27.	Tanah Adan	No. 563 Tahun 2020 24 November 2020	Jongkong

Selain potensi dari hasil tangkap potensi sumberdaya lahan pengembangan kawasan budidaya juga dapat diperhitungkan berdasarkan ketersediaan lahan

yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha budidaya. Potensi lahan budidaya air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu yang tersedia untuk pengembangan budidaya ikan cukup besar dan terdapat hampir diseluruh kecamatan yang cocok untuk kegiatan budidaya seperti Kolam, Keramba, Keramba Jaring Apung (KJA), Pagong, Mina Padi dan Bioflok.

Perikanan tidak hanya bergerak ditangkap dan budidaya, olahan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu ini juga sangat beragam. Ada beberapa olahan hasil perikanan yaitu ikan asin, ikan asap, kerupuk kering, kerupuk basah dan ada juga olahan diversifikasi antara lain nugget, abon, spring roll dan amplang. Diantara produk olahan yang paling digemari adalah Kerupuk basah karena memiliki rasa enak dan khas ikan kerupuk basah merupakan ikon kuliner makanan khas Kapuas Hulu yang merupakan menu kombinasi yang disajikan pada acara-acara besar juga sebagai oleh-oleh bagi wisatawan oleh sebab itu kerupuk basah sudah sangat dikenal di Kalimantan Barat.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kapuas Hulu. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari

primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas kondisi makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income per kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan. Relevansi data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja proses pembangunan di wilayah tersebut.

Perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pergerakan positif di setiap tahunnya dimana pada Tahun 2020 angka PDRB Kapuas Hulu mencapai 10,288 trilyun rupiah. Angka ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2015 angka PDRB hanya sebesar 7,842 trilyun rupiah. Akan tetapi Peningkatan ini seiring tidak berbanding lurus dengan laju

pertumbuhan ekonomi dimana pada Tahun 2020 mencapai -2,43 persen turun dari tahun sebelumnya sebesar 4,03 persen.

Gambar II.4.
Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020(Miliar Rupiah)

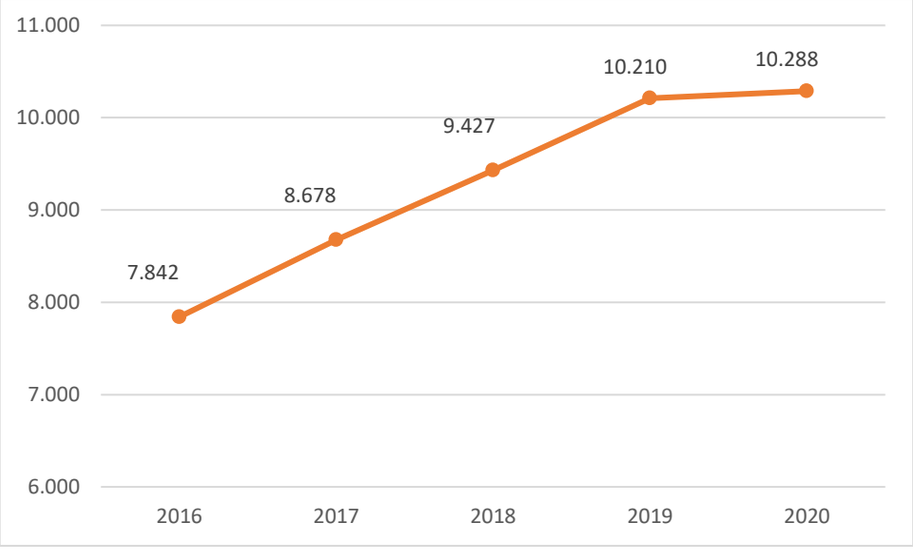

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

Jika melihat lebih jauh ke dalam kategori lapangan usaha, maka terlihat pertumbuhan ekonomi sektoral mengalami penurunan pada Tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB Kapuas Hulu mengalami kontraksi menjadi -2,43 persen sedangkan pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu sebesar 3,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi di Kapuas Hulu pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan akibat adanya penurunan produksi akibat adanya pandemi COVID-19 yang dimulai pada Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 7,02 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 6,34 persen. Jika melihat pertumbuhan ekonomi sektoral yang rendah, maka kategori Jasa Lainnya menjadi kategori yang terendah (17,93%) dalam pertumbuhan ekonomi sektoral disusul kategori Jasa Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar (15,56)persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi

pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi berkaitan dengan masuknya era digitalisasi ke Indonesia terutama di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel II.7.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kapuas Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016—2020

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,26	4,46	4,71	4,98	1,09
B	Pertambangan dan Penggalian	6,15	5,56	1,96	1,64	(1,29)
C	Industri Pengolahan	4,19	5,36	4,73	6,12	(0,65)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,84	2,14	1,53	3,78	(1,92)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	4,72	0,11	4,83	2,50
F	Konstruksi	7,66	6,75	4,59	0,08	(4,83)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	3,35	4,47	4,02	(10,01)
H	Transportasi dan Pergudangan	5,52	4,59	6,11	6,10	(10,23)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,48	5,13	4,78	5,50	(15,56)
J	Informasi dan Komunikasi	8,41	17,75	10,79	8,36	7,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,12	4,77	4,98	2,21	(5,25)
L	Real Estate	2,35	3,73	2,82	2,12	(1,82)
M,N	Jasa Perusahaan	2,90	2,91	4,29	3,80	(4,56)
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,70	4,95	5,99	6,07	1,51
P	Jasa Pendidikan	1,64	2,19	2,36	2,07	(4,43)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,08	3,76	5,18	5,67	6,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,92	7,15	4,56	7,70	(17,93)
Produk Domestik Regional Bruto		5,28	5,39	4,66	3,85	(2,43)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Struktur perekonomian daerah dapat terlihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2020, struktur perekonomian terbesar masyarakat Kapuas Hulu adalah kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, danPerikanan. Pada Tahun 2016-2019 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami perlambatan peranan ekonomi dan meningkat kembali pada Tahun 2020 . Pada Tahun 2020 peran lapangan usaha ini sebesar 23 persen. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut

dibandingkan produk lain menjadi penyebab turunnya peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Selanjutnya, struktur ekonomi yang pada Tahun 2020 mendominasi perekonomian Kapuas Hulu adalah kategori Konstruksi. Peranan kategori Konstruksi konsisten mengalami peningkatan pada 2016 - 2018 dan mengalami perlambatan pada Tahun 2019 dan 2020. Peran kategori Konstruksi pada Tahun 2020 telah mencapai 22,42 persen. Data ini mengindikasikan bahwa kategori Konstruksi memang mempunyai peluang besar untuk menjadi leading sector ekonomi Kapuas Hulu.

Selain itu, peran yang besar juga diberikan oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan kategori Industri Pengolahan. Walaupun masing-masing kategori tersebut memiliki peranan di atas 10 persen akan tetapi peran kategori Industri pengolahan menunjukkan trend yang lebih baik dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara peranan kategori lapangan usaha lainnya masih di bawah 10 persen lapangan usaha lainnya masih di bawah 10 persen.

Tabel II.8.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kapuas Hulu Atas Dasar Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha 2016—2020

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.70	22,33	22,08	22,02	23,00
B	Pertambangan dan Penggalian	7.96	8,13	7,91	7,78	8,01
C	Industri Pengolahan	11.03	11,09	11,22	11,35	11,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
F	Konstruksi	22.06	22,49	22,75	22,44	22,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.71	11,27	11,19	11,26	10,35
H	Transportasi dan Pergudangan	1.47	1,44	1,47	1,53	1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.92	1,89	1,90	1,91	1,67
J	Informasi dan Komunikasi	3.05	3,42	3,57	3,69	3,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.72	1,68	1,64	1,58	1,46
L	Real Estate	2.50	2,43	2,41	2,42	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	0.52	0,50	0,50	0,46	0,46
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.87	7,08	7,27	7,44	7,75

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
P	Jasa Pendidikan	3.78	3,60	3,48	3,41	3,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.74	1,68	1,65	1,70	1,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,87	0,86	0,86	0,90	0,66
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Satatistik Kabupaten Kapuas Hulu

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Gambar II.5.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Juta Rupiah)

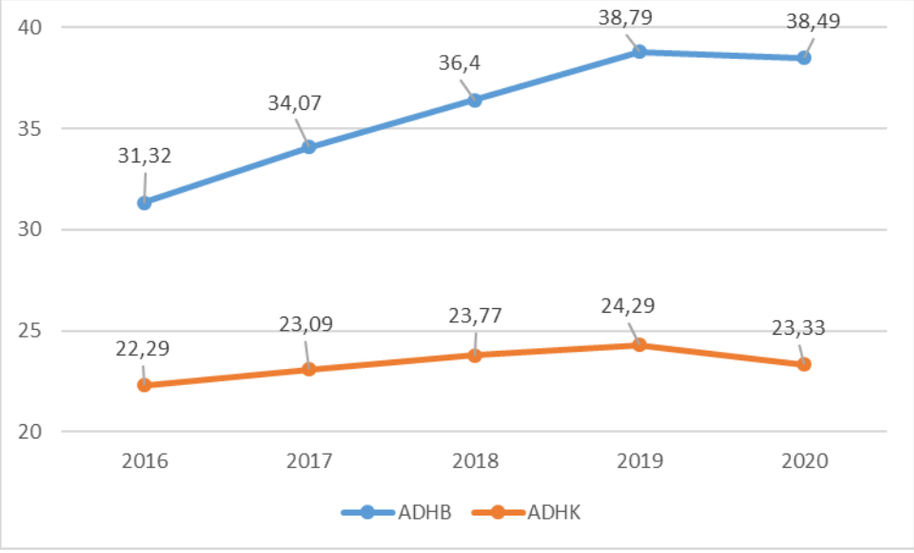

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Nilai PDRB per kapita Kapuas Hulu atas dasar harga konstan sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 senantiasa mengalami peningkatan namun menurun pada Tahun 2020. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 22,29 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami peningkatan

hingga Tahun 2019 mencapai 24,29 juta rupiah dan menurun pada Tahun 2020 menjadi 23,33 juta rupiah. Angka PDRB per kapita ini tidak disebabkan oleh faktor harga dan inflasi.

c. Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Inflasi yang tinggi berarti juga terjadinya perubahan harga yang tajam dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan indeks harga implisit PDRB dapat dilihat besarnya laju inflasi pada tingkat produsen secara umum.

Tingkat kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) di Kalimantan Barat diwakili oleh tiga kabupaten/kota, yaitu Singkawang, Sintang dan Pontianak. Pada Tahun 2020, secara umum inflasi yang terjadi di Kalimantan Barat relative stabil dibawah 10 persen, dimana inflasi di Kota Pontianak sebesar 2,11persen, Kabupaten Sintang sebesar 4,68 dan Kota Singkawang sebesar 2,72 persen.
Laju Inflasi tertinggi tertinggi terdapat pada kelompok penngeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, sebesar 6,07, disusul Kesehatan (4,89) dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,80. Sementara laju inflasi terendah terdapat pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar -0,99.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah

satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programes* (UNDP) sejak Tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Angka IPM Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan di setiap tahunnya meskipun masih berada di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Barat. IPM Kapuas Hulu meningkat hingga mencapai 65,65. Kenaikan ini merupakan andil positif dari kenaikan komponen-komponen penyusun seperti angka harapan hidup yang mencapai 72,44 tahun; harapan lama sekolah yang mencapai 12,04 tahun; rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun dan pengeluaran per kapita di sesuaikan yang mencapai 7.206 ribu/tahun/kapita.

Tabel II.9.
IPM dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	-	64,18	64,18	65,03	65,65	65,69
Indeks Kesehatan	-	**79,91**	**79,91**	**79,92**	**80,18**	**80,68**
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,94	71,95	72,12	72,44	72,52
Indeks Pendidikan	-	**56,19**	**56,26**	**56,32**	**57,58**	**58,34**
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,84	11,85	12,03	12,04	12,05
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,02	7,25	7,47	7,52
PPP	000 Rp/ Kapita/Thn	6.691	6.883	7.074	7.206	7.162

Sumber:Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar II.6.
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)

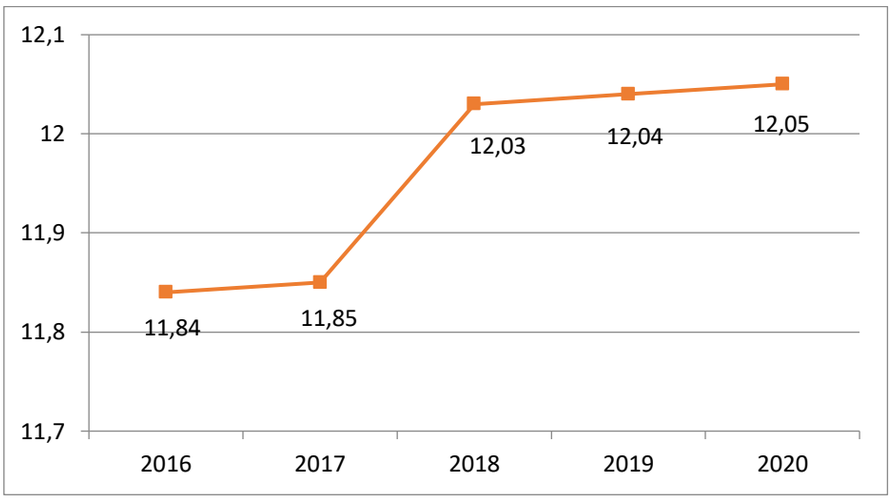

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Kapuas Hulu Tahun 2021

Harapan lama sekolah di Kapuas Hulu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada Tahun 2020 mencapai 12,04 Tahun dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,04 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan masuk pada jenjang pendidikan SMA kelas 3.

c. Angka Rata – rata Lama Sekolah

Sedangkan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kapuas Hulu terus mengalami peningkatan, dari 7,01 tahun pada Tahun 2016 menjadi 7,52 pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu bersekolah hanya setingkat SLTP.

Gambar II.7.
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Kapuas Hulu, 2015-2020 (Tahun)

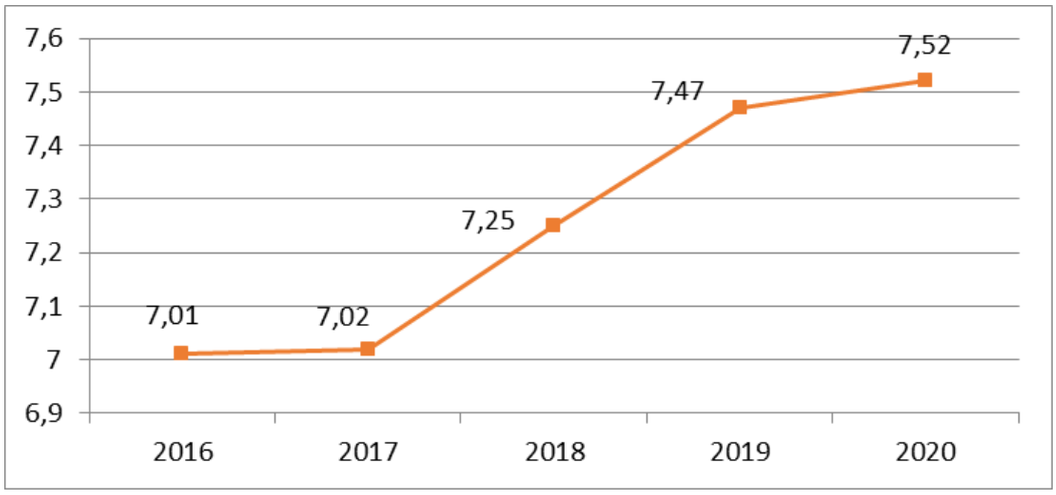

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Kapuas Hulu Tahun 2021

d. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Gambar II.8.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)

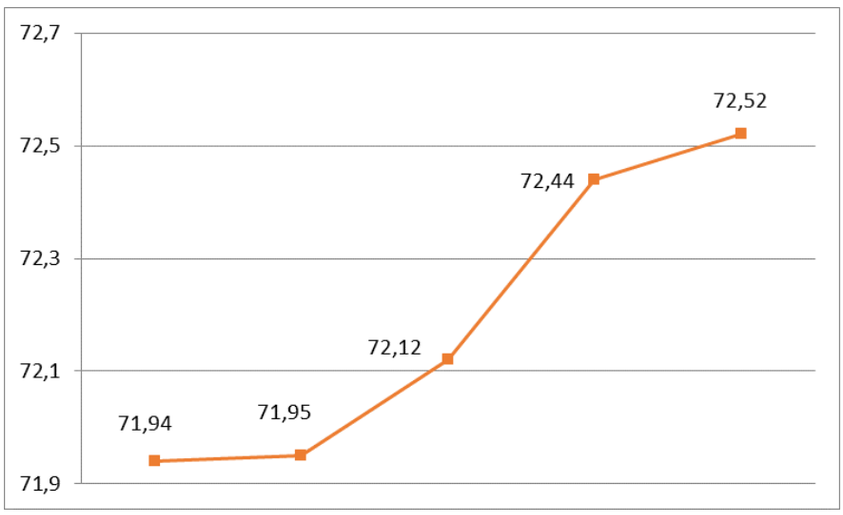

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

AHH Kapuas Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan hingga mencapai 72,52 tahun pada Tahun 2020 yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada Tahun 2020 akan memiliki usia harapan hidup hingga berumur 72-73 tahun.

Selain indikator komponen penyusun IPM tersebut, beberapa analisis indikator dapat dijadikan rujukan dalam melihat derajat kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Capaian indikator kesehatan tersebut antara lain, seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, dan angka kematian bayi, serta gizi masyarakat serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020 terdapat 5 kasus kematian ibu, atau dikonversikan menjadi 124/100.000 KH. Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung meningkat jika dibandingkan dengan AKI pada Tahun 2018 sebesar 71/100.000 KH dan Tahun 2019 sebesar 99/100.000 KH, tetapi telah jauh melampaui target jika dibandingkan dengan target Nasional 2020 yaitu 230/100.000 KH.

Gambar II.9.
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Tahun 2017 – 2020

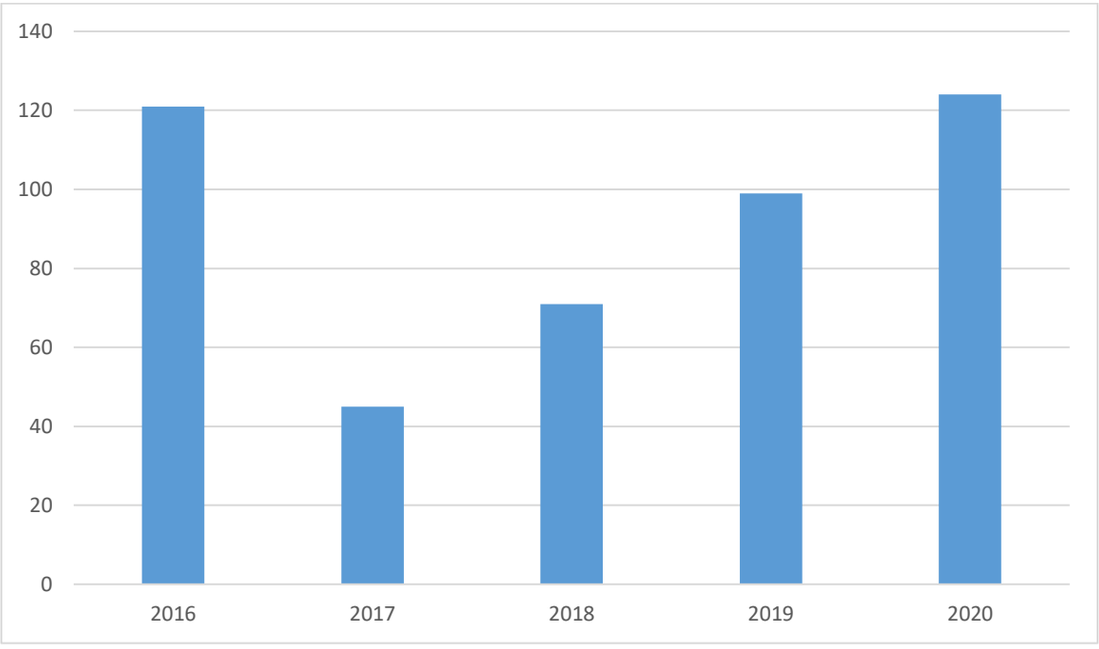

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020

e. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Gambar II.10.
Garis Kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 (Rupiah) Perkapita Perbulan

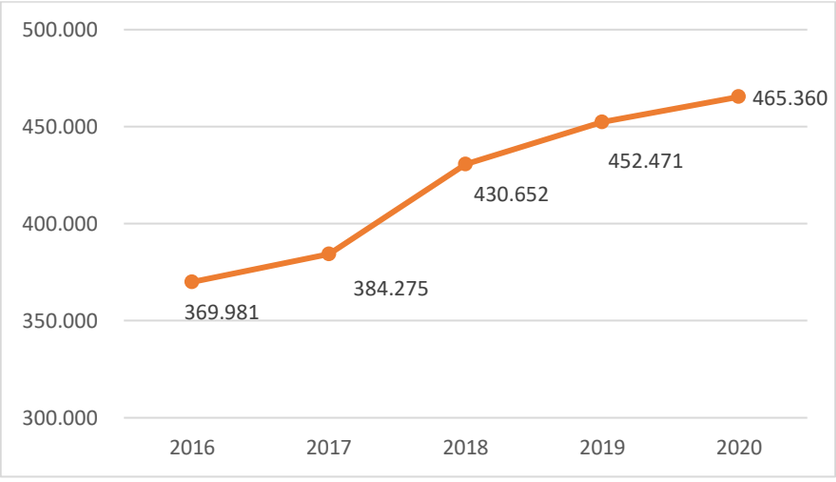

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2021

Berdasarkan gambar di atas menunjukan perkemangan garis kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu terlihat bahwa Tahun 2020 garis kemiskinan berada diangka 465.360 rupiah perkapita perbulan. Angka tersebutkan menunjukan bahwa seseorang diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan dikatagorikan miskin jika total pengeluaran untuk komsumsi makanan dan non makanan setiap bulanya kurang dari 465.360 rupiah perkapita perbulan. Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 mencapai 8,33 persen

menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2019 mencapai 9,62 persen.

Gambar II.11.
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020

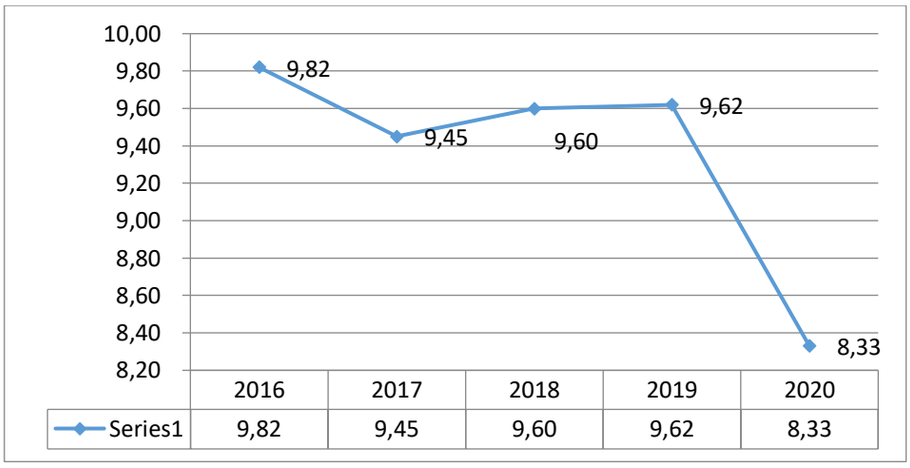

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2021

Persentase penduduk miskin Tahun 2020 menunjukan trend penurunan. Berdasarkan dari Kementerian Sosial kriteria dari rumah tangga, jiwa, dan keluarga miskin di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

No	Kategori	Data Dari Kementerian Sosial	Hasil Verifikasi dan Validasi oleh TKSK
		Sebelum Oktober 2020	Per Oktober 2020
1	Rumah Tangga Miskin	30.153	25.625
2	Individu Miskin	112.718	94.531
3	Keluarga Miskin	30.016	28.829

Pada table diatas menunjukkan, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2020 melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ditemukan masih banyak data keluarga miskin yang tidak sesuai, seperti tidak memiliki nomor induk kependudukan, tidak memiliki nama ibu kandung yang jelas dan lain sebagainya Sehingga, berdasarkan hasil verifikasi tersebut terjadi pengurangan pada jumlah data keluarga miskin per Oktober 2020 yang sudah ditetapkan melalui surat penetapan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti terlihat pada table di atas. Sementara itu masih ada juga keluarga miskin yang sudah

meninggal, sudah menjadi keluarga mampu dan atau sudah pindah domisili dari desa tersebut yang masih terdata menjadi keluarga miskin di kabupaten Kapuas Hulu, namun data tersebut sulit untuk didapatkan karena kurangnya sumber daya dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana terutama untuk pembiayaan bagi TKSK dalam menjangkau desa-desa yang jauh untuk melakukan pendataan tersebut sampai ketingkat desa. Kedepannya diharapkan melalui penguatan TKSK ini diharapkan data keluarga miskin semakin valid dan akurat sehingga pemberian bantuan dalam penanganan kemiskinan menjadi tepat sasaran. Dalam penanganan kemiskinan selama ini ditemui paling kurang ada 3 karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol yaitu, jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar kecamatan atau wilayah, dan akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin yang belum maksimal.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan yang inklusif. Jadi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

f. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (APK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dalam periode. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persenta sependuduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Perkembangan TPAK di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.12.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)

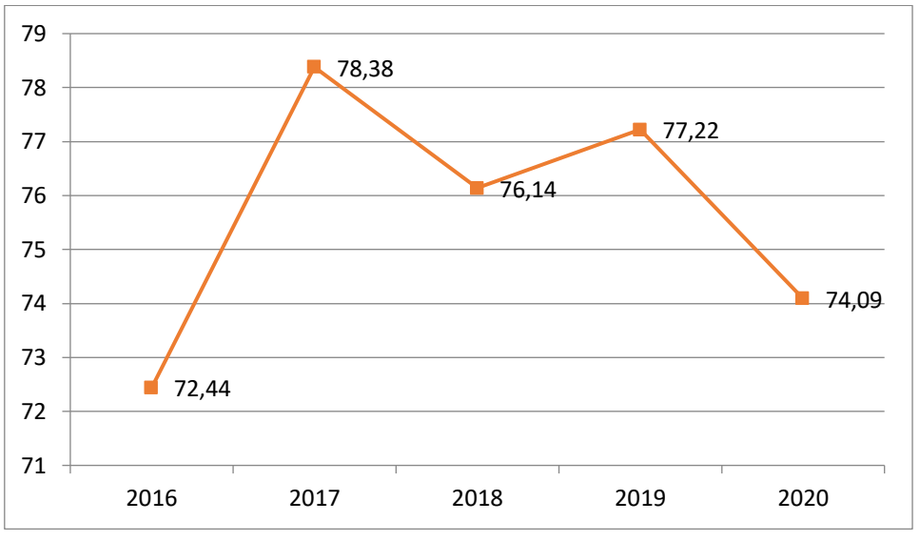

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa TPAK pada Tahun 2016-2017 menunjukkan tren peningkatan sedangkan Tahun 2020 mengalami penurunan . Dimana pada Tahun 2017 TPAK sebesar 78,38 persen dan hingga akhir Tahun 2020 TPAK menjadi 74,09. Dengan menurunnya angka TPAK ini menggambarkan bahwa semakin rendah pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar II.13.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kapuas Hulu, 2016-2020 (Tahun)

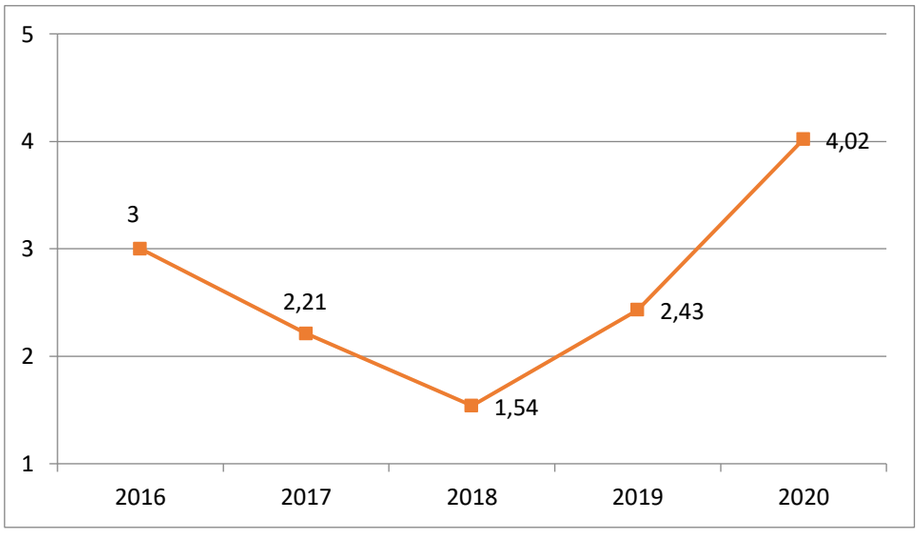

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan fluaktif antara tahun 2016-2020 dan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1,54 persen. Pada akhir Tahun 2020 TPT mengalami peningkatan menjadi 4,02 persen. Adapun terjadinya peningkatan TPT pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh adanya pendami covid mengakibatkan penurunan sebagian besar sektor perekonomian.

Perlu digarisbawahi, bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja di Kapuas Hulu pada Tahun 2019 hanya memiliki jenjang SD/MI/Sederajat bahkan belum/tidak tamat sekolah (8,78%). Selain itu, terdapat 7,81persen penduduk bekerja yang berpendidikan SLTP/MTs/Sederajat dan 18,91 persen penduduk bekerja yang berpendidikan SMA/MA/Sederajat (termasuk SMK sebesar 64,96 persen). Sedangkan penduduk bekerja yang telah mengenyam pendidikan perguruan tinggi terdapat 7,36 persen penduduk bekerja yang berpendidikan diploma dan 11,09 persen penduduk telah lulus universitas baik S1/S2 maupun S3.

Gambar II.14.
Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Kapuas Hulu (%), 2020

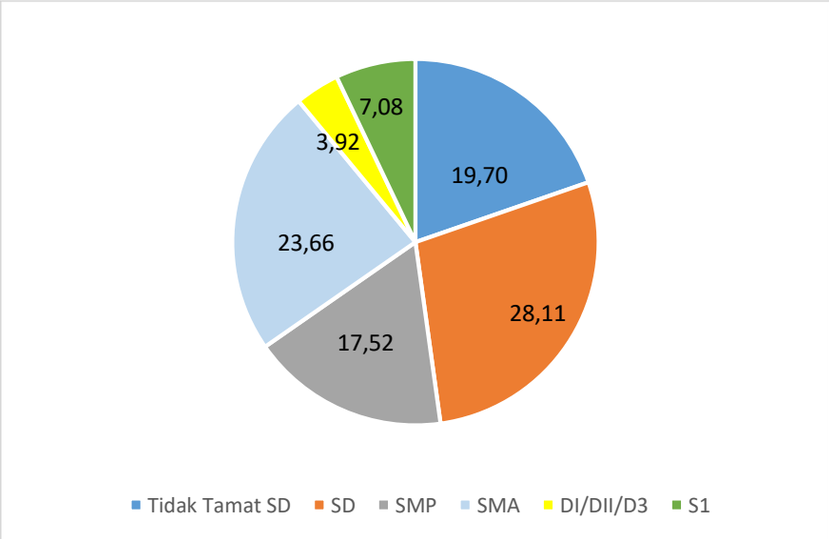

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

a. Seni dan Budaya

Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Adapun seni budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel II.10.
Jenis Budaya Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	JENIS KESENIAN	ASAL BUDAYA (SUKU)	KETERANGAN
1	Gawak Nyape Tanah	Dayak Iban	Adat Tradisi
2	Gawak Kenyalang	Dayak Iban	Adat Tradisi
3	Gawak Kelingkang Panggau	Dayak Iban	Adat Tradisi
4	Gawak Kelingkang Tuah	Dayak Iban	Adat Tradisi
5	Gawak Tambak Bulu	Dayak Iban	Adat Tradisi
6	Gawak Mali Umai	Dayak Iban	Adat Tradisi
7	Gawak Timang Benih	Dayak Iban	Adat Tradisi
8	Gawak Sandau Ari	Dayak Iban	Seni Sastra
9	Gawak Kelingkang Benih	Dayak Iban	Seni Sastra
10	Bepantun	Dayak Iban	Seni Sastra
11	Nimang	Dayak Iban	Seni Sastra
12	Melandai	Dayak Iban	Seni Sastra
13	Ngua'	Dayak Iban	Seni Sastra
14	Mupu Kenyalang	Dayak Iban	Seni Sastra
15	Beramban	Dayak Iban	Seni Sastra
16	Beranak Ringin	Dayak Iban	Seni Sastra
17	Nusi Ensera	Dayak Iban	Seni Sastra
18	Pantun Bulan	Dayak Iban	Seni Sastra
19	Ngayun Anak	Dayak Iban	Seni Sastra
20	Gawai Raa Mamandung	Dayak Taman	Budaya Tradisi
21	Mamasi	Dayak Taman	Adat Tradisi
22	Menyambaang	Dayak Taman	Seni Sastra
23	Mulambu	Dayak Taman	Budaya Tradisi
24	Menimang	Dayak Taman	Seni Sastra Lisan

NO.	JENIS KESENIAN	ASAL BUDAYA (SUKU)	KETERANGAN
25	Pamolek Beok	Dayak Tamambaloh	Adat Tradisi
26	Baranangis	Dayak Tamambaloh	Adat Tradisi
27	Ngiyaan	Dayak Kayan	Seni Tradisi
28	Dayuung	Dayak Kayan	Seni Tradisi
29	Naik Dange	Dayak Kayan	Budaya Tradisi
30	Sejiham Ningkau	Dayak Suaid	Budaya Tradisi
31	Jepin/Belangkah	Melayu	Tari Tradisi
32	Rodat-Hadrah	Melayu	Tari Tradisi
33	Betutur	Melayu	Seni Tradisi
34	Pantun	Melayu	Seni Tradisi
35	Besyair	Melayu	Seni Tradisi
36	Buang - buang	Melayu	Adat Tradisi
37	Tepung Tawar	Melayu	Adat Tradisi
38	Melamar	Melayu	Adat Tradisi
39	Antar Tunang	Melayu	Adat Tradisi
40	Mandi Berias Pengantin	Melayu	Adat Tradisi
41	Besurung	Melayu	Adat Tradisi
42	Arak-arakan Pengantin	Melayu	Adat Tradisi
43	Cucur Mawar	Melayu	Adat Tradisi
44	Selamat Mandi-mandi	Melayu	Adat Tradisi
45	Gunting Rambut	Melayu	Adat Tradisi
46	Turun Tanah	Melayu	Adat Tradisi
47	Beruding	Dayak Kantuk	Seni Tradisi
48	Bejandeh	Dayak Kantuk	Seni Tradisi
49	Betimang	Dayak Kantuk	Seni Tradisi
50	Makai Taun	Dayak Kantuk	Budaya Tradisi
51	Gawa' Batu	Dayak Kantuk	Budaya Tradisi
52	Adat Niri Karumah Panjae	Dayak Iban	Adat Tradisi
53	Tarian Tepin, Syair, Pantun, Qasidah, dan Hadrah	Suku Melalu	Upacara Adat
54	Dange	Suku Dayak Kayan Mendalam	Upacara Adat
55	Nike, Beni, Gawak Kenyalang, Gawak Nyape Tanah dan Neri Ke Rumah Painyai	Suku Dayak Iban	Upacara Adat
56	Gawak Batu, Bekali Tanah	Suku Melayu	Upacara Adat
57	Memindahkan Kuburan	Suku Dayak Taman	Upacara Adat
58	Tepung Tawar Pindah Rumah	Suku Melayu	Upacara Adat
59	Tari Jepin Manis	Suku Melayu	Tarian Tradisional
60	Tari Belangkah	Suku Melayu	Tarian Tradisional
61	Ngajat Perang	Suku Dayak Kayan	Tarian Tradisional
62	Ngajat Bersirang	Suku Dayak Kantuk	Tarian Tradisional
63	Ngajat Terima Tamu	Suku Dayak Iban	Tarian Tradisional
64	Malimongon	Suku Dayak Taman	Sastra Lisan
65	Bersanji	Suku Dayak Suruk	Sastra Lisan

NO.	JENIS KESENIAN	ASAL BUDAYA (SUKU)	KETERANGAN
66	Manjanang	Suku Dayak Tamambaloh	Sastra Lisan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

Tabel II.11.
Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	R. Betang Melapi Patamuan	Melapi I	Putussibau Selatan	SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 212 Tahun 2012
2	R. Betang Lunsa Hilir	Lunsa Hilir	Putussibau Selatan	
3	Kawasan Neolitikum Nanga Balang	Nanga Balang	Putussibau Selatan	
4	R. Betang Semangkok	Ariung Mendalam	Putussibau Utara	
5	Rumah Mayat/Kelambu Semangkok	Ariung Mendalam	Putussibau Utara	
6	R. Betang Sungai Uluk Palin	Benua Tengah	Putussibau Utara	
7	R. Betang Benua Tengah	Benua Tengah	Putussibau Utara	
8	R. Betang Nanga Nyabau	Nanga Nyabau	Putussibau Utara	
9	R. Betang Sungai Utik	Batu Lintang	Embaloh Hulu	
10	R. Betang Bukung	Benua Martinus	Embaloh Hulu	
11	R. Betang Lunsa Hilir	Lunsa	Putussibau Selatan	
12	Masjid Baiturrahman Nanga Bunut	Bunut Tengah	Bunut Hilir	
13	Masjid Jami' At-Taqwa Selimbau	Desa Dalam	Selimbau	
14	Kawasan Anggrek Hitam Selimbau	Gudang Hulu	Selimbau	
15	Makan Kerajaan Selimbau	Gudang Hulu	Selimbau	
16	Gereja Santo Fidelis Sejiram	Sejiram	Seberuang	
17	Peninggalan Kerajaan Silat	Desa Pengeran	Silat Hilir	Situs Daerah Terpencil dari Disbudpar Prop. Kalimantan Barat
18	Kuburan Bai Sari Amas Bale Polo Kayu	Melapi	Putussibau Selatan	
19	Kawasan Cagar Budaya	Pulau Majang	Badau	
20	Gudang Peluru	Sepandan	Batang Lupar	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

b. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda mempunyai peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan

agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kapuas Hulu pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya. APK Kapuas Hulu menunjukkan bahwa pendidikan sekolah dasar memiliki partisipasi lebih dari 100 persen yang mengindikasikan bahwa penduduk yang tidak berusia sekolah SD sederajat masih mengenyam pendidikan sekolah dasar.Namun APK SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA menurun cukup drastis yang mengindikasikan sebaliknya bahwa penduduk yang mengenyam pendidikan

tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk yang seharusnya mengenyam pendidikan SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA.

Lain halnya dengan APM Kapuas Hulu dimana APM mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan tertentu sesuai batasan usia sekolah.

Gambar II.15.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

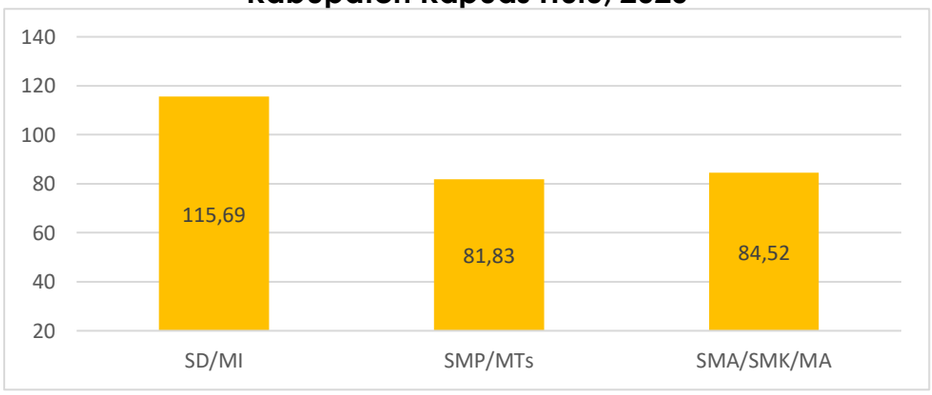

Sumber: Kabupten Kapuas Hulu Dalam Angka 2021

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa APK SD/MI pada Tahun 2020 lebih dari angka 100 persen yaitu 115,69 persen sama dengan APK SMP/MTs belum mencapai 100 persen ditahun 2020dengan APK SMP/MTs sebesar 81,83 persen sedang untuk APK SMA/MA/SMK pada Tahun 2020 sebesar 84,52 persen.

Gambar II.16.
Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Kabupaten Kapuas Hulu, 2019-2020

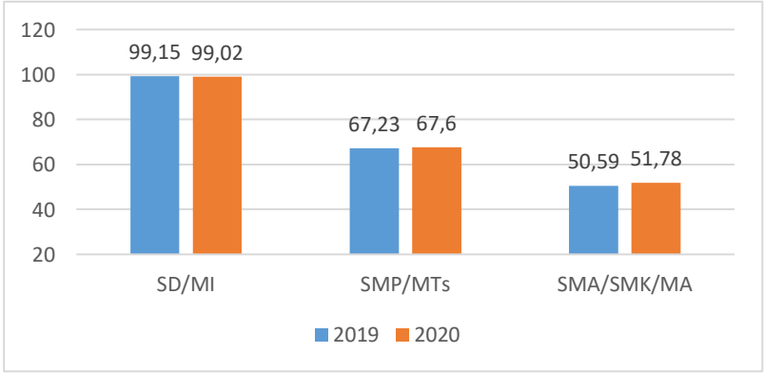

Sumber:KabupatenKapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan APM SD/MI pada Tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,13persen. Untuk APM SMP/MTs terjadi peningkatan di tahun 2020sebesar 0,37 persen dibandingkan dengan Tahun 2019. Untuk APM SMA/MA/SMK terjadi penuingkatan dari Tahun 2019-2020 sebesar 1,19 persen.

Gambar II.17.
Angka Melek Huruf
Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2020 (Persen)

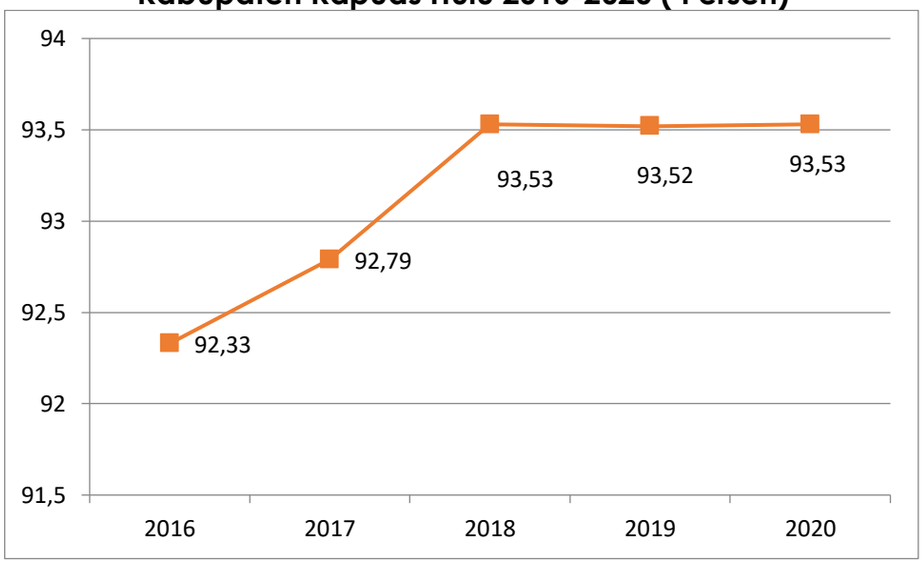

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang fluaktif dari Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 persentase angka menelek huruf sebesar 92,33 persen meningkat pada Tahun 2020 sebesar 93,53. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

Jika dilihat penduduk berusia (7-18 tahun), menurut jenis kelamin untuk perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini menunjukkanbahwa tingkat partisipasi sekolah di seluruh janjang pendidikan usia (7-18 tahun) bagi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Tabel II.12.
Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

Umur	Perempuan	Laki-Laki
7-12	99,56	99,49
13-15	96,07	81,19
16-18	77,34	66,93

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2021

Pelayanan pendidikan diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan tenaga kependidikan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemerataan.

Tabel II.13.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
TK	29	1.179	55
RA	8	377	34
SD	407	28.827	1655
MI	18	2.237	201
SMP	100	12.015	520
MTs	18	1.926	225
SMA	31	8.343	515
SMK	5	1.511	93
MA	6	846	116

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka, 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 unit yang berada di Kecamatan Badau, Semitau dan Putussibau Utara. Sedangkan unit pelayanan Puskesmas sebanyak 23 unit dengan ditunjang Puskesmas Pembantu sebanyak 100 unit. Selain itu, terdapat pula Polindes/Poskesdes yang tersebar di desa-desa maupun kelurahan dengan jumlah fasilitas sebanyak 181 unit.

Gambar II.18.
Fasilitas Kesehatan Kapuas Hulu, 2020

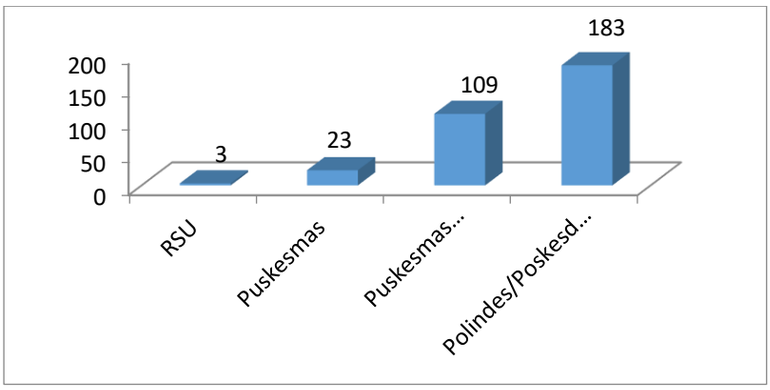

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Tabel II.14.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

Status	Unit Kerja			
	RSUD Dr. Achmad Diponogoro	RSU Badau	RSU Semitau	Puskesmas
Dokter Spesialis	9			
Dokter Umum	10	3	2	43
Dokter Gigi	2			
Bidan	67	4	12	361
Nutrisionis	5		1	38
Sanitarian	2			31
Apoteker	7	1		10
Asisten Apoteker	11		24	23
Perawat	143	12	28	469
Perawat Gigi	3			
Perawat Anastesi				
Rekam Medik	10			1
Radiografer	6	1		
Fisioterafi	4			
Kesehatan Masyarakat	4		1	143
Tenaga Lain	134	7	23	155
Jumlah	**417**	**28**	**71**	**1208**

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2021

Tenaga kesehatan yang melakukan praktik pengobatan di Kapuas Hulu cukup beragam dimana terdapat 9 dokter spesialis, 58 dokter umum dan 2 dokter gigi. Capaian derajat kesehatan (umur harapan hidup, angka kematian balita, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan) di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut. Sebagaimana disajikan dalam gambar II.11, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi Tahun 2016-2020 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 yaitu mencapai 72,52 tahun. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang lahir pada Tahun 2020 akan hidup hingga mencapai umur 72,52 tahun.

Peningkatan layanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian umur harapan hidup yang tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Saat ini dunia internasional sedang mengalami Pandemi Covid-19 yang menjadi permasalahan skala internasional. Pemerintah pusat pun menggerakkan seluruh sumber dayanya untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Begitu juga Pemerintah Kapuas Hulu, meningkatnya kasus demi kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 terus terjadi sehingga perlu adanya upaya khusus dalam penanganannya. Hingga Februari 2021, pasien terkonfirmasi positif terus mengalami peningkatan. Perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19 ini agar mampu bertahan baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi masyarakat.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

Sub urusan pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembangunan daerah, seperti sarana dan prasarana perhubungan, permukiman layak huni, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait proporsi kualitas jalan, baik dari bahan pembuatan jalan maupun kondisi jalan. Hal ini karena jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Sampai dengan akhir Tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi mantap yang terdiri dari panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 316,367 km dan panjang jalan kondisi sedang sepanjang 363,599 km, sedangkan keseluruhan panjang jalan kabupaten sesuai dengan keputusan Bupati sesuai dengan SK Bupati Nomor 365 tahun 2017 tentang penetapan jalan status ruas – ruas jalan sebagai jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 Km.

Gambar II.19.
Panjang Jalan Sebagai Status Ruas Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan (Km),
Kapuas Hulu, 2020

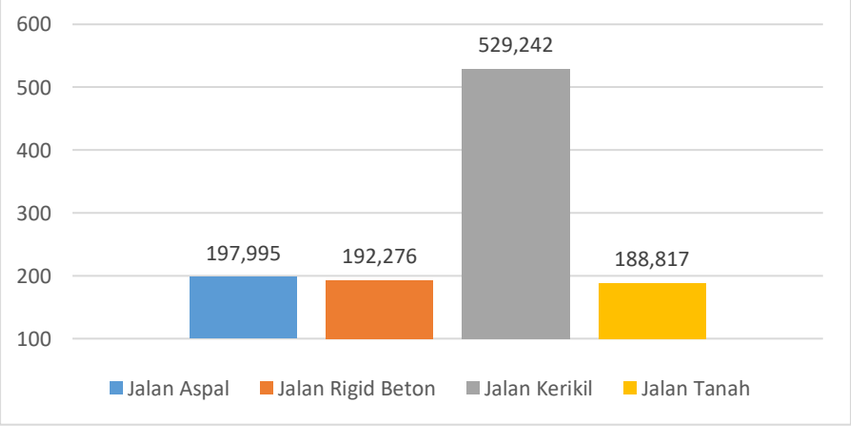

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perkerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Gambar II.20.
Panjang Jalan Sebagai Status Ruas Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi (Km), Tahun 2020

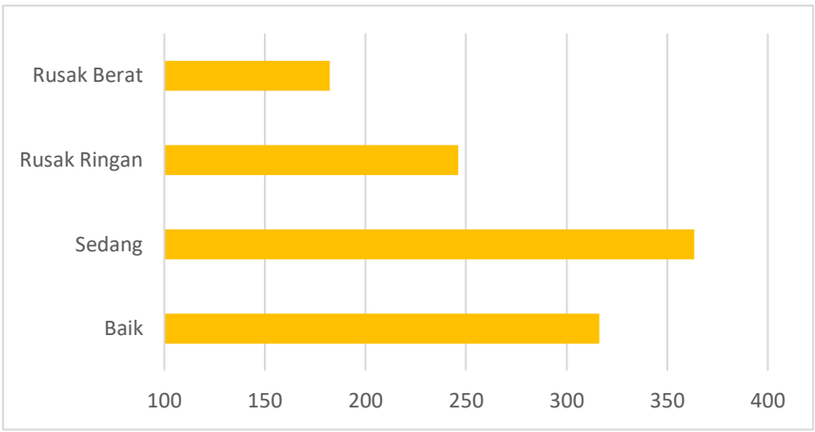

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perkerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan serta mengoptimalkan jalan yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Tabel II.15.
Panjang Jalan Sebagai Status Ruas Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan dan Kondisi (Km)
Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	001	Ruas Jalan Simp. Silat (Miau Merah) - Nanga Silat	Silat Hilir	15,080	4,50	6,501	0,000	8,579	0,000	4,221	27,99	3,000	19,89	7,859	52,12	0,000	0,00	120	Nasional	
2	002	Ruas Jalan Nanga Silat - Sekedau	Silat Hilir; Semitau	31,000	3,00/6,50	0,000	0,050	26,150	4,800	0,000	0,00	21,810	70,35	4,590	14,81	4,600	14,84	40	Kabupaten	
3	003	Ruas Jalan Bongkong - Nanga Dangkan	Silat Hilir; Silat Hulu	12,400	4,50	4,824	6,683	0,893	0,000	5,931	47,83	2,869	23,14	3,600	29,03	0,000	0,00	95	Nasional	
4	004	Ruas Jalan Dalam Kota Nanga Silat	Silat Hilir	4,710	2,00/3,00/3,50	0,000	4,710	0,000	0,000	4,710	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
5	005	Ruas Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang	Silat Hulu; Hulu Gurung	70,430	1,5/4,5/8,0/10,0	0,000	4,439	34,561	31,430	3,926	5,57	26,434	37,53	15,220	21,61	24,850	35,28	40	Kabupaten	
6	006	Ruas Jalan Dangkan Kota 1	Silat Hulu	0,381	3,50	0,000	0,381	0,000	0,000	0,381	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
7	007	Ruas Jalan Dangkan Kota 2	Silat Hulu	0,542	2,00/3,50	0,000	0,542	0,000	0,000	0,200	36,90	0,000	0,00	0,342	63,10	0,000	0,00	120	Kabupaten	
8	008	Ruas Jalan Dangkan Kota 3	Silat Hulu	0,180	3,00/3,50	0,000	0,180	0,000	0,000	0,180	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
9	009	Ruas Jalan Dangkan Kota 4	Silat Hulu	0,100	3,50	0,000	0,100	0,000	0,000	0,100	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
10	010	Ruas Jalan Lingkar Puja	Semitau	7,575	4,50/6,50	0,000	2,775	4,800	0,000	2,775	36,63	3,850	50,83	0,950	12,54	0,000	0,00	40	Kabupaten	
11	011	Ruas Jalan Kenerak - Menapar	Semitau; Suhaid	11,600	4,50	0,000	6,200	5,400	0,000	2,800	24,14	3,400	29,31	5,200	44,83	0,200	1,72	40	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	012	Ruas Jalan Semitau - Nanga Kantuk	Semitau; Empanang	54,055	6,50	0,000	0,000	51,400	2,655	0,000	0,00	43,800	81,03	7,600	14,06	2,655	4,91	80	Kabupaten	
13	013	Ruas Jalan Angkasa (dalam Kota Semitau)	Semitau	1,111	4,50	1,000	0,025	0,086	0,000	1,000	90,01	0,025	2,25	0,086	7,74	0,000	0,00	80	Provinsi	
14	014	Ruas Jalan Kartini (dalam Kota Semitau)	Semitau	0,920	4,00	0,425	0,495	0,000	0,000	0,425	46,20	0,375	40,76	0,120	13,04	0,000	0,00	80	Kabupaten	
15	015	Ruas Jalan Pendidikan (dalam Kota Semitau)	Semitau	2,164	3,00/7,00/12,00	0,364	0,000	1,800	0,000	0,364	16,82	1,200	55,45	0,600	27,73	0,000	0,00	80	Provinsi	
16	016	Ruas Jalan Pancasila (dalam Kota Semitau)	Semitau	0,502	4,00	0,502	0,000	0,000	0,000	0,502	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80	Kabupaten	
17	017	Ruas Jalan L. Lugit (dalam Kota Semitau)	Semitau	2,780	3,00/7,00	0,583	0,000	0,000	2,197	0,000	0,00	0,000	0,00	0,583	20,97	2,197	79,03	80	Kabupaten	
18	018	Ruas Jalan Sejiram - Gurung	Seberuang	5,780	3,00/4,50	0,000	3,000	2,780	0,000	3,000	51,90	0,980	16,96	1,800	31,14	0,000	0,00	80	Provinsi	
19	019	Ruas Jalan Simp. Bati (Lintas Selatan) - Menapar	Seberuang	29,740	2,00/4,50/6,50	0,000	5,265	12,221	12,254	4,150	13,95	9,085	30,55	6,191	20,82	10,314	34,68	80	Nasional	
20	020	Ruas Jalan Simp. Nanga Lot - Na. Luan	Seberuang; Silat Hulu	17,656	4,50	3,384	0,000	14,272	0,000	3,384	19,17	13,472	76,30	0,800	4,53	0,000	0,00	80	Nasional	
21	021	Ruas Jalan Dalam Kota Sejiram 1	Seberuang	0,432	3,00	0,000	0,432	0,000	0,000	0,432	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80	Kabupaten	
22	022	Ruas Jalan Dalam Kota Sejiram 2	Seberuang	0,100	3,00	0,000	0,100	0,000	0,000	0,100	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80	Kabupaten	
23	023	Ruas Jalan Suhaid - Mensusai	Suhaid	21,364	2,00/3,00/4,50	2,546	3,039	15,779	0,000	4,017	18,80	7,217	33,78	7,730	36,18	2,400	11,23	40	Kabupaten	
24	024	Ruas Jalan Mungguk Manday (dalam Kota Suhaid)	Suhaid	1,014	4,50	1,014	0,000	0,000	0,000	1,014	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80	Kabupaten	
25	025	Ruas Jalan Jambu (dalam Kota Suhaid)	Suhaid	0,400	5,00	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,00	0,400	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	026	Ruas Jalan Simp. Sekubah - Selimbau	Jongkong; Selimbau	29,710	4,50	10,831	15,650	3,229	0,000	18,191	61,23	7,920	26,66	3,280	11,04	0,319	1,07	120	Kabupaten	
27	027	Ruas Jalan Tepuai - Nanga Taman	Hulu Gurung	17,300	4,50	2,352	9,475	5,473	0,000	11,179	64,62	2,003	11,58	3,918	22,65	0,200	1,16	120	Nasional	
28	028	Ruas Jalan Simp. Senara - Simp. Sekubah	Hulu Gurung; Jongkong	22,100	4,50	11,210	6,070	4,820	0,000	12,260	55,48	7,240	32,76	2,400	10,86	0,200	0,90	120	Nasional	
29	029	Ruas Jalan Pesantren 1 (dalam Kota Na. Tepuai)	Hulu Gurung	1,670	3,60/4,00	0,484	0,716	0,470	0,000	0,716	42,87	0,000	0,00	0,954	57,13	0,000	0,00	120	Kabupaten	
30	030	Ruas Jalan Pesantren 2 (dalam Kota Na. Tepuai)	Hulu Gurung	1,094	3,60/7,00	1,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,194	17,73	0,200	18,28	0,700	63,99	120	Kabupaten	
31	031	Ruas Jalan Simp. Sekubah - Jongkong	Jongkong	23,090	4,50	17,608	5,482	0,000	0,000	21,970	95,15	0,720	3,12	0,400	1,73	0,000	0,00	120	Kabupaten	
32	032	Ruas Jalan Menendang - Nanga Temenang	Pengkadan; Jongkong	18,550	4,50	3,541	13,145	1,864	0,000	11,296	60,89	5,418	29,21	1,836	9,90	0,000	0,00	120	Nasional	
33	033	Ruas Jalan Mawan - Ujung Said	Pengkadan; Jongkong	26,430	3,00/4,50/6,50	0,000	0,000	6,400	20,030	0,000	0,00	5,000	18,92	1,200	4,54	20,230	76,54	120	Kabupaten	
34	034	Ruas Jalan Riam Panjang - Nanga Sangan	Pengkadan; Boyang Tanjung	11,800	4,50	0,000	0,844	10,956	0,000	0,844	7,15	7,756	65,73	3,000	25,42	0,200	1,69	80	Nasional	
35	035	Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman	Boyan Tanjung; Hulu Gurung	27,600	4,50	7,430	7,195	12,975	0,000	11,257	40,79	9,371	33,95	6,972	25,26	0,000	0,00	120	Nasional	
36	036	Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Danau	Boyan Tanjung	13,450	4,50	8,494	3,520	1,436	0,000	11,414	84,86	1,295	9,63	0,741	5,51	0,000	0,00	80	Nasional	
37	037	Ruas Jalan Nanga Danau - Nanga Bunut	Boyan Tanjung; Bunut Hilir	37,950	6,50	0,604	0,000	37,346	0,000	0,604	1,59	32,846	86,55	4,500	11,86	0,000	0,00	40	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
38	038	Ruas Jalan Nanga Boyan - Nanga Suruk	Boyan Tanjung; Bunut Hulu	16,000	4,50	0,000	0,000	11,580	4,420	0,000	0,00	9,580	59,88	2,600	16,25	3,820	23,88	40	Kabupaten	
39	039	Ruas Jalan Temuyuk - Nanga Suruk	Bunut Hulu	8,200	4,50	5,930	2,270	0,000	0,000	8,200	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Nasional	
40	040	Ruas Jalan Semangut - Segitak (Kelibang)	Bunut Hulu	11,050	4,50	0,000	2,764	8,286	0,000	2,764	25,01	5,400	48,87	2,686	24,31	0,200	1,81	80	Nasional	
41	041	Ruas Jalan Simp. Empat Suruk - Na. Payang	Bunut Hulu	17,400	4,50	0,884	0,000	16,516	0,000	0,884	5,08	4,000	22,99	12,316	70,78	0,200	1,15	80	Nasional	
42	042	Ruas Jalan Nanga Payang - Landau Kaloi	Bunut Hulu	33,180	6,50	0,000	0,000	16,665	16,515	0,000	0,00	7,600	22,91	9,065	27,32	16,515	49,77	40	Kabupaten	
43	043	Ruas Jalan Lingkar dalam Kota Na. Bunut	Bunut Hilir	2,200	10,00	0,000	0,000	1,828	0,372	0,000	0,00	1,828	83,09	0,372	16,91	0,000	0,00	80	Kabupaten	
44	044	Ruas Jalan Tekalong - Tanjung	Mentebah	22,736	4,50	4,786	1,405	16,545	0,000	5,591	24,59	10,209	44,90	6,936	30,51	0,000	0,00	100	Nasional	
45	045	Ruas Jalan Rantau Kalis - Nanga Sarai	Kalis	28,745	4,50	0,000	0,774	27,971	0,000	0,774	2,69	5,126	17,83	20,845	72,52	2,000	6,96	40	Kabupaten	
46	046	Ruas Jalan Tekudak - Tanjung	Kalis	34,478	4,50/8,00	2,944	5,365	9,691	16,478	7,849	22,77	2,831	8,21	7,320	21,23	16,478	47,79	120	Nasional	
47	047	Ruas Jalan Kalis - Nanga Sebintang	Kalis	14,060	4,00/ 6,50	0,000	0,525	9,110	4,425	0,000	0,00	7,414	52,73	2,421	17,22	4,225	30,05	40	Kabupaten	
48	048	Ruas Jalan Al Mukmin (dalam Kota Nanga Kalis)	Kalis	0,180	4,00	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	0,00	0,180	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
49	049	Ruas Jalan Hidayah (dalam Kota Nanga Kalis)	Kalis	0,880	3,00/4,00/6,00	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,00	0,880	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
50	050	Ruas Jalan DM Saleha (dalam Kota Nanga Kalis)	Kalis	0,455	3,00/5,00	0,000	0,000	0,455	0,000	0,000	0,00	0,455	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
51	051	Ruas Jalan SDN 01 (dalam Kota Nanga Kalis)	Kalis	1,070	3,00/4,00/6,20	0,000	0,547	0,523	0,000	0,000	0,00	1,070	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
52	052	Ruas Jalan SMA 01 (dalam Kota Nanga Kalis)	Kalis	0,622	4,00/6,00	0,000	0,000	0,622	0,000	0,000	0,00	0,622	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
53	053	Ruas Jalan Simpang Sayut - Nanga Sarai	Putussibau Selatan; Kalis	11,600	4,50	0,000	0,000	11,600	0,000	0,000	0,00	7,800	67,24	2,200	18,97	1,600	13,79	120	Nasional	
54	054	Ruas Jalan Tanjung Pandan	Putussibau Selatan	1,353	4,50	0,767	0,586	0,000	0,000	0,767	56,69	0,586	43,31	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
55	055	Ruas Jalan Tanjung Pura	Putussibau Selatan	1,467	4,50/5,00/13,50	1,467	0,000	0,000	0,000	1,467	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
56	056	Ruas Jalan Bukit Tilung	Putussibau Selatan	0,470	5,50	0,470	0,000	0,000	0,000	0,470	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
57	057	Ruas Jalan Adi Sucipto	Putussibau Selatan	0,427	6,00	0,427	0,000	0,000	0,000	0,427	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
58	058	Ruas Jalan Untung Sridadi	Putussibau Selatan	0,455	3,50/5,00	0,000	0,455	0,000	0,000	0,455	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
59	059	Ruas Jalan Penjara	Putussibau Selatan	0,588	6,00	0,588	0,000	0,000	0,000	0,588	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
60	060	Ruas Jalan Kalimantan	Putussibau Selatan	0,495	4,00	0,495	0,000	0,000	0,000	0,495	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
61	061	Ruas Jalan Kedamin - Teluk Sindur	Putussibau Selatan	5,570	6,00	5,570	0,000	0,000	0,000	5,570	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
62	062	Ruas Jalan Sentosa	Putussibau Selatan	0,785	3,00/4,30	0,000	0,785	0,000	0,000	0,785	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
63	063	Ruas Jalan Kedamin Hulu	Putussibau Selatan	2,725	4,50	0,000	1,264	1,461	0,000	1,264	46,39	1,125	41,28	0,336	12,33	0,000	0,00	200	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
64	064	Ruas Jalan R.A. Kartini	Putussibau Selatan	1,050	4,00	1,050	0,000	0,000	0,000	1,050	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
65	065	Ruas Jalan Fadilah	Putussibau Selatan	0,788	4,50	0,788	0,000	0,000	0,000	0,788	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
66	066	Ruas Jalan Angkasa Pura	Putussibau Selatan	0,589	4,00	0,364	0,225	0,000	0,000	0,589	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
67	067	Ruas Jalan Banin	Putussibau Selatan	0,950	5,70	0,950	0,000	0,000	0,000	0,950	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
68	068	Ruas Jalan Tani	Putussibau Selatan	2,010	4,00	0,554	0,000	1,456	0,000	0,554	27,56	1,456	72,44	0,000	0,00	0,000	0,00	100	Kabupaten	
69	069	Ruas Jalan Budaya	Putussibau Selatan	0,690	4,10/5,70/6,00	0,524	0,166	0,000	0,000	0,290	42,03	0,400	57,97	0,000	0,00	0,000	0,00	100	Nasional	
70	070	Ruas Jalan Pesantren	Putussibau Selatan	1,445	4,50	0,300	1,145	0,000	0,000	1,445	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
71	071	Ruas Jalan Kedamin - Nanga Manday	Putussibau Selatan; Bika	24,600	4,50/6,00	2,637	19,613	2,350	0,000	16,950	68,90	6,500	26,42	0,800	3,25	0,350	1,42	150	Nasional	
72	072	Ruas Jalan Lingkar Bika	Bika	3,900	4,50	0,000	3,900	0,000	0,000	3,900	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
73	073	Ruas Jalan Dalam Kota Bika 1	Bika	0,118	4,50	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,118	100,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
74	074	Ruas Jalan Dalam Kota Bika 2	Bika	0,997	3,00/4,50	0,000	0,997	0,000	0,000	0,997	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
75	075	Ruas Jalan Gajah Mada	Putussibau Utara	0,783	5,00/6,70/7,00	0,783	0,000	0,000	0,000	0,783	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
76	076	Ruas Jalan Kirin Durian	Putussibau Utara	0,509	5,50	0,509	0,000	0,000	0,000	0,509	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
77	077	Ruas Jalan D.I. Panjaitan	Putussibau Utara	0,439	10,00	0,439	0,000	0,000	0,000	0,439	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
78	078	Ruas Jalan Pasar Inpres	Putussibau Utara	0,383	6,00	0,060	0,323	0,000	0,000	0,383	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
79	079	Ruas Jalan S. Parman	Putussibau Utara	0,223	5,00	0,223	0,000	0,000	0,000	0,223	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
80	080	Ruas Jalan K.S. Tubun	Putussibau Utara	0,691	4,00	0,691	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,491	71,06	0,200	28,94	0,000	0,00	200	Kabupaten	
81	081	Ruas Jalan A. Dogom	Putussibau Utara	1,705	5,50	1,705	0,000	0,000	0,000	1,705	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
82	082	Ruas Jalan Kopral A. Rahman	Putussibau Utara	0,625	6,00	0,625	0,000	0,000	0,000	0,625	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
83	083	Ruas Jalan Hasanuddin	Putussibau Utara	0,591	7,50	0,591	0,000	0,000	0,000	0,591	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
84	084	Ruas Jalan Patimura	Putussibau Utara	0,478	6,00	0,478	0,000	0,000	0,000	0,478	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
85	085	Ruas Jalan Merdeka	Putussibau Utara	0,487	4,00/5,00/7,00	0,487	0,000	0,000	0,000	0,487	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
86	086	Ruas Jalan Dr. A. Diponegoro	Putussibau Utara	0,591	6,40	0,591	0,000	0,000	0,000	0,591	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
87	087	Ruas Jalan Rahadi Usman	Putussibau Utara	0,602	5,50	0,602	0,000	0,000	0,000	0,602	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
88	088	Ruas Jalan I.G. Ngurah Rai	Putussibau Utara	0,769	4,00/6,00/6,50	0,769	0,000	0,000	0,000	0,769	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
89	089	Ruas Jalan Jeranding A.R.	Putussibau Utara	0,517	3,80	0,517	0,000	0,000	0,000	0,517	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
90	090	Ruas Jalan Perwira	Putussibau Utara	0,162	6,50/13,50	0,162	0,000	0,000	0,000	0,162	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
91	091	Ruas Jalan Melati	Putussibau Utara	0,202	4,00	0,202	0,000	0,000	0,000	0,202	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
92	092	Ruas Jalan Ruai	Putussibau Utara	0,182	3,30/4,00	0,182	0,000	0,000	0,000	0,092	50,55	0,090	49,45	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
93	093	Ruas Jalan Moch. Dahar	Putussibau Utara	0,254	4,20	0,254	0,000	0,000	0,000	0,254	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
94	094	Ruas Jalan Amin	Putussibau Utara	0,208	4,80	0,208	0,000	0,000	0,000	0,208	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
95	095	Ruas Jalan Beringin	Putussibau Utara	0,460	5,50	0,460	0,000	0,000	0,000	0,460	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
96	096	Ruas Jalan Budi Utomo	Putussibau Utara	0,193	4,00	0,193	0,000	0,000	0,000	0,193	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
97	097	Ruas Jalan Iskandar Muda	Putussibau Utara	0,200	5,80	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
98	098	Ruas Jalan Dr. Syamsudin	Putussibau Utara	0,125	4,00	0,025	0,000	0,100	0,000	0,000	0,00	0,125	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
99	099	Ruas Jalan M. Yasin	Putussibau Utara	0,673	5,20	0,673	0,000	0,000	0,000	0,673	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
100	100	Ruas Jalan Piere Tendean	Putussibau Utara	0,932	4,00	0,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,792	84,98	0,140	15,02	0,000	0,00	200	Nasional	
101	101	Ruas Jalan W.R. Supratman	Putussibau Utara	0,501	4,00	0,501	0,000	0,000	0,000	0,501	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
102	102	Ruas Jalan Antasari	Putussibau Utara	0,596	4,50/8,00	0,596	0,000	0,000	0,000	0,375	62,89	0,221	37,11	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
103	103	Ruas Jalan Danau Luar	Putussibau Utara	0,365	7,00	0,365	0,000	0,000	0,000	0,365	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
104	104	Ruas Jalan Pendidikan	Putussibau Utara	0,210	4,00	0,210	0,000	0,000	0,000	0,210	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
105	105	Ruas Jalan Pancasila	Putussibau Utara	0,205	5,00	0,205	0,000	0,000	0,000	0,205	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
106	106	Ruas Jalan Danau Kayan 1	Putussibau Utara	0,249	4,00	0,249	0,000	0,000	0,000	0,249	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
107	107	Ruas Jalan Danau Kayan 2	Putussibau Utara	0,250	4,00	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
108	108	Ruas Jalan Danau Kayan 3	Putussibau Utara	0,175	3,00/4,00	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,175	100,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
109	109	Ruas Jalan Danau Sentarum	Putussibau Utara	0,191	4,80	0,191	0,000	0,000	0,000	0,191	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
110	110	Ruas Jalan Patinggi Sari	Putussibau Utara	0,580	4,30/6,00	0,580	0,000	0,000	0,000	0,330	56,90	0,250	43,10	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
111	111	Ruas Jalan Imelda	Putussibau Utara	0,250	4,00	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
112	112	Ruas Jalan Cempaka	Putussibau Utara	0,210	4,00	0,210	0,000	0,000	0,000	0,010	4,76	0,200	95,24	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
113	113	Ruas Jalan Flamboyan	Putussibau Utara	0,150	4,00	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,150	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
114	114	Ruas Jalan Meranti	Putussibau Utara	0,148	3,00	0,148	0,000	0,000	0,000	0,148	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
115	115	Ruas Jalan Nusa Indah	Putussibau Utara	0,132	6,00	0,132	0,000	0,000	0,000	0,132	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
116	116	Ruas Jalan Kenanga	Putussibau Utara	0,135	4,00	0,135	0,000	0,000	0,000	0,135	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
117	117	Ruas Jalan Darunnadwah	Putussibau Utara	0,090	13,00	0,090	0,000	0,000	0,000	0,090	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
118	118	Ruas Jalan Danau Kayan 4	Putussibau Utara	0,268	3,70/4,00	0,179	0,089	0,000	0,000	0,179	66,79	0,000	0,00	0,089	33,21	0,000	0,00	200	Kabupaten	
119	119	Ruas Jalan Kenanga - Dogom	Putussibau Utara	0,760	4,50/6,00	0,760	0,000	0,000	0,000	0,760	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
120	120	Ruas Jalan Dogom 1	Putussibau Utara	1,049	6,00	1,049	0,000	0,000	0,000	1,049	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
121	121	Ruas Jalan Kirin Braun	Putussibau Utara	0,529	4,50	0,000	0,529	0,000	0,000	0,529	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
122	122	Ruas Jalan Komplek Transmigrasi	Putussibau Utara	2,600	4,50	0,000	2,053	0,310	0,237	1,453	55,88	0,910	35,00	0,237	9,12	0,000	0,00	100	Kabupaten	
123	123	Ruas Jalan Pantai Sibau	Putussibau Utara	0,619	3,00/3,50	0,322	0,297	0,000	0,000	0,000	0,00	0,297	47,98	0,322	52,02	0,000	0,00	200	Kabupaten	
124	124	Ruas Jalan Iskandar Muda - Dogom	Putussibau Utara	0,731	4,50	0,731	0,000	0,000	0,000	0,731	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Nasional	
125	125	Ruas Jalan Komplek Perumahan Pemda	Putussibau Utara	0,641	4,20/5,20	0,000	0,641	0,000	0,000	0,441	68,80	0,200	31,20	0,000	0,00	0,000	0,00	100	Kabupaten	
126	126	Ruas Jalan Diponegoro - Pantai Sibau	Putussibau Utara	0,160	4,00	0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
127	127	Ruas Jalan Escape	Putussibau Utara	0,390	4,50	0,000	0,390	0,000	0,000	0,390	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80	Kabupaten	
128	128	Ruas Jalan Nyuai	Putussibau Utara	0,380	4,95	0,000	0,380	0,000	0,000	0,380	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
129	129	Ruas Jalan Beringin - Iskandar Muda	Putussibau Utara	0,233	5,50	0,233	0,000	0,000	0,000	0,233	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
130	130	Ruas Jalan Simp. Mupa (Lintas Utara) - Datah Dian	Putussibau Utara	18,100	4,00/5,00/6,00	0,350	16,362	1,388	0,000	16,712	92,33	1,388	7,67	0,000	0,00	0,000	0,00	100	Nasional	
131	131	Ruas Jalan Tanjung Kerja - Nanga Nyabau	Putussibau Utara	8,800	4,50	0,000	5,435	3,365	0,000	4,480	50,91	3,850	43,75	0,470	5,34	0,000	0,00	120	Nasional	
132	132	Ruas Jalan Pancasila 1	Putussibau Utara	0,265	4,00	0,265	0,000	0,000	0,000	0,265	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
133	133	Ruas Jalan Pancasila 2	Putussibau Utara	0,286	4,50	0,286	0,000	0,000	0,000	0,286	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200	Kabupaten	
134	134	Ruas Jalan Lingkar Mupa - Transmigrasi	Putussibau Utara	4,926	6,60/14,00/18,00	0,000	0,073	3,803	1,050	0,073	1,48	1,827	37,09	1,976	40,11	1,050	21,32	200	Nasional	
135	135	Ruas Jalan Sibau Hulu - Potan	Putussibau Utara	13,490	6,50	0,000	0,000	8,955	4,535	0,000	0,00	2,650	19,64	9,840	72,94	1,000	7,41	200	Nasional	
136	136	Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk	Embaloh Hulu	21,790	4,50	13,190	0,569	8,031	0,000	11,759	53,97	9,831	45,12	0,200	0,92	0,000	0,00	120	Kabupaten	
137	137	Ruas Jalan Apan - Ulak Pauk	Embaloh Hulu	7,150	4,50/6,50	2,530	0,000	4,620	0,000	2,530	35,38	3,420	47,83	1,200	16,78	0,000	0,00	80	Kabupaten	
138	138	Ruas Jalan Mataso - Sadap	Embaloh Hulu	3,300	4,00/4,50	2,700	0,200	0,400	0,000	2,500	75,76	0,400	12,12	0,400	12,12	0,000	0,00	80	Nasional	
139	139	Ruas Jalan Nanga Manday - Nanga Embaloh	Bika; Embaloh Hilir	31,720	7,00	0,000	0,000	5,400	26,320	0,000	0,00	5,000	15,76	1,750	5,52	24,970	78,72	120	Kabupaten	
140	140	Ruas Jalan Simp. Sungai Luar - Na. Bunut	Batang Lupar; Bunut Hilir	51,374	6,50/12,00	0,000	0,000	12,800	38,574	0,000	0,00	5,200	10,12	7,400	14,40	38,774	75,47	40	Kabupaten	
141	141	Ruas Jalan Ukit-Ukit - Sumpak Sengkuang (Simp. Jalan Nasional Lanjak - Badau)	Batang Lupar	19,780	4,50	0,875	2,030	16,875	0,000	2,905	14,69	11,250	56,88	5,625	28,44	0,000	0,00	100	Nasional	
142	142	Ruas Jalan Dwikora (dalam Kota Lanjak)	Batang Lupar	1,208	3,00/4,50	0,000	1,208	0,000	0,000	1,008	83,44	0,200	16,56	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
143	143	Ruas Jalan Temenggung Budit (dalam Kota Lanjak)	Batang Lupar	0,824	4,50	0,425	0,399	0,000	0,000	0,425	51,58	0,399	48,42	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
144	144	Ruas Jalan Badau - Pesayah	Badau	9,410	4,50	8,864	0,109	0,437	0,000	7,889	83,84	0,884	9,39	0,637	6,77	0,000	0,00	80	Nasional	
145	145	Ruas Jalan Sungai Tembaga - Empaik	Badau	14,500	4,50/6,00	3,917	0,000	8,308	2,275	2,942	20,29	7,722	53,26	2,136	14,73	1,700	11,72	80	Kabupaten	

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT			N/P/K	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
146	146	Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Badau	Badau	3,100	4,50	0,000	3,100	0,000	0,000	3,100	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40	Nasional	
147	147	Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Badau	Badau	5,200	4,50	0,000	5,200	0,000	0,000	5,200	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40	Nasional	
148	148	Ruas Jalan Bukit Perak (dalam Kota Badau)	Badau	0,582	4,50	0,582	0,000	0,000	0,000	0,582	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Nasional	
149	149	Ruas Jalan Nanga Kantuk - Sungai Antu	Empanang; Puring Kencana	25,320	4,50	6,908	4,044	14,368	0,000	6,908	27,28	5,970	23,58	12,172	48,07	0,270	1,07	80	Kabupaten	
150	150	Ruas Jalan Simp. Nanga Kantuk - Kayu Baung	Empanang	9,200	4,50	9,200	0,000	0,000	0,000	9,200	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40	Kabupaten	
151	151	Ruas Jalan Ensanak - Semirah	Empanang	2,817	6,50	0,000	0,000	2,817	0,000	0,000	0,00	1,600	56,80	1,217	43,20	0,000	0,00	120	Nasional	
152	152	Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (dalam Kota Nanga Kantuk)	Empanang	0,600	4,50	0,600	0,000	0,000	0,000	0,600	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	120	Nasional	
153	153	Ruas Jalan Pendidikan (dalam Kota Nanga Kantuk)	Empanang	0,720	3,00/4,00	0,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,720	100,00	0,000	0,00	120	Kabupaten	
154	154	Ruas Jalan Simp. Nanga Kantuk - Jaung (Batas Kabupaten Sintang)	Empanang; Puring Kencana	51,000	4,50	10,041	5,253	35,456	0,250	6,905	13,54	5,540	10,86	38,555	75,60	0,000	0,00	40	Kabupaten	
		A. Total Panjang Jalan (Km)		**1108,330**		**197,995**	**192,276**	**529,242**	**188,817**	**316,367**		**363,599**		**246,148**		**182,217**				
		B. Persentase Jalan (%)		**100,00**		**17,86**	**17,35**	**47,75**	**17,04**		**28,54**		**32,81**		**22,21**		**16,44**			

IRIGASI

Tabel II.16.
Data Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
A	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN																			
1	D.I. SIUT	20	20,00	ST	1	3					100	1.900						Baik	20,00	20,00
2	D.I. SUKA MAJU LUNSARA	60	300,00	ST			2					2.500		200				Rusak Sedang	218,67	218,67
	JUMLAH	80	320,00		1	3	2					4.400		200			0		238,67	238,67
B	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA																			
3	D.I. NAGA NYABAU (Sei Membuton)	75	75,00	SD	1	1					290	4.710	3.300					Rusak Berat	20,00	20,00
	JUMLAH	75	75,00		1	1					290	4.710					0		20,00	20,00

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
C	KECAMATAN KALIS																			
4	D.I. NANGA DANAU BAK	250	300,00	ST	1	6	1	6	9			4.000		400				Baik	290,00	290,00
5	D.I. NANGA DANAU KAUK	230	175,20	ST	1	12	7	3	18	2.000		2.100		200				Rusak Berat	100,00	100,00
6	D.I. HULU TUBUK	425	495,93	ST	1	44	7	7	30	1.000		11.000	70	150	22.400		10	Baik	454,48	454,48
7	D.I. LUBUK MANTUK (Sei Kopok)	125	125,25	ST	1	2						1.328		110				Baik	125,25	125,25
	JUMLAH	1.030	1.096,38		4	64	15	16	57	3.000		18.428	70	860	22.400		10		969,73	969,73
D	KECAMATAN MENTEBAH																			
8	D.I. TEKALONG	60	54,79	ST	2	4	4	1			70	4.500		1113			10	Baik	54,79	54,79
9	D.I. SUKAMAJU	75	40,67	ST	1	4	2				200	3.300		110				Baik	40,67	40,67
10	D.I. PALA	40	84,91	SD	1	4						2.000	165	115				Baik	84,91	84,91

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
	GURUNG																			
11	D.I. TANJUNG (Sei Mapat)	50	65,28	SD	1	1						3.000		100				Rusak Berat	0,00	0,00
	JUMLAH	225	245,65		5	13	6	1		0	270	12.800		1438			10		180,37	180,37
E	KECAMATAN BUNUT HULU																			
12	D.I. SUNGAI BESAR	75	145,26	ST	1	4					55	2.855	40	250			3	Rusak Sedang	91,46	91,46
13	D.I. MUNCINI	75	33,62	SD	1	1			4			3.000	90	118				Baik	33,62	33,62
14	D.I. MUNCINII (Karya Baru)	60	50,00	SD	1	3	2					1.890		106				Baik	50,00	50,00
15	D.I. MUNCIN TENGAH (Sei Mucin)	80	39,28	SD	1	3	1				300	2.700						Rusak Sedang	25,00	25,00
16	D.I. SEMANGUT	50	75,00	SD	1	1					50	1.500						Rusak Ringan	60,00	60
17	D.I. SUKA	75	75,27	SD		2												Baik	75,25	75,25

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
	BERINGIN																			
	JUMLAH	415	418,43		5	14	3		4		405	11.945	130	474			3		335,33	335,33
F	KECAMATAN BOYAN TANJUNG																			
18	D.I. USAHA BARU(Sei Pemawan)	100	97,61	SD	1	2						2.000						Baik	97,61	97,61
19	D.I. RIAM MENGELAI	20	11,82	SD	1	2						2.500	100	150				Rusak Berat	0,00	0,00
20	D.I. MENIN	86	145,95	ST	2	2						3.850		150				Rusak Berat	0,00	0,00
21	D.I. SRI WANGI	40	23,35	ST	1	2					60	2.280						Rusak Ringan	20,00	20,00
	JUMLAH	246	278,73		5	6					60	10.630	100	300					117,61	117,61
G	KECAMATAN PENGKADAN																			
22	D.I. RIAM PANJANG	200	78,36	ST	3	5	2	2				2.400		260				Rusak Sedang	50	50,00

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
23	D.I. SUKA RAMAI	200	18,00	ST	3	3	1				83	1.917	100	200				Rusak Berat	10	10,00
24	D.I. MENENDANG	75	33,68	SD	1	2						3.000		200				Baik	33,68	33,68
25	D.I. PEDIAN	45	45,00	SD	1	2	4	1				1.000						Baik	45,00	45,00
26	D.I. MAWAN	40	24,68	SD	1	4						931		150				Baik	24,68	24,68
27	D.I. REPUN	30	20,20	SD	1	1						671						Rusak Berat	0,00	0,00
28	D.I. BUAK LIMBANG	50	50,00															Rusak Berat	0,00	0,00
	JUMLAH	640	269,92		10	17	7	3				9.919		810					163,36	163,36
H	KECAMATAN HULU GURUNG																			
29	D.I. LUBUK ANTUK	325	415,60	ST	9	15						10.700		690				Baik	415,60	415,60
30	D.I. LANDAU KUMPANG	120	82,63	ST	4	10	2	9	1	1.000		11.000	14	550	9.000		34	Rusak Sedang	62,18	62,18

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
31	D.I. NANGAYEN	211	225,10	ST	5	2	9					7.750	304	250				Rusak Berat	50,00	50,00
32	D.I. LANDAU SERAWAK	30	30,00	ST	2	3					45	1.955		150				Rusak Sedang	20,00	20,00
33	D.I. MUBUNG	60	50,00	SD	2	5						3.000		50				Rusak Ringan	40,00	40,00
34	D.I. EMPEREJUK	125	50,00	SD	2	4	1	1	1			2.050		450				Baik	46,50	46,50
35	D.I. SENAI	150	100,00	SD	1	8		1	1		200	3.800		100				Rusak Berat	50,00	50,00
36	D.I. BUKIT KERAI	50	50,00	SD	1	2	1		1			4000		150				Baik	50,00	50,00
37	D.I. KEDUAI	40	9,76	SD	1	1	1	1				1.000		50				Rusak Berat	5,00	5,00
38	D.I. BUGANG	40	40,00	SD	2	3					50	2.290		160				Baik	40,00	40,00
39	D.I. BUGANG II	15	15,00	SD	1	2						1000		60				Baik	15,00	15,00
40	D.I. SEI MEDANG	40	22,05	SD	1	1						800						Baik	22,05	22,05

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
41	D.I. PARANG	100	41,66	SD	1							1.000						Baik	41,66	41,66
42	D.I. NANGATAMAN	15	12,88	ST	1	2						2.000						Baik	12,88	12,88
43	D.I. LIDI	50	36,35	ST	4							2.143						Baik	35,00	35,00
44	D.I. SEMIRAN KOMPLEK	35	19,70	SD	2	1						3.000						Baik	19,70	19,70
45	D.I. BATU BUIN SEI MEBAK	45	40,26	SD	1			1				2000						Rusak Sedang	30,00	30,00
46	D.I. MALI	59	43,80	SD	1	9					180	370	1020					Baik	43,80	43,80
	JUMLAH	1.510	1.284,79		41	68	14	13	4	1.000	475	59.858	1.338	2660	9.000		34		999,37	999,37
I	KECAMATAN SEBERUANG																			
47	D.I. LAONG SEJIRAM	200	192,65	ST	1	5	3	3			350	2.650		250			50	Rusak Berat	73,00	73,00
48	D.I. NANGALOT	50	28,65	SD	1	2					100	1.000		150				Rusak Berat	10,00	10,00
49	D.I. LANDAU	30	30,00	SD	2	4					100	1.900						Baik	30,00	30,00

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
50	D.I. GURUNG	60	60,00	SD	2	5					100	1.900		200				Rusak Berat	30,00	30,00
51	D.I. SEI RUSA	45	24,32	SD	1	2					100	2.900		200				Baik	24,32	24,32
52	D.I. BANYU	60	60,00	SD		2						1.000						Rusak Sedang	40,00	40,00
	JUMLAH	445	395,62		7	20	3	3			750	11.350		800			50		207,32	207,32
J	KECAMATAN SILAT HULU																			
53	D.I. NANGANGERI (Sei Segak)	140	110,00	ST	2	7	8	8			300	8.000		400			75	Rusak Berat	50,00	50,00
54	D.I. LANDAU RANTAU	50	8,53	SD	1	2	1	1				2.000						Rusak Berat	4,00	4,00
55	D.I. LUBUK RUBIN	50	50,00	SD	1	3					100	1.750		100				Rusak Berat	10,00	10,00
56	D.I. SEI BESAI	35	11,86	SD	1	3						800						Rusak Berat	3,00	3,00
57	D.I. RIAM TAPANG	75	44,60	SD	1	2						1.000	600					Rusak Berat	20,00	20,00
	JUMLAH	350	224,99		6	17	9	9			400	13.550	600	500			75		87,00	87,00
K	KECAMATAN																			

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
	EMBALOH HULU																			
58	D.I. PINJAUAN (Sei Margura n)	150	139,70	SD	1	5					390	5.000					200	Rusak Berat	15	15,00
59	D.I. APAN	600	519,16	SD	1							1.930	10	220				Rusak Berat	272,00	272,00
60	D.I. TOALANG	450	60,00	ST	1	2						1.500						Baik	54,79	54,79
61	D.I. SUNGAI UTIK	90	76,44	SD	1	1						1.450		115				Rusak Ringan	65	65,00
	JUMLAH	1290	795,30		4	8					390	9.880	10	335			200		406,79	406,79
L	KECAMATAN BATANG LUPAR																			
62	D.I. UKIT - UKIT	200	200,00	ST	1	14					1.013	6.000						Rusak Berat	102,97	102,97
63	D.I. TEMATUK (Sei Tematuk)	150	125,39	ST	1	5					220	8.000			5.000	1.000	100	Rusak Ringan	103,21	103,21
64	D.I. SEPAN TEKALONG	20	14,20	ST	1	1						2.500				1.000	30	Rusak Berat	4,00	4,00

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
65	D.I. SUNGAI SEDIK (Sei Empesuk)	120	155,48	SD	1	2						2.430		70				Baik	155,48	155,48
66	D.I. SUNGAI ABAU	60	55,47															Baik	55,47	55,47
	JUMLAH	550	550,54		4	22					1.233	18.930		70	5.000	2.000	130		421,13	421,13
M	KECAMATAN BADAU																			
67	D.I. BERANGAN	50	50,00			8						1.500		130				Rusak Berat	0,00	0,00
68	D.I. TANGIT	50	15,00		1						100			100				Rusak Berat	0,00	0,00
69	D.I. SERIANG	25	25,00		2						50	2.796		50				Rusak Berat	0,00	0,00
	JUMLAH	675	640,54		5	30					1.333	20.430		350	5.000	0	0		0,00	0,00
N	KECAMATAN SELIMBAU																			
70	D.I. GERAYAU	35	10,00	SD	2							981						Baik	10,00	10,00
	JUMLAH	35	10,00		2	0	0					981		0					10,00	10,00

NO	NAMA D.I. / D.R.	LUAS	LUAS	TINGKAT	BANG.UTAMA	BANGUNAN PELENGKAP(BH)				SAL. PEMBAWA PREMIER (M)		SAL. PEMBAWA SEKUNDER (M)			SAL. TERSIER (M)	SALURAN	TANGGUL	KONDISI	LUAS IRIGASI	AREAL SAWAH
		POTENSIAL	FUNGSIONAL	JARINGAN	BENDUNG/	BAGI / SADAP /	TALANG	GORONG 2	TERJUN	SALURAN	SALURAN	SALURAN	SALURAN DENGAN	SALURAN	SALURAN	PEMBUANG			KONDISI BAIK	MENDAPAT PENGAIRAN
		HA	Ha	T / ST / SD	EMBUNG	BOX				TANAH	PASANGAN	TANAH	PIPA	PASANGAN	TANAH	(M)	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		21
O	KECAMATAN SUHAID																			
71	D.I. KERENGAS	60	50,00	SD	1	2						2.000						Rusak Berat	25	25
	JUMLAH	60	50,00		1	2						2.000		0					25	25
P	KECAMATAN PURING KENCANA																			
72	D.I. SUNGAI BEMBAN	20	20,00	SD	1	2						2.000		100				Rusak Berat	12	12
_	JUMLAH	20	20,00		1							2.000		100					12	12
Q	KECAMATAN SEMITAU																			
73	D.I. KENERAK	40	40,00	SD	1	6					200	1.800		200				Rusak Berat	19,00	19,00
	JUMLAH	40	40,00		1	2						2000							19,00	19,00
	JUMLAH D .I. : 73	7.686	6.166	ST/SD	103	287	59	45	65	4.000	5.606	213.811,00	2.248	8.897	41.400	2.000	512	Rusak Berat	4.213	4213

2.3.1.3.2. Penataan Ruang

Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 1 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014-2034 dimana dalam perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruangwilayah yang dilakukan meliputi :

a. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
b. pengembangan ekowisata;
c. pengembangan agropolitan;
d. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
e. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
f. pengembangan kawasan perbatasan;
g. pengembangan infrastruktur;
h. penanganan kawasan rawan bencana; dan
i. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata.Upaya tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk masing-masingpemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentinganmasyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kabupaten Kapuas Hulu dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR).Hingga tahun2020 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 1 dokumen, yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Putussibau.

Terkait perizinan di Kabupaten Kapuas Hulu rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang Tahun 2015-2019 dari 0,24 pada Tahun 2016 menjadi 0,23 pada Tahun 2019.

Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Tahun 2019 jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 616 izin.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan,ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2019 Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 13.204 rumah dan layak huni sebanyak 32.899 rumah. Dari sisi ketersediaan fasilitas kelistrikan, maka sebanyak 75,89 persen rumah tangga di Kabupaten Kapuas Hulu telah menikmati listrik PLN dan sebanyak 20,13 persen dapat mengakses listrik Non PLN. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa masih terdapat 3,98 persen rumah tangga yang belum mendapatkan akses fasilitas listrik baik PLN maupun Non PLN.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1. Penanggulangan Bencana

Dalam Undang –Undang Dasar 1945 yang di tegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadapap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan

Pancasila. Dinyatakan pula dalam Undang –Undang tersebut bahwa penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha,organisasi non-pemerintah, Internasional, maupun pemamngku kepentingan (stakeholders) lainya. Oleh karenanya landasan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan resiko bencana (PRB) Secara terencana, sistimatis dan menyeluruh. Mencermati Kondisi Geografis, geologis, dan demografis, pada kenyataanya wilayah kabupaten kapuas hulu memiliki tingkat kerawanan masih rendah terhadap terjadinya bencana. Baik di sebabkan oleh Faktor alam dan maupun Faktor non alam. Dampak utama dari bencana dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namum kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sitimatik dan kurang koordinatif. Dimasa yang akan datang tingkat ancaman bencana akan semakin besar dengan bertambah jumlah kejadian bencana yang terjadi baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan dunia/global.

Tabel II.17.
Data Desa Rawan Bencana
Per Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK TERDAMPAK		JENIS BENCANA				KET
			PER JIWA	PER KK	BANJIR	KARHUTLA	LONGSOR	PUTING BELIUNG	
1.	PUTUSSIBAU UTARA	KEL.PUTUSSIBAU KOTA	9.235	2.804	✓	-	✓	-	RENDAH
		KEL.HILIR KANTOR	3.548	1.094	✓	-	✓	-	TINGGI
		PALA PULAU	2.197	664	✓	✓	✓	-	SEDANG
		SIBAU HILIR	2.405	836	✓	✓	✓	-	SEDANG
		SIBAU HULU	1.221	387	✓	✓	✓	-	SEDANG
		TANJUNG KARANG	639	197	✓	-	✓	-	SEDANG

		ARIUNG MENDALAM	756	242	✓	-	✓	-	SEDANG
		NANGA SAMBUS	366	177	✓	-	✓	-	SEDANG
		NANGA NYABAU	1.077	348	✓	✓	-	-	SEDANG
		NANGA AWIN	350	114	✓	✓	✓	-	RENDAH
		DATAH DIAN	802	266	✓	-	✓	-	SEDANG
		PADUA MENDALAM	528	160	✓	-	✓	-	TINGGI
		BENUA TENGAH	338	110	✓	-	✓	-	RENDAH
		TANJUNG BERUANG	569	178	✓	-	✓	-	RENDAH
		TANJUNG LASA	461	146	✓	-	✓	-	RENDAH
		JANGKANG	239	75	✓	-	-	-	SEDANG
		SELUAN	763	236	-	✓	-	-	SEDANG
		SUNGAI ULIK PALIN	684	224	✓	✓	-	-	SEDANG
		LAUK	336	98	✓	-	-	-	RENDAH
2	SELIMBAU	GUDANG HULU	1.143	390	-	✓	-	-	
		GUDANG HILIR	1.717	551	✓	-	-	-	
		DALAM	1.672	535	✓	-	-	-	
		NIBUNG	875	303	✓	-	-	-	
		PIASAK HILIR	962	302	✓	-	-	-	
		ENGKERENGAS	462	151	-	✓	-	-	
		GERAYAU	451	131	-	✓	-	-	
		BENUIS	493	145	-	✓	-	-	
		TITIAN KUALA	1.084	374	✓	-	-	-	
		SEKUBAH	316	100	-	✓	-	-	
		PIASAK HULU	754	248	✓	-	-	-	
		SEKULAT	1.396	391	-	✓	-	-	
		NANGA LEBOYAN	869	258	-	✓	-	-	
		VEGA	606	198	-	✓	-	-	
		SEMALAH	323	100	-	✓	-	-	
3	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	443	250	✓	-	-	-	
		BUNUT HULU	803	273	✓	-	-	-	
		TELUK AUR	946	215	✓	-	-	-	
		NANGA TUAN	833	223	✓	-	-	-	
		EMPANGAU	131	38	✓	-	-	-	
		UJUNG PANDANG	780	205	✓	-	-	-	
		TEMBANG	658	198	✓	-	-	-	
		BUNUT TENGAH	315	112	✓	-	-	-	
		ENTIBAB	325	65	✓	-	-	✓	
		KAPUAS RAYA	250	69	✓	-	-	-	
		EMPANGAU HILIR	142	43	✓	-	-	-	
4	SEBERUANG	BELIKAI	878	274	✓	-	-	-	
		GURUNG	730	232	✓	-	-	-	
		SEJIRAM	601	201	✓	-	-	-	
		BEKUAN	736	234	✓	✓	-	-	
		TANJUNG KELILING	678	193	✓	-	-	-	
		NANGA PALA	462	135	✓	✓	-	-	
		BATI	714	197	✓	-	-	-	
		TAJAU MADA	661	206	✓	-	-	-	
		RANYAI	837	237	-	✓	-	-	
		SENEBAN	883	261	-	✓	-	-	
		PALA KOTA	1.227	341	-	✓	-	-	
		BELIUS HARUM			-	-	-	-	

		EMPERIANG			-	-	-	-	
		JERENJANG			-	-	-	-	
		NANGA LOT			-	-	-	-	
5	BADAU	BADAU	2.933		✓	✓	-	-	
		JANTING	479		✓	✓	-	-	
		KEKURAK	492		-	✓	-	-	
		PULAU MAJANG	954		✓	✓	-	-	TINGGI
		SEBINDANG	505		-	✓	-	-	
		SEMUNTIK	255		-	✓	-	-	
		SERIANG	524		-	✓	-	-	
		TAJUM	707		-	✓	-	-	
		TINTING SELIGI	374		-	✓	-	-	
6	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	1.199	408	✓	-	-	-	
		NANGA PALIN	1.094	381	✓	-	-	-	
		NANGA LAUK	795	254	✓	-	-	-	
		KELILING SEMULUNG	658	204	✓	✓	-	-	
		PALA PINTAS	393	122	✓	✓	-	-	
		KIRIN NANGKA	925	311	✓	✓	-	-	
		UJUNG BAYUR	440	128	✓	✓	-	-	
		LAWIK	518	171	✓	✓	-	-	
		BELATUNG	620	197	✓	✓	-	-	
7	BATANG LUPAR	SEPANDAN	1.140	343	✓	✓	-	-	
		LANJAK DERAS	1.191	329	✓	✓	-	-	
		SUNGAI SENUNUK	668	213	-	✓	-	-	
		MELEMBA	362	109	✓	✓	-	-	
		SETULANG	350	116	-	✓	-	-	
		SUNGAI AJUNG	380	125	-	✓	-	-	
		SUNGAI ABAU	419	127	-	✓	-	-	
		LABIAN	779	221	✓	✓	-	-	
		MENSIAU	388	105	-	✓	-	-	
		LABIAN IRA'ANG	460	126	-	✓	-	-	
8	KALIS	NANGA SEBINTANG	566	161	✓	-	-	-	
		NANGA LEBANGAN	586	135	✓	-	-	-	
		NANGA KALIS	2.373	688	✓	✓	✓	-	
		NANGA RAUN	1.067	259	✓	-	-	-	
		NANGA TUBUK	1.276	326	✓	-	✓	-	
		NANGA DANAU	559	166	✓	-	-	-	
		RANTAU BUMBUN	406	101	✓	-	-	-	
		RANTAU KALIS	634	177	✓	-	-	-	
		KALIS RAYA	1.751	492	✓	✓	✓	-	
		TEKUDAK	1.473	419	-	✓	-	-	
		SEMERANTAU	715	210	✓	-	-	-	
		SEGIAM	342	105	✓	-	-	-	
		PENIUNG	361	103	✓	-	-	-	
		TAPANG DAAN	716	183	✓	-	-	-	
		BAHENAP			✓	-	-	-	
		RIBANG KADENG			✓	-	-	-	
		KENSURAY			-	-	-	-	
9	SEMITAU	SEMITAU HULU	2.012	592	✓	-	-	-	
		KENERAK	601	168	-	✓	-	-	

		NANGA SEBERUANG	875	235	✓	✓	-	-	
		ENTIPAN	925	273	-	✓	-	-	
		KENEPAI KOMPLEK	486	128	-	✓	-	-	
		SEMITAU HILIR	1.211	431	✓	-	-	-	
		NANGA KENEPAI	478	149	✓	✓	-	-	
		TUA ABANG	546	156	-	✓	-	-	
		NANGA LEMEDAK	778	218	✓	✓	-	-	
		MARSEDAN JAYA	718	211	✓	-	-	-	
		PADUNG KUMANG	512	133	-	✓	-	-	
		SEKEDAU	511	141	-	✓	-	-	
10	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	687	213	✓	-	-	-	
		UJUNG SAID	662	211	✓	-	-	-	
		UJUNG JAMBU	1.014	300	✓	-	-	-	
		JONGKONG KIRI HULU	1.857	600	✓	-	-	-	
		JONGKONG KIRI TENGAH	886	268	✓	-	-	-	
		JONGKONG KIRI HILIR	921	308	✓	-	-	-	
		JONGKONG TANJUNG	583	182	✓	-	-	-	
		JONGKONG KANAN	625	210	✓	-	-	-	
		JONGKONG PASAR	1.075	323	✓	-	-	-	
		KANDUNG SULI	510	154	✓	-	-	-	
		BONTAI	660	204	✓	-	-	-	
		NANGA SERIAN	771	231	✓	-	-	-	
		KARYA BARU	502	161	✓	-	-	-	
		NANGA TEMENUNG	489	153	✓	-	-	-	
11	SILAT HILIR	PERIGI	1.810	577	✓	-	-	-	
		BARU	1.692	504	✓	-	-	-	
		PANGERAN	1.348	417	✓	-	-	-	
		SENTABAI	1.483	421	✓	✓	-	-	
		PENAI	2.098	546	-	✓	-	-	
		NANGA NUAR	1.389	410	✓	-	-	-	
		BONGKONG	1.206	380	✓	✓	-	-	
		RUMBIH	1.195	358	✓	✓	-	-	
		SEBERU	1.780	507	-	✓	-	-	
		SUNGAI SENA	1.776	567	✓	-	-	-	
		BUKIT PENAI							
		MIAU MERAH							
		SETUNGGUL							
12	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	1.291	381	✓	-	-	-	
		BOYAN TANJUNG	981	330	✓	-	-	-	
		RIAM MENGELAI	1.423	423	✓	-	-	-	
		NANGA SANGAN	1.216	366	✓	-	-	-	
		SRI WANGI	601	180	✓	-	-	-	
		NANGA BOYAN	565	168	✓	-	-	-	
		NANGA BETUNG	734	296	✓	-	-	-	
		MUJAN	1.157	335	✓	-	-	-	
		NANGA JEMAH	908	264	✓	-	-	-	
		TUBANG JAYA	551	172	✓	-	-	-	

		KARYA MAJU	553	239	✓	-	-	-	
		LANDAU MENTAIL	590	165	✓	-	-	-	
		DELINTAS KARYA	712	207	✓	-	-	-	
		TELUK GERUGUK	576	156	✓	-	-	-	
		NANGA RET			✓				
		PEMAWAN			✓				
13	MENTEBAH	KEPALA GURUNG			✓	-	-	-	
		NANGA MENTEBAH	2.618		✓	✓	-	-	
		TANJUNG	970		✓	-	-	-	
		TANJUNG INTAN	1.584		✓	-	✓	-	
		TANGAI JAYA	818		✓	-	-	-	
		MENAREN	1.402		✓	-	-	-	
		TEKALONG			-	✓	-	-	
		SUKA MAJU			✓	-	-	-	
14	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK							
		JARAS							
		MELAPI							
		KEDAMIN DARAT							
		KAMPUNG JATI							
		SAYUT							
		URANG UNSA							
		SUKA MAJU							
		CEMPAKA BARU							
		BERINGIN JAYA							
		BUNGAN JAYA							
		TANJUNG LOKANG							
		KEREHO							
		INGKO' TAMBE							
		KEDAMIN HILIR							
		KEDAMIN HULU							
15	BIKA	BIKA	242	791	-	-	-	-	-
		JELEMUK	562	160	-	-	✓	-	TINGGI
		MELAPI MANDAY	375	106	-	-	✓	-	TINGGI
		TELUK SINDUR	915	229	-	-	-	-	-
		BIKA HULU	965	270	-	-	✓	-	TINGGI
		NANGA MANDAY	423	115	✓	-	-	-	TINGGI
		PENYELUANG	145	522	✓	-	-	-	TINGGI
		JONGKONG MANDAY	277	99	✓	-	-	-	TINGGI
16	BUNUT HULU	NANGA SURUK			✓			-	
		TEMUYUK			✓			-	
		NANGA SEMANGUT			✓			-	
		NANGA DUA						-	
		SELAUP						-	
		RIAM PIYANG			✓			-	
		NANGA PAYANG						-	
		BATU TIGA						-	
		SEMANGUT UTARA			✓			-	
		SEGITAK						-	
		NANGA KELIBANG			✓			-	
		SUNGAI BESAR						-	

		BAKONG PERMAI			✓			-	
		BERINGIN						-	
		PANTAS BERSATU			✓			-	
17	PENGKADAN	KERANGAN PANJANG			✓				
		MAWAN			✓				
		MARTA DANA							
		BUAK LIMBANG							
		RIAM PANJANG			✓				
		PERMATA			✓				
		HULU PENGKADAN							
		PINANG LAKA							
		PENGKADAN HILIR			✓				
		SASAN			✓				
		SIRA JAYA			✓				
18	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS							
		BANUA UJUNG							
		BATU LINTANG							
		LANGAN BARU							
		MENUA SADAP							
		PULAU MANAK							
		RANTAU PRAPAT							
		SAUJUNG GILING MANIK							
		TAMAO							
		ULAK PAUK							
19	EMPANANG	BAJAU ANDAI							
		KELING PANGGAU							
		KUMANG JAYA							
		LAJA SANDANG							
		NANGA KANTUK							
		TINTIN PENINJAU							
20	HULU GURUNG	BERINGIN							
		BUGANG			✓				
		KARYA MANDIRI			✓				
		KELAKAR			✓				
		LANDAU KUMPANG			✓				
		LUBUK ANTUK							
		MENTAWIT							
		MUBUNG							
		NANGA TEPUAI			✓				
		NANGA YEN			✓				
		PARANG							
		SEJAHTERA MANDIRI			✓				
		SIMPANG SENARA			✓				
		TANI MAKMUR							
		TUNAS MUDA							
21	PURING KENCANA	KANTUK ASAM							
		KANTUK BUNUT							

		LANGAU							
		MERAKAI PANJANG							
		SUNGAI ANTU							
		SUNGAI MAWANG							
22	SUHAID	JONGKONG HULU							
		KERENGAS							
		LAUT TAWANG							
		LUBUK PENGAIL							
		MADANG PERMAI							
		MANTAN							
		MENAPAR							
		MENSUSAI							
		NANGA SUHAID							
		TANJUNG							
		TANJUNG HARAPAN							
23	SILAT HULU	BELIMBING							
		DANGKAN KOTA			✓				
		ENTEBI			✓				
		LANDAU BADAI			✓				
		LANDAU RANTAU			✓				
		LEBAK NANJAH			✓				
		NANGA DANGKAN			✓				
		NANGA LUAN			✓				
		NANGA LUNGU			✓				
		NANGA NGERI			✓				
		PERJUK							
		RIAM TAPANG			✓				
		SELANGKAI			✓				
		SELIMU			✓				
		TOTAL	**146.323**	**41.264**					

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

2.3.1.5.2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelengaraan pembangunan didaerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan didaerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi terhadap upaya penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.18.
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN UPAYA PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI
Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS Terlatih	25%	36%
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran PERDA	65%	77%
	Persentase Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	65%	65%
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0,98%	103%

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.

d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.1.6. Sosial

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial, yang akhirnya akan meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun secara sosial memadai dan wajar. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 25 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria yaitu ;

1. Anak Berhadapan dengan Hukum
2. Anak terlantar
3. Anak dengan kedisabilitasan
4. Anak jalanan
5. Anak korban tindak kekerasan
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
7. Anak Balita terlantar
8. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan
9. Fakir miskin
10. Gelandangan
11. Korban bencana alam
12. Korban bencana sosial

13. Korban bermasalah sosial psikologis
14. Kelompok minoritas
15. Korban penyalahgunaan nafza
16. Korban trafficking
17. Korban tindak kekerasan
18. Lanjut usia terlantar
19. Orang dengan HIV/AIDS
20. Penyandang disabilitas
21. Pemulung
22. Pengemis
23. Pekerja Migran bermasalah sosial
24. Perempuan rawan sosial ekonomi
25. Tunasusila

Tabel II.19.
CAPAIAN PELAYANAN TERHADAP PMKS
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

No	Indikator	2020		
		Target	Capaian	Realisasi
1.	PMKS yang mendapatkan pelayanan	94.531	24.578	26 %

Masih rendahnya cakupan pelayanan PMKS di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ;

Faktor budaya pada sebagian masyarakat kapuas hulu yang masih merasa malu apabila anggota keluarganya dianggap bermasalah secara sosial (PMKS) sehingga banyak PMKS yang tidak terdaftar dan tidak terlayani. Selain itu, rendahnya cakupan pelayanan terhadap PMKS ini disebabkan masih lemahnya koordinasi pada tingkat desa sampai kecamatan terkait pelayanan PMKS ini, sehingga banyak PMKS yang tidak terdata yang akhirnya tidak terlayani. Selain itu, penyebab masih rendahnya pelayanan terhadap PMKS ini adalah;

1. Belum tersedianya fasilitas yang ramah pada penyandang disabilitas di tempat-tempat umum termasuk perkantoran milik pemerintah maupun swasta termasuk difasilitas pendidikan
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid 19 maupun karena pemotongan anggaran dinas (*Refocussing*)

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan, serta bisa memicu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri.Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang menyeluruh di semua sector yaitu perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.

Tabel II.20.
Data Pencari Kerja Tahun 2016-2020
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	SD	1	3	2	6	34	46
2	SMP	3	2	4	2	55	66
3	SMA	36	35	16	64	218	369
4	SMK	20	5	2	28	71	126

5	Diploma	32	101	40	35	82	290
6	Universitas	30	31	61	51	87	260
Jumlah		**122**	**177**	**125**	**186**	**547**	**1.157**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Merujuk pada tabel di atas, jumlah pencari kerja terbanyak masih didominasi oleh pencari kerja yang berpendidikan rendah SD, SMP, SMA, SMK dengan jumlah 607 orang dan jenjang pendidikan diploma dan unversitas berjumlah 550 orang. Kondisi ini dikarenakan lowongan-lowongan kerja yang tersedia hanya dengan posisi jabatan sebagai buruh/pekerja kasar baik di perusahaan kecil, sedang dan besar. Sementara posisi jabatan adminitrasi tentunya memiliki kualifikasi pendidikan tertentu sehingga jika dibandingkan dengan posisi jabatan yang ada secara tidak langsung jumlahnya pun terbatas. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bidang Tenaga Kerja telah berupaya melalui proses pelatihan bagi calon tenaga kerja sehingga mereka memiliki keterampilan sebelum memasuki dunia kerja atau perusahaan dimana mereka akan bekerja. Berbagai pelatihan telah dilakukan Bidang Tenaga Kerja seperti terlihat pada tabel di berikut ini.

Tabel II.21.
Data Pelatihan Calon Tenaga Kerja Tahun 2016-2021

No.	Jenis Pelatihan	Tahun						Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tata Rias & Salon Kecantikan	16	0	0	0	0	10	26
2	Keterampilan Menjahit	10	10	10	0	0	0	30
3	Mengemudi Kendaraan Roda Empat	0	0	0	20	35	0	55
4	Kewirausahaan Tenaga Kerja Muda	0	40	60	0	0	0	100
5	Bengkel Sepeda Motor	10	0	0	0	0	7	17
6	Bengkel Las Listrik	0	0	0	0	10	0	10
Jumlah		**36**	**50**	**70**	**20**	**45**	**17**	**238**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, telah banyak program pelatihan bagi calon tenaga kerja yang telah diberikan bagi calon pencari kerja sebelum bekerja ke jasa pemberi kerja. Dalam proses rekruitmen calon peserta pelatihan bagi calon

tenaga kerja, mereka harus terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pada Bidang Tenaga Kerja dengan persyaratan harus memiliki KTP, berkelakuan baik (SKCK), ijasah terakhir dan mengisi biodata pelatihan yang akan diikuti. Untuk jenis pelatihan bukan hanya yang tertera pada tabel di atas saja melainkan banyak pelatihan lainnya yang berbasis kompetensi bagi dunia usaha. Bidang Tenaga Kerja akan menghimpun minat para calon pelatihan tenaga kerja sehingga untuk kemudia diprogramkan dalam rencana kerja bidang dan dinas.

Melihat kuota pelatihan yang masih jauh rendah jika dibandingkan data masyarakat yang meminta program pelatihan melalui usulan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Hal ini hanya mampu dipenuhi jika anggaran juga memenuhi untuk melaksanakan berbagai jenis pelatihan serta kuota pelatihan yang lebih banyak lagi demi menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan bersertifikasi. Sasaran peserta pelatihan yang selama ini dilakukan adalah masyarakat kurang mampu, miskin, pengangguran dan masuk dalam usia kerja muda dengan rentang usia 17-30 tahun. Hal ini diprasyaratkan demi tersedia sumber daya manusia pekerja yang muda dan handal serta memiliki kompetensi terhadap kebutuhan dunia kerja.Tentunya implikasi dari pasca pelatihan adalah dapat bekerja pada lowongan kerja yang tersedia dan mampu menciptkan lapangan kerja baru melalui usaha mandiri dan kreatif.Berikut data-data penempatan tenaga kerja pada jasa pemberi kerja berdasarkan posisi jabatan baik di perusahaan kecil, sedang dan besar seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.22.
Data Penempatan Tenaga Kerja 2016-2020
Berdasarkan Posisi Jabatan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Asisten	1	2	1	1	1	6
2	Mandor	3	2	4	3	1	13
3	Administrasi	2	1	4	3	3	13
4	Akuntansi	2	3	1	2	1	9
5	Satpam	3	5	2	3	2	15
6	Sopir	5	7	4	6	3	25
7	Marketing	11	15	8	7	0	41
8	Kasir	2	1	3	2	0	8
9	Teknisi	2	3	5	5	3	18

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
10	Gudang	7	5	4	8	2	26
11	Perawatan Tanaman	28	52	47	66	17	210
12	Pemanen	12	17	7	11	5	52
13	Tenaga Medis	2	1	1	2	1	7
14	Tenaga Pendidik	2	5	3	1	0	11
15	Buruh Pabrik	5	2	3	7	186	203
Jumlah		**87**	**121**	**97**	**127**	**225**	**657**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Sehubungan data diatas, jelas bahwa pihak perusahaan sebagai jasa pemberi kerja telah andil dalam menciptakan dan menyedia lowongan kerja bagi para pencari kerja dengan posisi jabatan yang beragam sesuai kualifikasi pendidikan calon tenaga kerja. Adapun perusahan-perusahaan kecil, sedang dan besar sebagai jasa pemberi kerja antara lain adalah PT. Sinar Mas Grup, PT. Kencana Grup, PT. Bia-KAA, CU Tilung Jaya, Mini Market, Dealer Honda, dan Dealer Yamaha. Berikut data penempatan tenaga kerja terlihat padat tabel di bawah ini.

Tabel II.23.
Data Penempatan Tenaga Kerja 2016-2020
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	SD	0	1	0	2	12	15
2	SMP	1	0	0	0	21	22
3	SMA	21	30	1	44	157	253
4	SMK	17	3	1	12	18	51
5	Diploma	22	71	38	27	8	166
6	Universitas	26	16	57	42	9	150
Jumlah		**87**	**121**	**97**	**127**	**225**	**657**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Tabel II.24.
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja	156.080	170.770	181.679	190.183	192.744
2	Angkatan Kerja	130.762	129.667	142.409	146.309	151.491
3	Penduduk Yang Bekerja	127.458	126.801	140.164	142.707	146.327
4	Pengangguran	3.304	2.886	2.245	3.602	5.164
5	Bukan Angkatan Kerja	42.936	41.103	39.270	43.874	41.253
6	Lowongan Kerja	100	150	150	150	200

7	Pencari Kerja	122	177	125	186	547
8	Pencari kerja yang ditempatkan	87	121	97	127	225
9	TPAK	83.78%	75.93%	78.38%	76.93%	78.60%
10	TPT	2.53%	2.21%	1.58%	2.46%	3.41%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Kondisi Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang dihimpun dari data kecamatan tahun 2016-2020 bertambah dalam setiap tahunnya. Tahun 2016 Penduduk Usia Kerja berjumlah 156.080 orang, Tahun 2017 berjumlah 170.770 orang, tahun 2018 berjumlah 181.679 orang, tahun 2019 berjumlah 190.183 orang dan tahun 2020 berjumlah 192.744 orang. Sedangkan jumlah Angkatan Kerja tahun 2016 berjumlah 130.762 orang (83,78%), tahun 2017 berjumlah 129.667 orang (75,93%), tahun 2018 berjumlah 142.409 orang (78,38%), tahun 2019 berjumlah 146.309 orang (76,93), tahun 2020 berjumlah 151.491 orang (78,60%) dari total penduduk usia kerja.

Kondisi Penduduk yang bekerja tahun 2016 berjumlah 127.458 orang (97,47%), tahun 2017 berjumlah 126.801 orang (97,79%), tahun 2018 berjumlah 140.164 orang (98,42%), tahun 2019 berjumlah 142.707 orang (97,54%) dan tahun 2020 berjumlah 146.327 orang (96,59%) dari total angkatan kerja. Kemudian angka pengangguran tahun 2016 berjumlah 3.304 orang (2,53%), tahun 2017 berjumlah 2.886 orang (2,21%), tahun 2018 berjumlah 2.245 orang (1.58%), tahun 2019 berjumlah 3.602 orang (2.46%), dan tahun 2020 berjumlah 5.164 orang (3.41%) dari total angkatan kerja. sedangkan yang bukan termasuk angkatan kerja masih berjumlah banyak dengan rincian tahun 2016 berjumlah 42.936 orang, tahum 2017 berjumlah 41.103 orang, tahun 2018 berjumlah 39.270 orang, tahun 2019 berjumlah 43.874 orang dan tahun 2020 berjumlah 41.253 orang. Bukan angkatn kerja merupakan kondisi orang yang masih dalam tahap pendidikan/sekolah, mengurus rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang bersifat pribadi.

Sepanjang Tahun 2016-2020 jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 1.157 orang dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 46 orang, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

(SMP) berjumlah 66 orang, Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 369 orang, Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 126 orang, Jenjang Diploma berjumlah 290 orang, dan Jenjang Universitas berjumlah 260 orang. Tahun 2016 pencari kerja berjumlah 122 orang, tahun 2017 berjumlah 177 orang, tahun 2018 berjumlah 125 orang, tahun 2019 berjumlah 186 orang dan tahun 2020 berjumlah 547 orang. Dari 1.157 orang pencari kerja yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu telah ditempatkan sejumlah 657 orang yang tersebar dibeberapa perusahaan, baik perusahaan kecil, sedang dan besar. Adapun posisi jabatan yang didapatkan selamat proses penempatan diantaranya adalah posisi asisten, mandor, administrasi, akuntansi, satpam, sopir, marketing, kasir, teknisi, gudang, perawatan tanaman, pemanen, tenaga medis, tenaga pendidik dan buruh pabrik. Untuk penempatan tahun 2016 telah ditempatkan 87 orang, tahun 2017 berjumlah 121 orang, tahun 2018 berjumlah 97 orang, tahun 2019 berjumlah 127 orang dan tahun 2020 berjumlah 225 orang.

Sedangkan kondisi lowongan kerja yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan oleh Bidang Tenaga Kerja tahun 2016-2020 berjumlah 750 lowongan kerja atau peluang kerja baik diperusahaan kecil, sedang dan besar. Adapun rinciannya tahun 2016 jumlah lowongan kerja 100 lowogan kerjan, tahun 2017 berjumlah 150, tahun 2018 berjumlah 150, tahun 2019 berjumlah 150, dan tahun 2020 berjumlah 200 lowongan kerja dalam kabupaten dan 25 lowongan kerja di luar Kabupaten Kapuas Hulu.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah terdata dalam program wajib lapor ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2020 berjumlah 392 perusahaan yang terdiri dari perusahaan kecil berjumlah 19, sedang berjumlah 12 dan besar berjumlah 361 perusahaan. Sedangkan jumlah tenaga kerja penerima upah pada perusahaan sampai tahun 2020 berjumlah 6.926 orang. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan sampai tahun 2020 berjumlah 279 perusahaan dengan kepesertaan yang aktif berjumlah 15.729 orang. Untuk Perselisihan Hubungan Industrial yang layak diproses sesuai aturan yang berlaku tahun 2020-2021 berjumlah 5 kasus dan telah dinyatakan selesai.Untuk kondisi Upah Minimum

Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang tahun 2013-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.25.
Perkembangan UMK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013-2020

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UMK (Rp)	1.100.000	1.475.000	1.600.000	1.784.000	2.028.000	2.204.650	2.381.700	2.483.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Upah Minimum Kabupaten pada Kabupaten Kapuas Hulu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Proses usulan UMK Kabupaten merujuk pada hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap kecamatan sehingga kemudian diambil kesimpulan terhadap survei dimaksud yang menjadi dasar penetapan usulan UMK Kabupaten Kapuas Hulu oleh Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten kapuas hulu cenderung mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari aspek pengetahuan menunjukkan sudah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel II.26.
CAPAIAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	11	11	16	14
2	Kasus yang terselesaikan sampai tingkat Pengadilan Negeri	10	11	14	12
3	Persentase Kasus yang terselesaikan sampai tingkat Pengadilan Negeri	90,9 %	100 %	87 %	85 %

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terjadi trend peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kasus yang dilaporkan pada dasarnya belum bisa menggambarkan kasus yang terjadi dimasyarakat yang sesungguhnya. Beberapa kendala yang menjadi penyebab masih banyaknya kasus yang tidak terlaporkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut diantaranya ;

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-undang perlindungan anak dan perempuan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum terbentuknya sarana dan mekanisme pengaduan kasus sampai pada tingkat desa
3. Belum optimalnya pelaksanaan program SIMFONI dikabupaten Kapuas Hulu
4. Masih tingginya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan
5. Belum terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pada tabel diatas juga menggambarkan belum semua kasus bisa diselesaikan sampai pada tingkat pengadilan negeri, selain dikarenakan antara pihak korban dan pelaku yang menempuh jalan damai, namun ada juga penyebab lain sehingga masih lemahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya adalah;

1. Belum adanya kesepakatan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pihak Pengadilan Negeri terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (MOU)
2. Belum tersedianya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Belum Tersedianya Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)

2.3.2.3. Pangan

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling hakiki dan

mendasar bagi sumberdaya manusia suatu bangsa, pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk mendorong aktifitas sehari-hari sepanjang waktu.

Skor Pola Pangan Harapan telah menjadi indikator yang cukup strategis dibidang ketahanan pangan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel II.27.
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Realiasi Sektor Pangan

No.	indikator Kinerja Program (Outcome)	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	PANGAN					
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	71.80	75.40	77.90	71.60	69.56
2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita	54.00	53.90	54.63	67.48	113.94

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Berdasarkan Skor aktual PPH yang dicapai pada Tahun 2020 adalah 69,56 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yaitu 71,60. Sementara target skor yang harus dicapai berdasarkan RPJMD tahun 2020 yaitu 80,60. Dari angka tersebut terlihat dimana tingkat keberagaman konsumsi dan mutu pangan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu belum memenuhi keberagaman gizi yang seimbang dan aman. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih perlu terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perlu keberagaman konsumsi dan mutu pangan keluarga untuk mencapai nilai standar konsumsi yang ideal yaitu 100.

2.3.2.4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek danobyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanahabsente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kabupaten Kapuas Hulu terus mengalami peningkatan.Secara lengkap tanah bersertifikat di Kabupaten Kapuas Hulu dijelaskan dalam Tabel 2.87 berikut.

Tabel II.28.
Jumlah Tanah Bersertifikat Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015-2019

Jenis Hak Atas Tanah	Jumlah Sertifikat (Bidang)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hak Milik	625	1.899	3.819	12.362	8.672
HGB	8	12	1	13	21
Hak Guna Usaha	16	0	36	3	0
Hak Pakai	16	13	-	82	145
Hak Pengelolaan	0	0	0	0	0
Hak Wakaf	2	0	-	10	1

Sumber : BPN Kabuten Kapuas Hulu (diolah), 2020

Kinerja persertifikatan bidang tanah di kabupaten Kapuas Hulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 banyaknya bidang tanah bersertifikat adalah 625 bidang dalam kurunwaktu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan padatahun 2019 sebanyak 8.672 bidang di Kabupaten Kapuas Hulu sudah bersertifikat. Semakinmeningkatnya jumlah bidang tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukummasyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu wilayah yang memiliki ekosistem yang sangat beranekaragam dan membentuk lingkungan hidup yang mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan.

Secara umum, upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup di Kapuas Hulu memiliki *track record* cukup baik dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 sebesar 72,65 dengan target capaian tahun 2022 sebesar 74,41.

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020 sebesar 66,77 persen. Perhitungan tersebut diperoleh dari membandingkan Total Volume sampah yang dapat ditangani sebesar 30.020 M3/Tahun dari total volume timbunan sampah Kota Putussibau sebesar 44,963 M3/tahun. Capaian yang belum optimal ini terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta anggaran yang dimiliki, maka sampai tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu melayani di sekitar Kota Putussibau. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada Tahun 2020 sebesar 88,46 persen, Hal ini karena tidak terdapat jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap

ijin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL pada Tahun 2020 sebesar 55,56% diperoleh dari perbandingan jumlah Perusahaan yang telah dilakukan pengawasan AMDAL secara aktif sebanyak 17 (UKL UPL & AMDAL) Perusahaan dengan jumlah perusahaan yang melapor untuk pengawasan AMDAL pada Tahun 2020 sebanyak 27 perusahaan.

Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL sebesar 53,85% diperoleh dari perbandingan Usaha/Kegiatan yang menggunakan IPAL sebanyak 7 Kegiatan Usaha sedangkan jumlah Kegiatan Usaha yang seharusnya menggunakan IPAL sebanyak 13 Kegiatan Usaha.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demografi atau kependudukan mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan)penduduk. Kondisi demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Perkembangan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu dari karakteristik demografi yang terdiri dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Jumlah penduduk kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 255,298 jiwa pada tahun 2020 Semester II. Angka tersebut mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3,45 persen dari tahun sebelumnya yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 246.772 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2020 rata-rata persentase pertumbuhannya sebesar 2,34 persen seperti dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar II.21.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016-2020

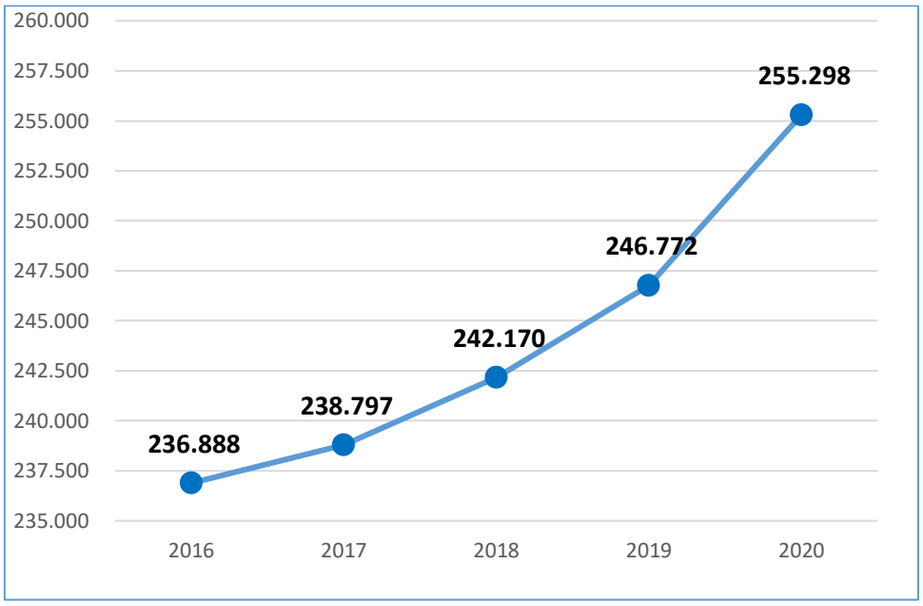

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kapuas Hulu 2020 Semester II

Tabel II.29.

Jumlah Penduduk,Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan				
1	Putussibau Utara	13,812	13,358	27,170	5,204.8	5.22	103.40%
2	Bika	2,389	2,254	4,643	395.2	11.75	105.99%
3	Embaloh Hilir	3,079	2,917	5,996	786.3	7.63	105.55%
4	Embaloh Hulu	2,667	2,572	5,239	3,457.6	1.52	103.69%
5	Bunut Hilir	4,385	4,300	8,685	844.1	10.29	101.98%
6	Bunut Hulu	7,498	7,129	14,627	1,118.1	13.08	105.18%
7	Jongkong	5,641	5,521	11,162	422.5	26.42	102.17%
8	Hulu Gurung	7,174	6,912	14,086	432.9	32.54	103.79%
9	Selimbau	6,923	6,750	13,673	1,153.9	11.85	102.56%
10	Semitau	4,850	4,516	9,366	562.7	16.64	107.40%
11	Seberuang	5,952	5,527	11,479	573.8	20.01	107.69%
12	Batang Lupar	2,784	2,714	5,498	1,332.9	4.12	102.58%

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan				
13	Empanang	1,859	1,734	3,593	547.1	6.57	107.21%
14	Badau	3,535	3,388	6,923	700.0	9.89	104.34%
15	Silat Hilir	10,452	9,646	20,098	1,177.1	17.07	108.36%
16	Silat Hulu	5,804	5,327	11,131	1,061.8	10.48	108.95%
17	Putussibau Selatan	11,900	11,481	23,381	5,352.3	4.37	103.65%
18	Kalis	7,069	6,602	13,671	1,857.8	7.36	107.07%
19	Boyan Tanjung	6,656	6,187	12,843	824.0	15.59	107.58%
20	Mentebah	5,587	5,228	10,815	781.3	13.84	106.87%
21	Pengkadan	4,833	4,615	9,448	531.2	17.79	104.72%
22	Suhaid	4,812	4,631	9,443	465.9	20.27	103.91%
23	Puring Kencana	1,221	1,107	2,328	258.7	9.00	110.30%
Jumlah		**130,882**	**124,416**	**255,298**	**29,842.0**	**8.55**	**105.20%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II

Dengan luas wilayah 29,842.0km, jumlah penduduk geografis di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020 mencapai 255,298 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 130,882 jiwa dan perempuan sebanyak 124,416 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni Kecamatan Putusibau Utara yang mencapai 27,170 jiwa dengan persentase sebesar 10.64 persen dari total penduduk Kapuas Hulu. Angka ini disusul domisili penduduk terbanyak di Kecamatan Putusibau Selatan sebanyak 23,381 jiwa dengan persentase sebesar 9.16 persen. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Puring Kecana dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 2,328 jiwa.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Hulu Gurung dengan kepadatan penduduk sebesar 32.54 Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yakni Kecamatan Embaloh Hulu dengan kepadatan penduduk sebesar1.52Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka sebagin besar penduduk Kapuas Hulu berjenis kelamin laki-laki sebesar 130,882 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 124,416 jiwa.

Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Jika dilihat persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, sebagian besar penduduk Kapuas Hulu berada pada usia muda dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk umur anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya program yang terarah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan utamanya jangka panjang.

Gambar II.22.
Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, 2020

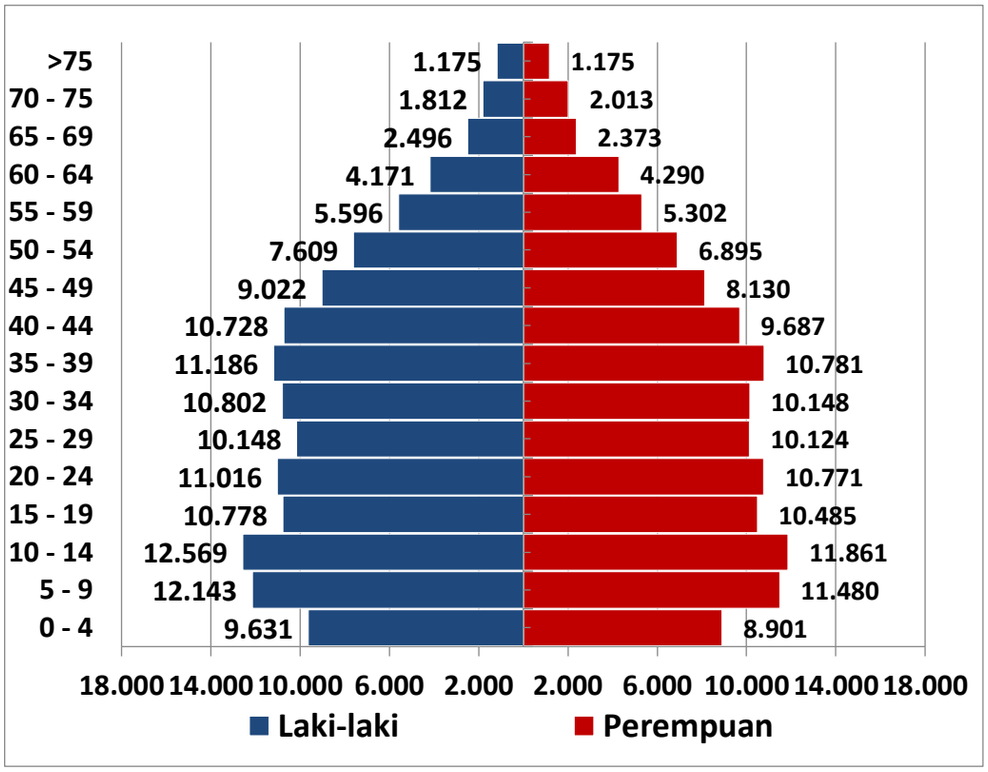

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 Semester II

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar

menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun. Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5.000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2.000 Desa Mandiri. Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, program dan kegiatan organisasi perangkat daerah hendaknya dapat mendukung capaian dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkroninasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Berikut desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel II.30.

NAMA KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN
1.	PUTUSSIBAU UTARA	KEL.PUTUSSIBAU KOTA
		KEL.HILIR KANTOR
		PALA PULAU
		SIBAU HILIR
		SIBAU HULU
		TANJUNG KARANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN
		ARIUNG MENDALAM
		NANGA SAMBUS
		NANGA NYABAU
		NANGA AWIN
		DATAH DIAN
		PADUA MENDALAM
		BENUA TENGAH
		TANJUNG BERUANG
		TANJUNG LASA
		JANGKANG
		SELUAN
		SUNGAI ULIK PALIN
		LAUK
2	SELIMBAU	GUDANG HULU
		GUDANG HILIR
		DALAM
		NIBUNG
		PIASAK HILIR
		ENGKERENGAS
		GERAYAU
		BENUIS
		TITIAN KUALA
		SEKUBAH
		PIASAK HULU
		SEKULAT
		NANGA LEBOYAN
		VEGA
		SEMALAH
3	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR
		BUNUT HULU
		TELUK AUR
		NANGA TUAN
		EMPANGAU
		UJUNG PANDANG
		TEMBANG
		BUNUT TENGAH
		ENTIBAB
		KAPUAS RAYA
		EMPANGAU HILIR
4	SEBERUANG	BELIKAI
		GURUNG
		SEJIRAM
		BEKUAN
		TANJUNG KELILING
		NANGA PALA
		BATI
		TAJAU MADA
		RANYAI
		SENEBAN
		PALA KOTA
		BELIUS HARUM
		EMPERIANG
		JERENJANG
		NANGA LOT
5	BADAU	BADAU
		JANTING
		KEKURAK

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN
		PULAU MAJANG
		SEBINDANG
		SEMUNTIK
		SERIANG
		TAJUM
		TINTING SELIGI
6	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH
		NANGA PALIN
		NANGA LAUK
		KELILING SEMULUNG
		PALA PINTAS
		KIRIN NANGKA
		UJUNG BAYUR
		LAWIK
		BELATUNG
7	BATANG LUPAR	SEPANDAN
		LANJAK DERAS
		SUNGAI SENUNUK
		MELEMBA
		SETULANG
		SUNGAI AJUNG
		SUNGAI ABAU
		LABIAN
		MENSIAU
		LABIAN IRA'ANG
8	KALIS	NANGA SEBINTANG
		NANGA LEBANGAN
		NANGA KALIS
		NANGA RAUN
		NANGA TUBUK
		NANGA DANAU
		RANTAU BUMBUN
		RANTAU KALIS
		KALIS RAYA
		TEKUDAK
		SEMERANTAU
		SEGIAM
		PENIUNG
		TAPANG DAAN
		BAHENAP
		RIBANG KADENG
		KENSURAY
9	SEMITAU	SEMITAU HULU
		KENERAK
		NANGA SEBERUANG
		ENTIPAN
		KENEPAI KOMPLEK
		SEMITAU HILIR
		NANGA KENEPAI
		TUA ABANG
		NANGA LEMEDAK
		MARSEDAN JAYA
		PADUNG KUMANG
		SEKEDAU
10	JONGKONG	PENEPIAN RAYA
		UJUNG SAID
		UJUNG JAMBU

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN
		JONGKONG KIRI HULU
		JONGKONG KIRI TENGAH
		JONGKONG KIRI HILIR
		JONGKONG TANJUNG
		JONGKONG KANAN
		JONGKONG PASAR
		KANDUNG SULI
		BONTAI
		NANGA SERIAN
		KARYA BARU
		NANGA TEMENUNG
11	SILAT HILIR	PERIGI
		BARU
		PANGERAN
		SENTABAI
		PENAI
		NANGA NUAR
		BONGKONG
		RUMBIH
		SEBERU
		SUNGAI SENA
		BUKIT PENAI
		MIAU MERAH
		SETUNGGUL
12	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU
		BOYAN TANJUNG
		RIAM MENGELAI
		NANGA SANGAN
		SRI WANGI
		NANGA BOYAN
		NANGA BETUNG
		MUJAN
		NANGA JEMAH
		TUBANG JAYA
		KARYA MAJU
		LANDAU MENTAIL
		DELINTAS KARYA
		TELUK GERUGUK
		NANGA RET
		PEMAWAN
13	MENTEBAH	KEPALA GURUNG
		NANGA MENTEBAH
		TANJUNG
		TANJUNG INTAN
		TANGAI JAYA
		MENAREN
		TEKALONG
		SUKA MAJU
14	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK
		JARAS
		MELAPI
		KEDAMIN DARAT
		KAMPUNG JATI
		SAYUT
		URANG UNSA
		SUKA MAJU
		CEMPAKA BARU

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN
		BERINGIN JAYA
		BUNGAN JAYA
		TANJUNG LOKANG
		KEREHO
		INGKO' TAMBE
		KEDAMIN HILIR
		KEDAMIN HULU
15	BIKA	BIKA
		JELEMUK
		MELAPI MANDAY
		TELUK SINDUR
		BIKA HULU
		NANGA MANDAY
		PENYELUANG
		JONGKONG MANDAY
16	BUNUT HULU	NANGA SURUK
		TEMUYUK
		NANGA SEMANGUT
		NANGA DUA
		SELAUP
		RIAM PIYANG
		NANGA PAYANG
		BATU TIGA
		SEMANGUT UTARA
		SEGITAK
		NANGA KELIBANG
		SUNGAI BESAR
		BAKONG PERMAI
		BERINGIN
		PANTAS BERSATU
17	PENGKADAN	KERANGAN PANJANG
		MAWAN
		MARTA DANA
		BUAK LIMBANG
		RIAM PANJANG
		PERMATA
		HULU PENGKADAN
		PINANG LAKA
		PENGKADAN HILIR
		SASAN
		SIRA JAYA
18	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS
		BANUA UJUNG
		BATU LINTANG
		LANGAN BARU
		MENUA SADAP
		PULAU MANAK
		RANTAU PRAPAT
		SAUJUNG GILING MANIK
		TAMAO
		ULAK PAUK
19	EMPANANG	BAJAU ANDAI
		KELING PANGGAU
		KUMANG JAYA
		LAJA SANDANG
		NANGA KANTUK
		TINTIN PENINJAU

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN
20	HULU GURUNG	BERINGIN
		BUGANG
		KARYA MANDIRI
		KELAKAR
		LANDAU KUMPANG
		LUBUK ANTUK
		MENTAWIT
		MUBUNG
		NANGA TEPUAI
		NANGA YEN
		PARANG
		SEJAHTERA MANDIRI
		SIMPANG SENARA
		TANI MAKMUR
		TUNAS MUDA
21	PURING KENCANA	KANTUK ASAM
		KANTUK BUNUT
		LANGAU
		MERAKAI PANJANG
		SUNGAI ANTU
		SUNGAI MAWANG
22	SUHAID	JONGKONG HULU
		KERENGAS
		LAUT TAWANG
		LUBUK PENGAIL
		MADANG PERMAI
		MANTAN
		MENAPAR
		MENSUSAI
		NANGA SUHAID
		TANJUNG
		TANJUNG HARAPAN
23	SILAT HULU	BELIMBING
		DANGKAN KOTA
		ENTEBI
		LANDAU BADAI
		LANDAU RANTAU
		LEBAK NANJAH
		NANGA DANGKAN
		NANGA LUAN
		NANGA LUNGU
		NANGA NGERI
		PERJUK
		RIAM TAPANG
		SELANGKAI
		SELIMU
		TOTAL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di

Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju.

Gambaran bentuk upaya guna meningkatkan kesejahteraan desa melalui program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 antara lain meliputi :

a) Program Penataan Desa dengan indicator kinerja fasilitasi sarana dan prasarana desa
b) Program adminstrasi pemerintahan desa dengan indicator kinerja fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari 278 siskeudes, 278 APBDes, Pembinaan peningkatan aparatur desa pada 94 desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa untuk 278 desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa untuk 278 desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD pada 100 desa, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi 132 Perbup, Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa pada 278 desa, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan pada 278 desa.

c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indicator kinerja Fasilitasi Penataan,Pemberdayan dan Pendayagunan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) terdiri dari 59 orang, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK ,Posyandu ,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada 29 desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyrakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada 150 BUMDes, Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada 15 Kelompok, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel II.31.
REALISASI CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan keluarga Berencana	Prevalensi KB aktiv	49.02 %	39.65 %	80.89%
	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,43	4.05	1,66 %

Dalam 5 tahun terakhir pencapaian program KB dianggap kurang populer dan kurang mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah daerah. Pembangunan saat ini pun belum menempatkan isu kependudukan sebagai plafon utama, dan ini akan menjadi ancaman untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama daya saing di masa mendatang.

Dari sisi kualitas kependudukan, Indonesia menempati urutan 116 dari 188 negara di dunia diukur dari indeks pembangunan manusia oleh PBB tahun 2018. Dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 264,2 juta jiwa atau keempat terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara konsumen terbesar di dunia. Kenaikan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Kemudian, bila dilihat dari kondisi Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dari cakupan prevalensi KB aktiv yang masih rendah yaitu hanya 39,65 %, serta laju kelahiran masih sangan tinggi, ini terlihat dari angka total kelahiran (TFR) masih besar yaitu masih 4,05, ini artinya setiap wanita usia subur di Kabupaten Kapuas Hulu melahirkan rata-rata 4 anak selama masa suburnya. Hal ini tentunya masih sangat rendah bila dilihat dari target TFR nasional yaitu 2,43. Antara nilai TFR dan cakupan prevalensi KB aktiv memiliki hubungan yang sangat erat, masih tingginya angka TFR ini salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya Prevalensi KB aktiv. Rendahnya cakupan prevalensi KB aktif dan TFR dikabupaten Kapuas Hulu secara umum disebabkan oleh beberapa hal berikut;

1. Rasio jumlah petugas penyuluh Lapangan KB (PLKB) bila dibandingkan dengan jumlah desa binaan yang hanya 0,185, sehingga menjadikan pelayanan KB kurang optimal, ditambah lagi dengan kondisi geografis Kabupaten Kapuas hulu yang masih relative masih sulit dijangkau.
2. Belum terkolaborasinya kegiatan antara PLKB dengan petugas difasilitas kesehatan, dimana terlihat perbedaan antara capaian kunjungan ibu hamil di trimester 3 mencapai 80% sedangkan prevalensi KB hanya 39 %, disini terlihat belum adanya sinkronisasi kegiatan dengan sasaran yang sama yaitu ibu hamil.
3. Belum maksimalnya pengawasan terhadap PLKB oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB

2.3.2.9. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk memajukan Infrastruktur perhubungan ada dua aspek penting yang menjadi dasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu aspek berkeadilan dan aspek berkelanjutan. Aspek berkeadilan berarti pembangunan infrastruktur harus dilakukan guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

tanpa kecuali. Sedangkan aspek berkelanjutan berarti pembangunan infrastruktur harus mencakup beberapa hal yaitu : keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib dan rendah polusi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah dan membuka aksesibilitas suatu daerah menjadi lebih mudah dijangkau, sehingga dapat mengurangi disparitas harga-harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pelayanan umum pada urusan perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP) dan perhubungan udara. Urusan perhubungan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang di bentuk berdasarkan peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Berdasarkan peraturan Bupati tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, melaksanakan 3 (Tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Penerbangan.

1. Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari :

a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

   Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Rambu-rambu lalu lintas,Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat

memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun Jumlah Terminal di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.32.
Jumlah terminal di Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Jumlah terminal
1	Putussibau Utara	1 unit
2	Semitau	1 unit
3	Bunut Hilir	1 unit
4	Badau	1 unit

Tabel II.33.
Jumlah Armada Darat (Bus) yang beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA PERUSAHAAN	TRAYEK	JUMLAH ARMADA	JADWAL KEBERANGKATAN			JUMLAH KURSI	KET
1	PT. PERINTIS	PUTUSSIBAU - PONTIANAK	13	11.00 WIB	13.00 WIB	17.00 WIB	25	
		PUTUSSIBAU - SINTANG	4	07.00 WIB	-	-	29	
		PUTUSSIBAU - BADAU	2	11.00 WIB	-	-	25	
		PUTUSSIBAU - SAMBAS	1	10.00 WIB	-	-	29	
2	PT MAJU TERUS	PUTUSSIBAU - PONTIANAK	3	15.00 WIB	-	-	29	
3	PT SENTOSA	PUTUSSIBAU - PONTIANAK	10	11.00 WIB	13.00 WIB	-	29	
		PUTUSSIBAU - SINTANG	2	07.30 WIB	-	-	29	
4	PERUM DAMRI	PUTUSSIBAU - BADAU	2	08.00 WIB	-	-	29	
		BADAU - EMPANANG	*1*	14.00 WIB			25	
		PUTUSSIBAU - PONTIANAK	4	14.00 WIB	-	-	34	Executive
		PUTUSSIBAU - PONTIANAK	3	14.00 WIB	-	-	23	Royal

5	PT PUTRA KEMBAR IBAN	BADAU - SUNGAI AMBAWANG	3	11.00 WIB	-	-	24	
		SEMITAU - SUNGAI AMBAWANG	1	11.00 WIB	-	-	26	
		PUTUSSIBAU - BADAU	2	10.00 WIB	-	-	16	
		PUTUSSIBAU - SUHAID	2	08.00 WIB	-	-	16	
6	PT. BORNEO KAPUAS RAYA	PUTUSSIBAU - PONTIANAK	3	15.30 WIB	-	-	29	
7	PT. BINTANG JAYA SINKA	PUTUSSIBAU - SAMBAS	1	09.00 WIB	-	-	23	

Tabel II.34.
Jumlah Rambu-rambu lalu lintas darat yang terpasang

No	Lokasi		2018	2019	2020
1	Ruas jalan mawan kec. Pengkadan		72 unit	-	-
2	Ruas jalan Tekudak-ribang kadeng kec. Kalis		114 unit	-	-
3	Ruas jalan simpang suka maju-kepala gurung kec. Hulu Gurung		-	93 buah	-
4	Ruas jalan simpang mataso-benua martinus kec. Embaloh hulu		-	93 buah	-
5	Ruas jalan Putussibau kota kec. Putussibau Utara		-	94 buah	-
6	Ruas jalan Simpang empat kedamin hilir-teluk sindur kec. Putussibau Selatan		-	-	40 buah
7	Ruas jalan Simpang empat boyan tanjung-na.danau kec. Boyan Tanjung		-	-	60 buah

8	Ruas jalan Kedamin Hilir dan Kelurahan Kedamin Hulu kec. Putussibau Selatan		-	-	60 buah
9	Ruas jalan Banin Kedamin Hilir kec. Putussibau Selatan-Nanga Mandai kec. Bika		-	-	6 buah
10	Ruas jalan Simpang Sekubah – Selimbau kec. Selimbau		-	-	80 buah
11	Ruas jalan Simpang empat boyan tanjung – nanga jemah kec.boyan tanjung		-	-	81 buah
12	Ruas jalan Simpang Temuyuk – nanga suruk kec. Bunut Hulu		-	-	40 buah
13	Ruas jalan Simpang mupa – padua mendalam kec. Putussibau utara		-	-	80 buah
14	Ruas jalan Simpang bandara Kec. Putussibau selatan – nanga manday kec. Bika		-	-	12 buah

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (Pju)

Tabel II.35.
Jumlah Pju yang terpasang tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Putussibau Selatan	51 unit	-	179 unit
2	Putussibau Utara	-	40 set	184 unit
3	Kalis	73 unit	-	-
4	Hulu Gurung	-	10 set	-
5	Bunut Hilir	45 unit	-	-
6	Suhaid	50 unit	80 set	-
7	Selimbau	38 unit	-	-

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk pelayanan pengajuan kendaraan bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena tidak adanya pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor (tenaga KIR)

1. Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai, Steiger dan tambatan perahu yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/ kelancaran pengguna jasa angkutan sungai dan penyeberangan.

Tabel II.36.
Jumlah Dermaga di Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Jumlah dermaga
1	Putussibau Utara	2 unit
2	Suhaid	2 unit
3	Bunut Hilir	1 unit
4	Jongkong	1 unit
5	Batang Lupar	2 unit
4	Silat hilir	1 unit

Tabel II.37.
Daftar Penyebrangan Sungai di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jumlah Kapal	Keterangan
1	PT. Paramita Internusa Pratama	Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau	1 Ponton dan Togboud	Khusus Penyeberangan Perusahaan
2	CV. Aneka Usaha	Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau	1 Ponton dan Togboud	Penyeberangan Umum
3	PT.Kencana Group Anugrah Makmur Sejati	Desa Sentabai Kecamatan Seberuang	1 Ponton dan Togboud	Khusus Penyeberangan Perusahaan

4	CV. Citra Lestari Bukit Sekedau	Dusun Salat Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir	1 Ponton dan Togboud	Penyeberangan Umum
5	ASDP	Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir	1 Kapal Ferry	Tahab Pembangunan Pelabuhan

Tabel II.38.
Sarana Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan

NO	KECAMATAN	JENIS KENDARAAN SUNGAI				
		KAPAL TAMBANG	BANDUNG BERUMAH	PONTON/KAPAL PENYEBERANGAN	SPEED BOAT	MOTOR BOAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Putussibau Utara	3	2	-	2	4
2	Putusibau Selatan	-	-	-	2	4
3	Bika	-	2	-	3	4
4	Kalis	3	-	-	4	6
5	Mentebah	-	-	-	4	4
6	Boyan Tanjung	-	-	-	-	-
7	Pengkadan	-	-	-	-	-
8	Hulu Gurung	-	-	-	-	-
9	Seberuang	-	-	2	-	-
10	Semitau	4	8	8	40	21
11	Suhaid	-	4	-	12	15
12	Selimbau	-	8	-	22	8
13	Jongkong	4	7	-	18	21
14	Bunut Hilir	14	4	-	21	11
15	Bunut Hulu	-	-	-	4	20
16	Embaloh Hilir	2	16	-	20	18
17	Embaloh Hulu	-	-	-	4	4
18	Batang Lupar	-	2	-	20	6
19	Badau	-	-	-	-	-
20	Empanang	-	-	-	-	-
21	Puring Kencana	-	-	-	-	-
22	Silat Hilir	4	3	10	24	10
23	Silat Hulu	2	-	-	2	2
JUMLAH		**35**	**72**	**20**	**202**	**167**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

a. Ruas jalan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup panjang dan karasteristik jalan yang berdeda-beda;

b. Tingkat kesadaran/kedisiplinan pengguna jalan di Kabupaten Kapuas hulu Masih rendah;
c. Sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan yang masih minim
d. Kuantitas sarana pemerintahan lainnya yang masih minim;
e. Sumber daya manusia khususnya yang berlatar belakang pendidikan Transportasi baik Transportasi Darat maupun Transportasi Sungai belum tersedia.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
b. Kebutuhan dasar sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Bidang Perhubungan;.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Pada pengelolaan domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah mengelola domain website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (www.kapuashulukab.go.id) dan juga memfasilitasi pendaftaran subdomain kapuashulukab.go.id baik untuk website OPD maupun subdomain untuk aplikasi kegiatan berbasis website serta memfasilitasi pendaftaran dan pengelolaan domain website desa.id. untuk saat ini domain dan subdomain yang dikelola olrh dinas Komunikasi, IInformatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ada 1 (domain website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu), 24 subdomain, dan 28 (dua puluh delapan) domain website desa.id. jadi jumlah total domain dan subdomain yang dikelola sebanyak 52 domain dan subdomain.

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2018

memiliki nilai indek SPBE 1,93 dengan predikat CUKUP. Sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 hasil evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu mendapat nilai 2,60 dengan predikat BAIK. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maka pimpinan kepala daerah berkewajiban melakukan akselerasi perbaikan pada domain kebijakan, domain tatakelola dan domain layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu keluaran dari domain kebijakan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-government*).

Sementara peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta melek dalam Teknologi informasi dan Komunikasi telah memfasilitasi usulan jaringan telkomunikasi dan akses internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dimana dalam usulan tersebut mendapat bantuan berupa jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mendapat jaringan telekomunikasi sebanyak 30 menara BTS yang tersebar di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sedangkan untuk jaringan akses internet dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 41 lokasi.

Tabel II.39.
Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu
(Keadaan per 31 Desember 2020)

NO	NAMA SITE/DESA	KECAMATAN	TAHUN	JUMLAH
1.	Ulak Pauk	Embaloh Hulu	2016	1
2.	Rantau Prapat	Embaloh Hulu	2016	1
3.	Kereho	Putussibau Selatan	2016	1
4.	Bungan Jaya	Putussibau Selatan	2016	1
5.	Labian	Batang Lupar	2016	1
6.	Melemba	Batang Lupar	2016	1
7.	Sungai Senunuk	Batang Lupar	2016	1
8.	Kantuk Asam	Puring Kencana	2016	1
9.	Pamtas Kantuk Asam	Puring Kencana	2016	1

10.	Lauk	Putussibau Utara	2016	1
11.	Sungai Uluk Palin	Putussibau Utara	2016	1
12.	Riam Tapang	Silat Hulu	2017	1
13.	Nanga lauk	Embaloh Hilir	2017	1
14.	Pulau majang	Badau	2017	1
15.	Setulang	Batang Lupar	2017	1
16.	Sekubah	Selimbau	2017	1
17.	Tani Makmur	Hulu Gurung	2017	1
18.	Nanga Boyan	Boyan Tanjung	2017	1
19.	Nanga Jemah	Boyan Tanjung	2017	1
20.	Ujung Said	Jongkong	2017	1
21.	Batu Lintang	Embaloh Hulu	2018	1
22.	Menua Sadap	Embaloh Hulu	2018	1
23.	Dusun Mata Lunai (Desa Beringin Jaya)	Putussibau Selatan	2018	1
24.	Dusun Nanga Balang (Desa Beringin Jaya)	Putussibau Selatan	2018	1
25.	Pamtas Kelawik	Batang Lupar	2018	1
26.	Nanga Awin	Putussibau Utara	2018	1
27.	Dusun Kampung Baru Desa Entibab	Bunut Hilir	2018	1
28.	Nanga Nyabau	Putussibau Utara	2019	1
29.	Nanga Luan	Silat Hulu	2019	1
30.	Nanga Kelibang	Bunut Hulu	2019	1
JUMLAH				**30**

Tabel II.40.
Jumlah Akses Internet Berdasarkan Bantuan
dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
(Keadaan per 31 Desember 2020)

NO	TEMPAT LOKASI	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN DIBANGUN	JUMLAH
1	Madrasah Aliyah Negeri Putussibau	Hilir Kantor	Putussibau Utara	2016	1
2	SMA Muhammadiyah Putussibau	Hilir Kantor	Putussibau Utara	2016	1
3	KIM "Sekilas Info"	Tanjung Jati	Putussibau Selatan	2016	1
4	SMK Negeri 2 Putussibau	Kedamin Hulu	Putussibau Selatan	2016	1
5	SMA Negeri 2 Putussibau	Kedamin Hilir	Putussibau Selatan	2016	1
6	KIM "Nandang Tekalong"	Tekalong	Mentebah	2016	1
7	Kim "Nandang Pasulang"	Tekudak	Kalis	2016	1

8	Pesantren "Al-Jihad"	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	2016	1
9	KIM "Ketam Bersatu"	Sungai Besar	Bunut Hulu	2016	1
10	KIM "Sura Dirja"	Bunut Hulu	Bunut Hilir	2016	1
11	Kantor Desa Jerenjang	Jerenjang	Seberuang	2016	1
12	Kantor Desa Bekuan	Bekuan	Seberuang	2016	1
13	Kantor Desa Titian Kuala	Titian Kuala	Selimbau	2016	1
14	Kantor Desa Gerayau	Gerayau	Selimbau	2016	1
15	Kim Piasak Info	Piasak Hilir	Selimbau	2016	1
16	Kantor Desa Piasak Hulu	Piasak Hulu	Selimbau	2016	1
17	Polsek Embaloh Hulu	Benua Martinus	Embaloh Hulu	2016	1
18	Kantor Desa Sei.Antu	Sei.Antu	Puring Kencana	2016	1
19	Kantor Desa Kandung Suli	Kandung Suli	Jongkong	2018	1
20	Kantor Desa Jongkong Kiri Hulu	Jongkong Kiri Hulu	Jongkong	2018	1
21	Kantor Desa Entibab	Entibab	Bunut Hilir	2018	1
22	Sekretariat KIM Entungan Hulu Desa Nanga Suhaid	Nanga Suhaid	Suhaid	2018	1
23	Sman 1 Suhaid	Nanga Suhaid	Suhaid	2018	1
24	Kantor Desa Benuis	Benuis	Selimbau	2018	1
25	Kantor Desa Kelakar	Kelakar	Hulu Gurung	2018	1
26	Sma Negeri 1 Hulu Gurung	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	2018	1
27	Bika	Bika	Bika	2018	1
28	Sman 1 Jongkong	Jongkong	Jongkong	2019	1
29	Madrasah Tsanawiyah Negeri No. 3 Jongkong	Jongkong Kanan	Jongkong	2019	1
30	Smpn 2 Hulu Gurung	Tepuai	Hulu Gurung	2019	1
31	Kantor Desa Sejahtera Mandiri	Sejahtera Mandiri	Hulu Gurung	2019	1
32	Kantor Desa Bugang	Bugang	Hulu Gurung	2019	1
33	Kantor Desa Lubuk Antuk	Lubuk Antuk	Hulu Gurung	2019	1
34	Kantor Desa Riam Piyang	Riam Piyang	Bunut Hulu	2019	1
35	Balai Desa Nanga Semangut	Nanga Semangut	Bunut Hulu	2019	1
36	Blc Kantor Camat Badau	Badau	Badau	2019	1
37	Smpn 1 Bunut Hilir	Bunut Hilir	Bunut Hilir	2019	1
38	Smpn 5 Bunut Hilir	Bunut Hilir	Bunut Hilir	2019	1
39	Smkn Hulu Gurung	Tepuai	Hulu Gurung	2019	1
40	Smpn 1 Batang Lupar	Sepandan	Batang Lupar	2019	1
41	Smpn 9 Putussibau	Lunsara	Putussibau Selatan	2019	1
JUMLAH					**41**

Untuk Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil memperoleh predikat sebagai "Kabupaten Informatif" berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi Kalimantan Barat sejak Tahun 2018 sampai dengan 2020. Untuk target pelaksanaan 5 (lima) tahun mendatang akan meningkatkan kualitas indeks nilai penilaian keterbukaan informasi publik dengan tetap mempertahankan predikat sebagai "Kabupate Informatif".

2.3.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Koperasi dan UMKM merupakan penggerak perekonomian di Indonesia yang berperan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.41.
Daftar Koperasi dan UMKM yang Aktif dan Tidak Aktif

No	Nama Kecamatan	Tahun 2018			Jml	Tahun 2019			Jml	Tahun 2020			Jml	Tahun 2021			Jml
		Aktif	Tdk Aktif	Sdh RAT		Aktif	Tdk Aktif	Sdh RAT		Aktif	Tdk Aktif	Sdh RAT		Aktif	Tdk Aktif	Sdh RAT	
1	Putussibau Utara	24	37	7	61	24	38	10	62	25	38	10	63	25	38	10	63
2	Putussibau Selatan	9	13	4	22	9	13	5	22	9	13	3	22	9	13	5	22
3	Kalis	1	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	4	3	1	1	4
4	Mentebah	3	6	1	9	3	6	1	9	3	6	1	9	3	6	1	9
5	Bunut Hulu	3	3	2	6	3	3	2	6	3	3	1	6	3	3	1	6
6	Embaloh Hilir	3	5	-	8	2	6	-	8	3	6	-	9	3	6	-	9
7	Bunut Hilir	3	7	-	10	2	8	1	10	2	8	-	10	2	8	-	10
8	Boyan Tanjung	4	9	-	13	4	9	1	13	4	9	1	13	4	9	1	13
9	Pengkadan	3	6	1	9	3	6	-	9	3	6	1	9	3	6	1	9
10	Hulu Gurung	3	5	-	8	3	5	-	8	3	5	1	8	3	5	1	8
11	Jongkong	3	4	-	7	3	4	-	7	3	4	-	7	3	4	-	7
12	Selimbau	3	6	1	9	3	6	1	9	3	6	-	9	3	6	-	9
13	Suhaid	2	9	-	11	2	9	2	11	2	9	1	11	2	9	-	11
14	Semitau	6	6	2	12	7	6	4	13	7	6	3	13	7	6	3	13
15	Seberuang	3	8	3	11	3	8	3	11	3	8	2	11	3	8	3	11
16	Silat Hilir	6	6	3	12	6	6	5	12	7	6	4	13	7	6	-	13
17	Silat Hulu	3	5	2	8	3	5	2	8	3	5	1	8	3	5	1	8
18	Embaloh Hulu	2	10	1	12	2	10	1	12	2	10	1	12	2	10	-	12
19	Batang Lupar	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	1	6	1	7
20	Badau	2	4	2	6	2	4	2	6	4	4	2	8	5	4	2	9
21	Empanang	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	1	3
22	Puring Kencana	3	-	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	1	3
		91	157	34	**248**	90	161	45	**251**	96	161	37	**257**	98	161	34	**259**

Berdasarkan data per 31 Desember 2020, koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 257 koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah berjumlah 8.180 usaha.Dari 257 koperasi yang ada, sebanyak 96 koperasi berstatus aktif, dan 161 koperasi berstatus tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut, melaksanakan kegiatan usahanya dan kelembagaan koperasi jelas (pengurus dan pengawas). Adapun penyebab sebuah koperasi disebut tidak aktif adalah tidak melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 3 (tiga) tahun berturut turut, koperasi tidak melakukan usaha (vakum), dan pengurus, pengawas serta anggota tidak diketahui keberadaannya.

Dalam bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah pada pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Tabel II.42.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di Kabupaten Kapuas Hulu

N0	Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Jongkong	222	-	-	222
2	Silat Hilir	2	-	-	2
3	Suhaid	6	-	-	6
4	Embaloh Hilir	186	-	-	186
5	Silat Hulu	332	-	-	332
6	Bunut Hulu	15	-	-	15
7	Mentebah	99	-	-	99
8	Badau	50	-	-	50
9	Empanang	189	9	-	198
10	Puring Kencana	20	-	-	20
11	Bika	119	2	-	121
12	Seberuang	822	43	6	871
13	Bunut Hilir	735	5	-	740
14	Selimbau	291	25	-	316
15	Embaloh Hulu	362	4	-	366
16	Pengkadan	333	34	3	370
17	Kalis	486	37	1	524
18	Batang Lupar	397	14	1	412

19	Semitau	183	1	-	184
20	Boyan Tanjung	97	39	1	137
21	Hulu Gurung	553	69	8	630
22	Putussibau Utara	688	191	49	927
23	Putussibau Selatan	1.383	69	-	1.452
Total		7.571	541	69	8.180

Data per 31 Desember 2020

Dari total 8.180 usaha Mikro, Kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan kepemilihan NIB/SKU/SKDU usaha mikro berjumlah 7.571 usaha, usaha kecil berjumlah 541 Usaha, dan usaha Menengah berjumlah 68 usaha.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan dilaksanakan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS (*online single submission*). Sedangkan izin yang tidak terakomodir dalam OSS diterbitkan dengan aplikasi SiCantik. Aplikasi SiCantik merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo RI untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Selama periode tahun 2016 - 2020 DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah menerbitkan sebanyak 3.115 dokumen perizinan.

Tabel II.43.
Dokumen Perizinan yang di Terbitkan
di Kabupaten Kapuas Hulu

SEKTOR	TAHUN					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	1	96	113	210
PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0
JASA LAINNYA	0	0	0	0	0	0
PERHUBUNGAN	0	0	2	2	0	4
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	3	50	19	72
KESEHATAN	0	0	0	61	469	530
PERDAGANGAN	512	685	6	54	13	585
PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	0	573	1,292
PARIWISATA	16	29	1	10	1	28
PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0
KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8	0	0	0	6	14
PERTANIAN	21	0	3	1	5	30
PERIKANAN	0	0	0	1	0	1
ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	2	0	0	0	0	2
JUMLAH	**538**	**719**	**352**	**307**	**1.199**	**3.115**

Sumber : DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu, kewenangan penerbitan perizinan yang dilimpahkan berjumlah 124 jenis izin, yang mencakup 14 sektor. Penerbitan izin sektor Kesehatan melalui aplikasi SiCantik sedangkan sektor lain hampir semuanya diterbitkan melalui aplikasi OSS.

Sedangkan realisasi investasi yang menjadi capaian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu merupakan penjumlahan realisasi investasi yang berasal dari izin usaha (nomor induk berusaha / NIB) yang diterbitkan melalui OSS dan realisasi investasi yang berasal dari penambahan modal usaha yang disampaikan melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Pertumbuhan investasi periode tahun 2016-2020 di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Gambar II.23.
Pertumbuhan investasi periode tahun 2016-2020 di Kabupaten Kapuas Hulu

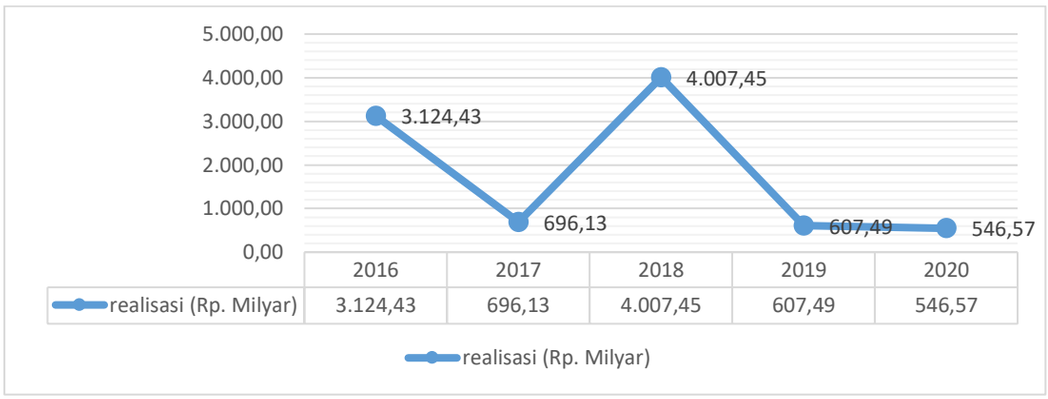

Sumber : DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2016-2020 sangat fluktuatif. Kenaikan dan penurunan realisasi investasi selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Nasional maupun global, juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, budaya, dan politik, dimana hal tersebut merupakan kondisi yang terjadi diluar kendali atau *uncontrollable*. Meskipun demikian, realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Selama periode 2016-2020 DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil menyusun buku Peta Potensi Investasi (2018) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kapuas hulu (2019).

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda Kepemudaan menjadi program penting bagia setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan asset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi *agent of change*.

Tabel II.44.
Jumlah Organisasi Pemuda Dan Kelompok Pemuda
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1	Putussibau Utara	7	

2	Putussibau Selatan	6	
3	Bunut Hilir	3	
4	Selimbau	1	
5	Mentebah	1	
6	Pengkadan	1	
7	Bunut Hulu	1	
8	Semitau	2	
9	Kalis	1	
10	Boyan Tanjung	2	
	Jumlah	**25**	

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwista Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Berdasarkan table diatas, terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) organisasi dan kelompok kepemudaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan hamper semuanya sudah memiliki akte notaris dan berstatus aktif. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan beberapa bantuan kepada kelompok pemuda yang tersebar di beberapa kecamatan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seperti bantuan alat musik.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan kelompok kepemudaan yang ada dibeberapa kecamatan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain Kegiatan Kelembagaan Kesenian Tradisional dan kelembagaan seni budaya lainnya, Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengembangan potensi generasi muda, Bakti sosial dalam masyarakat, Latihan bersama bidang kesenian melayu, latihan bersama bidang olahraga, Memfasilitasi dan mengembangkan bakat pemuda untuk mengelola pendidikan, keagamaan, kesenian, sosial bidaya, olahraga, usaha perikanan dan peternakan dan lingkungan hidup dan Pembinaan dan pengembangan anggota maupun masyarakat.

Tabel II.45.
Keikutsertaan Kabupaten Kapuas Hulu
Pada Event Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional

NO	PRESTASI	2017	2018	2019	JML
1	JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) DI KOTA SAWAH LUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT	1			1

2	PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI		1		1
3	PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI		1		1
4	PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI			1	1
5	PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI			1	1
6	KAPAL PEMUDA NUSANTARA (KPN) "SAIL NIAS" TINGKAT NASIONAL			1	1
7	JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) TINGKAT NASIONAL DI TONDANO KAB. MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA			1	1
8	JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) TINGKAT NASIONAL DI TONDANO KAB. MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA			1	1
JUMLAH		1	2	5	8

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwista Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Bedasarkan tabel diatas, pemuda dan pemudi Kabupaten Kapuas Hulu telah 8 (delapan) kali mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan seperti seleksi Paskibraka Tingkat maupun yang telah dilaksanakan di tingkat Nasional yaitu Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional.

Tabel II.46.
Perolehan Medali pada Kegiatan
Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Provinsi Kalimantan Barang
Di Pontianak Tahun 2019

No	Nama Cabang Olahraga	Perolehan Medali			Jumlah	Ket
		Emas	Perak	Perungu		
1	Taekwondo	1			1	
2	Anggar		2	6	8	
3	Karate	1			1	
4	Atlet NPC	3			3	
Jumlah		*5*	*2*	*6*	13	

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwista Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Berdasarkan table diatas, dalam bidang olahraga dimana Kabupaten Kapuas Hulu sudah pernah mendapatkan 13 (tiga belas) medali, 5 (lima) emas, 2 (dua) perak dan 6 (enam) perungu. Bahkan atlet NPC telah berhasil mewakili Provinsi Kalimantan Barat ke Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Papua.

Tabel II.47.
Data Gelangan dan Lapangan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	SEPAK BOLA (UNIT)		BOLA VOLLY (UNIT)		BOLA BASKET (UNIT)		FUTSAL (UNIT)		BULU TANGKIS (UNIT)		RENANG (UNIT)		TAKRAW (UNIT)	
		S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P
1	PUTUSSIBAU UTARA	-	15	-	22	-	-	2	-	1	19	-	1	-	2
2	PUTUSSIBAU SELATAN	-	12	-	17	-	3	-	1	-	15	-	-	-	5
3	KALIS	-	12	-	25	-	-	1	-	-	11	-	-	-	3
4	MENTEBAH	-	6	-	13	-	1	1	-	-	6	-	-	-	2
5	BUNUT HULU	-	17	-	23	-	1	2	-	-	13	-	-	-	3
6	BOYAN TANJUNG	-	24	-	38	-	-	1	-	-	13	-	-	-	6
7	PENGKADAN	-	18	-	25	-	1	1	-	-	23	-	-	-	17
8	HULU GURUNG	-	16	-	32	-	1	1	-	-	26	-	-	-	3
9	BIKA	-	6	-	10	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
10	SILAT HULU	-	9	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
11	SILAT HILIR	-	12	-	18	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-
12	SUHAID	-	11	-	19	-	2	3	2	-	6	-	-	-	9
13	SELIMBAU	-	20	-	28	-	-	1	-	-	18	-	-	-	5
14	SEMITAU	-	12	-	15	-	1	-	-	-	9	-	-	-	2
15	SEBERUANG	-	8	-	27	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
16	JONGKONG	-	15	-	22	-	-	-	4	-	11	-	-	-	5
17	BUNUT HILIR	-	9	-	13	-	1	-	3	-	13	-	-	-	1
18	EMBALOH HILIR	-	9	-	14	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
19	EMBALOH HULU	-	5	-	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
20	BATANG LUPAR	-	4	-	14	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
21	BADAU	-	9	-	18	-	-	-	1	-	9	-	-	-	3
22	PURING KENCANA	-	2	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
23	EMPANANG	-	1	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
JUMLAH		0	252		430		13	13	11	1	240	0	1	0	71

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwista Kab. Kapuas Hulu 2020, diolah

Berdasarkan table diatas, bahwa ketersediaan gelangan dan lapangan olahraga sudah cukup memadai, seperti untuk cabang olahraga sepak bola, bola volly dan bulu tangkis sudah ada semua kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian juga halnya dengan gelangan dan lapangan untuk cabang olahraga bola basket, futsal dan takraw juga sudah ada di sebagian kecamatan, hanya yang masih sangat minim adalah untuk cabang olahraga renang.

2.3.2.14. Statistik

Data yang akurat, cepat, kekikinian dan dapat dipertanggungjawabkan serta dibagipakaikan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keputusan perencanaan sampai dengan evaluasi. Akan tetapi kondisi yang ada saat ini penyajian data antar sektor tidak terintegrasi sehingga data belum sempurna. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit dikarenakan penyajian yang tumpang tindih. Oleh karena sebab itu, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memulai membangun kebijakan satu data melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data statistik sektoral melalui aplikasi statistik sektoral yang beralamatkan statistiksektoral. kapuashulukab.go.id yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu data statistik sektoral juga tersedia melalui penerbitan buku Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu dan Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.

2.3.2.15. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses diolah dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru untuk keamanan informasi dan data pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada dan secara

aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah layanan keamanan informasi, dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk melindungi komunikasi sistem dan dokumen elektronik yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

2.3.2.16. Perpustakaan

Pemerintah berperan sangat penting di dalam meningkatkan minat baca masyarakat yaitu melalui undang-undang tentang perpustakaan. Di dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi.

Dalam upaya peningkatan kegemaran membaca, setiap jenis perpustakaan mempunyai kelompok sasaran masyarakat tertentu. Perpustakaan sekolah melayani siswa dan para guru di lingkungan sekolahnya, perpustakaan umum dan desa melayani masyarakat umum dan masyarakat desa di lingkungan daerahnya, dan perpustakaan khusus melayani staf di lingkungan lembaga induknya.Untuk meningkatkan kegemaran membaca di Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk perpustakaan. Sampai dengan akhir Tahun 2020, jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Perpustakaan Daerah 1 (satu), Perpustakaan Kecamatan 10 (sepuluh), Perpustakaan Kelurahan 3 (tiga), Perpustakaan Desa 155 (seratus lima puluh lima), Perpustakaan Rumah Ibadah/Panti Asuhan 18 (delapan belas),Perpustakaan Rumah Sakit/Puskesmas 25 (dua puluh lima), Perpustakaan TBM/Komunitas 10 (sepuluh), Perpustakaan Sekolah/Pesantren 509 (lima ratus sembilan) dan Pojok Baca Digital/BI Corner 3 (tiga).

Untuk melayani tempat yang tidak memiliki perpustakaan, Perpustakaan Daerah melakukan pelayanan kepada pemustaka dengan menggunakan 2 unit mobil perpustakaan keliling. Perpustakaan Daerah juga menyediakan koleksi perpustakaan yang beragam di gedung perpustakaan dengan jumlah koleksi sebanyak 5.452 judul (17.791 eksemplar).

2.3.2.17. Kearsipan

Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bertujuan yaitu adanya jaminan perlindungan kepentingan Negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip dan adanya jaminan terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta, Perusahaan Swasta, Perseorangan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Kearsipan Nasional.

Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil Evaluasi Pengawasan Tahun 2020 memiliki Indek Kearsipan 56,22 (lima puluh enam koma dua puluh dua) dengan predikat cukup (CC). Terdapat 8 Aspek yang perlu dilakukan perbaikan secara sinergis oleh Lembaga Kearsipan Daerah bersama para pencipta arsip yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, ketertiban pelaksanaan penyusunan arsip, pengelolaan arsip statis, sumber daya manuasia kearsipan, kelembagaan dan prasarana dan sarana kearsipan.

Dalam meningkatkan sadar tertib arsip di Kabupaten Kapuas Hulu telah dibuat beberapa regulasi yang menjadi pedoman bagi pencipta arsip didalam penyelenggaraan kearsipan yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan kearsipan, Perbup 16 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Perbup Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Fungsi Kepegawaian Apartur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Perbup Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Perbup Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, Perbup Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Perbup Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis. Masih terdapat beberapa peraturan bupati yang masih harus dibuat untuk mendukung penyelenggraan kearsipan

2.3.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas perairan umum kurang lebih 450.257 ha atau 3,27 % dari luas perairan umum indonesia (13,3 juta ha), mengandung potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dan penting baik sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat nelayan sekaligus sebagai produk unggulan daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat menjadi lebih meningkat di masa yang akan datang. Terdapat 260 sungai dan anak-anak sungai, 266 danau, 27 merupakan danau lindung yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati dan beberapa danau lindung adat yang dikelola dengan kearifan lokal.

Merupakan ekosistem ikan air tawar yang dihuni oleh kurang lebih 297 jenis ikan, beberapa diantaranya merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti arwana (*scleropages formosus*), gabus *(ophiocephalus striatus)*, jelawat *(leptobarbus hoeveni* blkr*)*, toman (*channa micropeltes)*, belida *(notopterus chitala)*, betutu *(oxyeleotris marmorata* blkr*)*, tambakan *(helostoma temminckii)*, lais *(kryptopterus sp)*, patin *(pangasius pangasius*), baung *(mystus nemurus),* tapah *(wallago leeri),* cat fish, botia *(botia macracanthus)* dan lain-lain.

Usaha-usaha perikanan di Kapuas Hulu termasuk perikanan rakyat yang sebagian besar masih mempergunakan alat tangkap tradisional. Berdasarkan tabel berikut jumlah produksi ikan perairan umum di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2016 hingga 2020secara total sudah ada peningkatan pada tahun 2108 hingga 2019, akan tetapi tahun 2020 mengalamipenurunansebesar 15.957,42 ton

diandingkan tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel II.48.
Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Tahun
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Produksi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perkanan Tangkap	31.494,71	31.439,01	40.415,00	41.050,42	25.093,00

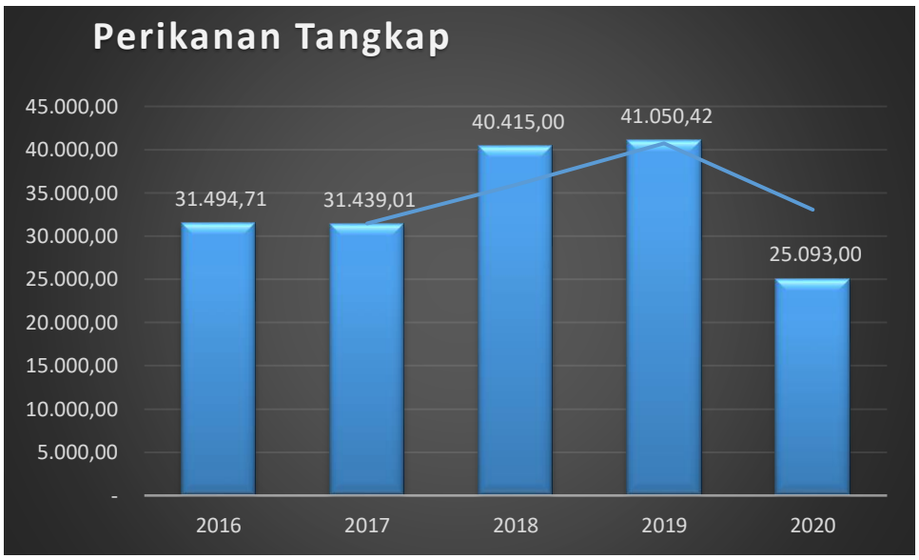

Sumber : DInas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Faktor penyebab penurunan produksi perikanan tangkapantara lain perubahan iklim (global warming) tidak menentu sehingga produksi ikan menurun. Selain itu pengunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih banyak, rendahnya kesadaran tentang zona pemasangan alat tangkap dan pengaturan waktu tangkap, rendahnya kesadaran tentang pengaturan waktu tagkap, kerusakan lingkungan sumber daya ikan serta mutu produksi rendah.

Menurunnya produksi ikan air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu juga berdampak terhadap penurunan produksi perikanan di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pemasok ikan air tawar terbesar di Provinsi kalimantan barat, tidak kurang dari 70% ikan dari kabupaten Kapuas Hulu baik berupa ikan segar maupun dalam bentuk olahan dipasok untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ikan bagi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat. Adapun potensi perikanan tangkap terdapat di 9

(Sembilan) Kecamatan yang memiliki hasil tangkapan baik sungai, danau maupun anak sungai. Adapun produksi berdasarkan tahun 2020 25.230,253 Ton tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.49.
Produksi Ikan Perairan Umum Berdasarkan Potensial Tangkapan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
1	Putussibau Utara	522,24	522,24	440,53	440,53	-
2	Putussibau Selatan	612,27	612,27	512,40	512,40	-
3	Bika	1.648,98	1.648,98	1.373,01	1.373,01	756.908
4	Kalis	-	-	-	-	-
5	Mentebah	-	-	-	-	-
6	Boyan Tanjung	-	-	-	-	-
7	Pengkadan	-	-	-	-	-
8	Hulu Gurung	-	-	-	-	-
9	Seberuang	-	-	-	-	-
10	Semitau	1.965,35	1.909,65	2.192,90	2.192,90	-
11	Suhaid	3.950,63	3.950,63	8.550,08	8.550,08	2.523.025
12	Selimbau	3.535,43	3.535,43	5.042,79	5.042,79	5.550.656
13	Jongkong	2.179,35	2.179,35	4.399,77	4.399,77	3.279.933
14	Bunut Hilir	7.839,56	7.839,56	10.320,35	10.320,35	4.541.446
15	Bunut Hulu	-	-	-	-	-
16	Embaloh Hilir	4.576,13	4.576,13	3.898,08	3.898,08	3.027.630
17	Embaloh Hulu	327,93	327,93	268,56	268,56	-
18	Batang Lupar	1.496,66	1.496,66	1.185,52	1.185,52	3.027.630
19	Badau	1.491,46	1.491,46	1.188,64	1.188,64	2.018.420
20	Empanang	50,60	50,60	41,44	41,44	
21	Puring Kencana	-	-	-	-	-
22	Silat Hilir	1.009,44	1.009,44	764,48	764,48	504.605
23	Silat Hulu	288,68	288,68	236,44	236,44	-

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Mengingat luasnya wilayah perairan yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan mungkin mampu diawasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu apalagi dengan segala keterbatasan yang ada baik dana, personil maupun sarana dan prasarana sehingga keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan kabupaten Kapuas Hulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya.

Kehadiran dan existensi Kelompok Pengawas Swadaya (POKMASWAS) bidang perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu dirasakan sangat besar manfaatnya dan sangat membantu pemerintah.Pokmaswasdengan kearifan lokalnya yangtumbuh dan terbentuk karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlangsungan sumber daya ikan dan lingkungan perairan umum daratan nya dirasakan lebih tepat, cepat, efektif, efesien dan lebih murah dibandingkan dengan pengawasan oleh aparat pemerintah, demikian juga halnya jika dibanding dengan penerapan hukum positif, terkecuali terhadap kasus-kasus besar yang dilakukan oleh penduduk luar desa/kecamatan seperti kasus penyetruman. Terdapat 22 Pokmaswas yang sudah terbentuk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang tersebar di 8 Kecamatan di Kapuas Hulu.

Tabel II.50.
Pokmaswas yang sudah terbentuk dari tahun 2016 hingga tahun 2020

No	Nama Kelompok / Organisasi	Alamat Kelompok/Organisasi	Pengurus Kelompok/Organisasi	Nomor Sk / Penerbit	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kecamatan Bunut Hilir					
1.	Pengurus POKMASWAS DL. Pilin	Desa Bunut Hilir Kec.Bunut Hilir	Ketua : Junaidi Sekretaris : Yus sudarso Bendahara : R.Saong Mulyono	Sk Kades Bunut Hilir No 21 Tahun 2015	
2.	Pengurus POKMASWAS DL. Sunjung	Desa Bunut Hilir Kec.Bunut Hilir	Ketua : Agus Hendarsyah Sekretaris : Muhammad Adeni Bendahara : Abang Samson	Tahun 2016	
3.	Pengurus POKMASWAS DL. Aur	Desa Teluk Aur Kec.Bunut Hilir	Ketua : Yusup Alyuda Sekretaris : Hariyadi Bendahara : Asnan	Sk Kades Teluk Aur No 07 Tahun 2015	
4.	Pokmaswas Tembang	Desa Tembang Kec.Bunut Hilir	Ketua : Said Sekretaris : Syahrul Bendahara : Syahbudin	Sk Kades Tembang No 16 Tahun 2019	
5.	POKMASWAS DL. Empangau	Desa Empangau Kec.Bunut Hilir	Ketua : Sunarto Sekretaris : Zulkifli Bendahara : Sapri	Sk Kades Empangau No 05 Tahun 2014	

6.	POKMASWAS Danau Baru	Desa Entibab Kec.Bunut Hilir	Ketua : Samsudin, Sekretaris : Lapudin, Bendahara : Salimin	Sk Kades Entibab No 18 Tahun 2018	
7.	POKMASWAS Terduata	Desa Entibab Kec.Bunut Hilir	Ketua : Zainal Sekretaris : Sugiman Bendahara : Salimin	Surat Penetapan Pokmaswas Oleh Kepala Desa Tahun 2011	
8.	POKMASWAS Pulau Danau	Desa Entibab Kec.Bunut Hilir	Ketua : Hamlet Sekretaris : Iwan Budiana Bendahara : Zaini	Surat Penetapan Pokmaswas Oleh Kepala Desa Tahun 2012	
9.	POKMASWAS DL. Bagot	Desa Entibab Kec.Bunut Hilir	Ketua : Sahdan Sekretaris : Jamil Bendahara : Hartono	Tahun 2018	
10.	POKMASWAS Desa Nanga Tuan	Desa Nanga Tuan Kec. Bunut Hilir	Ketua : Sukardi Sekretaris : Musliyadi Bendahara : Andi Harjono	Sk Kepala Desa Nanga Tuan No 06 Tahun 2021	
Kecamatan Embaloh Hilir					
11.	POKMASWAS Nanga Embaloh	Desa Nanga Embaloh Kec.Embaloh Hilir	Ketua : Betin Sekretaris : Yusri Bendahara : Rusmadi	Tahun 2016	
12.	POKMASWAS Palin	Desa Palin Kec.Embaloh Hilir	Ketua : Burhan Usman	Tahun 2017	
13.	POKMASWAS DL. Ulak Belat dan Perairan Umum Nanga Lauk	Desa Nanga Lauk Kec.Embaloh Hilir	Ketua : Nong Syahril Sekretaris : Wawan Bendahara : Delin	Sk Kepala Desa Nanga Lauk No 01 Tahun 2018	
14.	POKMASWAS Desa Keliling Semulung	Desa Keliling Semulung Kec.Embaloh Hilir	Ketua : Fransiskus Sare Sekretaris : Markus Kijo Bendahara : Agusthing	Sk Kepala Desa Keliling Semulung No 15 Tahun 2020	
KECAMATAN JONGKONG					
15.	POKMASWAS Ujung Jambu	Desa Ujung Jambu Kec.Jongkong	Ketua : Mamang Sekretaris : Bakri Bendahara : Sulaiman	Tahun 2008	
16.	Pokmaswas Ujung Said-Penepian Raya	Desa Ujung Said dan Desa Penepian Raya Kec.Jongkong	Ketua : Jailani Sekretaris : Damuri Bendahara : Shadeli	SK KEPALA DESA UJUNG SAID DAN PENEPIAN RAYA NO 5 TAHUN 2014	
17.	POKMASWAS Joki Hulu	Desa Joki Hulu Kec.Jongkong	Ketua : Ahmad Yani Sekretaris : M.Susandir Bendahara :-	SURAT PENETAPAN POKMASWAS OLEH KEPALA DESA TAHUN 2009	
KECAMATAN BATANG LUPAR					
18.	POKMASWAS Danau Merebung	Desa Melemba Kec.Batang Lupar	Ketua : Steven Boyke Karunding Sekretaris : Budi Utomo, Bendahara : Solihin	SK KEPALA DESA MELEMBA NO 02 TAHUN 2014	
KECAMATAN SELIMBAU					
19.	POKMASWAS Piasak Hilir	Desa Piasak Hilir Kec.Selimbau	Ketua : Taufik Yusuf Sekretaris : Rahmiati,	-	
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA					
20.	POKMASWAS Kel. Hilir Kantor	Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Ketua : Musmuliadi Sekretaris : M. Saleh	SK KEPALA KELURAHAN HILIR	

			Syahbandi Bendahara : Abdul Moin	KANTOR NO 06 TAHUN 2019	
KECAMATAN BIKA					
21.	POKMASWAS Desa Nanga Manday	Desa Nanga Manday Kec. Bika	Ketua : M. Ja'is, Sekretaris : Sapril Bendahara : Sa'ad	SK KEPALA DESA NANGA MANDAY NO 06 TAHUN 2020	
KECAMATAN SUHAID					
22.	POKMASWAS Desa Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan Kec. Suhaid	Ketua : Iswadi Sekretaris : Budi Ariyanto Bendahara : Agung	SK KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN NO 25 TAHUN 2021	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Potensi ikan di Kapuas Hulu bukan hanya ikan konsumsi namun ikan hias seperti ikan arwana sudah dikenal mendunia tinggal bagimana kita mengemas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk produksi olahan hasil perikanan juga memiliki nilai yang cukup ekonomis untuk dijadikan usaha bagi warga Kapuas Hulu sehingga sub sektor perikanan agar diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan di kolam, pagong, dan keramba serta bantuan fasilitas penangkapan ikan di perairan sungai dan danau guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan produksi daerah serta menunjang kebutuhan bahan baku industri rumah tangga dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Potensi budidaya ikan di perairan umum tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Seberuang, Semitau, Suhaid, Badau, Selimbau, Batang Lumpar, Jongkong, Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Bika, dan Kalis merupakan kecamatan-kecamatan yang menyimpan potensi besar untuk budidaya perikanan perairan umum. Sebagian wilayah kecamatan tersebut memiliki perairan umum, berupa danau, sungai dan rawa. Bahkan beberapa kecamatan wilayahnya merupakan bagian dari taman nasional (TN) Danau Sentarum. Kecamatan Seberuang, Pengkadan, Hulu Gurung, Boyan Tanjung, dan Bunut Hulu merupakan daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan di kolam dan minapadi. Adapun produksi budidaya perikanan di kolam dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel II.51.
Produksi Budidaya Perikanan di Kolam
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
1	Putussibau Utara	11,19	387,22	382,39	287,51	734,00
2	Putussibau Selatan	27,02	534,15	527,49	396,61	
3	Bika	5,83	264,32	207,69	156,16	-
4	Kalis	290,00	139,50	1.154,13	3,35	896,00
5	Mentebah	11,10	391,35	398,95	290,58	60,00
6	Boyan Tanjung	132,21	260,70	262,11	193,58	794,00
7	Pengkadan	330,00	576,75	600,11	439,58	158,00
8	Hulu Gurung	536,00	523,50	550,73	388,62	
9	Seberuang	10,52	16,00	15,80	11,88	-
10	Semitau	93,47	125,00	84,93	63,86	-
11	Suhaid	154,71	222,10	12,11	123,63	-
12	Selimbau	1.517,42	254,19	1.077,72	810,32	-
13	Jongkong	1.220,77	465,20	314,47	236,45	-
14	Bunut Hilir	59,76	170,00	-	-	
15	Bunut Hulu	713,35	545,60	543,75	408,84	
16	Embaloh Hilir	27,21	28,50	-	1.589,00	-
17	Embaloh Hulu	15,44	10,00	11,85	8,91	-
18	Batang Lupar	298,07	56,50	135,12	4,65	-
19	Badau	217,15	76,00	207,31	39,55	-
20	Empanang	15,90	10,00	9,88	7,43	-
21	Puring Kencana	1,15	10,00	9,88	7,43	-
22	Silat Hilir	45,30	120,50	96,29	53,84	-
23	Silat Hulu	10,70	86,50	85,43	64,23	-
	Total	**5.744**	**5.274**	**6.688**	**5.586**	**11.174**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Berdasarkan hasil pemetaan potensi budidaya air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 yang telah dilakukan bahwa budidaya ikan air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan masyarakat hampir di setiap kecamatan berupa budidaya ikan dalam kolam dengan jumlah 4.797 petak (285,12 hektar), kolam arwana berjumlah 1.637 petak (116,5 hektar) dan karamba sebanyak 7.718 unit (197.848 m²), serta budidaya ikan di sawah bersama padi (minapadi) dengan luas 167 hektar. Di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, luas total kolam yang ada diperkirakan sekitar 285,12 hektar. Kecamatan Suhaid memiliki kolam paling luas, yaitu sekitar 25,51 hektar (8,95% dari seluruh kolam di Kapuas Hulu), kemudian diikuti Kecamatan Jongkong dengan luas kolam 22,44 ha (7,87%), Kecamatan Semitau 22,31 ha (7,82%). Sisanya wilayah-wilayah kecamatan yang memiiki luas kolam 5-20 hektar. Setiap pembudidaya memiliki 1–3 unit kolam dan ukuran kolam yang dimiliki oleh pembudidaya cukup bervariasi meskipun tidak begitu besar yaitu antara 450 dan 1000 m².

Tabel II.52.
Produksi Budidaya Perikanan di Keramba
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
1	Putussibau Utara	11,19	387,22	382,39	287,51	734,00
2	Putussibau Selatan	4,04	-	-	-	-
3	Bika	7,13	-	-	-	-
4	Kalis	9,57	71,10	123,55	92,90	-
5	Mentebah	560,00	1.038,41	46,57	893,52	-
6	Boyan Tanjung	-	-	-	-	-
7	Pengkadan	-	-	-	-	-
8	Hulu Gurung	-	-	-	-	-
9	Seberuang	-	-	-	-	-
10	Semitau	-	-	-	-	-
11	Suhaid	121,65	200,22	236,22	177,61	
12	Selimbau	353,18	1.635,82	1.358,65	907,02	
13	Jongkong	5.167,58	7.572,82	6.870,28	8.132,85	
14	Bunut Hilir	3.685,23	6.673,55	6.576,11	5.867,63	
15	Bunut Hulu	905,24	881,94	1.966,21	2.178,35	620,00
16	Embaloh Hilir	-	-	-	-	-
17	Embaloh Hulu	123,79	722,32	783,37	-	-
18	Batang Lupar	10,31	-	-	-	-
19	Badau	631,93	483,34	278,24	216,14	86,00
20	Empanang	502,85	364,19	369,60	294,22	691,00
21	Puring Kencana	-	-	-	-	-
22	Silat Hilir	-	-	-	-	-
23	Silat Hulu	96,23	45,04	67,20	69,09	-
	Total	**12.179**	**19.689**	**18.676**	**18.829**	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Perairan umum yang potensial dengan luas 233,03 hektar adalah 58.250 unit karamba dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2.560 orang. Budidaya ikan dalam keramba di Kapuas Hulu cukup banyak dan tersebar di seluruh Kecamatan yang memiliki perairan umum. Kecamatan Selimbau memiliki keramba yang paling banyak, yaitu sekitar 1.782 unit (63.868 m²). Kemudian diikuti Kecamatan Jongkong yang memiliki keramba sebanyak 1682 unit dengan luas 48.968 m², dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Putussibau Utara. Secara produksi Kecamatan Jongkong memiliki produksi ikan yang paling tertinggi. Hal ini dikarenakan penjualan ikan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jongkong yang bersumber dari Kecamatan Selimbau, Jongkong dan Suhaid. Produksi kedua terbanyak di Kecamatan Bunut Hilir, Selimbau dan Suhaid.

Tabel II.53.
Produksi Budidaya Perikanan di Minapadi
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	2017 (Kg)	2018 (Kg)	2019 (Kg)	2020 (Kg)
1	Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung	-	40	870	310
2	Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung	-	-	1.082	-
3	Desa Mawan Kecamatan Pengkadan	-	-	630	-
4	Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu	630	40	642	450
5	Dusun Muncin Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu	-	-	584	-
6	Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah	-	-	142	-
	Total	**630**	**80**	**3.950**	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Potensi lahan budidaya air tawar yang tersedia di Kabupaten Kapuas cukup besar dengan total luas 4.126,38 hektar. Potensi budidaya tersebut terdiri atas potensi budidaya minapadi/kolam sebesar 2.115,5 ha. Dari dari pementaan terlaksanananya pengembangan kawasan budiddaya dengan pembangunan minapadi baru terealisasi pada tahun 2016 dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap tahunnya ditargetkan 1 ha, namun realisasi di tahun 2020 seluas 3,5 ha. Sehingga dari 4 Kecamatan tersebut sudah mencapai 7,3 ha di tahun 2020.

Tabel II.54.
Produksi Ikan Hias di Kolam
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	2016 (Ekor)	2017 (Ekor)	2018 (Ekor)	2019 (Ekor)	2020 (Ekor)
1	Putussibau Utara	552		915	89	90
2	Putussibau Selatan	5.045		3.049	231	160
3	Bika	150	-	910	60	-
4	Kalis	4.250		3.507	2.156	1.530
5	Mentebah	322		210	135	20
6	Boyan Tanjung	283		195	331	110

NO	KECAMATAN	2016 (Ekor)	2017 (Ekor)	2018 (Ekor)	2019 (Ekor)	2020 (Ekor)
7	Pengkadan	245		219	30	20
8	Hulu Gurung	520		335	65	20
9	Seberuang	723		312	78	40
10	Semitau	330	-	210	30	38
11	Suhaid	280		90	211	50
12	Selimbau	145		120	90	30
13	Jongkong	5.582		5.225	1.224	978
14	Bunut Hilir	15.790		9.075	2.318	1.514
15	Bunut Hulu	3.657		4.753	536	68
16	Embaloh Hilir	4.483		3.353	238	90
17	Embaloh Hulu	542		345	290	80
18	Batang Lupar	474		270	521	120
19	Badau	30	-	25	30	-
20	Empanang	927		620	76	30
21	Puring Kencana	650		350	652	20
22	Silat Hilir	20	-	67	30	-
23	Silat Hulu	-	-	-		-
	Total	**45.000**	**15.000**	**34.155**	**9.421**	**5.008**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Untuk kolam ikan hias (arwana) perkembangannya cukup pesat, terutama arwana Brazil. Jenis ikan ini dipelihara diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Puring Kencana. Kecamatan yang memiliki jumlah dan luas kolam arwana terbanyak adalah Kecamatan Suhaid, yang memiliki 313 petak kolam dengan total luas 21,5 hekatar. Setelah itu diikuti oleh Kecamatan Semitau dan Hulu Gurung yang masing-masing memiliki luas kolam 12,6 dan 6,4 hektar.Ukuran kolam untuk ikan arwana relatif bervariasi yaitu 350–2500 m²/unit atau rata-rata 1000 m²/unit. Sistem pemeliharaan ikan arwana tergolong budidaya ekstensif atau tradisional yaitu budidaya dengan padat tebar rendah dan input teknologi terbatas, sehingga produktifitas kolamnya juga rendah. Namun karena arwana merupakan ikan hias komoditas ekspor dengan harga jual tinggi, maka usaha budidaya ikan tersebut memiliki tingkat keuntungan yang tinggi.

Tabel II.55.
Produksi Benih Ikan di UPT BI (Benih Ikan) Kelansin
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KOMODITAS	2016 (Ekor)	2017 (Ekor)	2018 (Ekor)	2019 (Ekor)	2020 (Ekor)
1	Mas	71.920	17.790	16.075	4.470	5.050
2	Patin	33.945	87.510	72.671	57.785	127.500
3	Jelawat	18.400	56.284	37.000	16.617	30.000

NO	KOMODITAS	2016 (Ekor)	2017 (Ekor)	2018 (Ekor)	2019 (Ekor)	2020 (Ekor)
4	Gurami	34.570	48.500	21.550	24.300	20.250
5	Lele	120	100	2.600	3.000	7.820
6	Biawan	-	13.300	3.500	7.350	2.950
7	Nila	138.750	138.472	173.616	262.970	129.500
8	Arwana	33	41	14	-	15
9	Tengadak					800
	Total	**297.738**	**361.997**	**327.026**	**376.492**	**323.885**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Sebagai pendukung ketersediaan benih ikan di Kapuas Hulu, UPT Balai Benih Kelansin. Selama tahun 2020, UPT - Benih Ikan (BI) Kelansin Dinas Perikanan sudah melakukan penjualan benih hasil produksi sendiri sebanyak 323,885 ekor. Distribusi benih ada yang tersebar langsung di Kabupaten Kapuas Hulu dan ada juga di Kabupaten Sintang, baik yang diambil secara langsung oleh pembeli yang datang ke UPT - Benih Ikan (BI) Kelansin maupun pembeli yang meminta layanan jasa pengantaran sampai ke lokasi.

Dari total 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, ada sebanyak 15 Kecamatan yang menjadi lokasi distribusi benih, yaitu Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Kalis, Kecamatan Mentebah, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Silat Hulu, Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Jongkong, Kecamatan Selimbau, Kecamatan Suhaid, Kecamatan Semitau, Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Badau.

Ada sebanyak 9 jenis benih ikan yang sudah didistribusikan selama tahun 2020 yaitu jelawat, patin, gurame, nila merah, mas, lele, arwana, biawan, dan tengadak. Dari kesembilan jenis ikan ini, benih patin yang paling banyak didistribusikan yaitu 40,8% dari total benih kemudian nila merah sebanyak 38,9%, jelawat 9,2%, gurame 6,4% dan ikan lainnya sebanyak 4,7% dari total benih yang sudah dijual selama tahun 2020.

Kabupaten Kapuas terkenal dengan produk olahan ikan yang benilai ekonomis tinggi seperti kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asin dan ikan asap. Produk olahan tersebut sudah terjual di berbagai daerah dari pulau Kalimantan hingga pulau Jawa. Terutama kerupuk basah paling banyak diminati masyarakat.

Bahan baku pembuatan ikan tersebut masih bergantung pada produksi ikan tangkap.

Namun dalam pengembangan produk olahan hasil ikam masih mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya modal usaha, rendahnya penguasaan teknologi, diversifikasi masih minim, kualitas olahan masih relatif rendah dan belum bervariasi, pemasaran masih bersifat lokal, pengemasan masih sederhana dan sebagian produk belum besertfikat halal dari MUI.

Tabel II.56.
Produksi Hasil Olahan Perikanan Menurut Jenisnya
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN		KOMODITAS (Ton)					JUMLAH
			KERUPUK BASAH	KERUPUK KERING	IKAN ASAP	IKAN ASIN	LAIN-LAIN	
1	Putussibau Utara		103,50	-	-	-	-	103,50
2	Putussibau		80,30	-	-	-	-	80,30
3	Bika		-	-	-	57,67	-	57,67
4	Kalis		-	-	-	-	-	
5	Mentebah		-	-	-	-	-	
6	Boyan Tanjung		-	-	-	-	-	
7	Pengkadan		-	-	-	-	-	
8	Hulu Gurung		-	-	-	-	-	
9	Seberuang		-	-	-	-	-	
10	Semitau		231,40	423,20	192,79	339,94	48,46	1.235,79
11	Suhaid		282,40	617,90	231,65	427,75	99,58	1.659,28
12	Selimbau		293,70	891,42	236,74	483,52	179,60	2.084,98
13	Jongkong		361,50	981,32	157,06	493,47	157,53	2.150,88
14	Bunut Hilir		453,70	372,04	179,73	356,02	75,12	1.436,61
15	Bunut Hulu		-	-	-	-	-	
16	Embaloh Hilir		122,10	224,50	135,78	239,45	58,82	780,65
17	Embaloh Hulu		80,04	252,74	-	103,53	35,12	471,43
18	Batang Lupar		47,30	18,36	38,26	82,75	12,50	199,17
19	Badau		25,90	21,50	36,63	93,85	-	177,88
20	Empanang		27,80	24,70	41,55	98,42	-	192,47
21	Puring Kencana		-	-	-	-	-	
22	Silat Hilir		65,40	64,48	52,45	55,65	25,32	263,30
23	Silat Hulu		-	-	-	-	-	
	Jumlah	**2019**	**2.175,04**	**3.892,16**	**1.302,64**	**2.832,02**	**692,05**	**10.893,91**
		2018	**2.092,6**	**3.786,5**	**1.134,4**	**2.619,7**	**662,6**	**10.295,7**
		2017	**3.130**	**5.764**	**1.724**	**4.054**	**1.007**	**15.679**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

Dari data tahun 2019 Kecamatan Jongkong merupakan penghasil hasil olahan ikan yang paling tinggi yakni produksi kerupuk kering.

Disusul Kecamatan Selimbau, Bunut Hilir, Suhaid dan Semitau sebagai penghasil hasil olahan ikan yang masih konsisten dalam memproduksi hasil olahan ikan seperti kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asin dan ikan salai. Dalam upaya peningkatan produk olahan di Kapuas Hulu perlu langkah dalam peningkatan produk baik kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perlu dibantu dalam menyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan tempat pengolahan hasil perikanan seperti rehabilitasi rumah produksi.

2.3.3.2. Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki letak yang sangat strategis karena sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur), sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Kawasan lini satu perbatasan yang cukup luas, yaitu seluas 16.951 km2 atau 56,80 % dari luas Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang RIPPARDA Tahun 2017-2032 menetapkan bahwa Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi Kalimantan Barat, hal ini berarti ada 2 (dua) obyek wisata di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi fokus pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel II.57.
Data Usaha Pariwisata
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 2 Juni 2021

NO	Nama Usaha Pariwisata	Jml	Status			Jumlah Tenaga Kerja		Ket
			TDUP	TDUJP	Terdaftar	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hotel / Penginapan	51		9	42		132	

2	Rumah Makan / Restoran	106		2	104		407	
3	Café	17		17			91	
4	Pondok Wisata	7		3			14	
5	JasaTransportasi	10		9			66	
6	Jasa Perjalanan Wisata	3		3			18	
7	Jasa Cendera Mata	4		4			10	
8	Jasa Tataboga / Catering	6		6			38	
9	Usaha Taman Rekreasi dan Area Permainan	3		3			4	
10	Usaha MICE	5		5			29	
11	Pokdarwis / KPP	22		22			677	
Jumlah		**234**	**0**	**83**	**146**	**0**	**1.486**	

Sumber : Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

Berdasarkan table diatas, terdapat 22 (dua puluh dua) kelompok Pengelola Pariwisata (KPP) di Kabupaten Kapuas Hulu yang tersebar di 12 Kecamatan di wilayah kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas. Adapun jenis kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh Kelompok Pengelola Pariwisata (KPP) adalah wisata alam, budaya, rekreasi, petualangan dan minat khusus, Kabupaten Kapuas Hulu saat ini juga telah memiliki 2 (dua) Desa Wisata, yaitu Desa Wisata Banua Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Wisata Melemba di Kecamatan Batang Lupar.

Selanjutnya terdapat 110 (seratus sepuluh) potensi objek pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu, 2 (dua) lokasi objek pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan menjadi Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).

2.3.3.3. Pertanian

Pertanian menjadi sector penyangga utama perekonomian daerah, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani itu sendiri. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ini dapat menggunakan ukuran Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Tabel II.58.
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Realisasi Sektor Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :				
	Padi (Ton)	60,510.00	52,588.00	24,567.79	23.345,0
	Jagung (Ton)	244.00	255.00	1,258.00	3.190,2
	Ubi Kayu (Ton)	4.00	8,908.00	11,244.00	11.536,5
2	Peningkatan Produksi Peternakan :				
	- Sapi (kg)	138,709	136,280	155,706	161,776
	- Kambing (kg)	2,577	2,478	2,535	3,993
	- Babi (kg)	121,867	119,369	168,755	132,064
	- Ayam Buras (kg)	150,763	151,290	83,017	83,206
	- Ayam Ras Pedaging (kg)	980,336	987,848	1,450,028	1,222,092
	- Itik (kg)	371	386	1,673	3,551
3	Produksi Perkebunan :				
	Kelapa Sawit (Ton)	1,130,610	748,458.87	954,224.80	1,259,264.12
	Karet (Ton)	16,948	12,679	12,679	12,686
	Kopi (Ton)	5.00	4.00	2.50	1.60
	Lada (Ton)	11.00	11.00	12.50	12.75

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

a. Luas panen padi Kabupaten Kapuas Hulu 58,59 % masih di dominasi luas panen dari padi lahan kering (Padi Ladang). Hal ini sangat mempengaruhi tingkat Produktivitas padi per hektar, dikarenakan Produktivitas padi lahan kering (Padi Ladang) lebih rendah dibandingkan Produktivitas padi Lahan sawah;
b. Terjadinya penurunan produksi padi dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya dikarenakan dalam penghitungan data produksi padi menggunakan kerangka sample area yang mengacu pada luas lahan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/ BPN, sedangkan untuk luas panen padi lahan kering (Padi Ladang) tidak diperhitungkan;
c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang produksi pertanian, sehingga upaya untuk meningkatkan produksi dan produksi dan produktivitas pertanian masih belum maksimal.

Beberapa keanekaragaman di sector pertanian dan sub sektornya menjadi potensi yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sektor pertanian dengan kegiatan yang berlangsung pada seluruh sub sistemnya dapat berfokus pada sub system pengolahan (agroindustry) yang secara keseluruhan mewujudakan Kawasan agropolitan yang padu dan telah ditetapkan dalam masterplan agropolitan yang berupa penetapan distrik, komoditi dan produk unggulan pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu.

2.3.3.4. Perdagangan

Tabel II.59.
Pasar Rakyat Yang Tersebar Di 15 (Lima Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	NAMA PASAR	TAHUN PEMBANGUNAN	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Badau	Pasar Badau	1984	1			OPERASIONAL
2		Pasar Tradisional Badau	1998	1			OPERASIONAL
3		Pasar Terminal	2011			1	TIDAK OPERASIONAL
4		Pasar Niaga Badau	2017	1			OPERASIONAL
5	Bika	Pasar Bika	1999			1	TIDAK OPERASIONAL
6	Bunut Hilir	Pasar Bunut Hilir	2016	1			OPERASIONAL
7	Hulu gurung	Pasar Tradisional Keluarga	1989			1	TIDAK OPERASIONAL
8		Pasar Tepuai	2016	1			BELUM OPERASIONAL
9		Pasar Hulu Gurung	2018	1			OPERASIONAL
10	Jongkong	Pasar Lintas Senara Jongkong	1989			1	TIDAK OPERASIONAL
11		Pasar Jongkong	2010			1	TIDAK OPERASIONAL (DISEWA OLEH ALEXANDER CUNGKU(MANDIRI)
12		Pasar Bidadari Jongkong	2018	1			OPERASIONAL
13	Putussibau Selatan	Pasar Terminal Kedamin	1989	1			BELUM OPERASIONAL

NO	KECAMATAN	NAMA PASAR	TAHUN PEMBANGUNAN	KONDISI PASAR			KET
				BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
14		Pasar Kedah I	2013	1			OPERASIONAL
15		Pasar Kedah II	2014	1			BELUM OPERASIONAL
16	Putussibau Utara	Pasar Daerah	1970			1	TIDAK OPERASIONAL (PROVINSI)
17		Pasar Merdeka	1989	1			OPERASIONAL (BIDANG ASET)
18		Pasar Kopas	1989	1			OPERASIONAL (KOPAS)
19		Pasar Terminal	1990		1		OPERASIONAL
20		Pasar Pujasera I	2004		1		OPERASIONAL
21		Pasar Pala Pulau	2009			1	TIDAK OPERASIONAL
22		Pasar Sibau Hilir	2010	1			OPERASIONAL
23		Pasar Pantai Sibau	2013			1	TIDAK OPERASIONAL
24		Pujasera II	2017	1			OPERASIONAL
25		Pasar Rakyat Dogom Permai	2018	I			BELUM OPERASIONAL
26	Semitau	Pasar Cempaka	2015 & 2017	1			OPERASIONAL (KIOS)
27		Pasar Semitau	2018	1			OPERASIONAL (LAPAK)
28	Silat Hilir	Pasar Inpres Simpang Silat	1978			1	TIDAK OPERASIONAL (DANA TP)
29		Pasar Simpang Silat	2018	1			BARU MULAI OPERASIONAL
30	Silat Hulu	Pasar Inpres Silat Hulu	1978			1	TERBAKAR
31	Selimbau	Pasar Impress Munguk Batu Selimbau	1987			1	TIDAK OPERASIONAL
32		Pasar Selimbau	2018	1			BELUM OPERASIONAL
33	Batang Lupar	Pasar Lanjak	1984			1	TIDAK OPERASIONAL
34		Pasar Lanjak	2018	1			BELUM OPERASIONAL
35	Embaloh Hulu	Pasar Martinus	1989			1	TIDAK OPERASIONAL
36	Empanang	Pasar Rakyat Empanang	2019	1			OPERASIONAL
37	Puring Kencana	Pasar Rakyat Puring Kencana	2019	I			BELUM OPERASIONAL
				22	2	13	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total 37 (tiga puluh tujuh) pasar rakyat yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, hanya 16 (enam belas) pasar rakyat yang beroperasi, sedangkan yang lainnya belum beroperasi dan masih dalam tahap pembongkaran/revitalisasi, dan ada yang sudah dibangun namun belum beroperasi di karenakan sarana dan prasarana pendukung belum lengkap. Jumlah pedagang yang menempati 16 (enam belas) pasar rakyat yang beroperasi adalah 538 (lima ratus tiga puluh delapan) orang pedagang.

2.3.3.5. Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 2 (dua) Program yaitu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

Tabel II.60.
Perkembangan Pelaku Industri Kecil Dan Menenggah
Di Kabupaten Kapuas Dari Tahun 2016 S/D 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pelaku IKM	710	755	778	2.005	2.360

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaku Industri Kecil dan Menegah (IKM) di Kabupaten Kapuas Hulu yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Industri pangan (Madu, Depot Air Isi Ulang, Tepung Mokaf, Tepung Tapioka, Tempe, Tahu, Es Dawet, Kue Basah, Abon IKan, Penggiling Padi, Kerupuk Basah, Naget, Sosis, Produksi Mie, Pentol Kuah, Ikan Asap, Kripik, Obat Tradisional, Kue dan Roti, Ikan Asin, Bakso, Kerupuk Kering, Kerupuk Amplang dan Air Minum Dalam Kemasan). Dari 25 (dua puluh lima) jenis usaha di bidang industry pangan, ada 5 kegiatan yang mendominasi yaitu: Madu, Kerupuk Kering, Kerupuk Basah, Kue Basah, Abon Ikan dan Penggililngan padi.

Sedangkan di Bidang Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan (Las, Penggergajian Kayu, Menjahit, Revarasi Kaca, Pandai Besi, Pahat dan Seni Ukir, Kerajinan Limbah Kayu Belian, Meubel, Alumunium, Anyam-anyaman, Tenun Sidan, Tenun Ikat, Tenun Manik, Tenun Adat, Tikar Lampit, Tenun Ikat Lusi, Tenun Kebat, Tenun Selendang, Tenun Sungkit, Bengkel Mobil, Bengkel Sepeda Motor, Bengkel Sepeda, Reparasi TV, Tape Recorder, dll, Tukang Photo / Cetak (Photo Studio), Tukang Mas / Jual, Hiasan Manik, Kerupuk Ikan, Potong Kaca/Revarasi Kaca, Percetakan dan Photo Copy, Gigi Palsu, Stempel, Komponen Bahan Bangunan, Moulding, Kusen, Pintu dan Jendela, Bubut Kayu, Penyulingan Gaharu, Salon Rambut dan Tambal Ban.Dari 25 (dua puluh lima) jenis usaha di bidang industry pangan, ada 5 kegiatan yang mendominasi yaitu: Tenun Ikat, Tenun manik, Anyam-anyaman, Pandai Besi, Tenun Sidan dan Meubel.

Dalam satu tahun terakhir ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bidang perindustrian, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan kepada pelaku IKM;
2. Memfasilitas kelompok IKM di Kabupaten dengan bantuan mesin, peralatan dan bahan baku;
3. Memfasilitasi produk IKM melalui sertiifkasi produk halal;
4. Memfasilitasi produk IKM melalui pengujian produk dengan parameter SNI (Standar nasional Indonesia).

2.3.3.6. Transmigrasi

Program transmigrasi dikembangkan sebagai bagian dari upaya demografis pemerataan persebaran penduduk.Program transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan persebaran penduduk dalam tujuan mensejahterakan warga Negara.Ia merupakan salah satu dari berbagai upaya lain yang dilaksanakan dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, membangun

kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial-budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan transmigrasi antara lain adalah membangun permukiman baru yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga menjadi pusat produksi, pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan. Tujuan ini harus dicapai dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian, agar kemampuan sumberdaya untuk mendukung kegiatan transmigrasi dengan segala pengusahaan sumberdaya di atasnya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pembangunan transmigrasi juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dalam waktu yang telah ditentukan.Untuk mencapai maksud tersebut, pembangunan di wilayah baru dalam bentuk wilayah dan kawasan transmigrasi perlu dilakukan melalui prinsip-prinsip pengembangan wilayah (regional development) yang bersifat lestari (sustainable).Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu model pengembangan wilayah yang didukung oleh pengembangan masyarakat (community development) yang memadai.Selain itu, pembangunan permukiman transmigrasi pada hakekatnya merupakan pembangunan pedesaan di daerah baru yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya berbagai aspek sumberdaya fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pembangunan kewilayahan ini, salah satu hal yang patut dijadikan pertimbangan adalah fakta bahwa Indonesia telah memasuki era otonomi daerah, yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaiki dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang menjadi konsekuensi dari otonomi adalah terjadinya pergeseran dalam paradigm pembangunan, diantaranya dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kewilayahan.Sesuai dengan arahan Propenas untuk mempercepat pembanguna daerah, pengembangan wilayah transmigrasi diarahkan pada pengembangan wilayah-wilayah yang bersiat strategis, cepat tumbuh, wilayah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

Sesuai denan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di wilayahnya dengan harus tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah penyelenggaraan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanaatan ruang.

Sebelum dilakukannya pembukaan lahan, suatu calon permukiman transmigrasi disurvai melalui berbagai kajian. Tahapan perencanaannya dilakukan melalui tahapan perencanaan bertingkat, mulai dari penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), Rencana Kawasan Satuan Kawasan Pengembangan (RKSKP), Rencana Teknis Satuan Permukiman Transmigrasi (RTSP) dan lain-lain. Rekomendasi makro disampaikan pada dokumen-dokumen perencanaan makro seperti RKT, sedangkan, rekomendasi detil sesuai dengan karakteristik lokasi yang bersangkutan disajikan pada sebuah rencana teknis detil seperti RTSP dan RTJ.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya membentuk suatu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara holistic dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WTP) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LTP).Pengembangan WTP diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai **Kawasan Perkotaan Baru(KPB)**, sedangkan LTP diarahkan untuk **mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang** sebagai KPB.

Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tamping lingkungan. Dengan demikian,

pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar Pulau Jawa, untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari : (!) Lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa dan anatara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.

PIKA-Trans Mentebah meliputi dalam 4 kecamatan, yaitu : Embaloh Hilir, Kalis, Bika, dan Mentebah. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan antar Negara (Indonesia-Malaysia), merujuk pada Nawa Cita ke 3 Presiden Joko Widodo " **Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka negara kesatuan",** makaKawan Mentebah perlu mendapat perhatian oleh berbagai lintas sector guna pengembangan kawasan melalui berbagai program pemerintah, termasuk Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka mendukung ketahanan nasional dalam berbagai bidang, khususnya untuk kawasan Kabupaten Kapuas Hulu mengingat lokasi Keliling Semulung/Kirin Nanga SP.1 di Kecamatan Embaloh Hilir dan Lokasi Nanga Kalis SP. 1 di Kecamatan Kalis telah menerima sentuhan program pembangunan dari Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, disamping untuk mengembangkan daya saing perekonomian daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pendapatan petani di Provinsi Kalimantan Barat dan Khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu serta mendukung swasembada pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel II.61.
Data Penempatan Kawasan Satuan Transmigrasi Yang Telah Dibina Dan Difasilitasi Pembangunan Di Kabupaten Kapuas Hulu

No	UPT/SP	Kecamatan	Tahun Penempatan	Realisasi Penempatan		Penyerahan Tahun	Keterangan
				KK	Jiwa		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UPT. I Desa Pelangi						
	- SP. I	Silat Hilir	1983/1984	400	1.736	1987/1988	Terbangun

No	UPT/SP	Kecamatan	Tahun Penempatan	Realisasi Penempatan		Penyerahan Tahun	Keterangan
				KK	Jiwa		
2	UPT. II Desa Setunggul						
	- SP. II	Silat Hilir	1984/1985	350	1.435	1989/1990	Terbangun
3	UPT. III Desa Pangeran						
	- SP. III	Silat Hilir	1983/1984	250	1.075	1987/1988	Terbangun
4	UPT. IV Desa Miau Merah						
	- SP. IV	Silat Hilir	1983/1984	350	1.410	1997/1988	Terbangun
5	UPT. V Desa Miau Merah						
	- SP. V	Silat Hilir	1992/1993	275	975	1997/1988	Terbangun
6	UPT. VI Nanga Sahui Desa Sayut						
	- SP. I	Putussibau Selatan	1992/1993	300	1.227	1997/1988	Terbangun
7	UPT. VII Desa Nanga Danau						
	- SP. I	Manday	1994/1995	300	1.200	1999/1988	Terbangun
1	2	3	4	5	6	7	8
8	UPT. VIII Sibau Hulu Desa Pala Pulau						
	- SP. I	Putussibau Utara	1992/1993	75	308	1997/1988	Terbangun
9	UPT. IX HTI Desa Bunut Tubuy						
	- SP. I	Manday	1994/1995	300	1.200	1999/2000	Terbangun
10	Transabangdep Desa Nanga Suruk						
	- SP. I	Bunut Hulu	1995/1996	200	673	2001/2002	Terbangun
11	UPT. X PHR Manday Desa Kedamin Darat						
	- SP. I	Putussibau Selatan	1996/1997	120	505	2003/2004	Terbangun
12	UPT. XI Nanga Suhaid di Bua Mau						
	- SP. I	Pangkadan	1996/1997	310	890	2004/2005	Terbangun
13	UPT. XII Nanga						

No	UPT/SP	Kecamatan	Tahun Penempatan	Realisasi Penempatan		Penyerahan Tahun	Keterangan
				KK	Jiwa		
	Suhaid di Buak Mau						
	- SP. II	Pangkadan	1996/1997	280	1.011	2004/2005	Terbangun
14	UPT. XIII Nanga Suhaid di Buak Limbang						
	- SP. III	Pangkadan	1996/1997	300	1.080	2004/2005	Terbangun
15	UPT. XIV Desa Nanga Ret						
	- SP. I	Boyan Tanjung	2003/2004	225	874	2010	Terbangun
16	UPT. XV Boyan Tanjung Desa Mujan						
	- SP. I	Boyan Tanjung	2005/2006	100	390	2013	Terbangun
			2006/2007	100	441	2013	Terbangun
			2005/2006	100	430	2013	Terbangun
17	UPT. XVI Desa Suka maju						
	- SP. I	Mentebah	2005/2006	100	411	2013	Terbangun
			2006/2007	100	453	2013	Terbangun
			2007/2008	100	430	2013	Terbangun
			2008/2009	100	421	2013	Terbangun
1	2	3	4	5	6	7	8
18	UPT. XVI I Desa Kepala Gurung						
	- SP. I	Mentebah	2005/2006	100	440	2014	Terbangun
			2006/2007	100	416	2014	Terbangun
			2007/2008	100	399	2014	Terbangun
			2009/2010	100	388	2014	Terbangun
19	UPT. XVIII Desa Nanga Kalis						
	- SP. I	Kalis	2010	150	596	2016	Terbangun
			2011	70	249	2016	Terbangun
			2016	50	184	Masih dalam Binaan	Terbangun
20	UPT. XIX Desa Kirin Nangka						
	- SP. I	Embaloh Hilir	2013	105	399	Masih dalam Binaan	Terbangun
			2015	95	356	Masih dalam Binaan	Terbangun

No	UPT/SP	Kecamatan	Tahun Penempatan	Realisasi Penempatan		Penyerahan Tahun	Keterangan
				KK	Jiwa		
			2016	50	165	Masih dalam Binaan	Terbangun
		Jumlah		**5.655**	**22.435**		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Berdasarkan datapenempatan kawasan dan satuan permukiman transmigrasi tersebut dapat diketahui bahwa penempatan transmigrasi di Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 1983 s/d. Tahun 2016 menunjukkan jumlah transmigran sebanyak 5.655 KK dan jumlah Jiwa sebanyak 22.435 orang. Hal ini memberikan dampak yang baik terhadap kontribusi perekonomian dan pemerataan penduduk, pada hakekadnya adalah instrument pembangunan kawasan pedesaan dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru.Pembangunan kawasan transmigrasi tidak semata menyediakan ruang bagi perpindahan penduduk (transmigran) namun lebih penting adalah pengembangan potensi sumber daya lokal menjadi pusat pertumbuhan wilayah lokal dalam kerangka pengembangan keterkaitan Perdesaan Perkotaan.

2.3.4. FOKUS LAYANAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.4.1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu periode 2019 – 2024 adalah sebanyak 30 orang, yang terdiri atas 28 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ke-27 orang anggota tersebut (Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak temasuk dalam anggota komisi) terbagi menjadi 3 komisi, yaitu Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan sebanyak 9 orang, Komisi B yang membidangi Ekonomi dan Keuangan sebanyak 9 orang, dan Komisi C yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 9 orang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan 10 (sepuluh) PERDA Inisiatif yang merupakan salah satu fungsi DPRD di Bidang Legislasi atau Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu.

2.3.5. FOKUS LAYANAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.5.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban. Pelaksanaan pembangunan di Kapuas Hulu telah menetapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

2.3.5.2. Keuangan

Harus diakui bahwa *good governance* telah menempati posisi yang terhormat dalam wacana pembangunan belakangan ini. Suatu wacana yang sejatinya bersandar pada tiga pilar utama, transparansi, partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.Suatu upaya mulia yang pada dasarnya bermuara pada terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, khususnya terkait administrasi keuangan.

Selama 4 tahun terakhir (2017-2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kapuas Hulu. Opini WTP berarti bahwa seluruh informasi didalam laporan keuangan dinilai bebas dari salah saji material. Predikat WTP juga memberi arti bahwa auditor BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan, Kapuas Hulu telah memenuhi prinsip akuntabilitas.

2.3.5.3. Pendapatan

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pemungutan terhadap 10 (sepuluh) jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sedang Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui organisasi perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Uji Material/Laboratorium, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Penyeberangan Air, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek. Pada tahun 2021 ada penambahan jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang.

2.3.5.4. Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan subyek pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga memiliki peran penting dalam mewujudkan pencapaian pembangunan daerah.Selain terkait kuantitas ASN, kualitas ASN juga harus dikedepankan demi peningkatan dan akselerasi kinerja sehingga kompetensi ASN diperhatikan sesuai beban kerjanya.

Pada tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 4.810 orang pegawai yang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 2.431 orang dan pegawai perempuan sebanyak 2.379 orang. Dari sejumlah pegawai tersebut, 14 orang

diantaranya adalah golongan I, 782 orang golongan II, 2.857 orang golongan III dan 1.157 orang golongan IV, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 37 orang.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya meningkatkan pagu anggaran untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut.

1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 2 huruf m bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kesejahteraan. Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. Pemberian penghargaan atas beban kerja pegawai dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Pegawai dapat lebih antusias dalam bekerja apabila tempat kerjanya memberikan suatu penghargaan kepada seluruh pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan baik, dalam hal ini dapat berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang pada dasarnya pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mengharapkan suatu penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya berupa gaji pokok, insentif, dan asuransi, tapi pemberian kompensasi dapat lebih memberikan rangsangan kepada pegawai sehingga pegawai memperoleh penghasilan lain diluar gaji pokok yang diterima setiap bulannya dan dapat lebih meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga tujuan dan target pekerjaan dapat tercapai dengan baik. Ada

beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkenaan dengan pentingnya semangat kerja bagi pegawai, alasan tersebut antara lain:

a. pekerjaan yang diberikan kepada setiap pegawai dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Meminimalisir tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai oleh atasan.

2. Menurunkan potensi pelanggaran

Beberapa hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan korupsi antara lain adalah adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural. Standar pengeluaran yang tidak mencukupi dapat memotivasi pegawai pemerintah untuk melakukan korupsi demi memenuhi standar pengeluaran yang ingin dicapai. Ketika struktur dan sistem dalam pemerintahan masih belum ideal dan memungkinkan korupsi untuk terjadi. Faktor sistemik berupa sistem yang dapat menyebabkan terjadinya pembiaran korupsi sehingga korupsi terus berlangsung/merajalela dalam sebuah sistem. Dengan adanya berbagai macam motivasi untuk melakukan korupsi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orang melakukan korupsi. Salah atu upaya prefentif untuk menurunkan potensi melakukan pelanggaran seperti korupsi bisa berupa mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

3. Kondisi tempat bertugas

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten terluas setelah Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat dengan luas keseluruhan mencapai 29.842,03 km^2 (20% luas provinsi Kalimantan Barat). Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak kurang lebih 240 Km dan melebar dari utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 162,70 Km. terletak di ujung provinsi Kalimantan Barat dengan jarak tempuh 657 Km melalui jalan darat (16 jam berkendara) dan 842 Km melalui sungai kapuas. Waktu tempuh ke ibu kota provinsi kurang lebih 60 menit penerbangan menggunakan pesawat udara jenis ATR.

Daerah kapuas hulu termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sarana dan prasarana jalan mempunyai arti penting untuk kelancaran kegiatan ekonomi suatu daerah. Namun demikian sarana dan prasarana yang ada dikabupaten kapuas hulu masih terbatas. Jalan penghubung antar desa atau wilayah sebagian besar masih permukaan tanah yang sangat bermasalah ketika musim penghujan datang ditambah lagi struktur tanah yang masih labil serta jenis tanah liat yang berlumpur menyebabkan jalan-jalan yang ada sulit untuk dilalui.

Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pegawai yang bertugas di kecamatan dalam menjalankan tugasnya, tentu saja dengan resiko pekerjaan yang menyertainya. Penambahan jumlah TPP diharapakan dapat menjadi motivasi bagi pegawai di daerah agak menjadi lebih semangat menjalankan tugasnya.

4. Fasilitas pinjaman kredit bagi pegawai negeri

Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga keuangan yang beroperasional di daerah kabupaten kapuas hulu, sebanyak 85% pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu sudah mengambil fasilitas kredit pegawai, baik berupa fasilitas kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak sedikit pula dari pegawai tersebut yang mengambil pinjaman dan hanya menyisakan sedikit dari gaji yang diperolehnya tiap bulan. Dengan demikian secara otomatis sisa gaji tidak mencukup untuk kebutuhan pegawai tersebut. Pemberian TPP bagi pegawai bisa menjadi Salah satu solusi yang dapat diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

2.3.5.5. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas dan efesiensi organisasi dapat diberikan secara berkala agar setiap pegawai tetap dapat meningkatkan kompetensinya agar dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang pengembangan kompetensi yang termuat pada pasal 23. Sehingga hal ini

menunjukkan posisi penting pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka akselarasi kinerja aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Kapuas Hulu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Dalam hal ini yang menjadi titik berat dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur adalah terkait pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Pejabat Administrasi yang menjalankan fungsi manajerial di setiap unit organisasi yaitu melalui Pelatihan Kepemimpinan Negara (PKN) Pratama bagi Pejabat Eselon II, Pelatihan Kepempimpinan Adminstrastor (PKA) bagi Pejabat Eselon III dan Pelatihan Kepempinan Pengawas (PKP) bagi Pejabat Eselon IV.

Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2015 s.d 2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah men-diklat-kan para pejabat sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Pejabat yang memenuhi syarat. Adapun rincian Jumlah Pejabat Eselon II sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 50 (lima puluh orang), dan Pejabat Eselon IV sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang.

Adapun secara rinci dapat kami tampilkan sebagai berikut :

Tabel II.62.
Tabel Pejabat yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Tahun							Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	PKN	2	1	0	0	3	0	0	6
2.	PKA	13	15	4	4	4	0	10	50
3.	PKP	30	30	0	0	9	28	0	97
TOTAL									**153**

Sumber: BKPSDM Kab. Kapuas Hulu,September 2021

Dari data diatas maka jumlah seluruh Pejabat Struktural yang telah di-diklat-kan oleh Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu sejak tahun 2015 s.d 2021 dalam rangka pemenuhan kompetensi melalui pelatihan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang.

2.3.5.6. Penelitian dan Pengembangan

Penelitin dan pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitiandan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat. Adapun penelitian yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.63.
Tabel Penelitian Tahun 2017-2021 di Kabupaten Kapuas Hulu

TAHUN	KERJASAMA	JUDUL PENELITIAN
2017	Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Studi Kelayakan Kesesuian Lahan Perkebunan Jagung di Kabupaten Kapuas Hulu
2018	- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat - Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Visi Borneo	- Studi Kelayakan Kesesuian Lahan Untuk Bawang Merah di Kabupaten Kapuas Hulu - Dampak Sosial dan Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Kapuas Hulu
2019	- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura - Politeknik Negeri Pontianak	- Sejarah Kerajaan Selimbau di Kabupaten Kapuas Hulu - Pengembangan Ekowisata Melalui Strategi Pemasaran dan *Design* Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kunjugan Wisatawan di Kabupaten Kapuas Hulu

TAHUN	KERJASAMA	JUDUL PENELITIAN
2020	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura	Potensi Tumbuhan Obat Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu
2021	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura	- Studi Mitigasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu - Kajian Strategis Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kapuas Hulu - Kajian Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten Kapuas Hulu - Kajian Potensi dan Resiko Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

2.3.5.7. Pengelolaan Perbatasan

Pengelolaan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , pengelolaan perbatasan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Selain itu pengelolaan perbatasan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. menjaga dan memelihara tanda batas;
3. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan

4. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Terdapat 7 (tujuh) Kecamatan Lini I di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu : Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau utara, dan Putussibau Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Sarawak Malaysia Timur.

Di Kecamatan Badau, sejak tahun 2004 telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, dan telah diresmikan tahun 2016 sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), sebagaimana layaknya PPLB Entikong Kabupaten Sanggau.

2.3.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.6.1. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Inspektorat : Membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat : Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati d. Penyusunan laporan hasil hasil pengawasan e. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Prestasi kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran terdiri dari ;

1. Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “BB” dengan 76%
2. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti dengan 84 %
3. Level Maturitas SPIP Kabupaten dengan Level 3.

4. Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti 75%
5. Level Kapabilitas APIP dengan Level 3 dengan catatan

Hambatan Pengawasan yang dihadapi inspektorat Tahun Anggaran 2016 -2021 adalah :

1. Sumber Daya Manusia

kurangnya jumlah sumber daya manusia Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebanyak 60 orang dari kebutuhan yang seharusnya sebanyak 82 orang sehingga baru 22 orang tenaga APIP yang terpenuhi, hal tersebut tergambar dalam Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Auditor Ahli yang ada sebanyak 10 orang sedangkan kebutuhan akan Auditor Ahli tersebut sebanyak 36 orang, P2UPD Ahli yang ada sebanyak 10 orang sedangkan kebutuhan akan P2UPD sebanyak 38 orang, Auditor Kepegawaian yang ada sebanyak 2 Orang sedangkan kebutuhan akan Auditor Kepegawaian sebanyak 6, Pranata Komputer yang diperlukan sebanyak 1 orang tapi belum terpenuhi, dan kebutuhan akan Arsiparis sebanyak 1 orang juga belum terpenuhi.

Demikian juga Kurangnya Peningkatan Pengembangan Kompetensi tenaga APIP, dan pratek profesional pengawasan

2. Anggaran

Belum sepenuhnya terpenuhi anggaran Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang mengamanatkan bahwa anggaran pengawasan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran paling sedikit 0,75% dari Total Belanja Daerah dari 1 Triliun sampai dengan 2 Triliun

3. Sarana dan Prasarana

Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti Gedung Kantor yang belum memadai, belum tersedia kendaraan operasional roda empat, roda dua dan speed boats dalam pelaksanaan pengawasan serta masih terbatasnya perangkat Peralatan Kerja yang memadai.

2.3.7. FOKUS UNSUR KEWILAYAHAN

2.3.7.1. Kecamatan

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan dimana setiap kecamatan di pimpin oleh Camat. Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan".

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

2.3.8. FOKUS UNSUR PEMERINTAH UMUM

2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka melaksanaan pelayanan kepada menyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksaakan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang baik Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, selain instansi vertikal juga melibatkan pihak keamanan dan Badan Intelijen Negara di daerah, dan tidak kalah pentingnya melibatkan pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat dan organisasi kemasyaratan baik tingkat provinsi dana atau tingkat kabupaten/ kota.

Menjaga konduvisitas wilayah menjadi tugas kita bersama, oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 25 yang menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi antara lain :

a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
c) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
f) Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan ;
g) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
h) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah.Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas ekonomi suatu daerah yang dilihat dari pengeluaran perkapita. Semakin tinggi pengeluaran perkapita maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut.

a. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi atau pengeluran rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesajahteran rumah tangga yang bersangkutan golongan pengeluaran per kaipta penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 persentase terbesar terdapat pada golongan antara Rp.500.000,- s/d Rp.749.999,- dengan persentase sebesar 26,9 pesen. Lalu diikuti dengan golongan pengeluran sebesar Rp.750.000,- s/d Rp. 999.999,- sebanyak 21 persen penduduk. Berikut

ditampilkan secara rinci dan lengkap golongan pengeluaran perkapita penduduk kabupaten Kapuas hulu.

Tabel II.64.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

No	Golongan Pengeluaran (Rupiah)	Persentase
1	<500.000	16,4
2	500.000-749.999	26,9
3	750.000 -999.999	21,0
4	1.000.000 – 1.499.999	17,4
5	1.500.000+	18,3
Jumlah		100

Sumber: Survey Social Ekonomi Nasional,Maret 2020(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

b. Lapangan Usaha Utama

Lapangan usaha atau bidang pekerjaan adalah sektor kegiatan dari tempat bekerja/berusaha Lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor, yang paling umum digunakan dalam analisis ketenagakerjaan adalah lapangan usaha sembilan sektor.

Lapangan usaha yang berkontribusi paling besar bagi ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sektor pertanian sebesar 74.150 jiwa, sektor jasa sebesar 38.331 jiwa dan industri pengelolaan sebesar 28.272 jiwa.

Tabel II.65.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Berkerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Perkerjaan Utama di Kabupaten Kapuas Hulu,2020

Lapangan Perkerjaan Utama	Jumlah
Pertanian	74.150
Industri Pengelolaan	28.272
Jasa	38.331
Jumlah	**140.753**

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

2.4.2. Focus Fasilitas Infrastruktur/Wilayah

Infrastruktur merupakan konsep fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat umum dalam ranah sosial dan

ekonomi.Sedangkan fasilitas adalah tempat untuk menampung kepentingan masyarakat berupa fisik dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat publik. Fasilitas harus dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penyediaan produk dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya dan sumber daya yang minimal. Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas infrastruktur/wilayah akan mempengaruhi daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Fasilitas infrastruktur/wilayah antara lain meliputi tranportasi (darat, sungai dan udara), telekomunikasi, perumahan dan Permukiman, listrik dan air bersih/air minum.

2.4.2.1. Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang, dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Sedangkan alat transportasi adalah sebuah alat atau kendaran yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, barang dan hewan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Secara umum, apabila dilihat dari sistem pengangkutan atau transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu, belum seluruh wilayah mendapat layanan jaringan transportasi yang baik.Untuk itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana trasportasi harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.Ada 3 (tiga) macam jenis sarana transportasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi transportasi darat, transportasi sungai dan transportasi udara.

a. Transportasi Darat.

Sarana dan prasarana transportasi darat/jalan mempunyai arti penting untuk kelancaran kegiatan ekonomi suatu daerah.Namun demikian sarana dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat terbatas.

Berdasarkan data sampai akhir Tahun 2019 yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, hingga Akhir tahun 2019, panjang jalan Kabupaten di Kapuas Hulu adalah 1.108,330 km, dengan rincian jenis permukaan masing- masing : Aspal 204,954 km, rigid beton 194,680 km, kerikil 488,127 km dan tanah 220,569 km. Kondisi jaringan Jalan umumnya masih dalam kondisi Rusak ringan 21,50 %, rusak berat 17,96%, baik 28,29% dan sedang 32,15%. Sedangkan khusus untuk jembatan sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah total jembatan 845 unit dengan rincian jembatan dalam kondisi baik ada 538 unit, kondisi sedang 22 unit, kondisi rusak ringan 103 unit dan rusak berat 182 unit.

Berdasarkan data sampai akhir Tahun 2019 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah rambu-rambu lalu lintas darat yang telah terpasang di ruas-ruas jalan di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 1.354 unit dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan jumlah penumpang angkutan darat /bis 64.532 orang.

b. Transportasi Sungai

Angkutan sungai merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup penting di Kabupaten Kapuas Hulu. Banyak lokasi baik Desa maupun Kecamatan yang saat ini masih belum terjangkau dengan angkutan darat, sehingga satu-satunya cara untuk mencapai lokasi tersebut adalah melalui angkutan sungai. Angkutan sungai dijadikan sarana penghubung maupun penunjang kegiatan ekonomi bagi daerah pemukiman yang ada ditepi sungai seperti Suhaid, Jongkong, Selimbau, Semitau, Badau, Silat Hilir, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir.

Berdasarkan data sampai akhir Tahun 2019 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kapuas Hulu,jumlah dermaga yang telah di bangun di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 9 (sembilan) Unit yang tersebar pada 6 kecamatan yaitu Kecamatan Putussibau Utara ada 2 unit, Kecamatan Suhaid 1 unit, Kecamatan Jongkong 2 unit, Kecamatan Bunit Hilir 1 unit, Kecamatan Batang Lupar 2 unit dan Silat Hilir 1 unit. Sedangkan untuk jumlah penumpang speed boat 5.951 penumpang.

c. Transportasi Udara

Transportasi udara di Kabupaten Kapuas Hulu dilayani oleh perusahaan penerbangan NamAir dan Wings untuk jalur penerbangan Pontianak-Putussibau dan Putussibau - Pontianak.

Pada Tahun 2020, jumlah pesawat yang berangkat melalui Bandara Pangsuma Putussibau tercatat sebanyak 761 penerbangan. Angka ini mengalami penurunan 1,05 persen dibandingkan dengan Tahun sebelumnya 814 penerbangan di karenakan terjadinya penyebaran virus covid - 19.

2.4.2.2. Telekomunikasi

Sampai dengan akhir Tahun 2019 jumlah manara telekomunikasi operator indosat sebanyak 33 manara, telkomsel sebanyak 42 manara sedangkan jumlah desa yang terlayani jaringan telekomunikasi sebanyak 148 desa, 4 kelurahan, desa dengan jaringan komunikasi yang lemah (3 G dan 2 G) sebanyak 52 desa dan desa yang tidak mempunyai jarinagan telekomunikasi sebanyak 78 desa.

2.4.2.3. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maupun kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (Prov/Kab) dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman Kabupaten Kapuas Hulu pada saat ini dan yang akan terjadi dimasa depan, maka diperlukan kesatuan sistem yang terdiri dari pembinaan, penyelengggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sitem pembiayaan, serta peran masyarakat yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Berdasarkan kondisinya, perumahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perumahan layak huni dan perumahan tidak layak huni. Menurut Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002, kebutuhan ruang layak huni ditentukan oleh kebutuhan ruang/orang, ketinggian langit rumah rata-rata, memiliki minimal ruang dalam rumah yang dipersyaratkan dalam aturan. Sedangkan perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Adapun kebutuhan rumah layak huni adalah sebagai berikut.

- Kebutuhan ruang per orang adalah minimal 8 m^2 untuk perkotaan dan 10 m^2 untuk perdesaan.
- Perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2.80 m.
- Tersedia 1 ruang tidur yang memeuhi persyaratan keamanan dengan bagian-bagiannya tertutup oleh dinding dan atap serta memiliki pencahayaan yang cukup berdasarkan perhitungan serta ventilasi cukup dan terlindung dari cuaca. Bagian ini merupakan ruang yang utuh sesuai dengan fungsi utamannya.
- Tersedia 1 ruang serbaguna. Merupakan ruang kelengkapan rumah dimana didalamnya dilakukan interaksi antara keluarga dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ruang ini terbentuk dari kolom, lantai dan atap, tanpa dinding sehingga merupakan ruang terbuka namun masih memenuhi persyaratan minimal untuk menjalankan fungsi awal dalam sebuah rumah sebelum dikembangkan.
- Tersedia 1 kamar mandi/kakus/cuci marupakan bagian dari ruang servis yang sangat menentukan apakah rumah tersebut dapat berfungsi atau tidak, khususnya untuk kegiatan mandi cuci dan kakus.

Sedangkan perumahan tidak layak huni dengan kriteria antara lain:

- Luas lantai per orang, di kota kurang dari 8 m^2 sedangkan di desa kurang dari 10 m^2.
- Jenis atap rumah terbuat dari daun atau dari seng dengan kondisi buruk yaitu bocor.

- Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses atau triplek.
- Jenis lantai masih tanah.
- Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah melasanakan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni dan batuan stimulan perumahan swadaya baik yang dialokasikan melalui APBN maupun APBD.Sampai akhir tahun 2019, realisasi bantuan rumah tidak layak huni dan batuan stimulan perumahan swadaya berjumlah 2.239 unit.

2.4.2.4. Listrik

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kapuas Hulu, permintaan tenaga listrik juga semakin besar, oleh sebab itu upaya pemenuhan kebutuhan listrik perlu mendapat perhatian. Pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat selain memanfaatkan bakar fosil (Bahan Bakar Minyak) sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi listrik juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti sinar matahari, energi air dan lain sebagainya. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari 278 desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 203 desa yang sudah dialiri listrik melalui jaringan PLN, 66 desa sumber listrik berasal dari PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), LTSHE (Listrik Tenaga Surya Hemat Energi) dan Lisdes (Listrik Desa), sedangkan jumlah desa yang belum teraliri listrik sebanyak 9 (Sembilan) desa, sehingga Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 73,02% yang sudah dialiri listrik melalui jaringan PLN. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) jumlah pelanggan listrik pada akhir Tahun 2019 sebanyak 49.341 pelanggan. Total nilai penjualan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 83.319.374.414,-.

2.4.2.5. Air Minum

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Putussibau dapat diketahui bahwa pada Tahun 2019 tercatat jumlah pelanggan air minum sebanyak 11.573 pelanggan. Untuk lebih jelasnya

mengenai jenis pelanggan, jumlah air yang disalurkan dan banyaknya nilai air yang disalurkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.66.
Jumlah Pelangan dan Banyaknya Air Minum
Di Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan Air Minum	Banyaknya Air Minum(m3)	Total Nilai Air Minum (Rp)
1	Rumah Tempat Tinggal	10.450	2.515.174	8.608.960.189
2	Hotel/Niaga Besar	43	25.893	167.890.381
3	Badan Sosial dan Rumah Sakit/ Sosial Khusus	251	90.383	203.810.211
4	Rumah Ibadah/ Sosial Umum	26	8.375	12.104.243
5	Instansi Pemerintah	101	44.384	279.084.651
6	Perusahaan dan Pertokoan/ Niaga Kecil	699	252.819	1.001.066.766
7	Industri Besar	2	1.354	19.280.722
8	Pelabuhan	1	123	4.096.286
Jumlah		11.573	2.938.705	10.296.229.449

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah.Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non poduktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Jika dilihat angka rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk antara usia non produktif (usia<15 tahun ditambah usia>65 tahun) terhadap usia produktif (15–64 tahun) adalah sebagai berikut:

- rasio ketergantungan anak-anak: 37,48%
- rasio ketergantungan lansia: 6,22%
- total rasio ketergantungan: 43,69%

Dengan demikian, pada tahun 2020 setiap 100 orang berusia produktif di Kapuas Hulu secara rata-rata terbebani oleh sekitar 43 orang berusia tidak produktif (terdiri atas 6 orang lansia dan 37 orang anak-anak).

2.5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang

menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II.67.
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																		
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI																	
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,39	5,26	97,59	5,50	5,27	95,82	5,61	4,26	75,94	5,72	2,92	51,05	5,83			
2.	PDRB per Kapita (ribu)	28.620	28.848	28.789	99,80	31,156	32	103	33.649	31.649	94,06	36.341	21.341	58,72	39.248			
3.	Laju Inflasi	5,9	5,55	4,28	77,12	5,56	4,29	77,16	5,5	4,25	77,27	5,5	2,96	53,82	5,5			
4.	Tingkat kemiskinan	9,5	9,00	9,45	105,00	8,7	9,60	110,34	8,5	9,62	113,18	8	8,99	0,00	8			
5.	Angka Pengangguran	2,02	2,01	2,21	109,95	2,01	1,58	78,61	2,00	2,46	123,00	1,95		0,00	1,92			
6.	Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)	Cukup Baik	Cukup Baik	-	0	Cukup Baik	- ,00	0	Cukup Baik	52,71	52,71	Cukup Baik			Baik			
	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL																	
1.	Angka Partisipasi Murni SD/MI	96,1	96,25	76,86	79,85	96,50	85,65	88,76	96,75	97,70	100,98	97	99,36	102,43	97,25			
2.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	58,15	60,15	56	92,30	63,45	74,63	117,62	67,80	78,76	116,17	70,13	75,44	107,57	70,15			
3.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	90,44	100	120,10	120,1	100,00	133,82	133,82	100	116,19	116,19	100	113,60	113,60	100			
4.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	89,74	91,25	86,68	94,99	93,50	100,83	107,84	91,75	100,24	109,25	92,00	89,59	97,38	92,15			
5.	Angka Harapan Hidup	71,85	71,96	71,95	99,99	71,97	72,12	100,21	71,98	72	100,64	71,99		0	72			
6.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	51,07	55,06	75,93	137,90	59,03	78,38	132,78	65,03	76,93	118,30	73,05	78,6	107,598	80,05			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
ASPEK LAYANAN UMUM																		
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR																	
A.	**BIDANG PENDIDIKAN**																	
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,21	0,20	0,04	180	0,19	0,04	178,9	0,18	0,14	122,22	0,17	0,08	152,94	0,16			
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,21	0,20	0,18	110	0,19	0,26	63,16	0,18	0,27	50	0,17	0,09	147,06	0,16			
3.	Rata-Rata Nilau UN dan UAS SD/MI	61,75	62,5	63,54	101,66	64	62,23	97,23	65	61,45	94,54	67,5	70,66	104,68	68,0			
4.	Rata-Rata Nilau UN dan UAS SMT/MTs	48,88	50,55	45,66	90,33	50,95	42,90	84,20	60	44,68	74,47	65,05	72,50	111,45	66			
5.	Persentase Guru sesuai kualifikasi SD/MI	64,26	66,26	79,37	119,79	67,26	67,78	100,77	69,26	74,53	107,61	70	78,25	111,79	71			
6.	Persentase Guru sesuai kualifikasi SMP/MTs	90,13	89,5	83,71	93,53	90	89,50	99,44	95	92,94	97,83	96	94,29	98,22	97			
7.	Angka Rata-Rata lam sekolah SD/MI	6	6	6,05	100,79	6	4,92	81,93	6	5,81	96,84	6	6,13	102,21	6			
8.	Angka Rata-Rata lam sekolah SMP/MTs	3	3	3,75	124,93	3	3,80	126,79	3	3,23	107,56	3	3,40	113,30	3			
9.	Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa SD/MI	13,3	13	14,53	111,76	12,5	14,92	119,34	12	15,05	125,42	12	14,69	122,44	12			
10.	Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa SMP/MTs	4,15	4,11	26,40	642,42	4,04	26,26	650,08	4,05	26,04	642,99	4	26,70	667,54	4			
11.	Rasio Guru/murid SD/MI	6,3	8,4	15,32	182,38	10	16	160,00	12,5	17,48	139,84	15	19,61	130,73	15			
12.	Rasio Guru/murid SMP/MTs	41,1	45	28,08	62,40	50,5	24,35	48,22	60	24,95	41,58	70	24,87	35,53	70			
13.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	100			
14.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	99,85	100	99,95	99,95	100	100	100,00	100	100	100,00	100	98,82	98,82	100			
15.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58	58,2	63,74	109,52	59	62,06	105,19	59,5	58,93	99,04	60	54,13	90,22	60,5			
B.	**KESEHATAN**																	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
1.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal sesuai standar	68,46%	100%	65,28%	65,28%	100%	76,00%	76,00%	100%	75,46%	75,46%	100%	84,38%	84,38%	100%			
2.	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	38,36%	100%	54,38%	54,38%	100%	72,16%	72,16%	100%	85,54%	85,54%	100%	86,72%	86,72%	100%			
3.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,30%	100%	92,65%	92,65%	100%	96,52%	96,52%	100%	96,57%	96,57%	100%	97,61%	97,61%	100%			
4.	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64,51%	100%	66,32%	66,32%	100%	70,93%	70,93%	100%	77,61%	77,61%	100%	65,97%	65,97%	100%			
5.	Persentase komplikasi bidan yang ditangani	77%	80%	87,80%	##### ##	85%	77,97%	91,73%	90%	69,90%	77,67%	95%	62,85%	66,16%	100%			
6.	Cakupan kunjungan bayi	89,60%	88%	84,33%	95,83%	91%	95,48%	104,92%	94%	87,91%	93,52%	97%	87,07%	89,76%	100%			
7.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8,08%	100%	67,33%	67,33%	100%	69,21%	69,21%	100%	43,18%	43,18%	100%	26,84%	26,84%	100%			
8.	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,96%	100%	66,75%	66,75%	100%	68,16%	68,16%	100%	67,84%	67,84%	100%	107,54 %	107,54%	100%			
9.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGI) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43,93%	100%	58,75%	58,75%	100%	67,33%	67,33%	100%	79,78%	79,78%	100%	90,54%	90,54%	100%			
10.	Persentase penderita terduga Tuberkolosis (TB) mendapat pelayanan sesuai standar	55	100%	80,15%	80,15%	100%	81,93%	81,93%	100%	137,56%	137,56%	100%	114,71 %	114,71%	100%			
11.	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemriksaan HIV sesuai standar	0	100%			100%	83,00%	83,00%	100%	73,06%	73,06%	100%	72,12%	72,12%	100%			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
12.	Cakupan penduduk yang mengikuti kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan	49%	62%	52%	83%	65%	52%	79%	75%	77,87%	104%	85%	79,91%	94%	100%			
13.	Cakupan Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	26,09%	40%	30,43%	76,08%	60,00%	60,87%	101,45%	80,00%	78,26%	97,83%	100%	78,26%	78,26%	100%			
14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,27%	100%	90,61%	90,61%	100%	92,39%	92,39%	100%	94,87%	94,87%	100%	95,49%	95,33%	100%			
15.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	52,84%	64%	52%	81,25%	67,00%	52,13%	77,81%	70%	40,78%	58,26%	78%	35,82%	45,92%	80%			
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBS BTA	60,93%	90,00%	104%	######	90,00%	57%	63,19%	90,00%	110,60%	122,89%	90,00%	60,43%	67,14%	90,00%			
17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100			
18.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
19.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20.	Jumlah tenaga medis dan para medis																	
	- Dokter Spesialis	5	12	14	######	12	6	50%	13	3	23,08%	15	9	60,00%	16			
	- Dokter Umum	27	34	57	######	45	29	64,44%	59	59	100,00%	59	60	101,69%	59			
	- Bidan	252	355	252	70,99%	357	236	66,11%	355	380	107,04%	356	456	128,09%	356			
	- Perawat	175	433	252	58,20%	488	363	74,39%	696	623	89,51%	536	590	110,07%	536			
21.	Jumlah penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	121.522	120.000	22.123	18,44%	150.000	159586	106,39%	170.000	174243	102,50%	180.000	190.558	105,87%	180.000			
22.	Bed Occupancy Rate (BOR)	50,15	50,2	48,8	97,21%	50,25	51,4	102,29%	50,3	35,2	69,98%	50,4	53,27	105,69%	50,5			
23.	Turnover Interval (TOI)	5,8	2,9	2,7	93,10%	2,8	2,8	100%	2,7	5,8	214,81%	2,6	2,62	100,77%	2,5			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
24.	Nett Daad Rate	15	12			10			8			5			3			
C.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	**48,69%**	**50,00%**	51,88%	103,76%	**55,00%**	56,74%	103,16%	**60,00%**	60,44%	100,73%	**61,00%**	61,35%	100,57%	**64,00%**			**DPUBMSDA**
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan	**64,85%**	**65,00%**	64,76%	99,63%	**65,00%**	63,16%	97,17%	**66,00%**	66,27%	100,41%	**68,00%**	68,05%	100,07%	**70,00%**			**DPUBMSDA**
3.	Persentase Luas Irigasi Kondisi Baik	**29,13%**	**35,86%**	39,91%	111,29%	**50,00%**	55,87%	111,74%	**60,00%**	65,75%	109,58%	**68,33%**	68,33%	100,00%	**71,66%**			**DPUBMSDA**
4.	Rahabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (D.I)	**33,00**	**48,00**	37,00	77,08%	**61,00**	47,00	77,05%	**73,00**	64,00	87,67%	**73,00**	68,00	93,15%	**97,00**			**DPUBMSDA**
5.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah dan rawa)	**20**	**33,33**	50,68	152,05	**37,33**	64	171,44%	**50,67**	87,67	173,02%	**66,67**	93,15	139,72%	**86,67**			**DPUBMSDA**
6.	Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik																	
	- sekunder	**3.100**	**3.800**	7406,65	194,91	**4.800**	21649,43	451,03%	**5.500**	35703,44	649,15%	**6.653**	41931,44	630,26%	**8.000**			**DPUBMSDA**
7.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	1,26	1,08	6,06	561,11	1,35	7,74	573,33	1,8	9,07	503,89	1,53			1,35			
8.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	11,23	12,4	NA	######	13,6	NA	#VALUE!	14,9	NA	######	16,4	NA		18,1			
D.	**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**																	
1.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	59,88	55,38	55,38	100	80,00	81,89	102,36	80	77,58	96,98	82,08	78,67	95,85	100			
2.	Persentase rumah tangga bersanitasi baik	61,87	36,52	36,52	100	69,00	48,31	70,01	74	73,87	99,82	75,00	74,46	99,28	100			
3.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	11,23	9,63		0	8,02		0,00	6,42	0,013	0,20	4,81	1,27	26,40	3,21			
4.	Rasio rumah ber IMB	1,26	6,06	6,06	100	12,10	7,74	63,97	16,06	9,07	56,48	21,06		0,00	26,06			
E.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
1.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk	4,85	5,07		0,00	4,97		0,00	5,11	1,13	22,11	5,24	1,37	26,15	5,37		0,00	
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu	0,67	0,66		0,00	0,64		0,00	0,63	0,22	34,92	0,62	0,64	103,23	0,62		0,00	
3.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	-	-	
4.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	-	-	
5.	Pengakan PERDA	100	100		0,00	100		0,00	100	72	72,00	100	100	100,00	100		0,00	
F.	**SOSIAL**																	
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	0	0			0			0			0			1			
2.	PMKS yang memperoleh Bantuan Soaila	19,93	21,93	39,34	179,39	24,12	75,82	314,34	26,53	73,88	278,48	29,18	74,6	255,65	32,1			
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosail	48,07	50,47	4,23	8,38	52,99	2,65	5,00	55,64	0,35	0,63	58,42	0,38	0,65	61,35			
4.	Jumlah hari besar yang dirayakan	3	3	2	66,67	3	2	66,67	3	2	66,67	3	2	66,67	3			
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR																	
A.	**TENAGA KERJA**																	
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	78,06	55,06	75,06	136,32	59,03	78,38	132,78	65,03	76,93	118,30	73,05	78,6	107,60	80,05		0,00	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3	3	2,21	73.66	3.00	1.58	52.66	3.00	2,46	82.00	3.00	3,41	85.25	4.02			
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	72,31	75	68,36	91,15	100	77,6	77,60	100	68,28	68,28	73,05	41,59	56,93	75,05		0,00	
4.	Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja'	53	65	60	92,31	75	68	90,67	80	75	93,75	100	85	85,00	100		0,00	
5.	Jumlah Pelatihan Kerja	3	5	5	100,00	7	5	71,43	9	5	55,56	15	5	33,33	150		0,00	
6.	Jumlah Sertifikasi pekerja	10	3	10	333,33	5	10	200,00	7	20	285,71	10	45	450,00	20		0,00	
B.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,2	9,3	2,99	32,15	9,4	2,79	29,68	9,7	2,59	26,70	10	2,49	24,90	11			
2.	Rasio KDRT	0,03	0,04	0	0,00	0,04	0	0,00	0,05	0,83	1660,00	0,06	0,82	1366,67	0,06			
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	2,03	2,04	68,22	3344,12	2,1	72,91	3471,90	2,22	69,22	3118,02	2,3	71,03	3088,26	2,5			
4.	Penyelsaian pengaduan perlindungan masyarakat dan anak dari tindakan kekerasan	18,75	15,63	100	639,80	19,44	100	514,40	15,79	100	633,31	17,94	69,56	387,74	19,05			
C.	**PANGAN**																	
1.	Jumlah pangan segar layak konsumsi	5	5,00	5	100,00	7,00	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	7			
2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita	54	63	53,90	85,56	63,00	54,63	86,71	63,00	67,48	107,11	63,00	113,94	180,86	63,00			
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	71,80	76,34	75,4	98,77	77,78	77,9	100,15	79,14	71,6	90,47	80,60	69,56	86,30	82,18			
4.	Penanganan daerah rawan pangan	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2			
D.	**PERTANAHAN**																	
1.	Luas Lahan bersertifikat	85,74	900	900	100	104.667	104.667	100	104.667	104.667	100	104.667	104.667	100	90.000			
2.	Penyelesaian kasus tanah negara	nihil	nihil			nihil			nihil			nihil			nihil			
3.	Penyelesiaian ijin lokasi	nihil	nihil			1	1	100	3	3	100	3	3	100	2			
E.	**LINGKUNGAN HIDUP**																	
1.	Persentase penanganan sampah	63,1	73,56	**52,75**	71,71	82,43	**51,97**	63,05	90,69	**49,54**	54,63	92,89	**66,77**	71,88	94,21			
2.	Persentase Penegakan hukum lingkungan	2	2	**4**	200,00	3	**4**	133,33	3	**3**	100,00	3	**1**	33,33	3			
3.	Tempat pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,18	0,21	**0,14**	66,67	0,22	**0,12**	54,55	0,23	**0,11**	47,83	0,26	**0,11**	42,31	0,27			
4.	Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan AMDAL	20	20	**13**	65,00	20	**7**	35,00	20	**15**	75,00	20	**17**	85,00	20			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
5.	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL	10	20	**20**	100,00	20	**27,27**	136,35	30	**33,33**	111,10	30	**53,85**	179,50	30			
6.	Pencemaran status baku air	50	50	**80**	160,00	60	**56,67**	94,45	60	**60,56**	100,93	75	**60,32**	80,43	75			
7.	Persentase Daerah Rawan Bencana yang terdeteksi	65	74	75	101,35	87	88	101,15	90	91	101,11	92	93	101,09	95			
8.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	0,002	0,004	0,005	125,00	0,006	0,008	133,33	0,0010	0,0012	120,00	0,0012	0,0014	116,67	0,0016			
9.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	75	75,00	76	101,33	75	76	101,33	75	76	101,33	75	77	102,67	75			
10.	Persentase Kelengkapan sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	83	83	84	101,20	83	84	101,20	83	84	101,20	83	85	102,41	83			
F.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
1.	Kepemilikan KTP	87,15	90,36	159,218	176,20	93,57	164,960	176,30	96,78	173,389	179,16	99,98	178,498	178,53	100			
2.	Rasio pasangan ber Akta Nikah	72,36	70,89	2,457	3,47	72,07	7,130	9,89	73,67	8,175	11,10	75,7	9,114	12,04	78,77			
3.	Kepemlikikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	26,34	41,07	275	669,59	55,81	382	684,47	70,54	443,65	628,93	85,27	487	571,13	100			
4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	45,352	45,35	100	72,067	72,07	100	76,505	76,51	100	80,678	80,68	100			
G.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
1.	Persentase jumlah lembaga masyarakat desa yang mendapat pelatihan TTG	18,0	30	30,00	100,00	50%	50%	100	78	78	100	18	18	100	100			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Persentase desa yang administratsi pengelolaan keuangan desa tertib	53,96	64,75	64,75	100,00	75,54	75,54	100	86,33	86,33	100	87,00	87,00	100	100			DPMD
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	71,95	80,97	80,97	100,00	89,93	89,93	100	93,53	93,53	100	94	94,00	100	100			DPMD

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
	pemberdayaan masyarakat (LPM)																	
4.	PKK Aktif	79,14	83,45	83,45	100,00	92,81	92,81	100	98,82	98,92	100	99,00	99,00	100	100			DPMD
5.	Posyandu aktif	81,17	86,04	86,04	100,00	87,66	87,66	100	90,26	90,26	100	91,00	91,00	100	100			DPMD
H.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**																	
1.	Rasio Peserta KB terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	76,9	77,21	80,67	104,48	77,49	78,62	101,46	78,4	80,50	102,68	78,93	80,89	102,48	79,05			
2.	Rasio akseptor KB baru	20,99	21,05	65,80	312,59	21,51	65,09	302,60	22,48	75,80	337,19	23,91	76,80	321,20	25,45			
3.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	95,39	93,78	46,65	49,74	92,18	46,55	50,50	90,57	46,34	51,16	88,96	46,65	52,44	87,36			
4.	Prevalensi KB aktif	76,9	77,21	78,77	102,02	77,49	78,62	101,46	78,4	78,54	100,18	78,93	80,64	102,17	79			
5.	Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan	12,76	12,06	12,41	102,90	17,37	10,63	61,20	30,14	9,92	32,91	51,41	9,92	19,30	55,6			
6.	Persentase PKK aktif	79,14	83,45	83,45	100,00	92,81	92,81	100,00	98,82	98,82	100,00	100	100	100,00	100			
7.	Posyandu aktif	81,17	86,04	86,04	100,00	87,66	87,66	100,00	90,26	90,26	100,00	100	100	100,00	100			
I.	**PERHUBUNGAN**																	
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	151.754	166.929	93.021	56%	183.622	97.015	53%	201.985	92.569	46%	222.183	64.531	29%	244.401			
2.	Kepemilikan KIR angkutan umum	1.092	1.201	193	16%	1.321	703	53%	1.453	717	49%	1.598	416	26%	1.757			
3.	Persentase pemasangan rambu-rambu	35	55	51	93%	70	186	266%	85	279	328%	95	429	452%	100			
4.	Persentase jumlah dermaga penyeberangan	40	60	87,50	145,83	80	100,00	125,00	90	100,00	111,11	100	75,00	75,00	100			
5.	Persentase ketersediaan angkutan darat	0,049	0,051	87,000	9%	0,054	87,000	9%	0,056	92,000	10%	0,059	54,000	8%	0,062			
J.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
1.	Intensitas upgrade website Pemkab Kapuas Hulu per minggu	144	144	192	133,33	144	240	166,67	144	288	200,00	65	118	181,54	144		0,00	
2.	Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten	77	82	91	110,98	1224	1140	93,14	1220	1274	104,43	1260	5505	436,90	144		0,00	
K.	**KOPERASI DAN UMKM**																	
1.	Persentase Koperasi Aktif	18,61	20,07	45,24	**2,25**	22,81	47,69	**2,09**	32,84	37,85	**1,15**	22,81	37,35	**1,64**	38,32	0,00	0,00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2.	Persentase Usaha Mikro Kecil	99,44	99,22	95,06	**0,96**	98,04	94,12	**0,96**	97,07	97,62	**1,01**	99,22	106,91	**1,08**	95,41	0,00	0,00	
3.	Persentase Usaha Mikro Menengah	0,56	0,58	**37,38**	**64,45**	0,62	**41,38**	**66,74**	0,68	**73,04**	**107,41**	1,46	**93,36**	**63,95**	1,76	0,00	0,00	
L.	**PENANAMAN MODAL**																	**DPMPTSP**
1.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	41,12	11,54	555,78	100,00	10,34	863,00	100,00	9,38	607,485	100,00	8,57	311,92		7,89	N/A	311,92	
2.	PTSP kondisi mantap	tidak	tidak	tidak	0,00	tidak	tidak	0,00	ya	tidak	0,00	ya	tidak		ya	N/A		
3.	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	SPIPSE	SPIPSE	SPIPISE	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	SPIPISE, OSS	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	OSS dan SiCantik	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	OSS dan SiCantik		SPIPSE dan SIMYANDU	N/A		
4.	Rata-rata lama proses perijinan	3	3	3-5	100	3	3-5	100	3	3-5	100	3	3-5		3	N/A		
5.	Jumlah pelimpahan kewenangan perijinan pada PTSP	15	16	13	81	17	61	100	18	126	100	19	124		20	N/A		
M.	**PEMUDA DAN OLAHRAGA**																	
1.	Jumlah pemuda berprestasi	0	3	4	133	2	2	100	4	5	100	4	0	0	2	0	0	Disporapar
2.	Jumlah cabang olahraga berprestasi	0	5	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disporapar
3.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0	0	15	100	0	16	100	0	16	100	0	16	100	0	0	0	Disporapar

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
4.	Persentase ketersediaan lapangan olahraga'	0	0	0,35	0,35	0	0,37	0,37	0	0,37	0,37	0	0,37	0,37	0,37	0	0	Disporapar
N.	**KEBUDAYAAN**																	
1.	Penyelenggaraan even seni dan budaya daerah	2	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	0	0	2			
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	14	14	100	14	14	100	14	14	100	14	14	100	14			
O.	**PERPUSTAKAAN**																	
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		73,0482	4.537	0,62%	72,5673	4.537	6,25%	72,2946	5,452	0,75%	74,6661	5,452	0,73	75,6622			
2	Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan		45,08%	27%		45,92%	28,61%		46,62%	41,86%		48,93%	51%		51,26			
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		7,748	2,092	27%	8523	2,439	2861%	9375	3,925	4186%	10312	5,307	51%	11343			
P.	**KERASIPAN**																	
1	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku		55,56%	15,38%		61%	17,85%		64,81%	33,33%		74,07%	32,35%		82%			
2	Persentase peningkatan SDM pengelola arsip		100%	1%		100%	86,95%		100%	86,95%		100%	93,47%		100%			
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN																	
A.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
1.	Produksi Perikanan :																	
	- Hasil perikanan budidaya	17.960	18.220	24.665	135,37	19.080	25.365	133	25.263	24.414	96,64	26.526	32.266	121,64	27.852			
	- Hasil perikanan tangkap	18.020	17.900	31.439	175,64	31.516	40.415	128	41.100	42.050	102,31	24.700	25.093	101,59	25.935			
	- Konsusmi ikan	37	37,5	37,15	99,07	38	38,70	102	38,5	38,40	99,74	39	40	102,56	41,0			
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	40	43	50	116,28	46	59	128	48	55	114,58	50	50	100	-			
B.	**PARIWISATA**																	
1.	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan :																	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
	a) Wisatawan Domestik	6.221	4.880	3.816	78,20	5.500	8.929	162	5.775	9.256	160,28	5.967	6.465	108,35	6.000	0	0	Disporapar
	b) Wisatawan Asing	6.665	6.998	9.070	129,61	7.216	1.078	15	7.845	14.596	186,05	8.630	2.222	25,75	2.600	0	0	Disporapar
C.	**PERTANIAN**																	
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :																	
	Padi (Ton)	56.238,00	51.139,00	60.510,00	118,32	52.417,48	52.588,00	100,33	53.727,91	24.567,79	45,73	57.824,66	27.732,31	47,96	56.447,89			
	Jagung (Ton)	204,00	239,00	244,00	102,09	244,98	255,00	104,09	251,10	1.258,00	501,00	270,25	1.023,60	378,76	263,81			
	Ubi Kayu (Ton)	4.551,00	7.862,00	4,00	0,05	8.058,55	8.908,00	110,54	8.260,01	11.244,00	136,13	8.889,83	17.937,06	201,77	8.678,18			
	Hortikultura :																	
	Cabe (Ton)	194,10	311,50	362,10	116,24	320,85	387,80	120,87	330,47	228,90	69,26	357,40	224,90	62,93	350,60			
	Bawang Merah (Ton)	0,00	3,90	3,90	100,00	3,98	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,14	3,60	86,96	4,22			
2.	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan :																	
	Padi (kwt/ha)	24,33	25,84	25,93	100,35	26,49	22,35	84,37	27,15	26,08	96,06	24,00	28,51	118,79	28,52			
	Jagung (kwt/ha)	9,14	12,27	7,40	60,31	12,58	26,35	209,46	12,89	27,95	216,83	21,21	20,76	97,88	13,54			
	Ubi Kayu (kwt/ha)	190,03	195,49	201,30	102,97	200,38	200,62	100,12	205,38	209,78	102,14	210,52	257,72	122,42	215,78			
	Hortikultura :																	
	Cabe (kwt/ha)	12,40	28,31	24,14	85,27	29,16	18,70	64,13	30,03	12,37	41,19	35,03	12,28	35,06	31,86			
	Bawang Merah (kwt/ha)	0,00	4,30	4,33	100,70	4,39	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	4,47	9,00	201,34	4,65			
3.	Cakupan Bina Kelompok Tani	1.137	1.356	1.356	100,00	1.356,0	1.356	100,00	1.398,00	1.398	100,00	1.468,0	1.468	100,00	1.468,00			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
4.	Peningkatan Produksi Peternakan :																	
	- Sapi (kg)	134.308	138.863	138.709	99,89	139.280	136.280	97,85	272.561	155.706	57,13	155.862	161.776	103,79	140.537			
	- Kambing (kg)	1.501	2.650	2.577	97,25	2.730	2.478	90,77	4.956	2.535	51,15	2.586	3.993	154,41	2.983			
	- Babi (kg)	119.574	121.997	121.867	99,89	122.363	119.369	97,55	250.675	168.755	67,32	168.924	132.064	78,18	123.468			
	- Ayam Buras (kg)	193.815	150.870	150.763	99,93	151.021	151.290	100,18	120.300	83.017	69,01	83.059	83.206	100,18	11.474			
	- Ayam Ras Pedaging (kg)	874.924	980.690	980.336	99,96	981.376	987.848	100,66	1.007.605	1.450.028	143,91	1.451.478	1.222.092	84,20	983.439			
	- Itik (kg)	341	425	371	87,29	489	386	78,94	1.793	1.673	93,33	6.623	3.551	53,62	743			
5.	Peningkatan Populasi Ternak :																	
	- Sapi (ekor)	7.548	7.830	7.673	97,99	8.300	8.487	102,25	7.140	6.094	85,35	6.185	6.756	109,23	9.885			
	- Kambing (ekor)	1.510	1.790	1.666	93,07	1.915	1.155	60,31	1.166	974	83,53	1.008	1.218	120,83	2.346			
	- Babi (ekor)	23.485	23.910	23.806	99,57	24.269	16.624	68,50	15.020	17.651	117,52	17.704	17.002	96,03	25.377			
	- Ayam Buras (ekor)	164.499	165.990	165.694	99,82	166.488	149.644	89,88	154.133	137.772	89,39	138.323	118.320	85,54	167.991			
	- Ayam Ras Pedaging (ekor)	571.891	648.910	647.853	99,84	652.155	653.324	100,18	659.857	1.150.854	174,41	1.154.307	1.025.805	88,87	661.986			
	- Itik (ekor)	5.144	4.010	3.947	98,43	4.331	3.029	69,94	2.700	4.868	180,30	9.932	7.605	76,57	5.456			
6.	Produksi Perkebunan :																	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
	Kelapa Sawit (Ton)	0,00	650.261	1.130.610	173,87	655.287	##########	114,22	701.015	954.224,80	136,12	1.000.000	########	125,93	800.867			
	Karet (Ton)	15.905	17.415	16.948	97,32	17.763	12.679	71,38	18.118	12.679	69,98	15.000	12.686	84,57	19.218			
	Kopi (Ton)	11,00	5,0	5,00	100,00	5,5	4,00	72,73	6,0	2,50	41,67	5,00	1,60	32,00	7,0			
	Lada (Ton)	11,00	11,16	11,00	98,57	11,28	11,00	97,52	11,45	12,50	109,17	15,00	12,75	85,00	12,21			
7.	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan :																	
	Kelapa Sawit (kwt/ha)	0,00	134	250,05	186,60	137	254,84	186,56	250	259,46	103,78	250	144,10	57,64	1.507			
	Karet (kwt/ha)	7,87	7,6	7,87	103,55	7,98	5,47	68,55	9	5,47	60,78	6	5,48	91,33	8,98			
	Kopi (kwt/ha)	7,27	10	7,27	71,98	10	10,00	98,04	10	5,00	50,00	10	4,57	45,70	11			
	Lada (kwt/ha)	5,24	5,44	5,24	96,32	5,6	5,79	103,39	8	5,68	71,00	6	5,80	96,67	6,34			
D	**PERDAGANGAN**																	
1.	Kontirbusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1,3	1,36	11,27	829	1,45	11,21	773	1,59	11,24	707	1,60			1,73			
2.	Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera	30,59	30,65			31,1			31,55	5,30	16,80	31,65	10	31,50	32,2			
3.	Nilai ekspor daerah	198,91	204,88			211,02			217,35			223,87			230,59			
E.	**PERINDUSTRIAN**																	
1.	Perkembangan IKM :																	
	Jumlah unit	812	1.086	755	70	1.096	778	71	1.110	2.005	181	1.120	2.275	203	1.130			
	Tenaga kerja	1.818	2.746	1.510	55	2.846	2.070	73	2.986	2.232	75	3.086	2.973	96	3.186			
	Nilai Investasi (Juta)	40.600	54.300	37.750	70	54.800	38.900	71	55.500	100.250	181	56.000	113.750	203	56.500			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
E.	**TRANSMIGRASI**																	
1.	Persentase kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi	3 MoU (Jateng,Lampung, NTT)	2 MoU (Jateng & Jabar)			3 MoU (Jateng, Lampung, NTT)			2 MoU (Jateng & Jabar)	3		3 MoU (Jateng, Jabar & Jatim)	0		2 MoU (Jateng & Jabar)			
2.	Transmigrasi swakarsa	0	0			0			0	0		0	0		0			
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN																	
A.	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**																	
1.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	**53,13**	**90**	**78,26**	**86,96**	**70**	**88,65**	**126,64**	**100**	**96,74**	**96,74**	**100**	**96,74**	**96,74**	**100**			
2.	Persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai terget	**35,47**	**75**	**43,02**	**57,36**	**70**	**47,90**	**68,43**	**60**	**54,07**	**90,12**	**60**	**58,64**	**97,73**	**65**			
3.	Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik daerah :																	Diskominfo
	- Kapuas Hulu Dalam Angka	ada	ada			ada			ada			ada			ada			
	- Dokumen Datapokok Kapuas Hulu	ada	ada			ada			ada			ada			ada			
	- Dokumen PDRB	ada	ada			ada			ada			ada			ada			
B.	**KEUANGAN**																	
1.	Persentase peningkatan PAD	11	157,38%	95,46%	61	-32,85%	-42,08%	128	16,52%	5,23%	32	-15,09%	-7,03%	47	25			
2.	Persentase Belanja Pegawai terhadap total belanja	34	36,61%	36,03%	98	37,17%	37,32%	100	35,42%	36,54%	103	30,33%	34,29%	113	45			
3.	Persentase PAD terhadap total pendapatan	3,84	6,48%	7,79%	120	4,28%	4,49%	105	4,56%	4,35%	95	4,35%	4,65%	107	4,71			
4.	Persentase belanja modal terhadap total belanja	26	27,60%	36,03%	131	26,19%	26,17%	100	29,25%	28,81%	98	16,49%	15,31%	93	39			
5.	Persentase ketergantungan dana transfer terhadap APBD Ka. Kapuas Hulu	84,03	93,51%	92,18%	99	93,51%	93,27%	100	93,57%	92,83%	99	72,34%	74,25%	103	93			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
C.	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
1.	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional :																	**BKPSDM**
	- Struktural	98%	100%	4 Orang	69,37%	100%	4 Orang	70,54%	100%	16 Orang	60,48%	100%	28 Orang	61,80%	100%			
	- Teknis	65%	72%	60 Orang	100,00%	76%	26 Orang	100,00%	80%	4 Orang	100,00%	85%	53 Orang	100,00%	90%			
	- Fungsional	80%	82%	60 Orang	100,00%	85%	26 Orang	100,00%	87%	3 Orang	100,00%	92%	53 Orang	100,00%	92%			
2.	Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi	30%	35%		61,55%	40%		62,01%	45%		62,11	50%		63,52%	55%			
3.	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2, dan S3	2.257	2.297	2.297	100,00%	2.347	2.339	99,66	2.397	2.596	108	2.447	2.552	10429%	2.487			
D	**FUNGSI LAIN**																	
1.	Persentase jumlah SKPD yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	47	47	23	49	47	23	49	49	27	55	49	27	55	49			
2.	Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik :																	
	- Standar Pelayanan Publik (SPP)	70,00	70,50		0	70,50		0	70,50	81,65	116	70,50		0	70,50			
	- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	40	45	67,66	150	50,00	81,32	163	60,00	79,45	132	65,00	80,30	124	70,00			
3.	Persentase tindak lanjut Peraturan Bupati	100	100	84	84	100	80	80	100	111	111	100	117	117	100			
4.	Persentase tindak lanjut keputusan Bupati	100	100	638	638	100	728	728	100	669	669	100	664	664	100			
5.	Persentase tumuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti :																	
	- BPK	85	87	84,34	97	89	88,23	99	91	85	93	93	85,15	92	95			

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
	- Inspektorat	50	65	75,22	116	70	78,75	113	75	85,81	114	80	83,8	105	85			
6.	Persentase kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani	60	65	99,96	154	70	100	143	85	99,9	118	80	100	125	90			
7.	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100	100	60	60	100	65	65	100	70	70	100	38	38	100			
8.	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	5	3	15	500	3	16	533	3	7	233	3	9	300	3			
9.	Persentase keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	5	4	4	######	4	4	100,00%	4	4	100,00%	4	4	100,00%	4	0	0,00 %	SEKRETARIAT DPRD
10.	Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	WDP	WDP	WTP	######	WDP	WTP	100,00%	WDP	WTP	100,00%	WDP	WTP	100,00%	WTP			
11.	Persentase Instansi Pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B)	47,48	50			60	30,61	51	70	50	71	75	71	95	80			
12.	Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	Tepat Waktu			Tepat Waktu			
ASPEK DAYA SAING DAERAH																		
	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI																	
1	PDRB per Kapita (ribu)	28.620	28.848	28.789	99,80	31,156	32	103	33.649	31.649	94,06	36.341	21.341	58,72	39.248			
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR																	
1.	**Kondisi Jalan Mantap Kabupaten**	**48,69%**	**50,00%**	**51,88%**	**######**	**55,00%**	**56,74%**	**103,16%**	**60,00%**	**60,44%**	**100,73%**	**61,00%**	**61,35%**	**100,57%**	**64,00%**	**-**	**-**	**DPUBMSDA**
2.	Peningkatan pelabuhan sungai/dermaga	71	75	81,5	109	80	100	125	85	100	118	90	75	83	100	0	0	DISHUB
3.	Persentase Kawasan Pemukiman kumuh perkotaan	0,09	0,1			0,075			0,065		0	0,055		0	0,055			
	FOKUS IKLIM BERINVESTASI																	**DPMPTSP**
1.	PTSP Kondisi Mantap	tidak	tidak	tidak	100,00	tidak	tidak	100,00	ya	tidak	0,00	ya	tidak	0,00	ya	N/A		

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															SKPD Penaggung Jawab
			2017			2018			2019			2020			2021			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(22)
2.	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	SPIPSE	SPIPSE	SPIPISE	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	SPIPISE, OSS	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	OSS dan SiCantik	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	OSS dan SiCantik	100,00	SPIPSE dan SIMYANDU	N/A		
3.	Rata-rata lama proses perijinan	3	3	3-5	100	3	3-5	100	3	3-5	100	3	3-5	100	3	N/A		
4.	Jumlah pelimpahan kewenangan perijinan pada PTSP	15	16	13	81	17	61	100	18	126	100	19	124	100	20	N/A		
	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA																	
1.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	65	65,5	64,18	97,98	70	65,03	92,90	70,5	65,65	93,12	71		0,00	71,5			
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,85	71,96	71,95	99,99	71,97	72,12	100,21	71,98	72	100,64	71,99		0	72			
3.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	6,66	6,67	7,05	105,70	7,10	7,02	98,87	7,15	7,65	106,99	7,2	7,47	103,75	7,25			
4.	Rata-rata melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	89,05	95,80	95,82	100,02	95,84	96,61	100,80	95,88	96,97	101,14	95,92	96,58	100,69	95,96			

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah kedepan akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Hal itu disebabkan karena adanya wabah pandemi Covid-19. Semua level pemerintahan telah habis-habisan mencurahkan energi dan sumberdayanya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19, sementara keberhasilannya belum dapat dipastikan.

Banyak negara (bahkan negara maju) tengah menghadapi ancaman resesi ekonomi bahkan sudah ada yang telah masuk ke dalam jurang resesi ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sebut saja Singapura, Australia, Jepang, Argentina, Turki, Venezuela, Brazil dan lainnya. Beberapa negara di Asia seperti China, Singapura, India, Thailand dan Malaysia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak perekonomian secara masif di berbagai sektor. Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dalam situs web resminya, pada kuartal II tahun 2021 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dibandingkan dengan kuartal I 2021 (QoQ), dan 7,07% dibandingkan dengan Kuartal II 2020 (YoY). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok Provinsi di Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 59,92%. Meskipun saat ini Indonesia tengah mengalami pemulihan ekonomi, namun perlu diingat bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah kasus Covid-19 salah satunya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Imbas dari kebijakan ini adalah menurunnya kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya (QoQ).

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2021 akan berada di rentang batas bawah 4% dan batas atas 5,7% *year on year* (YoY).

Upaya mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia ke keadaan normal tentu saja perlu mendapat dukungan yang berkesinambungan dari semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah perlu membuat suatu rencana pembangunan yang mengakomodir kebutuhan daerah untuk menangani pandemi Covid-19 dan perencanaan yang difokuskan pada pemulihan ekonomi daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus selalu memperhatikan kinerja keuangan di masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu di analisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami fluktuatif yang tidak signifikan. Di tahun 2016, DOFD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 3,93% kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3,93%. Setelah itu di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 7,79%. Setelah mengalami peningkatan, di tahun 2019 terjadi penurunan drastis menjadi 4,49% dan terakhir tahun 2020 naik sedikit menjadi 4,61%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Kapuas Hulu yang sebesar 5,12% masih masuk kategori **sangat kurang** karena dibawah 10%.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan DOFD Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2016	67.135.520.050	1.707.744.597.979	3,93
2017	131.221.195.200	1.684.886.337.565	7,79
2018	76.001.252.906	1.694.329.049.699	4,49
2019	79.977.091.078	1.837.568.724.697	4,35
2020	79.165.077.924	1.661.181.264.057	4,77
Rata-Rata	**100.646.531.470**	**2.007.604.484.074**	**5,05**

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja

Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Gambar III.1 berikut ini.

Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam jutaan Rupiah)

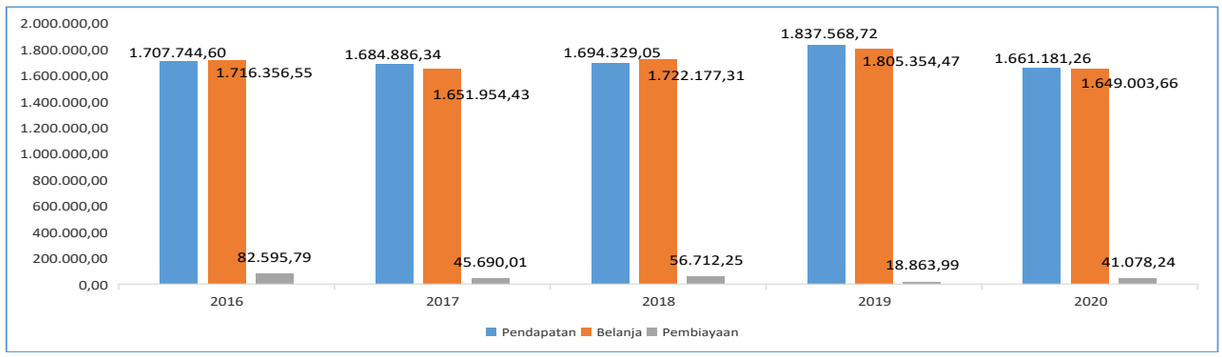

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami tren turun dimana pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,707 triliun menjadi Rp. 1,661 triliun pada tahun 2020. Kenaikan pendapatan ini juga berdampak pada penurunan kemampuan belanja daerah dari Rp. 1,716 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,649 triliun pada tahun 2020. Begitu juga dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mengalami tren naik turun akibat dinamika SiLPA yang relatif signifikan. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan strukur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -0.48% pertahun dari Rp. 1,707 triliun di tahun 2016 menjadi Rp. 1,661 triliun di tahun 2020. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat terdapat sumber pendapatan yang naik sangat signifikan diantaranya pendapatan retribusi daerah dan pendapatan pajak daerah. Pendapatan Retribusi daerah di tahun 2016 sebesar Rp. 3,524 miliar naik menjadi Rp. 6,047 miliar di tahun 2020. Untuk Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2016 sebesar Rp. 44,447 miliar naik menjadi Rp. 46,761 miliar di tahun 2020. Sedangkan sumber pendapatan yang lain seperti pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah yang mengalami kenaikan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,37% yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 9,249 miliar naik menjadi Rp. 13,778 miliar. Begitu pula pajak daerah yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tercatat di tahun 2016 sebesar Rp. 9,884 miliar naik pesat menjadi Rp. 12,578 miliar di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 50,11%.

Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1,59% pertahun dari Rp. 1,640 triliun di tahun 2016 menjadi Rp. 1,523 triliun di tahun 2020. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan transfer pemerintah pusat yang mencapai -0,40% pertahun dimana tahun 2016 sebesar Rp. 1,516 triliun menjadi Rp. 1,478 triliun di tahun 2020. Adapun transfer pemerintah pusat tersebut penyumbang terbesarnya ialah dari dana perimbangan yang trennya relatif meningkat.

Jika dilihat lebih rinci, realisasi sumber dana perimbangan cukup berfluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi penurunan realisasi dari tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut. Namun pada tahun 2020, total dana perimbangan kembali mengalami penurunan sehingga rata-rata pertumbuhan dana perimbangan periode 2016-2020 adalah sebesar -2,74%.

Untuk Pendapatan Transfer antar daerah mengalami rata-rata penurunan sebesar -15,57% pertahun. Pendapatan transfer antar daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil selama 5 (lima) tahun terakhir meningkat 6,64% pertahun sedangkan pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi hanya diterima pada tahun 2015 sebesar Rp. 65,598 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp. 88,318 miliar.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat dari tahun 2016-2020 juga mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1856% pertahun. Lain-Lain pendapatan yang sah hanya berasal dari pendapatan hibah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp. 509 juta di tahun 2017 menjadi Rp. 58,81 miliar di tahun 2020.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	**1.707.744.597.979,11**	**1.684.886.337.565,46**	**1.694.329.049.698,99**	**1.837.568.724.697,49**	**1.661.181.264.057,05**	**-0,48**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**67.135.520.050,11**	**131.221.195.200**	**76.001.252.906**	**79.977.091.078**	**79.165.077.924,15**	**14,39**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.884.040.362	37.633.411.036	16.041.608.749	14.199.084.087	12.578.509.216,12	50,11
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.524.011.979	3.488.880.467	4.937.168.610	6.832.385.653	6.047.033.710,90	16,85
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.249.484.821	11.313.416.176	12.850.604.529	12.453.625.748	13.778.294.215,21	10,86
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.477.982.888	78.785.487.521	42.171.871.018	46.491.995.590	46.761.240.781,92	10,37
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.640.609.077.929**	**1.553.665.142.366**	**1.618.327.796.793**	**1.757.591.633.620**	**1.523.207.347.574,00**	**-1,58**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.516.821.545.052**	**1.516.924.542.230**	**1.530.819.840.329**	**1.657.876.649.085**	**1.478.326.410.407,00**	**-0,40**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.345.352.173.052,00	1.298.518.564.230	1.301.886.123.329	1.390.199.326.685	1.188.262.231.407,00	-2,74
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	54.053.396.213	31.477.670.966	33.661.276.026	24.786.153.273	29.210.925.111,00	-10,83
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	983.714.397.000	975.757.515.000	975.757.515.000	996.869.776.000	900.430.493.000,00	-2,07
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	307.584.379.839	291.283.378.264	292.467.332.303	368.543.397.412	258.620.813.296,00	-2,17
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	171.469.372.000	218.405.978.000	228.933.717.000	267.677.322.400	290.064.179.000,00	14,37
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-

1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian (DD dan DID)	171.469.372.000	218.405.978.000	228.933.717.000	267.677.322.400	290.064.179.000,00	14,37
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	123.787.532.877	36.231.189.048	49.425.608.605	47.957.952.672	43.634.833.167,00	-11,57
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	35.469.932.877	36.231.189.048	49.425.608.605	47.957.952.672	43.634.833.167,00	6,64
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	88.317.600.000	-	-	-	1.246.104.000,00	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	88.317.600.000	-	-	-	1.246.104.000,00	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	509.411.087,75	38.082.347.859,00	51.757.031.863,00	58.808.838.558,90	1856,3
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	509.411.087,75	38.082.347.859,00	51.757.031.863,00	58.808.838.558,90	1856,3
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Realisasi belanja daerah mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar -3,75%, dari tahun 2017 ke tahun 2019 secara berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 4,25% dan 4,83%, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar -8,66%. Sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja daerah rata-rata mengalami penurunan sebesar -0,83%.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut juga mengalami fluktuasi dengan tren meningkat rata-rata mencapai 1,99% pertahun dari Rp. 918,84 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 991,32 miliar di tahun 2020. Adapun pos di Belanja Operasi yang telah berhasil ditekan dalam kurun waktu tersebut ialah Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa tahun 2016 sebesar Rp. 388,71 miliar diturunkan menjadi Rp. 386,69 miliar di tahun 2020. Sedangkan belanja bantuan sosial mengalami tren meningkat dengan rata-rata sebesar 279,09% yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 120 juta meningkat pesat menjadi Rp. 4,829 miliar di tahun 2020. Adapun peningkatan belanja pegawai sebesar 1,02% pertahun bisa dikatakan wajar mengingat belanja pegawai merupakan belanja untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai yang umumnya akan meningkat tiap tahunnya.

Berbeda dengan Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami fluktuatif namun trennya sedikit menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -12,45% pertahun. Pada Tahun 2016 Belanja modal sebesar Rp. 516,74 miliar menjadi Rp. 274,83 miliar di tahun 2020. Pada komponen belanja tak terduga mengalami tren meningkat yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,14 miliar menjadi Rp. 16,63 miliar di tahun 2020. Pada Belanja transfer setiap tahunnya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,34% pertahun. Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	**BELANJA**	**1.716.356.551.973,41**	**1.651.954.428.416,65**	**1.722.177.313.253,11**	**1.805.354.472.821,58**	**1.649.003.657.013,47**	**-0,83**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**918.846.167.488,11**	**955.688.224.916,65**	**1.024.740.398.774**	**1.017.145.321.826**	**991.320.779.037**	**1,99**
2.1.1	Belanja Pegawai	484.718.418.356,00	478.045.004.760,00	518.856.591.714,00	522.935.122.219,00	502.687.414.650,00	1,02
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	388.710.020.623,11	435.502.222.156,65	450.828.657.060,11	438.637.564.607,35	386.690.950.387,46	0,25
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	45.297.728.509,00	41.459.998.000,00	49.914.000.000,00	50.730.835.000,00	97.113.414.000,00	26,25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000,00	681.000.000,00	5.141.150.000,00	4.841.800.000,00	4.829.000.000,00	279,09
2.2	**BELANJA MODAL**	**516.742.090.512,30**	**363.660.077.485,00**	**363.888.159.574,00**	**412.301.577.995,23**	**274.853.948.709,21**	**-12,40**
2.2.1	Belanja Modal	516.742.090.512,30	363.660.077.485,00	363.888.159.574,00	412.301.577.995,23	274.853.948.709,21	-12,40

2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	-	-	-	-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.140.256.173,00**	**7.630.074.015,00**	**1.701.795.305,00**	**1.787.712.000,00**	**16.633.799.266,80**	**253,58**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.140.256.173,00	7.630.074.015,00	1.701.795.305,00	1.787.712.000,00	16.633.799.266,80	253,58
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**278.628.037.800,00**	**324.976.052.000,00**	**331.846.959.600,00**	**374.119.861.000,00**	**366.195.130.000,00**	**7,34**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**1.620.030.000,00**	**1.865.000.000,00**	**1.350.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.896.231.000,00**	**6,14**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.394.630.000,00	1.582.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.496.950.500,00	5,35
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	225.400.000,00	283.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	399.280.500,00	12,31
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**277.008.007.800,00**	**323.111.052.000**	**330.496.959.600,00**	**372.519.861.000,00**	**364.298.899.000,00**	**7,36**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke	-	1.650.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-21,97

	Pemda Lainnya						
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	277.008.007.800,00	320.918.119.000,00	329.754.026.600,00	371.989.491.000,00	364.100.549.500,00	7,32
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	542.933.000,00	542.933.000,00	530.370.000,00	198.349.500,00	-16,23
	SURPLUS / (DEFISIT)	-8.611.953.994,30	32.931.909.148,81	-27.848.263.554,12	32.214.251.875,91	12.177.607.043,58	-236,21

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Kapuas Hulu trennya relatif menurun. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar -0,82% pertahun.

Penerimaan pembiayaan menurun dengan rata-rata -1,20% pertahun (2016-2020) yang seluruhnya dari SiLPA dimana SiLPA tahun 2016 sebesar Rp. 98,856 miliar menjadi Rp. 51,078 miliar di tahun 2020. Besarnya SiLPA Kabupaten Kapuas Hulu khususnya tahun 2016 yang mencapai Rp. 98,856 miliar dirasa perlu mendapat perhatian. Setidaknya perlu ditekan SiLPA tersebut sekecil mungkin hingga SiLPA yang tersisa berupa SiLPA hasil penghematan belanja.

Untuk pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,82% pertahun. Pengeluaran pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk penyertaan modal pemerintah.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5
Realisasi Penggunaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	**PEMBIAYAAN**	**82.595.791.556,93**	**45.690.007.313,63**	**56.712.254.719,24**	**18.863.991.165,12**	**41.078.243.041,03**	**6,09**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**98.856.841.806,93**	**73.983.837.562,63**	**77.747.592.500,24**	**28.863.991.165,12**	**51.078.243.041,03**	**(1,20)**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	98.856.841.806,93	73.983.837.562,63	77.747.592.500,24	28.863.991.165,12	51.078.243.041,03	**0,39**
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00

3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.261.050.250,00**	**28.293.830.249,00**	**21.035.337.781,00**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	(0,82)
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	386.050.250,00	8.418.830.249,00	1.160.337.781,00	-	-	398,91
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.875.000.000,00	19.875.000.000,00	19.875.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(4,90)
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**45.690.007.313,63**	**56.712.254.719,24**	**18.863.991.165,12**	**18.863.991.165,12**	**41.078.243.041,03**	**6,09**

Tabel III.6
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	**1.707.744.597.979,11**	**1.684.886.337.565,46**	**1.694.329.049.698,99**	**1.837.568.724.697,49**	**1.661.181.264.057,05**	**-0,48**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**67.135.520.050,11**	**131.221.195.200**	**76.001.252.906**	**79.977.091.078**	**79.165.077.924,15**	**14,39**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.884.040.362	37.633.411.036	16.041.608.749	14.199.084.087	12.578.509.216,12	50,11
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.524.011.979	3.488.880.467	4.937.168.610	6.832.385.653	6.047.033.710,90	16,85
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.249.484.821	11.313.416.176	12.850.604.529	12.453.625.748	13.778.294.215,21	10,86
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.477.982.888	78.785.487.521	42.171.871.018	46.491.995.590	46.761.240.781,92	10,37
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.640.609.077.929**	**1.553.665.142.366**	**1.618.327.796.793**	**1.757.591.633.620**	**1.523.207.347.574,00**	**-1,58**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.516.821.545.052**	**1.516.924.542.230**	**1.530.819.840.329**	**1.657.876.649.085**	**1.478.326.410.407,00**	**-0,40**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.345.352.173.052,00	1.298.518.564.230	1.301.886.123.329	1.390.199.326.685	1.188.262.231.407,00	-2,74

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	54.053.396.213	31.477.670.966	33.661.276.026	24.786.153.273	29.210.925.111,00	-10,83
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	983.714.397.000	975.757.515.000	975.757.515.000	996.869.776.000	900.430.493.000,00	-2,07
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	307.584.379.839	291.283.378.264	292.467.332.303	368.543.397.412	258.620.813.296,00	-2,17
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	171.469.372.000	218.405.978.000	228.933.717.000	267.677.322.400	290.064.179.000,00	14,37
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	171.469.372.000	218.405.978.000	228.933.717.000	267.677.322.400	290.064.179.000,00	14,37
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	-	-	-	-
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**123.787.532.877**	**36.231.189.048**	**49.425.608.605**	**47.957.952.672**	**43.634.833.167,00**	**-11,57**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	35.469.932.877	36.231.189.048	49.425.608.605	47.957.952.672	43.634.833.167,00	6,64
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	1.246.104.000,00	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	1.246.104.000,00	-

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**509.411.087,75**	**38.082.347.859**	**51.757.031.863**	**51.757.031.863**	**58.808.838.558,90**	**1856,3**
1.3.1	Pendapatan Hibah	509.411.087,75	38.082.347.859	51.757.031.863	51.757.031.863	58.808.838.558,90	1856,3
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	**BELANJA**	**1.716.356.551.973,41**	**1.651.954.428.416,65**	**1.722.177.313.253,11**	**1.805.354.472.821,58**	**1.649.003.657.013,47**	**-0,83**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**918.846.167.488,11**	**955.688.224.916,65**	**1.024.740.398.774**	**1.017.145.321.826**	**991.320.779.037**	**1,99**
2.1.1	Belanja Pegawai	484.718.418.356,00	478.045.004.760,00	518.856.591.714,00	522.935.122.219,00	502.687.414.650,00	1,02
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	388.710.020.623,11	435.502.222.156,65	450.828.657.060,11	438.637.564.607,35	386.690.950.387,46	0,25
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	45.297.728.509,00	41.459.998.000,00	49.914.000.000,00	50.730.835.000,00	97.113.414.000,00	26,25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000,00	681.000.000,00	5.141.150.000,00	4.841.800.000,00	4.829.000.000,00	279,09

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.2	**BELANJA MODAL**	**516.742.090.512,30**	**363.660.077.485,00**	**363.888.159.574,00**	**412.301.577.995,23**	**274.853.948.709,21**	**-12,40**
2.2.1	Belanja Modal	516.742.090.512,30	363.660.077.485,00	363.888.159.574,00	412.301.577.995,23	274.853.948.709,21	-12,40
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	-	-	-	-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.140.256.173,00**	**7.630.074.015,00**	**1.701.795.305,00**	**1.787.712.000,00**	**16.633.799.266,80**	**253,58**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.140.256.173,00	7.630.074.015,00	1.701.795.305,00	1.787.712.000,00	16.633.799.266,80	253,58
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**278.628.037.800,00**	**324.976.052.000,00**	**331.846.959.600,00**	**374.119.861.000,00**	**366.195.130.000,00**	**7,34**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.620.030.000,00	1.865.000.000,00	1.350.000.000,00	1.600.000.000,00	1.896.231.000,00	6,14
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.394.630.000,00	1.582.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.496.950.500,00	5,35
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	225.400.000,00	283.000.000,00	350.000.000,00	-	399.280.500,00	12,31

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	350.000.000,00	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	277.008.007.800,00	323.111.052.000	330.496.959.600,00	372.519.861.000,00	364.298.899.000,00	7,36
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	1.650.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-21,97
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	277.008.007.800,00	320.918.119.000,00	329.754.026.600,00	371.989.491.000,00	364.100.549.500,00	7,32
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	542.933.000,00	542.933.000,00	530.370.000,00	198.349.500,00	-16,23
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-8.611.953.994,30**	**32.931.909.148,81**	**-27.848.263.554,12**	**32.214.251.875,91**	**12.177.607.043,58**	**(236,21)**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	**PEMBIAYAAN**	**82.595.791.556,93**	**45.690.007.313,63**	**56.712.254.719,24**	**18.863.991.165,12**	**41.078.243.041,03**	**6,09**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**98.856.841.806,93**	**73.983.837.562,63**	**77.747.592.500,24**	**28.863.991.165,12**	**51.078.243.041,03**	**(1,20)**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	98.856.841.806,93	73.983.837.562,63	77.747.592.500,24	28.863.991.165,12	51.078.243.041,03	0,39
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.261.050.250,00**	**28.293.830.249,00**	**21.035.337.781,00**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**(0,82)**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	386.050.250,00	8.418.830.249,00	1.160.337.781,00	-	-	398,91

3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.875.000.000,00	19.875.000.000,00	19.875.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(4,90)
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**82.595.791.557**	**45.690.007.313,63**	**56.712.254.719,24**	**18.863.991.165,12**	**41.078.243.041,03**	**6,09**

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2016-2020 relatif mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 5,30% pertahun. Tercatat Jumlah aset Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 senilai Rp. 2,712 triliun berfluktuatif dan akhirnya pada tahun 2020 aset naik menjadi Rp. 3,328 triliun. Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa jenis aset yang mengalami penurunan cukup signifikan ialah jenis aset lancar mencapai -2,3% pertahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan kas dan piutang. Adapun jenis investasi permanan justru mengalami peningkatan sebesar 11,97% pertahun yang berasal dari peningkatan modal pemerintah daerah. Nilai Aset Tetap juga setiap tahun terus meningkat dari Rp. 2,381 triliun di tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 2,927 triliun di tahun 2020. Selain itu, Nilai Aset lainnya juga meningkat sangat signifikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata

peningkatan sebesar 9,89% pertahun yang mulanya di tahun 2016 sebesar Rp. 131,58 miliar menjadi 145,39 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari komponen Amortisasi aset tak berwujud dan Aset lain-lain.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun-tahun mengalami penurunan yang artinya hutang jangka pendek dapat ditekan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 43,81%. Selain kewajiban jangka pendek, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga mempunyai kewajiban jangka panjang di tahun 2016 dan tahun 2017 yang nilainya tetap sebesar Rp. 8,4 miliar.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Jumlah Ekuitas di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan signifikan sebesar 5,38 % pertahun. Jumlah ekuitas tahun 2016 sebesar Rp. 2,696 triliun menjadi Rp. 3,319 triliun di tahun 2020. Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.7
Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	**ASET**	**2.712.246.814.194**	**2.985.892.056.001**	**3.114.164.241.922**	**3.292.252.923.985**	**3.328.962.092.228**	**3,30**
2	**ASET LANCAR**	**99.047.284.887**	**107.599.769.870**	**82.681.845.678**	**108.379.891.464**	**100.791.354.292**	**2,38**
3	Kas	75.790.295.062	77.747.592.499	30.915.300.797	51.441.070.865	53.576.238.306	3,22
4	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
5	Piutang	7.993.815.742	11.080.475.908	30.477.596.768	38.736.360.329	22.813.651.418	49,91
6	Persediaan	15.263.174.083	18.771.701.463	21.288.948.112	18.202.460.270	24.401.464.566	13,98
7	Aset Lancar Lainnya	-	-	-	-	-	-
22	**Jumlah Aset Lancar**	**99.047.284.887**	**107.599.769.870**	**82.681.845.678**	**108.379.891.464**	**100.791.354.292**	**2,38**
23	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
24	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
18	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
31	**Jumlah Investasi Non Permanen**	-	-	-	-	-	-
32	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	-
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	99.656.594.346	114.200.049.459	138.770.687.079	147.409.413.484	155.638.057.588	11,97
35	**Jumlah Investasi Permanen**	**99.656.594.346**	**114.200.049.459**	**138.770.687.079**	**147.409.413.484**	**155.638.057.588**	**11,97**
36	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	**99.656.594.346**	**114.200.049.459**	**138.770.687.079**	**147.951.299.448**	**155.638.057.588**	**11,97**
37	**ASET TETAP**	**2.381.955.808.223**	**2.686.751.116.383**	**2.769.880.894.969**	**2.891.172.588.431**	**2.927.142.024.289**	**5,37**
38	Tanah	234.709.844.745	241.202.038.839	239.465.943.343	244.315.757.718	244.760.703.076	1,06
39	Peralatan dan Mesin	284.287.850.560	304.501.067.316	291.629.276.269	332.405.253.202	379.592.221.289	7,76
40	Gedung dan Bangunan	951.400.681.107	1.013.149.739.374	1.130.882.468.666	1.243.937.820.689	1.301.489.635.830	8,18
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.413.790.166.822,52	2.657.770.812.821	2.853.214.730.448	2.907.162.063.775	3.012.135.753.422	3,74
42	Aset Tetap Lainnya	30.670.720.567,88	39.030.047.606	15.091.572.353	17.122.556.133	18.588.496.955	-3,01
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	79.992.465.567,79	117.466.708.877	40.326.498.052	70.198.003.041	127.750.823.687	34,30
44	Akumulasi Penyusutan	-1.612.895.921.148,29	-1.686.369.298.449	-1.800.729.594.163	-1.923.968.866.128	-2.157.175.609.973	7,57

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
45	**Jumlah Aset Tetap**	**2.381.955.808.223,66**	**2.686.751.116.383**	**2.769.880.894.969**	**2.891.172.588.431**	**2.927.142.024.289**	**5,37**
46	**DANA CADANGAN**	-	-	-	-	-	-
47	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
48	**Jumlah Dana Cadangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
49	**ASET LAINNYA**	-	-	-	-	-	-
34	Tunggakan UUDP dan UYHD	-	-	-	-	-	-
35	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
36	Tuntutan Ganti Rugi	270.816.504	270.816.504	231.716.504	2.449.294.004	2.249.294.004	233,60
	Penyisihan Tuntutan Ganti	-270.816.504	-270.816.504	-231.716.504	-221.716.504	-231.854.392	-3,54
37	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-				
38	Aset Tak Berwujud	5.267.688.264	5.665.452.764	659.198.000	817.895.000	842.895.000	-13,42
	Amortisasi Asset tak Berwujud	-4.274.682.672	-4.578.308.964	-467.066.000	-537.072.667	-611.246.000	-12,47
	Aset Lain-lain	130.594.121.146	136.223.650.788	145.496.016.225	275.812.867.888	281.359.236.753	25,67
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-	-	-60.018.646.150	-14.195.595.303	-13.030.237.111.101	-138.217.669.307	191,16

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	lain						
	Kas yang telah dibatasi penggunaannya	-	48.971.850	493.247.450	-	-	226,60
	Kas Yang Belum jelas Statusnya	-	-	-	-	-	-
57	**Jumlah Aset Lainnya**	**131.587.126.737**	**77.341.120.288**	**131.985.800.372**	**145.291.030.610**	**145.390.656.059**	**9,89**
58	**JUMLAH ASET**	**2.712.246.814.194**	**2.985.892.056.001**	**3.114.164.241.922**	**3.292.252.923.985**	**3.328.962.092.228**	**5,30**
59	**KEWAJIBAN**	**15.297.780.763**	**2.706.488.248**	**3.591.147.961**	**11.632.594.461**	**9.130.555.776**	**38,19**
60	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**6.879.000.513**	**2.706.488.248**	**3.591.147.961**	**11.632.594.461**	**9.130.555.776**	**43,61**
43	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Utang Pada Pihak Ketiga	-	-	-	1.382.409.000,00	9.130.555.776,23	140,12
2	Utang Perhitungan Pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Propinsi	-	-	-	59.561.531,00	-	-25
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keu. Bank	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
44	Pendapatan diterima dimuka	-	-	63.964.692	-	-	0
45	Utang Jangka pendek lainnya	6.879.000.513	2.706.488.248	3.527.183.268	10.190.623.930,36	-	14,64
46	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
71	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**6.879.000.513**	**2.706.488.248**	**3.591.147.961**	**11.632.594.461**	**9.130.555.776**	**43,61**
72	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	-	-
73	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
74	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
75	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
76	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
77	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
78	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
79	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	**8.418.780.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
80	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**15.297.780.763**	**2.706.488.248**	**3.591.147.961**	**11.632.594.461**	**9.130.555.776**	**38,19**
81	**EKUITAS**	2.696.949.033.533	2.983.185.567.754	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	5,38
82	**EKUITAS**	2.696.949.033.533	2.983.185.567.754	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	5,38
83	Ekuitas	2.696.949.033.533	2.983.185.567.754	3.119.728.080.137	3.280.620.329.524	3.319.831.536.451	5,38
84	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-	-
85	**JUMLAH EKUITAS**	**2.696.949.033.533**	**2.983.185.567.754**	**3.119.728.080.137**	**3.280.620.329.524**	**3.319.831.536.451**	**5,38**
86	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**2.712.246.814.295**	**2.985.892.056.002**	**3.123.319.228.098**	**3.292.252.923.985**	**3.328.962.092.228**	**5,30**

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016-2020 digunakanlah beberapa analisis rasio antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aset lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif meningkat. Namun yang perlu diperhatikan ialah terjadinya kenaikan aset lancar daerah yang cukup signifikan dari Rp. 99,047 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 100,791 miliar di tahun 2020. Meskipun aset lancar naik signifikan, namun jumlah kewajiban lancar menurun pada periode yang sama. Sehingga meskipun aset lancar mengalami peningkatan namun rasionya tetap mengalami peningkatan.

Berikut ini adalah tabel rasio lancar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2020 (dalam jutaan Rupiah).

Tabel III.8
Rasio Lancar Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016– 2020 (dalam Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Lancar	99.047.284.887,00	107.599.769.870,00	82.681.845.678,05	108.379.891.463,81	100.791.354.292,11
Kewajiban Lancar	15.297.780.763,00	2.706.488.248,00	3.591.147.961,00	11.632.594.461,36	9.130.555.776,23
Rasio Lancar (%)	647,46%	3975,62%	2302,38%	931,69%	1103,89%

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aset yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio Hutang terhadap Ekuitas merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini sering juga disebut sebagai Rasio Hutang Modal. Rasio hutang terhadap ekuitas (DER) adalah rasio keuangan yang menghitung total hutang dibagi dengan total ekuitas. Hutang adalah kewajiban dan ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan. Maka rasio hutang terhadap ekuitas adalah hasil pembagian antara kewajiban dan ekuitas perusahaan.

Nilai rasio hutang terhadap ekuitas yang ada di Kab. Kapuas Hulu dari tahun 2016-2020 mempunyai tren menurun. Adapun rasio terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 0,57%. Menurun rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kekayaan bersih pemerintah daerah dalam membiayai hutang semakin meningkat. Selain itu jika dilihat dari data yang ada, Kabupaten Kapuas Hulu dapat menekan angka kewajiban (hutang) baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 15,297 miliar menjadi 9,130 miliar di tahun 2020.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	15.297	2.706	3.591	11.632	9.130
Ekuitas	2.696	2.983	3.119	3.280	3.319

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (%)	0,57%	0.09%	0,12%	0,35%	0,28%

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

b) Rasio Hutang terhadap Total Aset (*Total Debt to Total Asset Ratio*)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aset. Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aset yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aset Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif yang relatif menurun. Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap total aset sebesar 0,56% yang artinya 0,56% nilai aset dibelanjai oleh hutang dan tahun 2020 menurun menjadi 0,27%, atau juga bisa dimaknai bahwa nilai hutang pada tahun 2020 hanya sebesar 0,27% dibandingkan total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Meskipun rasionya masih terbilang kecil, namun kedepan perlu diwaspadai agar nilai kewajiban tidak terus meningkat.

Tabel III.10
Rasio Hutang Terhadap Total aset Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kewajiban	15.297,78	2.706,49	3.591	6.891	9.130
Aset	2.712.246,81	2.985.892,06	3.123.319	3.271.757	3,328
Rasio Hutang Terhadap Total Aset (%)	0,56%	0,09%	0,12%	0,35%	0,27%

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran Aset Tetap *(Fixed Assets Turn Over)*

Perputaran Aset Tetap adalah rasio antara penjualan dengan aset tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aset tetap atau perputaran aset tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan aset tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aset tetap Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2016-2020 tren relatif berfluktuasi namun relatif tetap. Adapun rasio di tahun 2016 mencapai 2,82% dan turun menjadi 2,70% di tahun 2020. Rasio tersebut sempat naik menjadi 4,88% di tahun 2017 dan turun kembali 2,74% di tahun 2018. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunaan sumber daya aset tetap di tahun 2016 yang senilai Rp. 2,381 triliun, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 67,135 miliar. Sedangkan di tahun 2019 dengan mendayagunakan sumber daya aset tetap senilai Rp. 2,891 triliun, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 79.165 miliar. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 2016-2020 rata-rata keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu relatif meningkat walaupun tidak signifikan bahkan pernah terjadi penurunan. Dapat dimaknai juga bahwa pendayagunaan aset tetap belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD secara signifikan.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Aset Tetap Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	67.135,52	131.221,20	76.001,25	84.978,04	79.165
Aset Tetap	2.381.955,81	2.686.751,12	2.769.880,89	2.914.667,88	2.927.142
Rasio Perputaran Aset Tetap (%)	2,82%	4,88%	2,74%	2,77%	2,70%

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

b) Perputaran Total Aset (*Total Assets Turn Over*)

Hampir mirip dengan perputaran aset tetap, perputaran total aset juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aset Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi namun sedikit menurun. Rasio di tahun 2016 mencapai 2,48% dan menjadi 2,38% di tahun 2020. Adapun fluktuasi peningkatan terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,39%. Setelah itu rasio menurun kembali hingga tahun 2020.

Secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 rata-rata nilai rasio perputaran total aset daerah menurun meskipun hanya sedikit. Hal tersebut bisa dikatakan bawah tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD sangat belum optimal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

Tabel III.12
Rasio Perputaran Total Aset Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016– 2020 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	67.135,52	131.221,20	76.001,25	84.978,04	79.165
Total Aset	2.712.246,81	2.985.892,06	3.114.164,24	3.264.695,31	3.328.962
Rasio Perputaran Total Aset (%)	2,48%	4,39%	2,44%	2,43%	2,38%

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Rasio belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren meningkat namun fluktuatif setiap tahunnya dengan rata-rata rasio sebesar 29,34% pertahun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2016 sebesar 28,34% dari total pengeluaran daerah dan rasionya menurun sedikit hingga mencapai 30,48% di tahun 2020. Tren rasionya relatif menurun walaupun jika dilihat nominalnya nilai belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparaturnya terus meningkat. Berdasarkan data terlihat bahwa total belanja untuk aparatur di tahun 2016 sebesar Rp. 484,781 miliar dan naik menjadi Rp. 502,687 miliar di tahun 2020.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel III.12 berikut ini.

Tabel III.13
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	522.813,86	1.732.617,60	30,17%
2	2017	537.733,28	1.680.248,26	32,00%
3	2018	583.368,16	1.743.212,65	33,47%
4	2019	580.363,64	1.815.354,47	31,97%
5	2020	502.687.41	1.649.003.65	30,48%

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata meningkat sebesar 6,95% pertahun dari Rp.. 780,93 miliar menjadi Rp. 1,021 triliun di tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan daerah yang kemudian berimbas pada meningkatnya kemampuan belanja daerah. Dengan kondisi kemampuan

belanja daerah yang meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kemudian mencoba menekan pengeluaran pada pos belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Oleh karena itu adanya penekanan di Belanja Operasi tersebut menyebabkan secara agregat belanja program/kegiatan pembangunan nilainya akan relatif meningkat.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, sumber utama penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA. Nilai SiLPA tahun 2016 mencapai Rp. 116 miliar dan turun menjadi Rp. 21,113 miliar pada tahun 2020. Meskipun begitu, besaran SilPA tahun kedepannya masih perlu ditekan sebagai upaya mengefektifkan penggunaan anggaran yang dapat menutup defisit di tahun tahun mendatang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan belanja maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perlu ditekan dari SiLPA ialah yang disebabkan oleh tidak termanfaatkannya anggaran untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kapuas Hulu pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016-2020 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	98.856,84	73.983,84	77.747,59	28.863,12	51.078,24
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**98.856,84**	**73.983,84**	**77.747,59**	**28.863,12**	**51.078,24**

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel III.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016-2020 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	**98.856,84**	**73.983,84**	**78.621,92**	**28.864,00**	**51.078,24**
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah	1.691,46	-28.550,70	6.089,48	-13.464,92	-29.751,31
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	97.165,39	102.534,54	72.532,43	42.328,91	80.829,56

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendaaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa

besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga 2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara yang sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data outlier yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

a. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (*flat*) bahkan relatif menurun terlebih dahulu mengingat adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang memungkinkan berdampak pada keuangan negara hingga tahun 2022. Adapun proyeksi mempertimbangkan realisasi APBD tahun 2019 dan kondisi ekonomi saat ini.

Penerimaan PAD pada tahun 2022-2026 ditargetkan naik ± 3% pertahun dari tahun dasar 2020. Adapun pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 ditargetkan naik 4% dibandingkan tahun 2020. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 17,50 miliar di tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 18,94 miliar di tahun 2026. Untuk pendapatan retribusi daerah ditargetkan tumbuh ± 2% pertahun dari tahun dasar 2020 dimana proyeksi tahun 2022 sebesar Rp. 6,78 miliar menjadi Rp. 7,33 miliar di tahun 2026. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan tumbuh ± 2% pertahun dimana tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp. 14,00 miliar menjadi Rp. 15,15 miliar di tahun 2026. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh ± 2% pertahun dari Rp. 38,63 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 41,81 miliar di tahun 2026.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan naik sedikit sebesar ± 3% pertahun dari tahun dasar 2020 dimana target tahun 2022 sebesar Rp. 1,60 triliun menjadi Rp. 1,80 triliun di tahun 2026. Secara umum kenaikan yang relatif kecil tersebut sangat dipengaruhi dari kemungkinan masih lesunya perekonomian nasional dan global akibat pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

a. Dana Perimbangan:
   - Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di tahun 2022 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2020, kemudian dari tahun selanjutnya hingga tahun 2026 akan mulai meningkat 3% pertahun;

- Nilai Dana Alokasi Umum di tahun 2022 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2020, kemudian dari tahun selanjutnya hingga tahun 2026 akan mulai meningkat 3% pertahun;
- Dana Alokasi Khusus juga di tahun 2022 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2020, kemudian dari tahun selanjutnya hingga tahun 2026 akan mulai meningkat 3% pertahun.

Pendapatan Transfer yang diproyeksikan meningkat adalah pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah tahun 2022-2026 diproyeksikan naik 3% pertahun dari tahun dasar 2020 dimana tahun 2022 sebesar Rp. 42,86 miliar menjadi Rp. 48,24 miliar pada tahun 2026. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan bagi hasil antar daerah. Adapun Pendapatan Transfer yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah nilainya tahun 2022-2026 secara berturut-turut ditargetkan sebesar Rp. 51,84 miliar, Rp. 62,19 miliar, Rp. 67,85 miliar, Rp. 73,86 miliar, dan Rp. 80,23 miliar. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.16
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**1.661.181,26**	**1.728.526,55**	**1.788.407,44**	**1.845.074,98**	**1.903.597,09**	**1.964.044,50**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**79.165,07**	**76.903,08**	**78.441,14**	**80.009,96**	**81.610,16**	**83.242,37**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	12.578,51	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14	18.942,56
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	6.047,03	6.776,45	6.911,98	7.050,22	7.191,22	7.335,05
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	13.778,29	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	46.761,24	38.626,63	39.399,16	40.187,15	40.990,89	41.810,71
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.523.207,35	**1.599.787,35**	**1.647.780,97**	**1.697.214,40**	**1.748.130,83**	**1.800.574,76**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	1.478.326,41	**1.556.926,61**	**1.603.634,41**	**1.651.743,44**	**1.701.295,74**	**1.752.334,62**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	1.188.262,23	1.532.100,28	1.578.063,29	1.625.405,19	1.674.167,34	1.724.392,36
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	29.210,93	38.237,06	39.384,17	40.565,70	41.782,67	43.036,15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.430,50	920.588,39	948.206,04	976.652,22	1.005.951,79	1.036.130,34

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.620,81	328.523,91	338.379,63	348.531,02	358.986,95	369.756,56
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	0,00	24.826,33	25.571,12	26.338,25	27.128,40	27.942,25
1.2.1.3	**Dana Otonomi Khusus**	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	**Dana Desa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	44.880,93	**42.860,74**	**44.146,56**	**45.470,96**	**46.835,09**	**48.240,14**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	43.634,83	42.860,74	44.146,56	45.470,96	46.835,09	48.240,14
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**58.808,84**	**51.836,12**	**62.185,33**	**67.850,62**	**73.856,09**	**80.227,38**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	58.808,84	51.836,12	62.185,33	67.850,62	73.856,09	80.227,38

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dibiayai.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik ± 2,5% pertahun. Pertumbuhan belanja pegawai tersebut digunakan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala ASN. Adapun belanja hibah dan bantuan sosial untuk kurun waktu 2022-2026 akan diturunkan/ditekan untuk meningkatkan kapasitas belanja publik masyarakat. Belanja Hibah sendiri tahun 2022 diturunkan hinga -148% dibandingkan dengan tahun 2020 dan nilainya akan berangsur meningkat mulai pada tahun 2022 sebesar Rp. 39,06 miliar hingga tahun 2026 sebesar Rp. 43,11 miliar. Sedangkan belanja bantuan sosial tahun 2022-2026 nilai diproyeksikan turun dibandingkan tahun dasar 2020 yaitu sebesar Rp. 1,5 miliar pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 2,5% pertahun hingga menjadi sebesar Rp. 1,66 miliar pada tahun 2026.

Untuk belanja transfer tahun 2022-2026 diproyeksikan nilainya naik sebesar 5% pertahun sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksi tahun 2022-2026 nilainya tetap pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 10 miliar dan meningkat sebesar 33,33% mulai dari tahun 2023 hingga 2026 untuk penyertaan modal. Adapun Belanja Tidak Terduga dialokasikan tiap tahun Rp. 5,00 miliar (2022-2026). Turunnya Belanja Tidak Terduga tahun 2022 dikarenakan dalam penganggarannya belum termasuk anggaran untuk penanganan hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak lainnya.

Berdasarkan beberapa hal diatas maka total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten

Kapuas Hulu tahun 2022-2026 secara berturut-turut sebesar, Rp. 1,748 triliun, Rp. 1,801 triliun, Rp. 1,856 triliun, Rp. 1,912 dan Rp. 1,971 triliun. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel III.17 berikut ini.

Tabel III.17
Proyeksi Belanja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
2	**Belanja Daerah**	1.649.003,65	**1.748.526,55**	**1.801.407,44**	**1.856.074,98**	**1.912.597,09**	**1.971.044,50**
2.1	**Belanja Operasi**	991.320,77	**1.013.321,95**	**1.038.655,00**	**1.064.621,37**	**1.091.236,91**	**1.118.517,83**
2.1.1	Belanja Pegawai	502.687,41	559.254,10	573.235,45	587.566,34	602.255,50	617.311,88
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	386.690,95	413.509,99	422.551,82	431.819,71	441.319,30	451.056,38
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	97.113,41	39.057,86	40.034,31	41.035,16	42.061,04	43.112,57
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.829,00	1.500,00	1.537,50	1.575,94	1.615,34	1.655,72
2.2	**Belanja Modal**	274.853,95	**358.495,65**	**367.458,04**	**376.644,49**	**386.060,60**	**395.712,12**
2.2.1	Belanja Modal	274.853,95	358.495,65	367.458,04	376.644,49	386.060,60	395.712,12
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	16.633,80	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2.4	**Belanja Transfer**	366.195,13	**371.708,95**	**390.294,40**	**409.809,12**	**430.299,57**	**451.814,55**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.896,23	2.427,64	2.549,02	2.676,47	2.810,30	2.950,81
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	364.298,90	369.281,31	387.745,38	407.132,64	427.489,28	448.863,74

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

c. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatan surplus anggaran. Proyeksi pembiayaan daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 secara berturut-turut adalah sebesar Rp. 20,00 miliar, Rp. 13,00 miliar, Rp. 11,00 miliar , Rp. 9,00 miliar , dan Rp. 7,00 miliar.

Tabel III.18
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
3	**Pembiayaan Daerah**	41.078,24	20.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

Tabel III.19
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**1.661.181,26**	**1.728.526,55**	**1.788.407,44**	**1.845.074,98**	**1.903.597,09**	**1.964.044,50**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**79.165,07**	**76.903,08**	**78.441,14**	**80.009,96**	**81.610,16**	**83.242,37**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.578,51	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,14	18.942,56
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.047,03	6.776,45	6.911,98	7.050,22	7.191,22	7.335,05
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.778,29	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.761,24	38.626,63	39.399,16	40.187,15	40.990,89	41.810,71
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.523.207,35	**1.599.787,35**	**1.647.780,97**	**1.697.214,40**	**1.748.130,83**	**1.800.574,76**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	1.478.326,41	**1.556.926,61**	**1.603.634,41**	**1.651.743,44**	**1.701.295,74**	**1.752.334,62**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.188.262,23	1.532.100,28	1.578.063,29	1.625.405,19	1.674.167,34	1.724.392,36
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	29.210,93	38.237,06	39.384,17	40.565,70	41.782,67	43.036,15

1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	900.430,50	920.588,39	948.206,04	976.652,22	1.005.951,79	1.036.130,34
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	258.620,81	328.523,91	338.379,63	348.531,02	358.986,95	369.756,56
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	24.826,33	25.571,12	26.338,25	27.128,40	27.942,25
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	290.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	44.880,93	**42.860,74**	**44.146,56**	**45.470,96**	**46.835,09**	**48.240,14**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	43.634,83	42.860,74	44.146,56	45.470,96	46.835,09	48.240,14
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**58.808,84**	**51.836,12**	**62.185,33**	**67.850,62**	**73.856,09**	**80227,38**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	**Pendatan Dana Darurat**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	**Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan**	58.808,84	51.836,12	62.185,33	67.850,62	73.856,09	80.227,38
2	**Belanja Daerah**	**1.649.003,65**	**1.748.526,55**	**1.801.407,44**	**1.856.074,98**	**1.912.597,09**	**1.971.044,50**
2.1	Belanja Operasi	991.320,77	**1.013.321,95**	**1.038.655,00**	**1.064.621,37**	**1.091.236,91**	**1.118.517,83**
2.1.1	Belanja Pegawai	502.687,41	559.254,10	573.235,45	587.566,34	602.255,50	617.311,88
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	386.690,95	413.509,99	422.551,82	431.819,71	441.319,30	451.056,38
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	97.113,41	39.057,86	40.034,31	41.035,16	42.061,04	43.112,57
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.829,00	1.500,00	1.537,50	1.575,94	1.615,34	1.655,72
2.2	**Belanja Modal**	**274.853,95**	**358.495,65**	**367.458,04**	**376.644,49**	**386.060,60**	**395.712,12**
2.2.1	Belanja Modal	274.853,95	358.495,65	367.458,04	376.644,49	386.060,60	395.712,12
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**16.633,80**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2.4	**Belanja Transfer**	**366.195,13**	**371.708,95**	**390.294,40**	**409.809,12**	**430.299,57**	**451.814,55**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.896,23	2.427,64	2.549,02	2.676,47	2.810,30	2.950,81
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	364.298,90	369.281,31	387.745,38	407.132,64	427.489,28	448.863,74
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-41.078,24**	**-20.000,00**	**-13.000,00**	**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-7.000,00**
3	**Pembiayaan Daerah**	**41.078,24**	**20.000,00**	**13.000,00**	**11.000,00**	**9.000,00**	**7.000,00**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	51.078,24	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran	41.078,24	20.000,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendapatan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2022 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat dimana kapasitas riil tahun 2022 hingga 2026 secara berturut-turut adalah Rp. 772,01 miliar, Rp. 790,01 miliar, Rp. 808,46 miliar, Rp. 827,38 miliar, dan Rp. 846,77 miliar.

Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel III.20 sebagai berikut.

Tabel III.20
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.728.526,55	1.788.407,44	1.845.074,98	1.903.597,09	1.964.044,50
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
	Total Penerimaan	**1.758.526,55**	**1.816.407,44**	**1.871.074,98**	**1.927.597,09**	**1.986.044,50**
	Dikurangi:					
4	Belanja Operasi (diluar Belanja Barang dan Jasa), Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	976.520,91	1.011.397,58	1.047.610,78	1.085.217,18	1.124.276,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**772.005,64**	**790.009,86**	**808.464,20**	**827.379,90**	**846.768,50**

Sumber: BKD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

BAB IV
PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki sisi strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan oleh kepala daerah beserta wakilnya. Perencanaan pembangunan yang dirumuskan, akan memberikan jalan bagi kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerahnya melalui koridor janji politik yang telah ditetapkan sehingga dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pengejawantahan setiap langkah kebijakan kepala daerah terpilih. Kebijakan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah nantinya harus didasari berbagai permasalahan dan isu strategi pembangunan yang relevan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab problematika pelaksanaan pembangunan selama ini. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang terstruktur sebagai cikal bakal kebijakan pembangunan Kapuas Hulu.

Perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional merupakan suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian

pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu selama periode pembangunan lima tahun ke depan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab II serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan

kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: "Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu".

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutna dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV.1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

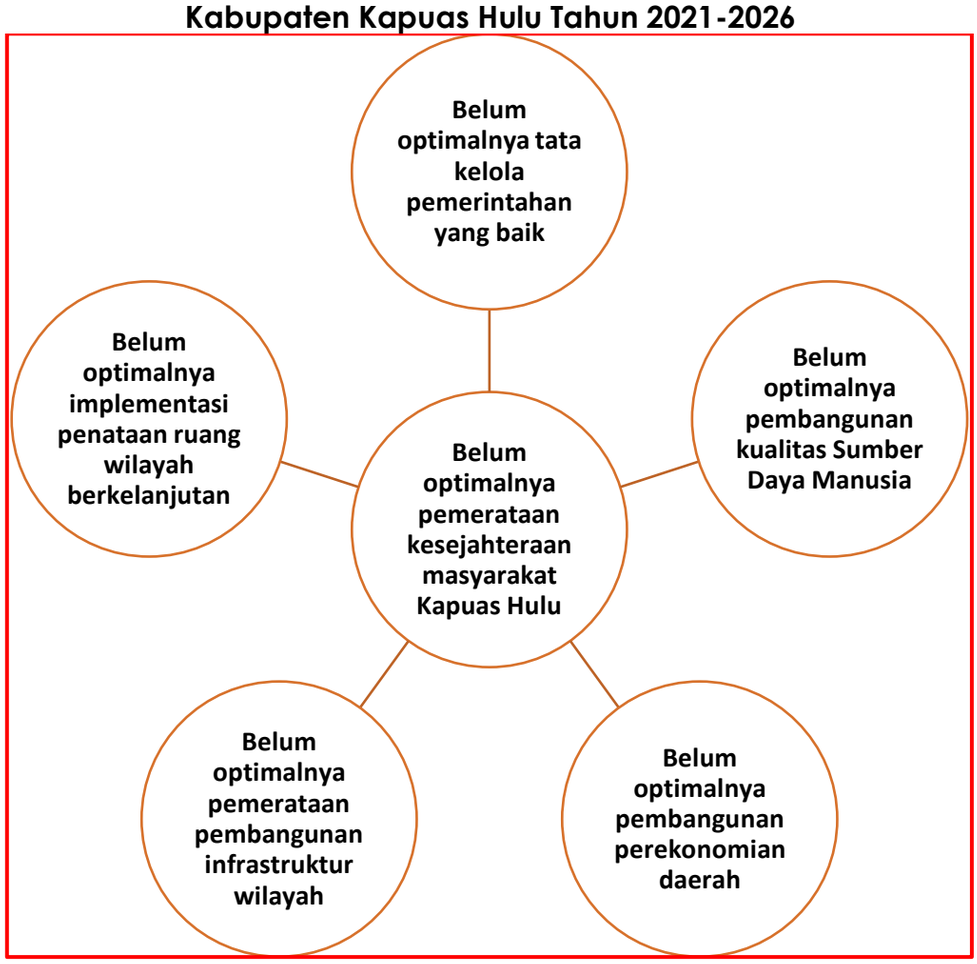

Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. **Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**

   Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparancy, predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud. Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: Belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan Belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada.

   Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Beberapa capaian kinerja urusan keuangan daerahpun masih belum memuaskan pada tahun 2019 seperti persentase peningkatan PAD yang belum optimal dengan realisasi 11,81 persen (capaian 62,15%), persentase belanja pegawai terhadap modal belum maksimal dengan

capaian 79,70 persen dan persentase belanja modal terhadap total belanja yang masih kurang dengan capaian 67,15 persen.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan pembangunan yang disusun dimana penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang belum maksimal dengan capaian hanya 88,65 persen dan persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target hanya sebanyak 58,97 persen.

Gambar IV.2
Penyelesaian Tindak Pidana
Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

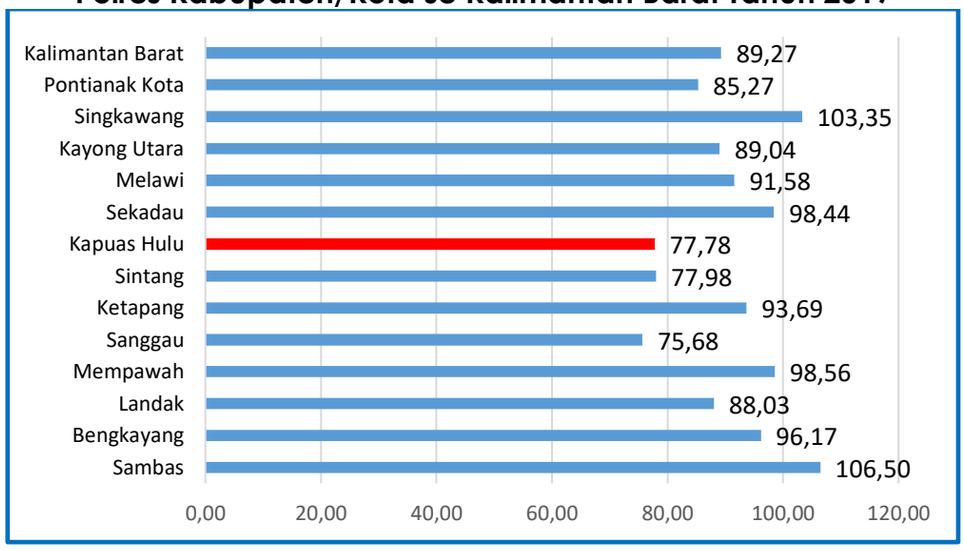

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Dari sisi perwujudan kondusivitas wilayah, penyelesaian tindak pidana secara umum di Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya kasus tindak pidana mampu diselesaikan. Terlebih Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya sebesar 77,78 persen kasus yang mampu diselesaikan. Terlihat pula capaian target kinerja pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagian besar masih belum optimal seperti rasio personil satpol PP sebesar 37,66 persen, cakupan petugas linmas 34,92 persen, pembinaan politik 66,67 persen maupun penegakan perda sebesar 72 persen. Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri karena menimbulkan keresahan masyarakat.

2. **Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dimana angka Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten/kota. IPM dengan capaian 65,65 masih jauh di bawah angka tertinggi IPM Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak yang mencapai 79,35. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,47 tahun); Harapan Lama Sekolah (12,04 tahun); Angka Harapan Hidup (72,44 tahun); dan Paritas Daya Beli (7.206 ribu rupiah per tahun/kapita)

Rendahnya komponen IPM tersebut mengindikasikan belum optimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di dalamnya capaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat agar mampu diantisipasi dan diselesaikan segala kendala pembangunan, khususnya pendidikan dan kesaehatan yang secara langsung memperlihatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja maupun tenaga kerja.

Tabel IV.1
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	IPM	RLS	HLS	AHH	PPP
Sambas	67,02	6,70	12,60	68,83	9.924
Bengkayang	67,57	6,53	12,08	73,67	9.182
Landak	65,96	7,10	12,39	72,70	7.403
Mempawah	65,50	6,82	12,33	70,90	7.913
Sanggau	65,67	6,95	11,56	71,35	8.410
Ketapang	67,16	7,26	11,79	71,01	9.259
Sintang	66,70	6,89	12,02	71,62	8.823
Kapuas Hulu	**65,65**	**7,47**	**12,04**	**72,44**	**7.206**
Sekadau	64,34	6,60	11,57	71,65	7.640
Melawi	65,54	6,67	11,15	72,88	8.465
Kayong Utara	62,66	6,00	11,81	68,11	7.905
Kubu Raya	67,76	6,82	13,64	70,43	8.773
Kota Pontianak	79,35	10,14	14,99	72,80	14.515
Kota Singkawang	71,72	7,72	12,89	71,85	11.789
Kalimantan Barat	67,65	7,31	12,58	70,56	9.055

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Gambar IV.3
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

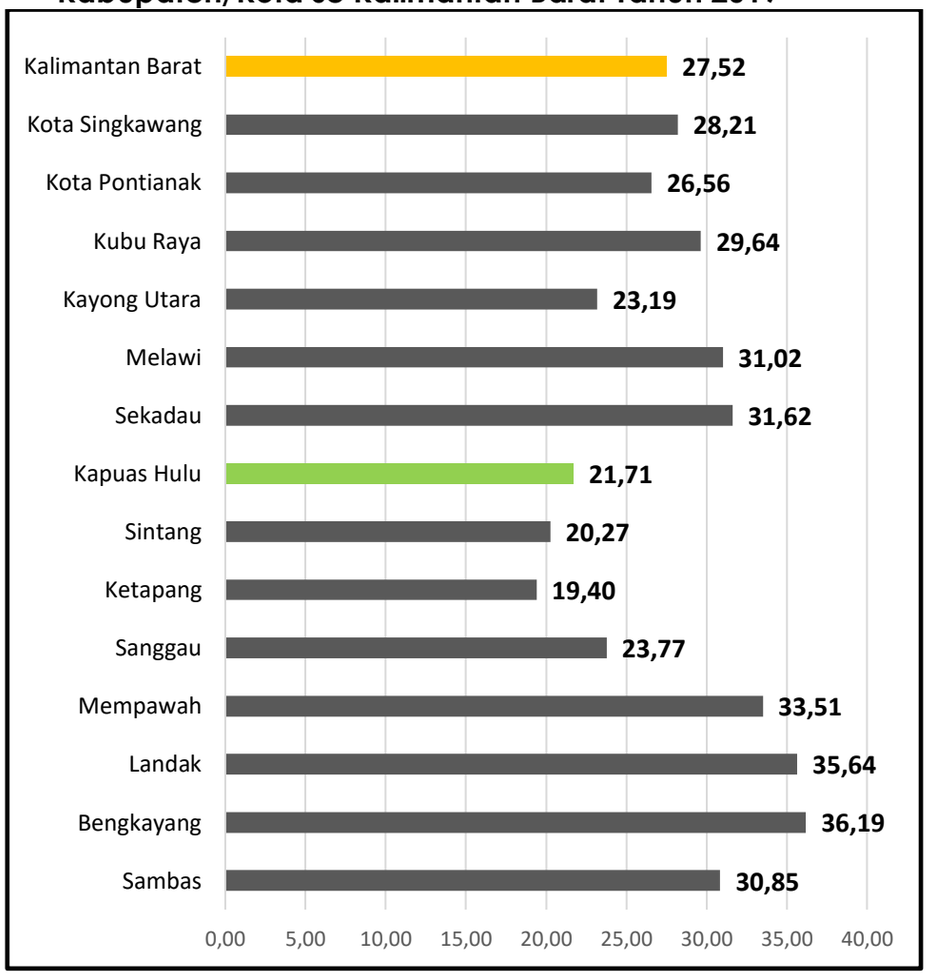

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat juga terlihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dimana pada tahun 2019 sebanyak 21,71 persen penduduk mengeluhkan kesehatan mereka. Dari sini terlihat kesehatan lingkungan juga masih belum cukup berkualitas sehingga menyebabkan keluhan kesehatan masyarakat cukup tinggi.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih jauh dari harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya capaian indikator terkait penyetaraan gender ini menjadi

asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kapuas Hulu belum membuahkan hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender.

Gambar IV.4
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

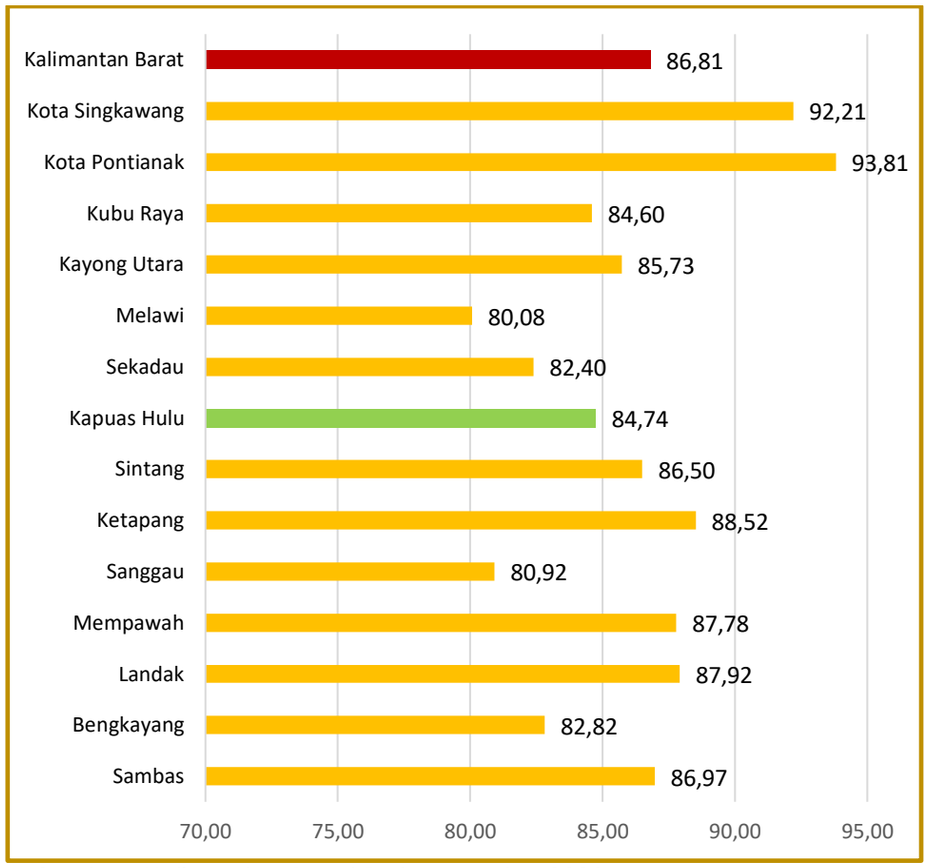

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi

pemerintah mengingat masa Pandemi COVID-19 saat ini perlambatan akan terus terjadi bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan negatif.

Gambar IV.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

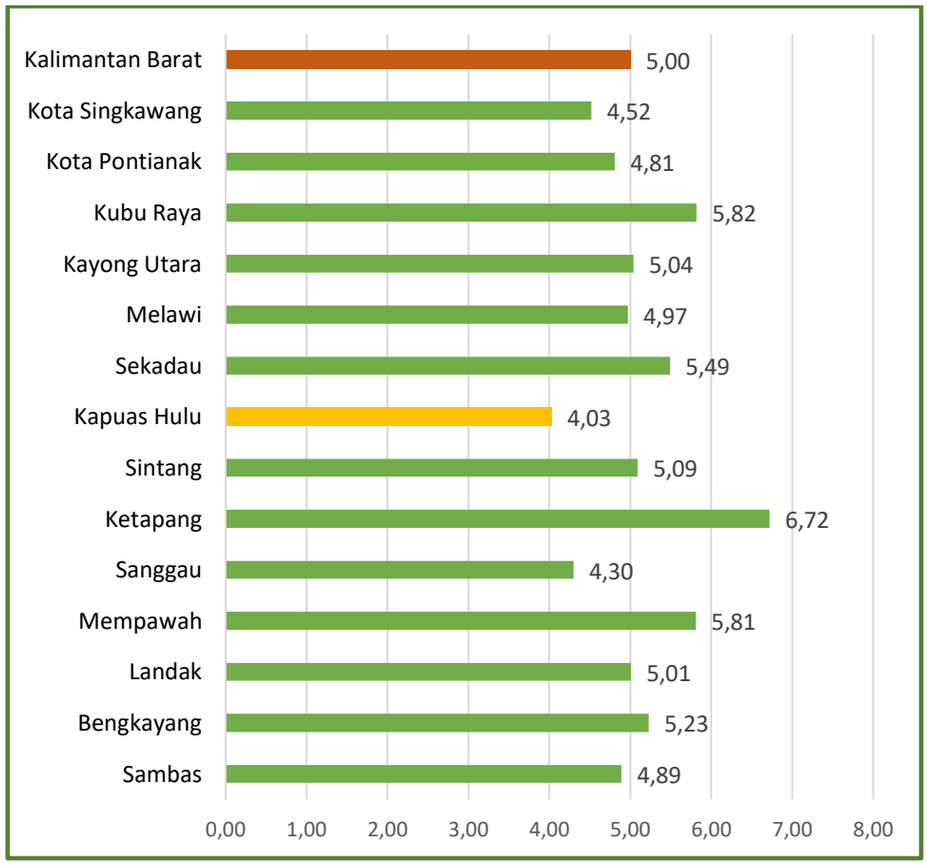

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Barat dengan capaian 4,03 persen. Kewaspadaan dalam melihat fenomena ini perlu dirumuskan pemecahannya mengingat ke depan, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai dengan adanya berbagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain dari pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa kontribusi perekonomian Kapuas Hulu terhadap agregat prekonomian Kalimantan

Barat masih belum optimal. Sebesar 4,80 persen perekonomian Kalimantan Barat disumbang dari perekonomian di Kapuas Hulu.

Gambar IV.6
Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019

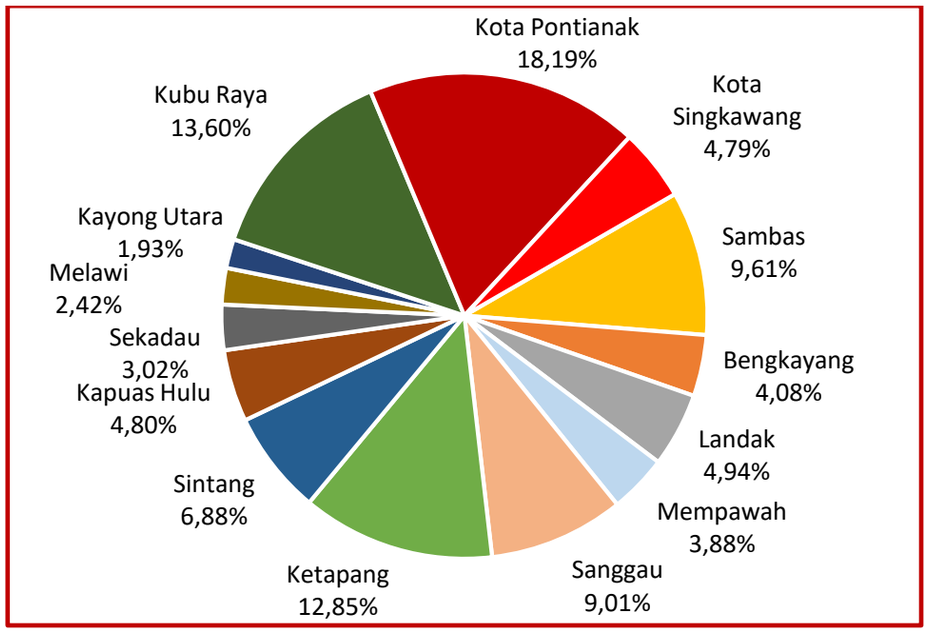

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu (9,62%) berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yang mencapai 7,49 persen. Selain masih cukup tinggi kemiskinan dibanding wilayah lain, series angka kemiskinan di Kapuas Hulu juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka kemiskinan ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga ketika terjadi gejolak perekonomian akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Poin ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis

dalam mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.

Gambar IV.7
Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

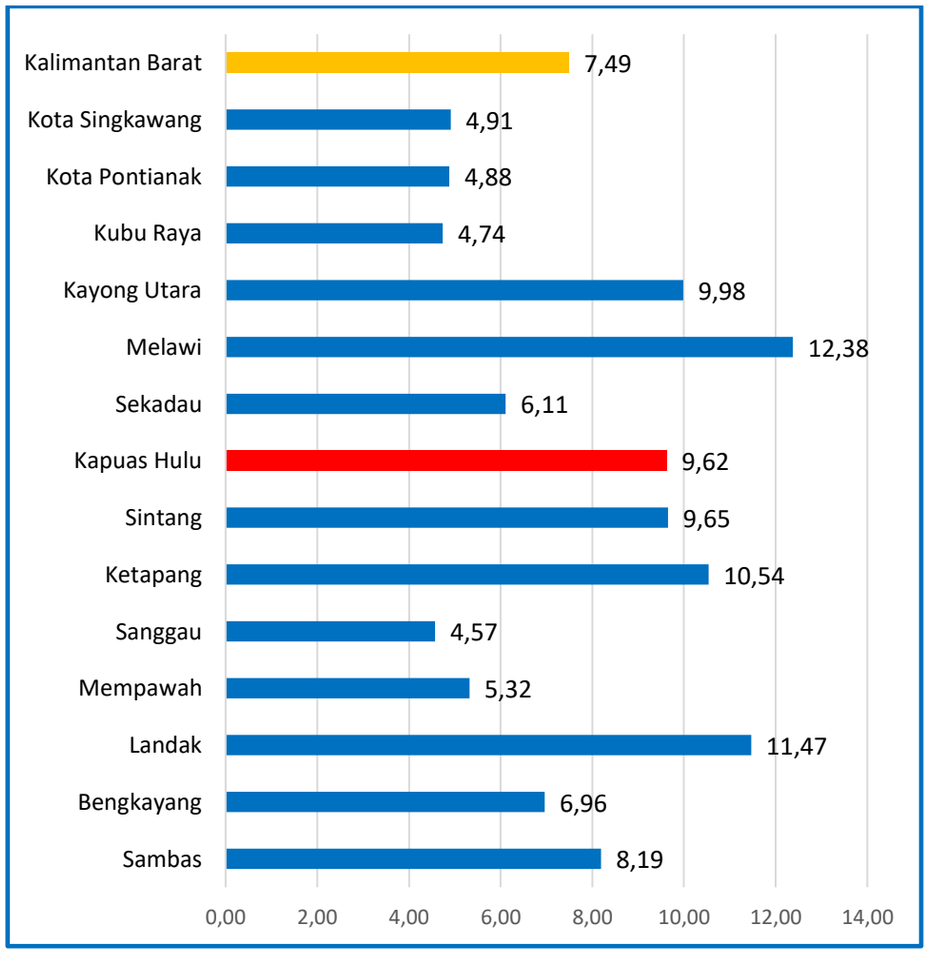

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu "pekerjaan rumah" bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu

kendala pembangunan Kapuas Hulu yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Kapuas Hulu maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Kapuas Hulu menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparatur pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparatur tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan.

Dari sisi fasilitas perumahan dan kesehatan, terlihat masih minimnya akses rumahtangga ke fasilitas sanitasi layak maupun air minum layak. Hal ini tentu sejalan dengan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan, yang masih perlu banyak pembenahan. Terlihat bahwa akses rumahtangga terhadap sanitasi layak hanya sebesar 57,88 persen dan akses rumahtangga terhadap air minum layak sebesar 44,71 persen.

Tabel IV.2
Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

Kab/Kota	Akses rumah tangga (%)	
	sanitasi layak	air minum layak
Sambas	81,83	91,63
Bengkayang	77,76	68,21
Landak	46,88	37,23
Mempawah	74,71	76,95

Kab/Kota	Akses rumah tangga (%)	
	sanitasi layak	air minum layak
Sanggau	62,00	47,74
Ketapang	76,68	30,37
Sintang	57,73	16,17
Kapuas Hulu	**57,88**	**44,71**
Sekadau	64,75	33,96
Melawi	61,70	21,69
Kayong Utara	62,90	84,17
Kubu Raya	72,98	89,06
Kota Pontianak	94,05	58,03
Kota Singkawang	89,91	53,33
Kalimantan Barat	72,08	54,81

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Kabupaten Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dirumuskan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik lainnya masih belum memperhatikan RTRW ini secara optimal. Hal ini menyebabkan masih belum sinkronnya implementasi penataan ruang wilayah yang berujung pada terjadinya bencana maupun buruknya tata kelola perkotaan. Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam "pengerukan"nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi besar aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bahkan pada struktur ekonomi, sektor ini cukup memberikan pengaruh pada nilai PDRB

Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dari sisi perijinan maupun pengawasan kegiatannya harus dilakukan secara ketat sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup Kapuas Hulu.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kapuas Hulu.

Tabel IV.3
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah
	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Merebaknya Pandemi COVID-19
	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah
	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan
	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum optimalnya peran serta

Permasalahan Pokok	Permasalahan
	perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan
	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya
	Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu
	Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal
	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

4.2. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui

identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kapuas Hulu adalah adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi

COVID-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kapuas Hulu seperti:

a. *Sustainable Development Goals*/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya *(Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;

2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan

17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera

saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Kapuas Hulu telah menyandang status Cagar Bioasfer dari UNESCO. Dari total wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, lebih dari setengahnya adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat dan ketat secara aturan. Hal ini menjadikan beberapa keuntungan bagi pemerintah daerah Kapuas Hulu seperti dalam hal anggaran maupun terkait kelestarian lingkungan.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming*/*Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto

pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "Katowice Climate Package" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0 Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

f. *Heart of Borneo* (HoB)

Heart of Borneo merupakan program dari *World Wildlife Fund* (WWF) yang kerjasama dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia pada tahun 2007. Heart of Borneo merupakan program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan mencakup sebagian wilayah Brunei Darussalam. Tujuan program pengelolaan kawasan lintas batas negara untuk mengatasi isu-isu pengelolaan SDA dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal di kawasan perbatasan. Salah satu tujuan HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat kawasan hutan yang masih ada di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai salah satu wilayah kawasan di Kalimantan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kawasan hutan yang cukup luas. Kabupaten Kapuas Hulu dan para pemangku kepentingan berkomitmen terhadap HoB melalui ekowisata. Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki komitmen kuat terhadap tamasya alam di HoB dan berniat mengembangkan rencana induk ekowisata. Jelajah hutan rimba di Jantung Borneo sebagai suatu kegiatan ekowisata yang sudah berlangsung. Dengan ekowisata HoB ini dapat memberi andil berkelanjutan bagi pendapatan masyarakat lokal, dan turut membantu melindungi keanekaragaman ekosistem yang sangat luas. Tantangan bagi HoB bukanlah berkurangnya nilai yang menarik, melainkan ancaman terus menerus yang membuatnya terdevaluasi akibat pemanfaatan SDA yang mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mana hal ini masih bergantung pada kebijakan pembangunan demi mencegah SDA dari eksploitasi serta penghancuran.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika

isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Penyebaran pusat-pusatpertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
   d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

   a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
   b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   c. Moderasi beragama; dan
   d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

   a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
   e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
   c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Pengembangan komoditas unggulan wilayah Kalimantan, terutama pada Kalimantan Barat adalah karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas dan batubara. Dalam rangka pembangunan desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pemerintah Pusat mengarahkan pada pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembnagunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 Tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 Kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan berbagai potensi sumberdaya yang ada, beberapa proyek Prioritas Nasional pembangunan diKabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa Terpadu, pelaksana Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri dengan kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:
   - Desa Digital (P3PD)
   - Penetapan Batas Desa
   - Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan berbasis masyarakat
   - BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa
   - Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemsyarakatan desa
   - Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)
   - Pendampingan desa
   - Daerah yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa
   - Pengendalian penggunaan Dana Desa
2. Pengembangan komoditas unggulan karet pelaksana Kementan dengan kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:
   - Pengembangan kawasan karet, dengan program K/L: Program peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

b. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease* 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena "hantaman" efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayak perekonomian nasional, maka besara defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masayrakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing,* maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa.

Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Jlka dilihat secara tahunan, perekonomian Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y). Beberapa sektor yang masih memiliki kontraksi pertumbuhan cukup tinggi pada pertumbuhan y-on-y adalah industri pengolahan (-4,31%); Perdagangan, reparasi mobil dan motor (-5,03%); dan transportasi dan pergudangan yang memiliki kontraksi paling dalam sebesar 16,70 persen.

c. Kebijakan Strategis Nasional

Beberapa permasalahan pembangunan nasional terus bergulir dengan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Oleh karena itu, lembaga legislatif dibarengi dengan lembaga eksekutif merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional dengan menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengantisipasi dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode. Implementasi kebijakan tersebut memiliki efek domino yang cukup signifikan pada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kapuas Hulu. Sehingga dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, perlu melihat beberapa kebijakan nasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja pembangunan daerah.

i. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan

mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Namun dalam rancangannya, Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Meskipun begitu, UU tersebut telah disahkan dan diundangkan sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh elemen. Beberapa poin yang akan berdampak merugikan, khususnya yang mempengaruhi kinerja ketenagakerjaan dan perekonomian daerah, sebagai berikut:

- Substansi UU Cipta Kerja mengubah waktu kerja yaitu dihilangkannya ketentuan lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan. Di dalam UU Ciptaker pasal 79 ayat 1 b disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari dalam seminggu.
- Pada pasal 88 UU Ciptaker menghapus ketentuan rinci mengenai perhitungan upah yaitu tidak ada lagi ketentuan upah minimum.
- Dalam UU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil (produktivitas) yang terdapat dalam pasal 88B. Selain itu, upah dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Hal ini tentu saja berpotensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.
- Ketentuan UU Cipta Kerja memang tidak menghilangkan pasal dalam UU No 13 tahun 2003 mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi, substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut otomatis tidak dihitung bekerja.
- Sejumlah cuti seperti cuti panjang tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh perusahaan dengan perjanjian

kerja, peraturan perusahaan dan dengan Perjanjian Kerja Bersama.

- Perusahaan dapat memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak melalui Pasal 154A UU Ciptaker yaitu PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; efisiensi; tutup karena rugi, force majeur, menunda utang, dan pailit.
- Ketentuan dalam UU Ciptaker pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di-PHK karena menghapus uang penggantian hak.

Sebagian besar tenaga kerja di Kapuas Hulu memiliki status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai sebanyak 44.208 jiwa atau 30,98 persen. UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan ini tentu memiliki dampak pada tenaga kerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah, khususnya dalam hubungan industrial.

ii. Selama masa Pandemi Covid-19, perekonomian sudah bisa dipastikan mengalami kontraksi pada sebagian besar sektor perekonomian.

Salah satu yang terkena dampak terbesar adalah sektor perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan ekspor dan impor karena pandemi ini sudah menjadi isu internasional. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan segera merilis enam kebijakan stimulus untuk menjaga kelancaran lalu lintas barang ekspor dan impor.

- Strategi pertama yang disiapkan pihaknya yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor melalui penerapan *affixed signature* dan *stamp*.
- Strategi kedua menerapkan *Automatic Authentication* dalam pemrosesan perizinan dan impor bagi *Reputable traders*.

- Strategi ketiga yaitu peningkatan dan percepatan layanan ekspor dan impor, serta pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).
- Strategi keempat, melakukan peningkatan fasilitasi dan pelayanan informasi ekspor, promosi ekspor serta business matching secara virtual melalui perwakilan perdagangan.
- Strategi kelima, melakukan pelatihan kepada calon eksportir baru, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan maupun kerjasama dengan beberapa lembaga dan mitra dagang.
- Strategi keenam, mengusulkan insentif berupa asuransi atau kredit ekspor atau pembiayaan lainnya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bagi eksportir terdampak Covid-19.

Komoditas unggulan yang menjadi komoditas ekspor dari Kapuas Hulu seperti madu, sahang, kain tenun, kerajinan tangan, minyak atsiri, dan kayu lapis terkendala dalam memasuki Malaysia karena adanya lockdown. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai kebijakan strategis dalam upaya pemasaran kembali komoditas unggulan di Kapuas Hulu yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berada pada pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 dimana pada pembangunan saat ini, pemerintah daerah memiliki visi pembangunan jangka menengah "TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN".

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi pembanguan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib; serta
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Sedangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah peiode 2018-2023, maka dapat dijabarkan tujuan pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Tujuan 3: Meningkatnya kualitas SDM

Tujuan 4: Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata

Tujuan 5: Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan 6: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tujuan 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

4.2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitar

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Sintang merumuskan visi pembangunan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dengan Visi "KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA". Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021"

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Dalam pelaksanaan pembangunan periode ini, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya angka melek huruf
2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun
3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat
4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar
5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi

Tujuan 2:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak
2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.

Tujuan 3:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Tujuan 4:

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan ketiga dan keempat memiliki sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang

2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTR.

Tujuan 4:

Mewujudkan kualitas Kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat. Dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatnya kerukunan antar ummat beragama.

Tujuan 5:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan

Tujuan 6:

Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa

Tujuan kelima dan keenam memiliki sasaran pembangunan sebagai berikut

1. Meningkatnya perekonomian daerah.
2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan daerah.
3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.
4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.
5. Menigkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam
6. pengembangan perekonomian rakyat.
7. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.

Tujuan 7:

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur

Tujuan 8:

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

Tujuan 9:

Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah

Tujuan 10:

Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa

Dari keempat tujuan pembangunan Kabupaten Sintang terkait tata kelola pemerintahan daerah, maka dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah.
2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.
3. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
8. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD

Sintang bersama dengan Kapuas Hulu menjadi bagian dari beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan desa terpadu untuk membangun daerah tertinggal dan perbatasan. Selain itu, terdapat proyek strategis dalam pengembangan komoditas karet melalui Program peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan oleh Kementerian Pertanian.

4.2.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai wilayah yang memiliki geografis sulit dan berada di Pulau Kalimantan yang memiliki berbagai ekosistem lingkungan hidup, maka Kabupaten Kapuas Hulu harus merumuskan KLHS secara terstruktur dan memiliki integrasi dengan berbagai perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil dari KLHS di Kabupaten Kapuas Hulu mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini memiliki konsistensi yang baik terhadap berbagai dokumen penunjangnya, termasuk didalamnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu pada periode pembangunan sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadikan beberapa poin perencanaan pada periode sebelumnya masih relevan dari sisi pembangunan berkelanjutan.

Dalam rumusan KLHS telah ditetapkan isu strategis pada pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026 yang memiliki prioritas dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kelompok Pilar dan Isu Strategis
KLHS Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Kelompok Pilar	Isu Strategis
1	Pilar Pembangunan Sosial	Masih adanya kemiskinan atau ketidaksejahteraan pada beberapa kelompok/komunitas masyarakat
		Belum optimalnya pencapaian ketahanan pangan dan terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera, tenteram dan nyaman (Ketersediaan bahan pangan selalu ada dan terjangkau)
		Belum optimalnya pencapaian kehidupan sehat dan sejahtera
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pendidikan di beberapa komunitas masyarakat
		Kesetaraan gender
2	Pilar Pembangunan Ekonomi	Kurangnya kesempatan pekerjaan yang layak yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah
		Kuantitas dan kualitas infrastruktur (Jln Pelabuhan, saluran drainasi, irigasi, saluran angkutan air dan datar yang representative
		Kurangnya percepatan dan atau pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan dan perkotaan
3	Pilar Pembangunan Lingkungan	Banjir dan kekeringan
		Sampah dan limbah
		Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (hutan, realisasi kebun dan besarnya perijinan, pertambangan, pertanian, industri) dalam rangka mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah
		Kebakaran hutan dan lahan (asap)
		Alih fungsi lahan dan konflik lahan (batas patok tanah claim masyarakat dan batas kawasan hutan, lahan pertanian menjadi permukiman, pemukiman menjadi pusat kegiatan, dll)
		Terbatasnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak
4	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya pelayanan dan transparansi kelembagaan (Efektivitas, akuntabilitas) di semua tingkat dan

No.	Kelompok Pilar	Isu Strategis
		sekaligus meminimalisir atau meniadakan segala bentuk kolusi, korupsi dan penyuapan

4.2.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada periode pembangunan 2014-2034 sebagai arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah di daerah. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri adalah untuk "Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi". Hal ini tentu sudah menjadi tujuan utama mengingat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan memiliki potensi alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dalam rumusannya, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

1. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
2. pengembangan ekowisata;
3. pengembangan agropolitan;
4. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
5. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
6. pengembangan kawasan perbatasan;
7. pengembangan infrastruktur;
8. penanganan kawasan rawan bencana; dan
9. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan Negara

Kebijakan tersebut membawa pada perencanaan struktur ruang wilayah daerah, khususnya pusat kegiatan dimana terdapat lima pusat kegiatan yakni:

a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Kota Badau
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Putussibau

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Kota Nanga Tepuai dan Semitau
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
    - kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
    - kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
    - kawasan perkotaan jongkong di Kecamatan Jongkong;
    - kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
    - kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
    - Desa Bika di Kecamatan Bika;
    - Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
    - Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
    - Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
    - Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
    - Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
    - Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
    - Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
    - Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
    - Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
    - Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
    - Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
    - Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;
    - Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
    - Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan
    - Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid

Dalam RTRW Kapuas Hulu Periode RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan pada tahap II dan III pada tahapan pelaksanaan program RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014 – 2034 yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5
Program Utama RTRW
Periode Jangka Menengah II dan III Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**			
1.	**Perwujudan Pusat Kegiatan**			
	1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)			
	a. Perencanaan Detail Kawasan PPLB	Nanga Badau		
	b. Pembangunan Kawasan PPLB	Nanga Badau		
	c. Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan	Nanga Badau		
	d. Penataan Kawasan Kota	Nanga Badau		
	e. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Nanga Badau		
	f. Pembangun Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Badau		
	g. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Nanga Badau		
	h. Konsolidasi Lahan	Nanga Badau		
	i. Penataan daerah perbatasan guna mencegah illegal loging dan trafficking	Nanga Badau		
	1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)			
	a. Perencanaan Detail Kawasan Ibukota Kabupaten	Putussibau		
	b. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan	Putussibau		
	c. Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan	Putussibau		
	d. Penataan Land Mark Kota	Putussibau		
	e. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Putussibau		
	f. Pembangun Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Putussibau		
	g. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Putussibau		
	h. Konsolidasi Lahan	Putussibau		
	1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PKL)			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau		
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau		
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau		
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Tepuai dan Semitau		
	e. Konsolidasi Lahan	Nanga Tepuai dan Semitau		
	1.4 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	1.5 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya		
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya		
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya		
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Ibukota Kec.		

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
		Lainnya		
2	**Perwujudan Sistem Prasarana**			
	2.1 Pengembangan Sistem Transportasi			
	• **Pengembangan Sistem Transportasi Darat**			
	a. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Arteri :			
	(a) Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Simpang Sejiram – Nanga Tepuai – Mentebah – Putussibau	292,19 km		
	(b) Simpang Sejiram – Semitau – Nanga Kantuk	89,2 km		
	(c) Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Puring Kencana – Nanga Kantuk – Badau – Lanjak – Simpang Mataso – Tanjung Kerja – Putussibau – Nanga Bungan – Batas Kalimantan Timur	296,36 km		
	b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor :			
	(a) Jln. Ahmad Yani (Putussibau)	2,34 km		
	(b) Jln. Yos Sudarso (Putussibau)	0,45 km		
	(c) Nanga Kantuk – Sungai Tembaga	18,6 km		
	(d) Badau – Sungai Tembaga	17,9 km		
	(e) Simpang Silat – Nanga Silat	13,2 km		
	(f) Benua Martinus – Ulak Pauk	17,8 km		
	(g) Kedamin – Bika	19,1 km		
	(h) Bika – Manday	3,17 km		
	(i) Bongkong – Nanga Dangkan	12,5 km		
	(j) Kenerak – Selimbau	25,0 km		
	(k) Lingkar Mupa – Transmigrasi	1,63 km		
	(l) Lingkar Dalam Kota Bika	0,68 km		
	(m) Mataso – Sadap	4,0 km		
	(n) Nanga Kantuk – Langau	51,6 km		
	(o) Nanga Kantuk – Nanga Silat	68,0 km		
	(p) Semitau – Suhaid	10,3 km		
	(q) Simpang Sekubah – Jongkong	23,2 km		
	(r) Sungai Tembaga – Empaik	13,0 km		
	(s) Tepuai – Nanga Taman	13,6 km		
	c. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal	522,88 km		
	d. Pembangunan dan Peningkatan Terminal			
	(a) Terminal B	Nanga Badau, Kedamin		
	(b) Terminal C	Putussibau, Semitau, Nanga Tepuai		
	e. Pengembangan Dermaga Sungai	Putussibau Kota, Nanga Bunut, Semitau, Jongkong, Lanjak, Nanga Silat		
	f. Pembangunan Rel Kereta Api Pontianak - Putussibau			
	• **Pengembangan Sistem Transportasi Udara**			
	a. Peningkatan Bandar Udara Pangsuma	Putussibau Utara		
	b. Penyusunan aturan Zonasi Kawasan sekitar Bandara Pangsuma	Putussibau Utara		
	c. Pembangunan Bandar Udara Perintis Badau	Badau		
	d. Pembangunan Bandar Udara Khusus TNI AU	Nanga Awin		
	2.2 Pengembangan Jaringan Energi			
	• **Pengembangan Jaringan Listrik**			
	a. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Silat Hulu, Hulu Gurung, Semitau, Selimbau, Jongkong, Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Putussibau Selatan, Batang		

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
		Lupar, Badau, Empanang		
	b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Putussibau Selatan		
	c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB)	Mentebeh		
	d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)	Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Batang Lupar, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan, Pengkadan, Silat Hulu, Embaloh Hulu, Puring Kencana, Empanang		
	e. Peningkatan dan perluasan Jaringan Distribusi	Seluruh Kec.		
	• **Peningkatan Sistem Distribusi BBM**			
	a. Peningkatan kapasitas Depo BBM	Putussibau		
	b. Pembangunan Fasilitas Penyimpanan BBM untuk	Putussibau		
	Mendukung PLTD, Transportasi			
	c. Pengembangan Jaringan Distribusi BBM untuk Kebutuhan Domestik	Seluruh Kec.		
	2.3 Jaringan Sumberdaya Air			
	• **Konservasi Sumberdaya Air**			
	a. Penataan Kawasan Lindung sekitar Mata air	Seluruh Kec.		
	b. Perlindungan Kawasan Tangkapan Air	Seluruh Kec.		
	c. Penetapan Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh kec.		
	• **Pendayagunaan Sumberdaya Air**			
	a. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Bersih	Nanga Tepuai, Nanga Dangkan, Serijam, Semitau, Badau, Putussibau, Jongkong, Mentebah		
	b. Peningkatan Jaringan Pelayanan Air bersih	Seluruh Kec.		
	c. Pembangunan Irigasi	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Imbal Jasa Hulu Hilir (Payment Watersheet Services)	Sungai Mendalam		
	• **Pengendalian Daya Rusak Air**			
	a. Pembangunan sarana bendungan pengendali banjir	Hulu Tabuk, Lubuk Antuk, Riam Panjang, Sukamaju- Lunsana, Ukit-Ukit, Toalang		
	2.4 Jaringan Telekomunikasi			
	a. Pembangunan jaringan sistem teresterial/kabel	Seluruh Kec.		
	b. Pembangunan jaringan sistem satelit dengan Broadband	Seluruh Kec.		
	c. Pembangunan BTS untuk telepon seluler	Seluruh Kec.		
	d. Pembangunan Basis data spasial dan jaringan sistem	Seluruh Kec.		
	informasi penyelengaraan kegiatan penataan ruang			
	terpadu			
	2.5 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah			
	a. Pembangunan TPA Modern Skala kabupaten	Badau		
	b. Pembangunan TPS Skala Kecamatan	Seluruh Kec.		

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
	2.6 Pengembangan Sistem Pengelohan Limbah			
	Pembangunan UPL Modern Skala Kabupaten	Badau		
B.	**PERWUJUDAN POLA RUANG**			
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**			
	1.1 Pemantapan Kawasan Hutan Lindung			
	a. Pemantapan Hutan Lindung	Seluruh Kec.		
	b. Penetapan Alih Fungsi Lahan			
	1.2 Pemantapan Kawasan Yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya			
	a. Kawasan Bergambut	Batang Lupar, Bika, Bunut Hilir, Danau Sentarum, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Jongkong, Putussibau Utara		
	b. Kawasan Resapan Air	Seluruh Kec.		
	1.3 Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh Kec.		
	b. Kawasan Sekitar Danau dan Danau Lindung	Seluruh Kec.		
	c. Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kec.		
	1.4 Pemantapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya			
	a. Pemantapan Kawasan TNBK	TNBK		
	b. Pemantapan Kawasan TNDS	TNDS		
	c. Pemantapan Kawasan Cagar Budaya			
	d. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	TNDS dan sekitarnya		
	1.5 Pemantapan Kawasan Rawan Bencana			
	a. Penetapan kawasan rawan bencana	Seluruh Kec.		
	b. Penetapan aturan zonasi kawasan rawan bencana	Seluruh Kec.		
	c. Penetapan zona-zona evakuasi	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan sistem penanganan dan mitigasi bencana	Seluruh Kec.		
	1.6 Pemantapan Kawasan Lindung Lainnya			
	a. Kawasan koridor satwa dilindungi	Batang Lupar, Embaloh Hulu		
	b. Kawasan Perlindungan Masyarakat Setempat/Hutan Lindung Adat/Hutan Kelola Masyarakat	Seluruh Kec.		
	c. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk jasa lingkungan	Seluruh Kec.		
2	**Pengembangan Kawasan Budidaya**			
	2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi			
	a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan hutan produksi	Seluruh Kec.		
	b. Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Konversi/Restorasi Ekosistem	Bunut Hilir, Bunut Hulu, Bika, Mentebah, Boyan Tanjung, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Semitau, Silat Hilir		
	c. Pengembangan Hutan Desa	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Hutan Penghasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Seluruh Kec.		
	e. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Seluruh Kec.		
	2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian			
	a. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman			

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
	Pangan Lahan Basah	Seluruh Kec.		
	b. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering	Seluruh Kec.		
	c. Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kec.		
	e. Pengembangan Kawasan Peternakan	Seluruh Kec.		
	f. Pengembangan budidaya madu hutan	Seluruh Kec.		
	g. Penetapan Kawasan Pertanian Abadi/Lahan Basah Irigasi Teknis	Seluruh Kec.		
	2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan			
	a. Pengembangan perikanan tangkap	Selimbau, Batang Lupar, Bunut Hilir, Jongkong, Embaloh Hilir, Silat Hilir, dan Suhaid		
	b. Pengembangan budidaya perikanan kolam	Pengkadan, Hulu Gurung, Boyan Tanjung, Bunut Hulu		
	c. Pengembangan budidaya perikanan karamba	Selimbau, Bunut Hilir, Jongkong, Batang Lumpar, Badau, Embaloh Hilir, Bika, Kalis, Seberuang		
	d. Pengembangan kawasan ikan hias Arwana	Suhaid, Semitau, Kedamin, Bika,		
	e. Penerapan teknologi budidaya ikan bernilai ekonomi tinggi	Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Boyan Tanjung, Batang Lumpar		
	2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan			
	a. Inventarisasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan	Bunut Hulu, Bunut		
	Pertambangan	Hilir, Hulu Gurung, Selimbau, Suhaid, Kalis, Mentebah, Pengkadan		
	2.6 Kawasan Peruntukan Industri			
	a. Perencanaan dan Penetapan Kawasan Agroindustri	Putussibau Utara, Semitau, Nanga Tepuai, Badau		
	b. Pengembangan *home industry*	Seluruh Kec		
	2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata			
	a. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata	Seluruh Kec.		
	b. Promosi dan networking	Seluruh Kec.		
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Seluruh Kec.		
	d. Penataan kawasan wisata alam dan budaya	Seluruh Kec.		
	e. Penataan Kawasan Ekowisata Danau Sentarum	TNDS dan sekitarnya		
	f. Penyusunan Blue Print Ekowisata	Seluruh Kec.		
	g. Peningkatan daya tarik obyek wisata	Seluruh Kec.		
	2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan			
	a. Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan	PKSN, PKW, PKL,		

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
		PPK		
	b. Penataan Lingkungan Permukiman Skala besar	Seluruh Kec.		
	c. Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Manjemen Pertanahan Perkotaan	Seluruh Kec.		
	e. Pemetaan status tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.		
	f. Penatagunaan tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.		
	g. Revitalisasi Kawasan Permukiman Terpencil	Seluruh Kec.		
C.	**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**			
1	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi	Agropolitan Silat Hilir dsk		
2	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan	Kawasan Ekowisata TNDS dan sekitarnya		
3	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Lingkungan	Koridor TNDS-TNBK		

4.2.3.5. Isu Strategis Kabupaten Kapuas Hulu

Perumusan isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kapuas Hulu yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.

Tabel IV.6
Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya pelayanan publik	Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi
Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	
Rendahnya indeks profesionalitas ASN	
Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya	
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintahan	
Belum optimalnya peningkatan	

Permasalahan	Isu Strategis
Pendapatan Asli Daerah	
Merebaknya Pandemi COVID-19	Percepatan penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah	Peningkatan kualitas SDM unggul
Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	
Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak	
Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal	
Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah	
Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (*Nature Base Solution*)
Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya	
Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu	
Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan
Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak	
Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca	
Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam	

Dalam menginterpretasikan isu strategis tersebut, dapat dilihat pada penjabaran isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. **Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi**

   Prioritas utama Kabupaten Kapuas Hulu dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Kapuas Hulu adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah. Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya.

Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Kapuas Hulu.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu dimana saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,61 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2019. Minimnya kontribusi PAD ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang saat ini masih jauh dari harapan.

2. **Percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah**

   Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam antisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah "normal" yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Desease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kapuas Hulu juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

3. **Peningkatan kualitas SDM unggul**

Sebagai daerah yang memiliki geografis sulit dan berada di perbatasan negara, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu

adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terdalam demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu yang lebih baik.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai wilayah yang memiliki geografis yang sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Kapuas Hulu, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi infomasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Pembangunan responsif gender di Kabupaten Kapuas Hulu masih diarahkan pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting, khususnya di Kapuas Hulu yang masih terikat pada permasalahan *culture mindset*. Pemberdayaan perempuan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan kesetaraan gender merupakan dampak dari *culture mindset* setempat dimana

beberapa budaya bagi perempuan yang menyebabkan sulit berkembang. Diharapkan ke depannya, peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dengan memberi kesempatan bagi perempuan Kapuas Hulu untuk tampil mengekspresikan diri tanpa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4. **Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat**

   Meningkatnya angka kemiskinan pada dua tahun terakhir menunjukan permasalahan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

   Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian hingga mencapai 62,61 persen. Hal ini menjadi salah satu pemicu masih terjadinya fluktuasi angka kemiskinan karena penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih memiliki kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu sasaran program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada masyarakat petani sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

   Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat yang bekerja dimana sebanyak 51,68 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sebatas lulusan SD sederajat ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih

memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki. Imbas dari rendahnya kualitas tenaga kerja tentu saja adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan minimnya pendapatan yang masuk ke dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum, rendahnya kualitas tenaga kerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga terbatas pada penghasilan yang telah didapatkan. Selain itu, lapangan usaha untuk tenaga kerja yang minim keterampilan rata-rata tidak memiliki potensi untuk mengembangkan tenaga kerjanya seperti pertanian maupun buruh/karyawan level menengah ke bawah. Oleh karena itu, diharapkan dengan peningkatan keterampilan dan kemandirian tenaga kerja, akan memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Secara umum, pemerintahan di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa). Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka upaya kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat tercapai.

5. **Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam (*Nature Base Solution*)**

   Solusi berbasis alam (NBS) mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan alam untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan. NBS merupakan solusi permasalahan pembangunan, khususnya perekonomian, yang didukung oleh alam dengan biaya yang lebih murah. Selain itu, secara bersamaan memberikan manfaat pada lingkungan, sosial dan ekonomi dan membantu membangun ketahanan. Sebagai wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, peningkatan nilai tambah pada sektor ini menjadi salah satu NBS yang dapat diimplementasikan dalam pembangaunan daerah.

   NBS pada sektor ini dapat dilakukan melalui agribisnis yang merupakan suatu kesatuan dari berbagai macam usaha yang mencakup salah satu ataupun keseluruhan bagian dari rantai produksi, pengolahan hasil, dan juga pemasaran yang saling berhubungan dengan berdasar pada pertanian dalam artian yang luas. Di Kapuas Hulu, agribisnis memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan gerak perekonomian daerah. Hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik karena hasil pertanian akan meningkat nilai tambahnya dan secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat.

6. **Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tesebut akan menjadikan kemandirian wilayah.

Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara tetangga, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dalam mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan NKRI. Bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mengupayakan peningkatan kualitas kinerja di daerah perbatasan yang meliputi pembangunan jalan maupun Pos Lintas Batas Negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Saat ini, Pos Lintas Batas Negara di Kapuas Hulu terdapat di Badau (PLBN Nanga Badau) yang diresmikan Preside Jokowi pada tanggal 16 Maret 2017.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga menjadi salah satu bagian dari penguatan wilayah perbatasan

karena dengan adanya perhatian dari pemerintah maka kedaulatan wilayah akan semakin tinggi dan tidak ada terjadi permasalahan yang mengindikasikan disintegrasi bangsa.

7. **Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

   Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang saat ini telah menyandang status Cagar Biosfer dari UNESCO. Status yang ditetapkan secara Internasional tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan dengan status yang telah disematkan, maka terdapat beberapa keistimewaan yang akan didapatkan oleh Kapuas Hulu yang telah 100 persen masuk dalam *Hearth of Borneo* (HoB) yang menjadikannya sebagai kabupaten konservasi dimana lebih dari setengah wilayahnya adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat dan ketat secara aturan. Salah satu keistimewaan tersebut adalah meningkatnya kemampuan ekonomi wilayah melalui branding promosi ekowisata yang berbasis kearifan lokal masyarakat dan kekayaan sumberdaya alam lainnya. Dari sisi pembangunan, maka kawasan konservasi Kapuas Hulu akan meningkatkan poin pembangunan berkelanjutan bukan hanya di Kapuas Hulu tetapi juga pencapaian pembangunan berkelanjutan nasional.

   Beberapa permasalahan muncul mengingat kawasan konservasi yang akan membatasi gerak perekonomian, khususnya subsektor ekonomi pertanian dan kehutanan karena lahan maupun sumber daya alam yang ada tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, harapan cukup tinggi diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat untuk tetap menjaga kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kawasan konservasi di Kapuas Hulu.

Sebagai daerah konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu berupaya melakukan yang terbaik untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya baik tanah, air dan udara. Upaya ini dimaksudkan untuk mempertahankan seluruh ekosistem dari berbagai gangguan, tekanan maupun kerusakan, tak terkecuali ekosistem perairan. Diharapkan ekosistem perairan Kabupaten Kapuas Hulu nantinya akan menjadi ekosistem tangguh yang mampu beradaptasi, fleksibel, serta menghadapi perubahan dan ketidakpastian.

Beberapa ekosistem perairan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya seperti ekosistem air tawar maupun rawa gambut dimana sebagian besar berada pada kawasan konservasi

Dari sisi ketahanan wilayah, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi bencana yang tinggi sehingga status kerawanan bencana juga cukup tinggi. Intensitas bencana alam yang cukup sering menyebabkan kerugian materiil maupun kondisi psikis korban bencana Hal ini menjadikan penanganan bencana harus diutamakan khususnya dalam meningkatkan *response rate* penanganan bencana agar lebih cepat penanganannya dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pencegahan beberapa bencana alam dapat dioptimalkan dengan kerjasa semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mampu menjaga lingkungan hidup agar menjadi lebih baik.

BAB V
VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif serta partipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya, dilakukan dengan memerhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu.

5.1 VISI

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta Visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2005 - 2025. Maka dengan terpilihnya **Fransiskus Diaan, S.H. sebagai Bupati dan Wahyudi Hidayat, S.T. sebagai Wakil Bupati** yang

mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Kapuas Hulu agar masyarakatnya lebih sejahtera. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD 2021-2026.

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntanbilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

5.2. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Penjabaran dari misi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Misi pertama, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan**

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan kebergaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks)

atau informasi yang bersifat provokatif. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Menciptakan keamanan swakarsa dan mebina pengembangan komunitas religius dan budaya masyarakat
b. Melibatkan tokoh masyarkat dan aparat dalam mendukung program pengamanan swakarsa
c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat kabupaten Kapuas Hulu, terhadap anti-diskriminasi, terorisme dan paham radikal
d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat daam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya gotong royong
e. Memberikan apresiasi di bidang agama, seni dan budaya tradisional
f. Mengembangkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya
g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok kesenian, organisasi sosial dan oembentukan forum pembaruan kebangsaan.

2. Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

Dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan memengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional
c. Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
e. Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
f. Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuh-kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
g. Menyediakan aksebilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan parasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
i. Mengembangkan kawasan agropolitan, pariwisata dan perikanan.
j. Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
k. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

3. **Misi ketiga, Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovativ. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memenuhi standar nasional.
b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
c. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.
d. Membebaskan biaya pendidikan dasar dan bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa.
e. Mengembangkan pendidikan non-formal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf
f. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
g. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah unggulan, serta asrama pelajar dan mahasiswa, dan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.

h. Mengoptimalkan pendokumentasian kebudayaan sebagai panduan melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan dalam pembangunan.

4. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaikai tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan e-government
f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.
g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.

5. Misi kelima, Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Mengoptimalkan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
b. Menerapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/berpengasilan rendah
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang profesional
d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.
e. Membangun rumah singgah bagi masyarakat miskin yang sakit, dan ibu hamil dari pedalaman.

f. Meningkatkan pelayanan jaringan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan stunting/gizi buruk.
g. Mengoptimalkan sarana dan prasana penunjang pelayanan kesehatan di dusun,desa, dan kecamatan.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

1. **Mewujudkan masyarakat yang aman, relegius dan berbudaya.**
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.**
3. **Meningkatkan jumlah desa mandiri.**
4. **Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka;**
5. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.**
6. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.**
7. **Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**
8. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.**
9. **Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.**

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel V.1
Inidikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
						2022	2026
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL							
Misi 1							
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan							
1.1	**Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya**		**Indeks Rasa Aman**	**Indeks**	**76,31**	**93,66**	**96,08**
	1.1.1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100
	1.1.2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	78	88
	1.1.3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	126,64	116,3
	1.1.4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	70	80
Misi 2							
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi							
2.1	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**-2,43**	**1,23**	**5**
	2.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,1	1,5
			Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,0	4,2
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,18	5,98
			LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	-10,52	5,58
2.2	**Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri**		**Persentase Desa Mandiri**	**%**	**13,31**	**15,47**	**24,10**
	2.2.1	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	43	67
2.3	**Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka**		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**8,33**	**8,08**	**7,08**
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	**4,02**	**3,68**	**3,00**
	2.3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan kesejahtaraan sosial	%	35,43	36,14	39,12

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
						2022	2026
	2.3.2	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	9,30	20,82
	2.3.3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	546,57	547,29	620,20
	2.3.4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,02	93,72
			Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	39,30	51,36
2.4	**Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup**		**Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Predikat**	**Baik**	**Baik**	**Baik**
	2.4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,41	75,05
	2.4.2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase RDTR	%	4,35	13,04	65,22
Misi 3: **Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**							
3.1	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**-**	**65,69**	**67,11**	**69,17**
	3.1.1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,53	13,04
	3.1.2	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,91	8,54
	3.1.3	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,42	73,51
	3.1.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Th n	7,162	7,428	7.963
Misi 4: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas**							
4.1	**Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**PREDIKAT**	**CC**	**CC**	**BB**
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB	A
	4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,5	81
	4.1.3	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
	4.1.4	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
						2022	2026
	4.1.5	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif
	4.1.6	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3
	4.1.7	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,25	50
4.2	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah**		**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**-**	**72,22**	**74,22**	**83,83**
	4.2.1	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	67	79
	4.2.2	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	60	69
	4.2.3	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	79,66	87,03
	4.2.4	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	75,55	82,64
	4.2.5	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	74,66	86,66
	4.2.6	Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100
	4.2.7	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	43,85	69,05
	4.2.8	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,2	61,1	80,7
Misi 5: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**							
5.1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan**	**-**	**0,00**	**72,50**	**82,50**

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
						2022	2026
	5.1.1	Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	SCORE		75	85
	5.1.2	Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	SCORE		70	80

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1) **Tujuan 1:** Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya

Agar tujuan Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya kondusivitas wilayah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Tindak Lanjut dan Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pencapaian 100 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat beragama, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat di ukur dengan Indeks Kerukunan antar Umat Beragama dengan pencapaian sebesar 88 pada akhir Tahun 2026.
- Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat di ukur dengan Indeks Resiko Bencana dengan pencapaian sebesar 124 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan pencapaian sebesar 80 pada akhir tahun 2026.

2) **Tujuan 2:** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Agar tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan LPE Kategori Industri

Pengolahan sebesar 1,50 %; LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,20 % ; dan LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sebesar 5,98 % pada tahun 2026.

3) **Tujuan 3:** Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri

Agar tujuan Mewujudkan Meningkatkan jumlah desa mandiri tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Jumlah Desa Mandiri dengan pencapaian 67 Desa Mandiri pada akhir tahun 2026.

4) **Tujuan 4:** Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Guna Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase pelayanan kesejahtaraan sosial sebesar 39,12 % pada akhir tahun 2026;
- Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih sebesar 20,82 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai Realisasi Investasi sebesar 620,20 Milyar pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Mikro sebesar 93,72 % dan Persentase Koperasi Aktif sebesar 51,36 % pada akhir tahun 2026.

5) **Tujuan 5:** Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Guna Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,05 pada akhir tahun 2026.

- Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase RDTR sebesar 65,22 % pada akhir tahun 2026

6) Tujuan 6: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Guna Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Harapan Lama Sekolah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,04 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Rata - Rata Lama Sekolah sebesar 8,54 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup sebesar 73,51 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Pengeluran Perkapita sebesar 7,963 Juta pada akhir tahun 2026.

7) Tujuan 7: Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Guna Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP Predikat A pada tahun 2026.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Score 81,00 pada tahun 2026.
- Optimalnya pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Opini BPK Predikat WTP pada tahun 2026.
- Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Predikat SPBE dengan Predikat Baik pada tahun 2026.

- Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Predikat KIP dengan Predikat Informatif pada tahun 2026.
- Meningkatnya Maturitas SPIP, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Maturitas SPIP dengan Level 3 pada tahun 2026.
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan professional, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat di ukur dengan Indeks Profesional ASN dengan nilai 50 Pada Tahun 2026.

8) Tujuan 8: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah

Guna mencapai tujuan Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah

- Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap sebesar 79 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap sebesar 69 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum sebesar 87,03 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 82,64 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik sebesar 86,66 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan

Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten sebesar 100 % pada akhir tahun 2026.

- Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani sebesar 69,05 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Rasio konektivitas Kabupaten sebesar 80,70 % pada akhir tahun 2026.

9) Tujuan 9: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Guna mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM sebesar 85 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana sebesar 80 pada akhir tahun 2026.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL										
Misi 1										
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan										
1.1	**Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya**		**Indeks Rasa Aman**	**Indeks**	**76,31**	**93,66**	**95**	**96**	**97**	**96,08**
	1.1.1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100
	1.1.2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	78	80	83	86	88
	1.1.3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	126,64	124,06	121,5	118,9	116,3
	1.1.4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	70	72	75	78	80
Misi 2										
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi										
2.1	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**-2,43**	**1,23**	**2**	**3**	**4**	**5**
	2.1.1	Meningkatnya pertumbuhan	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
		ekonomi sektor unggulan daerah	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,0	1,8	2,6	3,4	4,20
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
			LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	-10,52	2,88	3,24	4,53	5,58
2.2	**Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri**		**Persentase Desa Mandiri**	**%**	**13,31**	**15,47**	**17,63**	**19,78**	**21,94**	**24,10**
	2.2.1	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	43	49	55	61	67
2.3	**Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka**		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**8,33**	**8,08**	**7,83**	**7,58**	**7,33**	**7,08**
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	**4,02**	**3,68**	**3,51**	**3,34**	**3,17**	**3,00**
	2.3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan kesejahtaraan sosial	%	35,43	36,14	36,92	37,68	38,45	39,12
	2.3.2	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	9,30	13,46	17,63	19,99	20,82
	2.3.3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	546,57	547,29	569,18	591,95	615,63	620,20
	2.3.4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,02	93,12	93,32	93,52	93,72
			Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	39,30	41,63	44,75	48,25	51,36
2.4	**Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup**		**Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**PREDIKAT**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**
	2.4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,41	74,64	74,87	74,96	75,05

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
	2.4.2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase RDTR	%	4,35	13,04	26,09	39,13	52,17	65,22
Misi 3: **Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**										
3.1	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**-**	**65,69**	**67,11**	**67,64**	**68,15**	**68,66**	**69,17**
	3.1.1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,53	12,66	12,79	12,92	13,04
	3.1.2	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,91	8,07	8,23	8,39	8,54
	3.1.3	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,42	73,02	73,18	73,35	73,51
	3.1.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7,428	7.601	7.722	7.842	7.963
Misi 4: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas**										
4.1	**Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**PREDIKAT**	**CC**	**CC**	**CC**	**B**	**B**	**BB**
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB	BB	BB	BB	A

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
	4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,5	80,73	80,8	80,9	81
	4.1.3	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4.1.4	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	4.1.5	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	4.1.6	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
	4.1.7	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,25	48,50	49,00	49,50	50
4.2	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah**		**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**-**	**72,22**	**74,22**	**76,49**	**78,66**	**80,92**	**83,83**
	4.2.1	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	67	70	73	76	79
	4.2.2	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	60	63	65	67	69
	4.2.3	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	79,66	81,00	82,58	84,2	87,03

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
	4.2.4	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	75,55	77,30	78,40	79,83	82,64
	4.2.5	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	74,66	77,66	80,66	83,66	86,66
	4.2.6	Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
	4.2.7	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	43,85	50,15	56,45	62,75	69,05
	4.2.8	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	61,10	66,00	70,90	75,80	80,70
Misi 5: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**										
5.1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan**	**-**	**0,00**	**72,50**	**74,50**	**77,00**	**79,50**	**82,50**
	5.1.1	Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	SCORE		75	77	80	83	85
	5.1.2	Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	SCORE		70	72	74	76	80

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan.
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah).
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL		
Misi 1: **Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan**		
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya		
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran
2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama	
3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana
4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya
Misi 2: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi**		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan		
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.
		Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin
		Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri		
6	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		
7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya
8	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendayagunaan Tenaga Kerja
9	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah
10	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi
		Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup		
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
		Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota
12	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR
Misi 3: **Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**		
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		
13	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan
14	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	
15	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM
Misi 4: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas**		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik
19	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengeloaan Keuangan Daerah
		Peningkatan Pengeloaan Pendapatan Daerah
20	Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE
21	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik
22	Meningkatnya Maturitas SPIP	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
23	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah		
24	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran
25	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
26	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	
27	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	
28	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	
29	Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	
30	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	
31	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	
Misi 5: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
32	Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar
33	Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan	

Penjelasan dari masing-masing strategi Kabupaten Kapuas Hulu selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran

Masyarakat yang religius dan toleran berdampak lingkungan yang aman dan damai. Keamanan dan kedamaian merupakan hal yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat dan berkehidupan sehari-hari. Sehngga untuk mewujudkan perlu peran masyarakat didukung oleh aparatur penegak sebagai pengambila keputusan.

b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana

Bencana merupakan hal yang tidak bisa diprediksi sehingga perlu upaya edukasi masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bahaya bencana dilaksanakan melalui pengembangan sistem perlindungan masyarakat yang terintegrasi antardesa atau kelurahan, serta pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.

c. Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang kaya akan budaya, yang dipengaruhi dari 2 kebudayaan terbesar yaitu budaya dayak dan melayu. Sehingga kehidupan sosial yang ada tidak dapat dilepaskan dari akar budaya yang terbentuk dari tradisi dan budaya yang bersumber kepada kearifan lokal yang ada tersebut. Namun dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka secara tidak langsung akan mendorong masuknya budaya luar yang tidak dapat dihindari ke Kab. Kapuas Hulu, sehingga kearifan dan kebudayaan daerah yang meliputi kesenian, kesasteraan, adat istiadat, bahasa, nilai tradisional dan kepurbakalaan, yang mencerminkan nilai luhur daerah harus tetap dilestarikan dan dikembangkan, baik melalui pagelaran, pelatihan, kurikulum pendidikan maupun upaya-upaya lainnya.

d. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial dan Pengembangan pariwisata alam berbasis lingkungan

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memiliki dominasi terbesar dalam pembentukan perekonomian daerah Kabupaten Kapuash Hulu. Pada sektor ini, komoditas unggulan yang memiliki pangsa pasar ekspor seperti kratom, arang, lada biji, bungkil kelapa, langsat dan kelapa bulat. Sektor pertanian apabila diolah dengan baik, mulai dari produksi bahan mentah, mengolahnya menjadi barang mentah, setengah jadi maupun jadi, kemudian proses distribusi yang baik akan menghasilkan komodisti ekonomi kerakyatan.

Pariwisata berbasis ingkungan merupakan pengembangan wisata yang masih memerhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaannya. Kawasan Ekowisata Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi. Diharapkan kawasan ini dapat menjadi kawasan potensial dalam pelaksanaan pariwisata berbasis lingkungan.

e. Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PPKS lainnya

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Upaya pengentasan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan tingkat kesenjangan baik kesenjangan antar golongan pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah. Fokus golongan masyarakat yang menjadi perhatiann untuk ditingkatkan kualitas hidupnya adalah fakir miskin dan PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari tuna wisma, anak jalanan, tuna susila dan penyandang cacat.

f. Pendayagunaan Tenaga Kerja

Dalam menghadapi revolusi industri keempat, kabupaten Kapuas Hulu dapat mendayagunkan dan meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja dikapuas Hulu. Upaya yang bisa dilakukan adalah penyediaan diklat bagi tenaga kerja terampil dan berkualitas dalam rangka mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang lebih mandiri, pengembangan potensi ekonomi kerakyatan yang didukung oleh perluasan kesempatan dan peluang kerja terutama bagi masyarakat Kapuas Hulu.

g. Peningkatan kualitas iklim investasi daerah

Investasi daerah merupakan hal yang dibutuhkan daerah untuk membangun daerahnya di luar dana anggran daerah. Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah yang dimulai dari mempermudah sistem investasi di kabupaten kapuas Hulu. Peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN/PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif

h. Peningkatan Kualitas koperasi

UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, yang selaras dengan prinsip pengelolaan koperasi yakni dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Oleh karena itu, diperlukan koperasi yang berkualitas agar dapat meningkatkan peran ekonominya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kabupaten, dengan berlandaskan kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas koperasi perlu diarahkan melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi dan peningkatan akuntabilitas manajemen usaha koperasi serta pengembangan kebijakan perkoperasian, agar koperasi lebih lincah (*agile*), tumbuh berkembang dan adaptif terhadap perkembangan industri 4.0, perubahan masyarakat 5.0 dan kondisi lingkungan dunia yang *Volatility* (penuh gejolak), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas) dan *Ambiguity* (ambiguitas/tidak jelas.

i. Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Secara nasional, data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61.07%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dalam suatu wilayah. Sehingga upaya pendampingan, pemberdayaan dan pengembangan usaha dilakukan dari calon pelaku usaha, pelaku ultra mikro, mikro dan kecil melalui metode coaching, mentoring maupun metode lainnya, untuk peningkatan kapasitas SDM maupun manajemen usahanya. Dengan pengembangan usaha, diharapkan usaha yang dilakukan akan dapat meningkatkan pendapatan, yang pada akhirnya usaha ultra mikro, mikro dan kecil dapat naik kelas menjadi usaha menengah maupun besar (yang mampu menampung tenaga kerja lebih banyak), semakin lincah, tumbuh berkembang dan semakin adaptif dengan perkembangan industri 4.0, perubahan masyarakat 5.0 dan kondisi

lingkungan dunia yang yang *Volatility* (penuh gejolak), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas) dan *Ambiguity* (ambiguitas/tidak jelas.

j. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah

Isu ramah lingkungan dalam pengembangan perekonomian di skala regional, nasional dan internasional terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan diri sebagai Kabupaten Konservasi, terus diapresiasi baik secara nasional maupun internasional, seperti ditetapkannya Kab. Kapuas Hulu sebagai kawasan strategis nasional *Heart of Borneo* atau Jantung Kalimantan dan sebagai wilayah Cagar Biosfer.

Sehingga, upaya peningkatan pembangunan ekonomi termasuk kaitannya dengan sosial budaya dan lingkungan di Kab. Kapuas Hulu perlu diwujudkan dalam bentuk pembangunan ekonomi hijau, seperti misalnya pembangunan pertanian (secara keseluruhan) yang menerapkan skema-skema kelestarian, pengembangan produk-produk yang organik, maupun pengembangan produk tersertifikasi lainnya yang selaras dengan keberlanjutan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dari produk masyarakat agar produk yang dihasilkan bukan produk bahan mentah, namun sudah meningkat menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Selanjutnya, untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, perlu juga dilakukan pemetaan rantai nilai produk, agar produk masyarakat tersebut bisa langsung atau semakin dekat ke konsumen akhir dan mendapatkan harga yang lebih baik. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung upaya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Kapuas Hulu.

k. Penyediaan RDTR

RDTR sebagai bagian dari tata ruang wilayah kabupaten, perlu dilakukan percepatan penyusunannya, untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang berkelanjutan, yang selaras dengan mimpi kabupaten konservasi dalam balutan wilayah *Heart of Borneo* (Jantung Kalimantan)

dan Cagar Biosfer, agar pembangunan wilayah di kabupaten akan sesuai peruntukannya dan akan harmonis dengan alam.

l. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik, maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan diri dan keluarganya. Sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perlu didorong agar menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Kapuas Hulu, dengan kondisi sarana prasarana yang cukup dan didukung SDM tenaga pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, khusus di dunia pendidikan, kurikulum yang bermuatan lokal perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan kecintaan dan kesadaran masyarakat akan budaya, sosial ekonomi dan lingkungan sejak dini.

m. Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM

Kabupaten Kapuas Hulu dikaruniai keanekaragaman sumberdaya alam (hayati) yang berlimpah, yang menghasilkan produk alam dengan kekhasan tersendiri, yang berbeda dengan daerah lain seperti madu hutan rawa gambut, kopi bahenap, beras uncak, purik dan produk-produk lainnya. Selain itu, Kabupaten Kapuas Hulu juga dikaruniai dengan ekosistem/lingkungan yang unik, yang menyediakan jasa lingkungan baik untuk Kabupaten Kapuas Hulu sendiri maupun untuk daerah lainnya, seperti penyedia produk-produk alam (ikan, kayu, dsb), penyimpanan dan penyerapan karbon, penyimpan air tawar, keindahan alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya.

Sehingga, dengan kekhasan dan keunikan tersebut, maka optimalisasi pengelolaan SDA dan ekosistem/lingkungan di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu diwujudkan melalui pengembangan dan kebijakan pengelolaan SDA dan ekosistem/lingkungan yang berkelanjutan; penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan; pengembangan model sistem

dinamis; dan perencanaan yang partisipatif, terintegrasi dan terpadu dengan upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya, seperti misalnya melalui penyusunan rencana pengelolaan daerah tangkapan air danau sentarum maupun penyusunan rencana aksi lainnya.

Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan SDA tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi "upaya kelestarian maupun keberlanjutan SDA dan ekosistem/lingkungannya" melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran SDM baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Upaya kelestarian dan keberlanjutan SDA dan ekosistem/lingkungannya harus menjadi perilaku dan gaya hidup sehari-hari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, seperti misalnya pilah-pilih sampah dari rumah tangga, upaya *paperless* di perkantoran, membuang sampah ke tempat sampah 3R, mencari ikan dengan alat ramah lingkungan dan upaya-upaya kelestarian lainnya. Dengan harapan, perilaku-perilaku seperti ini akan menjadi kebiasaan dan pada akhirnya akan menjadi karakter konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

n. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana

Perkembangan industri 4.0 dan masyarakat menuju masyarakat 5.0 (yang berpusat pada manusia dan berbasis tehnologi), luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, serta ketersebaran penduduk yang merata di seluruh wilayah kabupaten, membutuhkan model birokrasi pemerintah yang sederhana, lincah, adaptif dan transformatif, untuk dapat memberikan pelayanan di seluruh urusan, yang efektif dan efisien kepada seluruh masyarakat. Sehingga implementasi satu data kabupaten menjadi maha data (*big data*) kabupaten adalah suatu keniscayaan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan satu data kabupaten, maka akan dapat meningkatkan keterpaduan KISS Me (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi dan Mekanisme), keakuratan penyajian data informasi, kecepatan pelayanan, keterjangkauan wilayah layanan, kemudahan

akses dan efisiensi operasional serta manfaat lainnya, baik layanan di internal pemerintah maupun layanan terhadap masyarakat umum.

o. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan membangun Kapuas Hulu dari pinggiran

Untuk meningkatkan ketermanfaatan pembangunan ke seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan percepatan dan peningkatan kondisi (kualitas dan kuantitas) infrastuktur dasar di seluruh wilayah kabupaten melalui pola desa membangun. Dengan meningkatnya aksesibilitas ke seluruh pelosok Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan akan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka pencapaian kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, terutama di daerah atau desa yang masih terpencil atau jauh dari pusat pemerintahan.

p. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar

Peningkatan layanan kesehatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah, sehingga dalam pelaksanaannya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes, yang merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama untuk kesehatan ibu, bayi, anak dan layanan lainnya. Upaya pengoptimalan didorong melalui peningkatan sarana prasarana, kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan kesehatan, yang menjadi faktor penting dalam menangani isu pandemi covid, kesehatan ibu dan bayi, stunting, gizi anak, pemenuhan hak anak dan perempuan serta isu-isu lainnya. Dengan upaya ini, maka diharapkan akan dapat meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak khususnya terhadap perempuan, ibu dan anak di Kabupaten Kapuas Hulu.

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan

prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh 0PD yang terlibat di dalamnya.

Gambar VI.1

Tema Pembangunan Tahun 2021-2026 Kabupaten Kapuas Hulu

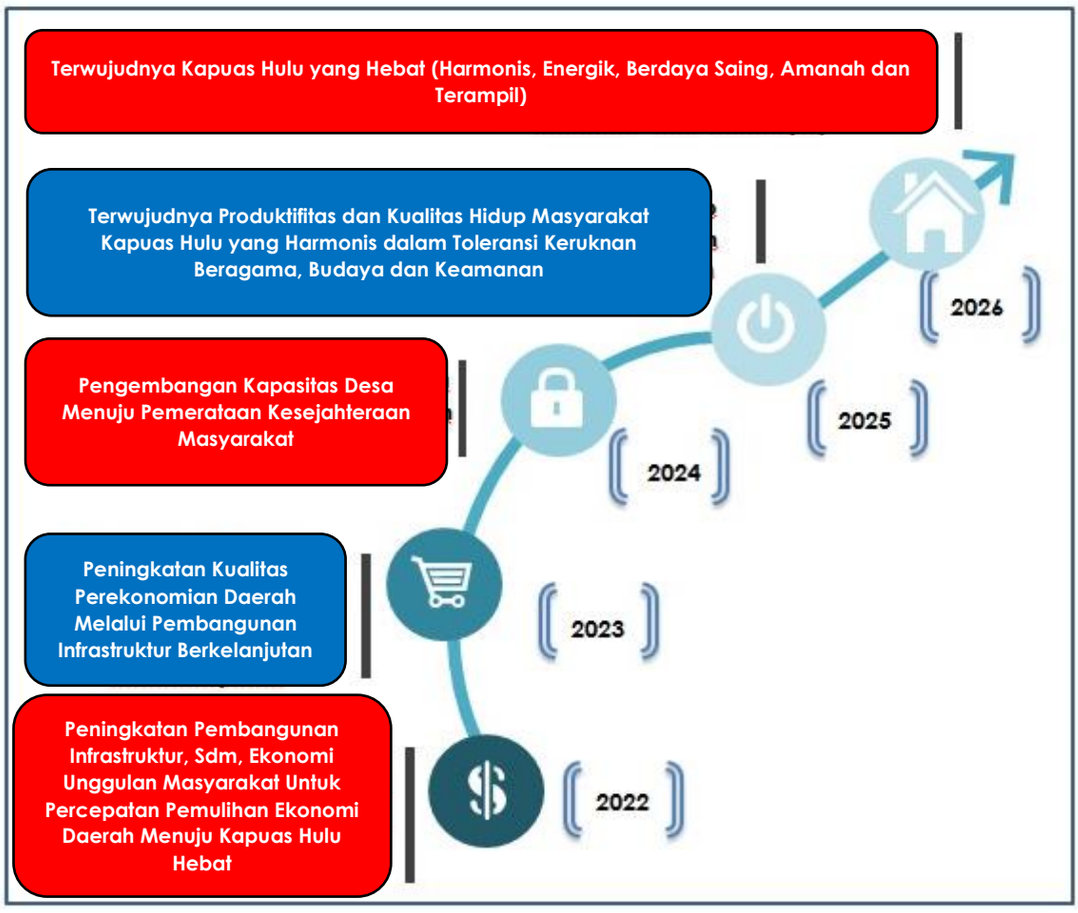

Tema pembangunan digunakan sebagai dasar untuk menentukan arah pembangunan yang dijabarkan ke dalam dokumen tahunan atau RKPD Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Uraian tema pembangunan per tahun adalah sebagai berikut:

1. **Tema Pembangunan Tahun 2022**

   Tahun 2022 adalah tahun awal pembangunan berdasarkan RPJMD Kapuas Hulu Tahun 2022-2026. Tema pembangunan tahun 2022 adalah **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, SDM, Ekonomi Unggulan Masyarakat Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Menuju Kapuas Hulu Hebat.** Seperti diketahui pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 diperkirakan masih berlangsung di tahun 2022. Namun diharapkan di tahun 2022, penyebaran vaksin sudah optimal sehingga berangsur kehidupan masyarakat kembali normal. Percepatan pemulihan perekonomian dimulai dengan menghidupkan kembali sektor-sektor unggulan Kapuas Hulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor perdagangan dan perindustrian terutama Industri kecil menengah. Selain ekonomi, kondisi sosial juga dilakukan percepatan pemulihan diantaranya di bidang pendidikan dan kesehatan. Utamanya bidang pendidikan yang di tahun 2022 diharapkan sudah tatap muka untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan kepada anak usia sekolah.

2. **Tema Pembangunan Tahun 2023**

   Peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan tema pembangunan di tahun 2023 atau tahun kedua pembangunan berdasarkan RPJMD kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026. Setelah di tahun sebelumnya dilakukan percepatan pemulihan, di tahun kedua ini kualitas perekonomian ditingkatkan dengan cara menyediakan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk melancarkan proses distribusi ekonomi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang memerhatikan sisi lingkungannya. Hal ini dikarenakan pembangunan yang selaras dengan lingkungan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kapuas Hulu dikarenakan luas hutan di Kapuas Hulu terbilang masih asri.

3. Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan di tahun 2024 adalah **Pengembangan kapasitas desa menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat**. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan di desa. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah desa harus memahami kondisi desanya terutama terkait permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya, mulai dari kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kebutuhan air minum, ketenteraman dan ketertiban umum dan sarana prasarana lainnya. Pemerintah desa sudah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri salah satunya dengan membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Diharapkan di tahun 2024 banyak desa dengan status desa mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Tema Pembangunan Tahun 2025

Terwujudnya produktivitas dan kualitas hidup masyarakat kapuas Hulu yang harmonis dalam toleransi kerukunan beragama, budaya, dan keamanan merupakan tema pembangunan di tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026. Di tahun 2025, diharapkan masyarakat Kapuas Hulu semakin produktif dan memiliki hidup dengan aman dan damai. Hidup yang aman dan damai ditandai dengan hidup berdampingan antar masyarakat walaupun berbeda agama, suku, ras, dan etnik. Seperti diketahui masyarakat di Kapuas Hulu memiliki keberagman dikarenakan Kapuas Hulu merupakan perbatasan dengan Negara Malaysia sehingga banyak pendatang di Kapuas Hulu.

5. Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema pembangunan di tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah tercapainya visi **Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 yaitu Terwujudnya Kapuas Hulu yang Hebat (harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil)**. Di tahun 2026 diharapkan masyarakat Kapuas Hulu semakin harmonis, energik, berdaya saing, amanah dan

terampil yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja utama Kabupaten Kapuas Hulu yang tercapai sesuai target.

Arah kebijakan tiap tahun yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disajikan dalam keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel VI.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL								
Misi 1: **Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan**								
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya								
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama					
2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama							
3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah					
4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Mewujudkan kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya, memperkuat jaringan pengamanan sosial, peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyakratan dan kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi**								
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan								
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.					
			Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.					
			Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca Pandemi COVID-19.					
			Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi komoditas unggulan daerah.					
			Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.					
			Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.					
			Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.					
		Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produski perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF					
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri					
			Diarahkan kepada kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran					
		Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.					
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri								
6	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Percepatan peningkatan status IDM					
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka								

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Optimalisasi sosial safety Net (jaringan Pengaman Sosial), meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan, pemberian akses permodalan dan pemasaran, mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.					
			Pelibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan dan bidang usaha. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, penguatan informasi Keluarga Berencana dan Konseling untuk kelompok muda, perbaikan sistem manajemen Keluarga Berencana (data, informasi). Peningkatan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.					
			Penguatan kapasitas pelembagaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Pelayanan Perempuan Dan Anak					
			Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
			sosial. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.					
8	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendayagunaan Tenaga Kerja	Penguatan Kerjasama Lintas Instansi terkait Pelatihan dan Kesempatan Kerja					
			Peningkatan kualitas tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil					
9	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah					
			Mendorong investasi masuk ke dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyebaran investasi yang berkualitas dan berkeadilan, menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai kebutuhan industri, optimalisasi infrastruktur.					
10	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi					
		Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro					
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup								
		Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah						
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran (institusi dan non-institusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.					
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan					
			Pengembangan Ruang terbuka hijau(RTH) melalui hutan/taman kota					
			Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup					
			Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan					
12	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.					
Misi 3: **Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**								
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia								
13	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
14	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	pelayanan pendidikan dan Kesehatan	biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.					
15	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan					
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM	Pemberdayaan dan pengembangan SDA dan SDM					
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program Padat Karya tunai.					
Misi 4: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas**								
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi								
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah					
			Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.					
			Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
			modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.					
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan					
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.					
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan *e-government*					
			Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah					
			Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).					
			Membangun Fasilitas pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.					
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
19	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengeloaan Keuangan Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan daerah dan					

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
			penertiban aset daerah					
		Peningkatan Pengeloaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah					
20	Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Optimalisasi Sitem Pelaksanaan SPBE					
21	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
22	Meningkatnya Maturitas SPIP	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan					
23	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	1. Penempatan ASN Sesuai dengan standar Kompetensi					
			2. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi					
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah								
24	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi					
25	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa		Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah					
26	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak							
27	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak							
28	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi							

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
29	Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten							
30	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani							
31	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten							
Misi 5: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**								
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
32	Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19					
			Pembangunan rumah singgah masyarakat miskin yang sakit dan Ibu hamil					
33	Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan					
			Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan yang berorientasi pada pencapaian standar pelayanan minimal					
			Peningkatan akses dan mutu kefarmasian					

6.2.2. Arah Kebijakan Kewilayahan

Kabupaten kapuas Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang wilayahnya bebatasan dengan Negara Malaysia. Untuk mewujudkan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu disusunlah Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam dokumen RTRW sudah disususn matriks indikasi program yang dibagi dalam 4

tahapan per lima tahunan. Dalam dokumen RTRW, program yang menjadi dasar ketataruangan dalam PJM II tertera pada tabel berikut:

Tabel VI.3.
Matriks Indikasi Program Kabupaten Kapuas Hulu PJM II

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG				
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan				
	1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)				
	a. Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan	Nanga Badau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	b. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Nanga Badau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	c. Pembangun Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Badau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	d. Konsolidasi Lahan	Nanga Badau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	e. Penataan daerah perbatasan guna mencegah illegal loging dan trafficking	Nanga Badau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)				
	b. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan	Putussibau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	c. Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan	Putussibau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	e. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Putussibau	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Bappeda, PU
	1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PKL)				
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau	2 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	e. Konsolidasi Lahan	Nanga Tepuai dan Semitau	2 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	1.4 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)				
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak	4 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nang Bunut, Lanjak	4 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak	4 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak	4 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
	1.5 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)				
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya	16 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya	16 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya	16 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Ibukota Kec. Lainnya	16 paket	APBD	KPDT, Bappeda, PU
2	Perwujudan Sistem Prasarana				
	2.1 Pengembangan Sistem Transportasi				
	Pengembangan Sistem Transportasi Darat				
	a. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Arteri :				
	(a) Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Simpang Sejiram – Nanga Tepuai – Mentebah – Putussibau	292,19 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(b) Simpang Sejiram – Semitau – Nanga Kantuk	89,2 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(c) Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Puring Kencana – Nanga Kantuk – Badau – Lanjak – Simpang Mataso – Tanjung Kerja – Putussibau – Nanga Bungan – Batas Kalimantan Timur	296,36 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor :				
	(a) Jln. Ahmad Yani (Putussibau)	2,34 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(b) Jln. Yos Sudarso (Putussibau)	0,45 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(c) Nanga Kantuk – Sungai Tembaga	18,6 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(d) Badau – Sungai Tembaga	17,9 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(e) Simpang Silat – Nanga Silat	13,2 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(f) Benua Martinus – Ulak Pauk	17,8 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(g) Kedamin – Bika	19,1 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(h) Bika – Manday	3,17 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
	(i) Bongkong – Nanga Dangkan	12,5 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(j) Kenerak – Selimbau	25,0 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(k) Lingkar Mupa – Transmigrasi	1,63 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(l) Lingkar Dalam Kota Bika	0,68 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(m) Mataso – Sadap	4,0 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(n) Nanga Kantuk – Langau	51,6 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(o) Nanga Kantuk – Nanga Silat	68,0 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(p) Semitau – Suhaid	10,3 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(q) Simpang Sekubah – Jongkong	23,2 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(r) Sungai Tembaga – Empaik	13,0 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	(s) Tepuai – Nanga Taman	13,6 km	1 paket	APBN	Kemen PU, KPDT
	c. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal	522,88 km	1 paket	APBD	Dinas PU
	d. Pembangunan dan Peningkatan Terminal				
	(a) Terminal B	Nanga Badau, Kedamin	2 paket	APBD, APBN	Dishub, Dephub, KPDT
	(b) Terminal C	Putussibau, Semitau, Nanga Tepuai	3 paket	APBD, APBN	Dishub, Dephub, KPDT
	e. Pengembangan Dermaga Sungai	Putussibau Kota, Nanga Bunut, Semitau, Jongkong, Lanjak, Nanga Silat	6 paket	APBN, APBD	Dishub, Dephub, KPDT
	Pengembangan Sistem Transportasi Udara				
	a. Peningkatan Bandar Udara Pangsuma	Putussibau Utara	1 paket	APBN, APBD	Dephub, Dishub
	c. Pembangunan Bandar Udara Perintis Badau	Badau	1 paket	APBN, APBD	Dephub, Dishub
	d. Pembangunan Bandar Udara Khusus TNI AU	Nanga Awin	1 paket	APBN	TNI
	2.2 Pengembangan Jaringan Energi				
	Pengembangan Jaringan Listrik				
	a. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Silat Hulu, Hulu Gurung, Semitau, Selimbau, Jongkong, Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Putussibau Selatan,	11 paket	APBN, APBD	Kemen ESDM, PLN, Dinas Pertamben

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
		Batang Lupar, Badau, Empanang			
	d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro(PLTMH)	Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Batang Lupar, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan, Pengkadan, Silat Hulu, Embaloh Hulu, Puring Kencana, Empanang	11 paket	APBN APBD, investasi swasta	Kemen ESDM, PLN, Dinas Pertamben
	e. Peningkatan dan perluasan Jaringan Distribusi	Seluruh Kec.	1 paket	APBN APBD, investasi swasta	Kemen ESDM, PLN, Dinas Pertamben
	Peningkatan Sistem Distribusi BBM				
	b. Pembangunan Fasilitas Penyimpanan BBM untuk Mendukung PLTD, Transportasi	Putussibau	1 paket	APBN APBD, investasi swasta	Pertamina, Distamben
	c. Pengembangan Jaringan Distribusi BBM untuk Kebutuhan Domestik	Seluruh Kec.	1 paket	APBN APBD, investasi swasta	Pertamina, Distamben
	2.3 Jaringan Sumberdaya Air				
	Konservasi Sumberdaya Air				
	a. Penataan Kawasan Lindung sekitar Mata air	Seluruh Kec.	1 paket	APBD	Bappeda, Disbunhut, Kantor Lingkungan Hidup, BPDAS
	b. Perlindungan Kawasan Tangkapan Air	Seluruh Kec.	1 paket	APBD	Disbunhut, BPDAS
	c. Penetapan Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh kec.	1 paket	APBD	Dinas PU, BPDAS
	Pendayagunaan Sumberdaya Air				
	a. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Bersih	Nanga Tepuai, Nanga Dangkan, Serijam, Semitau, Badau, Putussibau, Jongkong, Mentebah	1 paket	APBD	PDAM, Dinas PU
	b. Peningkatan Jaringan Pelayanan Air bersih	Seluruh Kec.	1 paket	APBD	PDAM, Dinas PU
	c. Pembangunan Irigasi	Seluruh Kec.	1 paket	APBD	Dinas PU
	d. Pengembangan Imbal Jasa Hulu Hilir (Payment Watersheet Services)	Sungai Mendalam	1 paket	APBD	PDAM, BPMD, Kantor LH
	Pengendalian Daya Rusak Air				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
	a. Pembangunan sarana bendungan pengendali banjir	Hulu Tabuk, Lubuk Antuk, Riam Panjang, Sukamaju-Lunsana, Ukit-Ukit, Toalang	1 paket	APBD	Dinas PU
	2.4 Jaringan Telekomunikasi				
	a. Pembangunan jaringan sistem teresterial/kabel	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	Diskominfo, Telkom, Swasta
	b. Pembangunan jaringan sistem satelit dengan Broadband	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	Diskominfo, Telkom, Swasta
	2.5 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah				
	a. Pembangunan TPA Modern Skala kabupaten	Badau	1 paket	APBD	Dinas PU, Kantor LH
	2.6 Pengembangan Sistem Pengelohan Limbah				
	Pembangunan UPL Modern Skala Kabupaten	Badau	1 unit	APBD	Dinas PU, Kantor LH
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG				
1	Perwujudan Kawasan Lindung				
	1.1 Pemantapan Kawasan Hutan Lindung				
	a. Pemantapan Hutan Lindung	Seluruh Kec.	798.210 ha	APBN, APBD	Kemen dan Dinas Kehutanan
	b. Penetapan Alih Fungsi Lahan			APBN, APBD	Kemen dan Dinas Kehutanan
	1.2 Pemantapan Kawasan Yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya				
	a. Kawasan Bergambut	Batang Lupar, Bika, Bunut Hilir, Danau Sentarum, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Jongkong, Putussibau Utara	1 paket	APBN, APBD	Kemen dan Dinas Kehutanan
	b. Kawasan Resapan Air	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Kemen dan Disbunhut
	1.3 Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat				
	a. Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Kemen dan Disbunhut
	b. Kawasan Sekitar Danau dan Danau Lindung	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Kemen dan Disbunhut
	c. Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Kemen dan Disbunhut

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
	1.4 Pemantapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya				
	1.5 Pemantapan Kawasan Rawan Bencana				
	c. Penetapan zona-zona evakuasi	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	BPBD
	d. Pengembangan sistem penanganan dan mitigasi bencana	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	BPBD
	1.6 Pemantapan Kawasan Lindung Lainnya				
	a. Kawasan koridor satwa dilindungi	Batang Lupar, Embaloh Hulu	1 paket	APBN, APBD	Kemenhut, Disbunhut
	b. Kawasan Perlindungan Masyarakat Setempat/Hutan Lindung Adat/Hutan Kelola Masyarakat	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Kemenhut, Disbunhut
2	Pengembangan Kawasan Budidaya				
	2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi				
	a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan hutan produksi	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Disbunhut
	b. Revitalisasi Kawasan Hutan ProduksiKonversi/Restorasi Ekosistem	Bunut Hilir, Bunut Hulu, Bika, Mentebah, Boyan Tanjung, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Semitau, Silat Hilir	3 paket	APBN, APBD	Kemenhut, Disbunhut
	c. Pengembangan Hutan Desa	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Disbunhut
	d. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Hutan Penghasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	Disbunhut
	2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian				
	d. Pengembangan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian
	e. Pengembangan Kawasan Peternakan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, swasta, masyarakat	Dinas Pertanian

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
	f. Pengembangan budidaya madu hutan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, swasta, masyarakat	KPDT, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
	2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan				
	d. Pengembangan kawasan ikan hias Arwana	Suhaid, Semitau, Kedamin, Bika,	1 paket	APBD	Dinas Perikanan
	e. Penerapan teknologi budidaya ikan bernilai ekonomi tinggi	Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Boyan Tanjung, Batang Lumpar	1 paket	APBD	Dinas Perikanan
	2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan				
	2.6 Kawasan Peruntukan Industri				
	2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata				
	a. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	KPDT, Disbudpar
	b. Promosi dan networking	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	KPDT, Disbudpar
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	KPDT, Disbudpar
	d. Penataan kawasan wisata alam dan budaya	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	KPDT, Disbudpar
	e. Penataan Kawasan Ekowisata Danau Sentarum	TNDS dan sekitarnya	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Kemenhut, Disbudpar
	f. Penyusunan Blue Print Ekowisata	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	KPDT, Disbudpar
	g. Peningkatan daya tarik obyek wisata	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD, investasi swasta	KPDT, Disbudpar
	2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan				
	b. Penataan Lingkungan Permukiman Skala besar	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Dinas PU
	c. Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Dinas PU
	d. Pengembangan Manjemen Pertanahan Perkotaan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	BPN

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana
	e. Pemetaan status tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	BPN
	f. Penatagunaan tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	BPN
	g. Revitalisasi Kawasan Permukiman Terpencil	Seluruh Kec.	1 paket	APBN, APBD	KPDT, Dinas PU
C.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN				
1	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan	Agropolitan Silat	1 paket	APBD	Distan, Disperindag
	Ekonomi	Hilir dsk			
2	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan	Kawasan Ekowisata TNDS dan sekitarnya	1 paket	APBD	Disbudpar, Disbunhut
3	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Lingkungan	Koridor TNDS-TNBK	1 paket	APBD	Disbunhut

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran daerah. Program prioritas daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan program kampanye kepala daerah. Program unggulan kampanye Bupati dan Wakil Bupati antara lain:

- Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan membangun Kapuas Hulu dari pinggiran.
- Pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan Kapuas Hulu mandiri, untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumberdaya alam lokal dan merevitalisasi pasar tradisional.

- Membangun tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial (kratom, karet, madu, ikan arwana).
- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar, membangun rumah singgah (tenaga kerja Indonesia dan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial).
- Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa.
- Menyiapkan tenaga kerja bersertifikasi untuk menghasilkan tenaga terampil dalam akses menghadapi peluang kerja, dan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.

Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode. Program Prioritas Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel VI.4

Tabel VI.4.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL				
Misi 1: **Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan**				
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya				
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah	Program Penanggulangan Bencana
				Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem Dan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		Menghadapi Resiko Bencana		Pengelolaan Persampahan Regional
4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Mewujudkan kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya, memperkuat jaringan pengamanan sosial, peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyakratan dan kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Misi 2: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi**				
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan				
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.	Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pengembangan Umkm Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Rogram Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan Umkm
			Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca Pandemi COVID-19.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi komoditas unggulan daerah.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produski perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Diarahkan kepada kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri				
6	Meningkatnya Jumlah Desa	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata	Percepatan peningkatan status IDM	Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	dengan IDM Katagori Mandiri	kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.		
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka				
7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Optimalisasi sosial safety Net (jaringan Pengaman Sosial), meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan, pemberian akses permodalan dan pemasaran, mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.	Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan Umkm
			Pelibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan dan bidang usaha. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, penguatan informasi Keluarga Berencana dan Konseling untuk kelompok muda, perbaikan sistem manajemen Keluarga Berencana (data, informasi). Peningkatan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.	Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Penguatan kapasitas pelembagaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Pelayanan Perempuan Dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan	Program Perlindungan Perempuan, Program

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.	Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
8	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendayagunaan Tenaga Kerja	Penguatan Kerjasama Lintas Instansi terkait Pelatihan dan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Peningkatan kualitas tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
9	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal
			Mendorong investasi masuk ke dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyebaran investasi yang berkualitas dan berkeadilan, menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai kebutuhan industri, optimalisasi infrastruktur.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal
10	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,
		Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup				
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH
		Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan		

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah		
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran (institusi dan non-institusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
			Pengembangan Ruang terbuka hijau(RTH) melalui hutan/taman kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH
12	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Misi 3: **Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**				

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia				
13	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.	Program Pengelolaan Pendidikan
14	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah			
15	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM	Pemberdayaan dan pengembangan SDA dan SDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program Padat Karya tunai.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Misi 4: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas**				
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.	Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Kepegawaian Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan *e-government*	Program Aplikasi Informatika
			Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah	Program Aplikasi Informatika
			Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
			Membangun Fasilitas pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.	Program Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
				Program Pencatatan Sipil
19	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengeloaan Keuangan Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan daerah dan penertiban aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		Peningkatan Pengeloaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
20	Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Optimalisasi Sitem Pelaksanaan SPBE	Program Aplikasi Informatika
21	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
22	Meningkatnya Maturitas SPIP	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
23	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	1. Penempatan ASN Sesuai dengan standar Kompetensi 2. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Program Kepegawaian Daerah
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah				
24	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi serta Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah	Program Penyelenggaraan Jalan
25	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa			Program Penyelenggaraan Jalan
26	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
27	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
28	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
29	Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten			Program Pengembangan Perumahan,
30	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
31	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten			Program Penyelenggaraan Jalan
Misi 5: **Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**				
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
32	Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pembangunan rumah singgah masyarakat miskin yang sakit dan Ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
33	Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan yang berorientasi pada pencapaian standar pelayanan minimal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Peningkatan akses dan mutu kefarmasian	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perumusan kerangka pendanaan pembangunan dan program program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Mendasari pada realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020.

Program pembangunan dan program OPD ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikasi program pada penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ini.

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dngan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah periode jangka menengah sehingga terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengkat serta prioritas utama, maka

dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan periode 2021-2026 selama 5 (lima) tahun dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 ini sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021-2026
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.728.526,55	1.788.407,44	1.845.074,98	1.903.597,09	1.964.044,50
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.000,00	28.000,00	26.000,00	24.000,00	22.000,00
	Total Penerimaan	**1.758.526,55**	**1.816.407,44**	**1.871.074,98**	**1.927.597,09**	**1.986.044,50**
	Dikurangi:					
4	Belanja Operasi (diluar Belanja Barang dan Jasa), Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	976.520,91	1.011.397,58	1.047.610,78	1.085.217,18	1.124.276,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**772.005,64**	**790.009,86**	**808.464,20**	**827.379,90**	**846.768,50**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kapuas Hulu, 2020 (diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Mengacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD ke dalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyear*). Selain program pembangunan daerah (program prioritas I), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan.

Program Perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah. Rencana program perangkat daerah RPJMD kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.2.

TABEL VII.2

PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PROGRAM PRIORITAS YANG DI SERTAI PENDANAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022 - 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	6.784.629.600	B	6.784.629.600	BB	6.784.629.600	BB	6.784.629.600	A	6.784.629.600	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		83		85		87		90		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	55	101.210.675.203	56	111.322.324.423,30	57	122.445.258.566	58	134.680.486.122	59	148.139.236.434	DISPENBUD
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	23,04		26,5		28,8		31,11		34,56		
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,96		2,074		2,3		2,53		2,88		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,91		108,21		105,51		102,8		100		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,48		99,6		99,72		99,84		100		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,62		98,64		98,5		98,63		98,65		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,47		76,49		77		77,1		77,2		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99		99,5		99,75		99,9		100		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06		0,04		0,02		0,01		0		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100		100		100		100		100		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	18		13		11		10		7		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100		100		100		100		100		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		2	1.500.000									DISPENBUD
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,73	193.484.800,00	53,41	212.833.280,00	54,09	234.116.608	54,77	257.528.269	55,45	283.281.096	DISPENBUD
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	69,86		70,77		71,68		72,59		73,5		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	140.860.787.042	B	151.646.865.746	BB	166.811.552.321	BB	183.492.707.553	BB	201.841.978.308	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		DINKESPPKB
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		DINKESPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		DINKESPPKB
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		DINKESPPKB
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		85		90		92		95		DINKESPPKB
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		DINKESPPKB
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		DINKESPPKB
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		DINKESPPKB
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	75	394.429.430.460	76	473.315.316.552	77	551.902.893.667	78	662.283.472.401	79	794.740.166.881	DINKESPPKB
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar	82		83		84		85		86		DINKESPPKB
		Angka Kamatian Ibu	124/100000 KH		123/100000 KH		122/100000 KH		121/100000 KH		120/100000 KH		DINKESPPKB
		Angka Kamatian Neonatal	12/1000 KH		11/1000 KH		10/1000 KH		9/1000 KH		8/1000 KH		DINKESPPKB
		Angka Kematian Bayi	19/1000 KH		18/1000 KH		16/1000 KH		15/1000 KH		14/1000 KH		DINKESPPKB
		Persentase Balita pendek dan sangat pendek (stunting)	32%		32%		31%		30,50%		30%		DINKESPPKB
		Cakupan Pelayanan PTM	75		76		77		78		79		DINKESPPKB
		Insiden Rate TB	155/100000 pddk		150/100000 pddk		145/100000 pddk		140/100000 pddk		135/100000 pddk		DINKESPPKB
		Cakupan Penyakit Menular Berpotensi Wabah Yang ditangani	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase Puskesmas sesuai standar	73,91		78,26%	-	82,60%	-	86,95%	-	91,30%	-	DINKESPPKB
		Jumlah Tempat Tidur RS	198		200		220		240		255		DINKESPPKB
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	90		94		95		95		95		DINKESPPKB
		Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten	85		90		90		90		90		DINKESPPKB
		Persentase Balita Kurus (Wasting)	26,20%		25,70%	-	25,20%	80.377.430.976	24,70%	96.452.917.171	24,20%	115.743.500.605	DINKESPPKB
		Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight)	11,70%		11,40%		11,10%		10,80%		10,50%		DINKESPPKB
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase Puskesmas dengan IDL 80%	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang telah memiliki akreditasi	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase Puskesmas terakreditasi	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Kejadian Luar Biasa	≤1		≤1		≤1		≤1		≤1		DINKESPPKB
		Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD	2		5		5		6		6		DINKESPPKB
		Jumlah Klinik yang terakredasi	0		0		2		2		2		DINKESPPKB
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan	77		80		85		90		100		DINKESPPKB
		Persentase Desa Melaksanakan STBM	95		100		100		100		100		DINKESPPKB
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	0,1		0,5		0,7		0,8		0,9		DINKESPPKB
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	0,00080		0,00082		0,00084		0,00086		0,00088		DINKESPPKB
		Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	1		1	-	1	-	1	-	1	-	DINKESPPKB
		Persentase Puskesmas dan RS yang memiliki Ijin Operasional	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	4,35%	20.877.739.000	8,70%	25.053.286.800	13,40%	30.063.944.160	74	36.076.732.992	75	43.292.079.590	DINKESPPKB
		Persentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
		Persentase RS Rujukan Kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (wajib ada) dan 3 dokter spesialis lainnya	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
		Jumlah Puskesmas tanpa dokter	1		0		0		0		0		DINKESPPKB
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	200		200	-	200	-	200	-	200	-	DINKESPPKB
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal	71	390.924.400	72	469.109.280	73	562.931.136	74	675.517.363	75	810.620.836	DINKESPPKB
		Persentase pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
		Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
		Persentase rekomendasi pemberian izin produksi pangan industri rumah tangga	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
		Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKESPPKB
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan dengan Rumah Tangga ber PHBS ≥ 50 %	55%	700.000.000	60%	700.000.000	65%	700.000.000	70%	700.000.000	75%	700.000.000	DINKESPPKB
		Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
		Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%		100%		100%		DINKESPPKB
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	9.246.736.500	B	9.246.736.500	BB	9.246.736.500	BB	9.246.736.500	BB	9.246.736.500	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		85		90		94		98		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	74,66%	62.588.948.472	77,66%	10.315.677.999	80,66%	9.983.983.200	83,66%	9.983.983.200	86,66%	9.983.983.200	DPUPR
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum	79,66%	17.403.959.100	81,00%	17.403.959.100	82,58%	17.403.959.100	84,20%	17.403.959.100	87,03%	17.403.959.100	DPUPR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,55%	5.846.612.200	77,3%	5.846.612.200	78,4%	5.846.612.200	79,83%	5.846.612.200	82,64%	5846612200,0	DPUPR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% Luas genangan air yang ditangani	4,20%	Rp 1.100.000.000	7,20%	Rp 1.550.000.000	10,20%	Rp 1.500.000.000	13,20%	Rp 1.500.000.000	16,20%	Rp 1.500.000.000	DPUPR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	38.039	68.765.032.853	38.039	68.765.032.853	38.039	68.765.032.853	38.039	68.765.032.853	38.039	68.765.032.853	DPUPR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB (%)	100	21.929.962.516	100	21.929.962.516	100	21.929.962.516	100	21.929.962.516	100	21.929.962.516	DPUPR
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kepatuhan IMB (%)	100	6.464.760.610	100	6.464.760.610	100	6.464.760.610	100	6.464.760.610	100	6.464.760.610	DPUPR
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	67,00%	260.491.265.000	70	260.491.265.000	73	260.491.265.000	76	260.491.265.000	79	260.491.265.000	DPUPR
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan jasa konstruksi	81,5	Rp 681.232.000	82	Rp 681.232.000	82,5	Rp 681.232.000	83	Rp 681.232.000	83,5	Rp 681.232.000	DPUPR
		% Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota / Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTDR	10	1.099.767.790	15	1.099.767.790	17	1.099.767.790	19	1.099.767.790	22	1.099.767.790	DPUPR
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	7.879.735.600	B	7.879.735.600	BB	7.879.735.600	BB	7.879.735.600	BB	7.879.735.600	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		85		90		94		98		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	321.208.800	100	321.208.800	100	321.208.800	100	321.208.800	100	321.208.800	DPRKPPLH
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	30	2.462.791.540	37	2.462.791.540	47	2.462.791.540	57	2.462.791.540	60	2.462.791.540	DPRKPPLH
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	38.039	191.792.700	38.039	191.792.700	38.039	191.792.700	38.039	191.792.700	38.039	191.792.700	DPRKPPLH
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	8.848.547.000	B	8.848.547.000	B	8.848.547.000	B	8.848.547.000	B	8.848.547.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	4.194.900.812	100%	4.614.390.893	100%	5.075.829.982	100%	72.066.864.629	100%	6.141.756.277	SATPOLPP
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	126.64	6.525.224.364	124,06	6.551.645.120	121,05	6.598.890.120	118,9	6.696.524.120	116,30	6.721.545.120	BPBD KH
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	4.473.565.914	100%	4.512.045.120	100%	4.513.045.120	100%	4.513.045.120	100%	4.513.045.120	BPBD KH
		Persentase Jumlah Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	95%		95%		95%		95%		95%		
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.627.284.000	B	3.627.284.000	B	3.627.284.000	B	3.627.284.000	B	3.627.284.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	100%	415.000.000	100%	456.500.000	100%	502.150.000	100%	552.365.000	100%	607.601.500	DINSOS PPKB
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan uang dilakukan pemulangan	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000.000	100%	36.603.500	DINSOS PPKB
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	100%	3.792.293.612	100%	4.171.522.973	100%	4.588.675.270	100%	5.047.542.797	100%	292.820.000	DINSOS PPKB
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jaminan Sosial Keluarga	10,267	3.592.293.612	10,470	3.951.522.973	10,682	4.346.675.270	10,890	4.781.342.797	11,110	5.259.477.077	DINSOS PPKB
		pelayanan kesejahtaraan sosial	36,140	50.000.000	36,863	55.000.000	37,600	60.500.000	38,352	66.550.000	39,119	73.205.000	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi		330.000.000	4	363.000.000	6	399.300.000	8	439.230.000	10	483.153.000	
		Cakupan perlindungan korban bencana alam	10	50.000.000	15	55.000.000	20	60.500.000	25	66.550.000	30	73.205.000	DINSOS PPKB
		Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	2	30.000.000	4	33.000.000	6	36.300.000	8	39.930.000	10	43.923.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	DINSOS PPKB
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	5.256.076.000	B	5.256.076.000	B	5.256.076.000	B	5.256.076.000	B	5.256.076.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		84		86		90		92		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/UNIVERSITAS	76,31	65.246.400	77,83	65.246.400	79,38	65.246.400,00	80,96	65.246.400,00	82,58	65.246.400,00	DISNAKERINTRANS
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	100,00	2.828.870.000	100,00	2.478.870.000	100,00	2.428.870.000	100,00	3.278.870.000	100,00	3.278.870.000	DISNAKERINTRANS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari Kerja Yang ditempatkan	72,85	411.400.000	74,31	411.400.000	75,79	411.400.000	77,31	411.400.000	78,85	411.400.000	DISNAKERINTRANS
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100	496.992.000	100	496.992.000	100	496.992.000	100	496.992.000	100	496.992.000	DISNAKERINTRANS
		Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	72		73		74		75		76		
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya IPG (Indeks Pembangunan Gender)	25	278.000.000	30	305.800.000	35	336.380.000	40	370.018.000	45	407.019.800	DINSOS PPKB
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	85%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000	DINSOS PPKB
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG	3	220.000.000	3	242.000.000	3	266.200.000	3	292.820.000	5	322.102.000	DINSOS PPKB
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.858.679.000	B	3.858.679.000	B	3.858.679.000	B	3.858.679.000	B	3.858.679.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	DISPANGAN
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan energi perkapita	70%	1.903.000.000	72%	2.075.000.000	75%	2.160.000.000	76%	2.200.000.000	79%	2.234.000.000	DISPANGAN
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	50%	622.000.000	55%	697.000.000	57%	730.000.000	61%	732.000.000	62%	743.000.000	DISPANGAN
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	80%	175.000.000	82%	175.000.000	82%	175.000.000	85%	175.000.000	86%	175.000.000	DISPANGAN
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**												
1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan	100%	Rp 169.614.500	1	Rp 169.614.500	1	Rp 169.614.500	1	Rp 169.614.500	1	Rp 169.614.500	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian tanah	100%	Rp 500.000.000	100	Rp 100.000.000	100	Rp 100.000.000	100	Rp 100.000.000	100	Rp 100.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi	5	Rp 229.711.500,00	5	Rp 229.711.500,00	5	229.711.500	5	229.711.500	5	229.711.500	
4	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN******)	Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi	100	Rp 200.000.000,00	100	Rp 200.000.000,00	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**												
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	18,50	400.000.000	22,20	600.000.000	25,90	600.000.000	29,60	600.000.000	33,30	600.000.000	PRKPPLH
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan baku mutu	16,67	900.000.000	20,00	950.000.000	23,33	1.000.000.000	26,67	1.050.000.000	30,00	1.100.000.000	PRKPPLH
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penambahan tutupan lahan	0,70%	2.313.000.000	1,40%	2.789.000.000	2,10%	2.989.000.000	2,80%	3.389.000.000	3,50%	3.689.000.000	PRKPPLH
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelayanan pengumpulan B3 dan limbah B3	42	80.000.000	44	80.000.000	46	100.000.000	48	100.000.000	50	120.000.000	PRKPPLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	15	400.000.000	20	450.000.000	25	500.000.000	30	550.000.000	35	600.000.000	PRKPPLH
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal	100%	310.000.000	100%	450.000.000	100%	490.000.000	100%	530.000.000	100%	570.000.000	PRKPPLH
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas kelompok sasaran	15	100.000.000	20	120.000.000	25	140.000.000	30	160.000.000	35	180.000.000	PRKPPLH
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100	50.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	PRKPPLH
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan LH	100	80.000.000	100	100.000.000	100	120.000.000	100	140.000.000	100	160.000.000	PRKPPLH
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pemenuhan layanan persampahan	19	4.195.000.000	20	5.375.000.000	21	6.620.000.000	22	7.865.000.000	23	9.110.000.000	PRKPPLH
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.850.971.000	B	2.850.971.000	B	2.850.971.000	B	2.850.971.000	B	2.850.971.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP	100%	1.209.778.200	100%	1.419.256.000	100%	1.339.881.600	100%	1.562.369.700	100%	1.497.356.600	DISDUKCAPIL
		Persentase Kepemilikan KK	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Kepemilikan KIA	78%		81%		84%		87%		90%		
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	88%	826.857.500	95%	876.029.800	96%	928.443.500	97%	984.338.700	98%	1.043.975.600	DISDUKCAPIL
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	80%		82%		84%		86%		88%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	13	210.000.000	17	231.000.000	20	254.100.000	23	279.510.000	26	307.461.000	DISDUKCAPIL
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan	100%	65.000.000	100%	71.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	DISDUKCAPIL
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.419.467.000	B	3.419.467.000	B	3.419.467.000	B	3.419.467.000	B	3.419.467.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelesaian Batas Administrasi Desa	38,49	3.860.000.000	100%	3.950.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.120.000.000	100%	4.230.000.000	DPMD
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% Bumdesma	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	660.000.000	100%	710.000.000	100%	800.000.000	DPMD
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	% Batas Desa	100%	5.744.079.182	100%	5.879.079.182	100%	5.999.079.182	100%	6.114.079.182	100%	6.284.079.182	DPMD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Desa Mandiri	15,47	3.380.395.000	17,63	3.525.395.000	19,78	3.630.395.000	21,94	3.715.395.000	24,10	3.810.395.000	DPMD
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,26%	314.740.200	1,27%	346.214.220	1,28%	380.835.642	1,29%	418.919.206	1,30%	460.811.127	DINSOPPKB
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	100%	10.684.970.100	100%	11.753.467.110	100%	12.928.813.821	100%	14.221.695.203	100%	15.643.864.723	DINSOPPKB
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	56,56		56,58		56,60		56,62		56,64		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	4,10		4,11		4,12		4,13		4,14		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,10		19,08		19,04		19,02		18,00		
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	9,93		10,28		10,64		10,99		11,35		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kemanusaan KB	100%	108.265.850	100%	119.092.435	100%	131.001.678	100%	144.101.846	100%	158.512.030	DINSOPPKB
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	11,05		11,07		11,10		11,12		11,14		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	72,05		72,06		72,07		72,08		72,09		
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	37,92		37,93		37,95		37,96		37,98		DINSOPPKB
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.976.457.000	B	2.976.457.000	B	2.976.457.000	B	2.976.457.000	B	2.976.457.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Porsentase Fasilitas Angkutan Jalan	55%	9.032.000.000	60%	9.042.000.000	75%	9.122.000.000	80%	9.160.000.000	90%	9.200.000.000	DISHUB
		Rasio konektivitas Kabupaten											
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Porsentase Fasilitas angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	50%	590.000.000	60%	800.000.000	70%	835.000.000	80%	870.000.000	90%	905.000.000	DISHUB
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.641.459.000	B	2.641.459.000	B	2.641.459.000	B	2.641.459.000	B	2.641.459.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai indek Keterbukaan Informasi Publik	88,25	1.943.000.000	88,45	2.337.300.000	88,65	2.496.030.000	88,85	2.670.633.000	89,05	2.862.696.300	DISKOMINFOTIK
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penilaian SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	2,65 (Baik)	7.575.000.000	2,70 (Baik)	7.673.000.000	2,80 (Baik)	8.401.650.000	2,90 (Baik)	10.420.115.000	3,00 (Baik)	10.266.126.500	DISKOMINFOTIK
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.316.289.000	B	2.316.289.000	B	2.316.289.000	B	2.316.289.000	B	2.316.289.000	DINKOPUKMP
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam	1,60%	17.250.000	2%	25.500.000	2,50%	34.500.000	3%	43.250.000	4%	52.000.000	DINKOPUKMP
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	39,30	98.635.000	15%	116.685.000	15%	134.600.000	17,65%	152.515.000	17,69%	177.100.000	DINKOPUKMP
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	% Koperasi yang di nilai	44,44%	194.775.000	50%	202.000.000	54,55%	260.600.000	58,33%	343.400.000	61,54%	476.000.100	DINKOPUKMP
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terselengaranaya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi	120 0rang	295.500.000	120 orang	315.500.000	160 orang	285.500.000	160 orang	395.500.000	200 orang	476.000.100	DINKOPUKMP
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi	8,57%	105.000.000	8,75%	105.000.000	8,89%	105.000.000	9%	-	9,91%	-	DINKOPUKMP
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	% Pertumbuhan Usaha Mikro	93,02%	615.000.000	93.12 %	615.000.000	93.32 %	615.000.000	93.52 %	615.000.000	93.72 %	615.000.000	DINKOPUKMP
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	% UMKM naik Kelas	1%	70.000.000	1%	70.000.000	1%	70.000.000	1%	120.000.000	1%	120.000.000	DINKOPUKMP
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.234.800.700	B	2.234.800.700	B	2.234.800.700	B	2.234.800.700	B	2.234.800.700	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	2 dok	1.025.000.000	2 dok	582.500.000	2 dok	640.750.000	3 dok	704.825.000	2 dok	775.307.500	DPMPTSP
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat investor	2 minat	475.000.000	2 minat	522.500.000	2 minat	574.750.000	3 minat	632.225.000	3 minat	695.447.500	DPMPTSP
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP	100%	312.234.740	100%	343.458.214	100%	377.804.035	100%	415.584.439	100%	457.142.883	DPMPTSP
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan perusahaan sampaikan LKPM	50%	535.947.500	50%	589.542.250	55%	648.496.475	60%	713.346.123	65%	784.680.734,75	DPMPTSP
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Laporan pengelolaan data dan sistem informasi	2 dok	151.024.060	2 dok	166.126.466	2 dok	182.739.113	2 dok	201.013.024	2 dok	221.114.326	DPMPTSP
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.429.678.000	B	2.429.678.000	B	2.429.678.000	B	2.429.678.000	B	2.429.678.000	DISPORAPAR
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		DISPORAPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		DISPORAPAR
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		DISPORAPAR
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		DISPORAPAR
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		DISPORAPAR
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		DISPORAPAR
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		DISPORAPAR
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		DISPORAPAR
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda	117	36.786.000	142	2.124.000.000	167	1.211.030.000	192	1.154.646.000	217	1.357.610.600	DISPORAPAR
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun	1		1		1		1		1		DISPORAPAR
		Jumlah organisasi dan kelompok/perkumpulan pemuda yang aktif	26		28		30		32		34		DISPORAPAR
													DISPORAPAR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	116	2.440.000.000	119	2.823.000.000	127	3.005.000.000	135	3.430.000.000	143	3.773.000.000	DISPORAPAR
		Cakupan pembinaan atlet muda	5		6		9		10		10		DISPORAPAR
		Jumlah atlet berprestasi	4		5		5		6		6		DISPORAPAR
		Jumlah prestasi olahraga	4		5		6		7		7		DISPORAPAR
		Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan olah raga pendidikan	1234		1236		1239		1242		1245		DISPORAPAR
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**												
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi	300 dataset	825.000.000	315 dataset	742.500.000	330 dataset	981.750.000	345 dataset	898.425.000	360 dataset	1.169.767.500	DISKOMINFOTIK
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**												
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Tingkat I/Pemenuhan Kerangka Awal	2.107.500.000	Tingkat I/ Cukup Baik	2.318.250.000	Tingkat II/Pemenuhan Kerangka Awal	2.550.075.000	Tingkat II/ Cukup Baik	2.339.232.500	Tingkat II/ Baik	2.573.155.750	DISKOMINFOTIK
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**												
													DISPENBUD
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	93,75	137.239.000	94,06	150.962.900,00	94,34	166.059.190	94,59	182.665.109	94,83	200.931.620	DISPENBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	86.657.000	100%	95.322.700,00	100%	104.854.970	100%	115.340.467	100%	126.874.514	DISPENBUD
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya yang dilestarikan	70,00	201.408.600	75,00	221.549.460,00	80,00	243.704.406	90	268.074.847	100	294.882.331	DISPENBUD
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.959.489.000	B	2.959.489.000	B	2.959.489.000	B	2.959.489.000	B	2.959.489.000	DINPERSIP
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		DINPERSIP
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		DINPERSIP
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		DINPERSIP
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		DINPERSIP
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		DINPERSIP
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		DINPERSIP
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		DINPERSIP
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		DINPERSIP
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kunjungan Perpustakaan	5.414 Orang (9,37)	192.050.400	5.520 Orang (11,5%)	206.879.740	5.626 Orang(13,6%)	232.219.000	5.733 Orang (15,8 %)	262.676.000	5.839 Orang (17,9%)	283.943.600	DINPERSIP
		persentase perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan	4 Perpustakaan (4/645x100%= 0,62%)	119.910.000	6 Perpustakaan (6/645x100%=0,93 %)	140.000.000	8 Perpustakaan (8/645x100%=1,24%)	150.365.000	10 Perpustakaan (10/645x100%=1,55 %)	165.761.000	12 Perpustakaan (12/645x100%=1,86 %)	180.000.000	DINPERSIP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	Target Kinerja K	Pagu Indikatif Rp	
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**												
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kearsipan Daerah	CC (57)	200.000.000	CC (59)	240.000.000	CC (60)	280.317.000	B (61)	320.038.700	B (62)	200.042.570	DINPERSIP
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip yang selamatkan	1/27 (3,7 %)	66.800.000	2/27 (7,40 %)	78.280.000	3/27 (11,11 %)	82.108.000	4/27 (14,8%)	96.318.800	5/27(18,5 %)	100.950.680	DINPERSIP
3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase arsip tertutup yang dapat diakses	0		0		500 (13,37%)	50.000.000	750 (70,06	75.000.000	1000	90.000.000	DINPERSIP
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	6.289.673.000	B	6.289.673.000	B	6.289.673.000	B	6.289.673.000	B	6.289.673.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	30	1.196.073.000	30	749.445.333	30	847.306.667	31	949.168.000	31	1.024.029.333	DISKAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	875.000	8.725.395.599	1.000.000	8.725.395.599	1.025.000	8.725.395.599	1.035.000	8.725.359.599	1.050.000	8.725.395.599	DISKAN
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2	10.550.000	2	10.550.000	2	10.550.000	2	10.550.000	2	10.550.000	DISKAN
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	5	824.390.700		979.998.500		1.069.998.500	5	1.164.998.500	5	1.219.998.500	DISKAN
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	875.000	8.725.395.599	1.000.000	8.725.395.599	1.025.000	8.725.395.599	1.035.000	8.725.359.599	1.050.000	8.725.395.599	DISKAN
6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2	10.550.000	2	10.550.000	2	10.550.000	2	10.550.000	2	10.550.000	DISKAN
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	5	824.390.700		979.998.500		1.069.998.500	5	1.164.998.500	5	1.219.998.500	DISKAN
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**												
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-10,52	754.265.000	10.406	869.692.000	11.447	936.661.000	12.591	1.005.327.000	13.850	1.105.859.700	DISPORAPAR
		Lama kunjungan Wisata	1,8		2,0		2,25		2,8		3,0		
		PAD sektor pariwisata	1.152.714		1.187.295		1.240.723		1.315.167		1.413.804		
		Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata	29,52		31,43		35,24		42,86		47,62		
		Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata	6,875		7,5		9,44		15,00		20,00		
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kunjungan wisatawan	100	364.800.000	10,406	401.280.000	11,447	441.408.000	12.591	485.548.000	13.850	534.102.800	DISPORAPAR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	77.930.000	100%	85.722.000	100%	94.295.000	100%	103.724.000	100%	114.096.400	DISPORAPAR
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**												
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	100%	2.457.500.000	100%	2.703.250.000	100%	2.973.575.000	100%	3.270.932.500	100%	3.598.025.750	DISPANGAN
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	100%		100%		100%		100%		100%		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	100%	29.469.500.000	100%	32.401.450.000	100%	35.623.645.000	100%	39.159.279.500	100%	43.055.967.450	DISPANGAN
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti	75%	679.500.000	78%	747.900.000	79%	776.500.000	80%	819.700.000	81%	866.200.000	DISPANGAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana pertanian yang dapat ditindaklanjuti	75%	735.000.000	77%	745.500.000	79%	755.600.000	80%	768.500.000	85%	832.100.000	DISPANGAN
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat pelayanan baik	18 perusahaan	879.500.000	18 perusahaan	925.000.000	19 perusahaan	954.000.000	19 perusahaan	976.800.000	21 perusahaan	1.025.000.000	DISPANGAN
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani tingkat madya	7 poktan	475.000.000	7 poktan	487.000.000	8 poktan	490.000.000	8 poktan	495.000.000	9 poktan	550.000.000	DISPANGAN
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**												
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tersedianya Data Perizinan Perusahaan	80	77.000.000	95	85.000.000	100	95.000.000	110	102.000.000	125	110.000.000	DINKOPUKMP
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terlaksananya Pembangunan Pasar	1 Unit	2.500.000.000	2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	4.000.000.000	2 Unit	5.000.000.000	2 Unit	6 Milyard	DINKOPUKMP
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kenutuhan Pokok	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	1 Laporan	DINKOPUKMP
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Terlaksananya Pengembangan Ekspor Melalui Penyelengaraan Promosi Dagang	2 Event	150.000.000	2 Event	165.000.000	2 Event	170.000.000	2 Event	175.000.000	2 Event	200.000.000	DINKOPUKMP
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pesersentase Pengunaan Uji Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang memenuhi Ketentuan Metrologi Legal	31,20%	245.000.000	31,90%	255.000.000	32,50%	265.000.000	33,25%	285.000.00	34,50%	285.000.000	DINKOPUKMP
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang di pasarkan.	k Unggulan Daerah	50.000.000	: Unggulan Daerah	60.000.000	: Unggulan Daerah	70.000.000	: Unggulan Daerah	75.000.000	k Unggulan Daerah	85.000.000	DINKOPUKMP
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**												
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,1	4.550.000.000	1,2	4.605.000.000	1,3	4.923.000.000	1,4	4.325.000.000	1,5	4.325.000.000	DISNAKERINTRANS
		Sektor Pengolahan Pangan	48,42		48,90		49,39		49,88		50,38		
		Sektor Pengolahan Kerajinan	52,58		53,11		53,64		54,18		54,72		
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Industri pangan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar	2 IKM	100.000.000	2 IKM	100.000.000	2 IKM	100.000.000	2 IKM	100.000.000	2 IKM	100.000.000	DISNAKERINTRANS
		Jumlah Industri Sandang, Logam dan Aneka Kerajinan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar	2 IKM		2 IKM		2 IKM		2 IKM		2 IKM		
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan Data IKM	5,50	200.000.000	5,60	200.000.000	5,70	200.000.000	5,80	200.000.000	5,90	200.000.000	DISNAKERINTRANS
30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**												
1	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1,00	906.752.600	1,00	1.197.140.500	1,00	1.385.423.510	1,00	1.619.019.301	1,00	1.913.361.391	DISNAKERINTRANS
2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pembangunan permukiman Transmigrasi	0,00	92.619.300	0,00	138.928.950	1 SKP dan 2 SP	1.004.393.425	1 SKP dan 2 SP	1.267.790.138	1 SKP dan 2 SP	1.615.125.206	DISNAKERINTRANS
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Transmigrasi yang Mandiri	18,99	985.384.000	26,56	1.182.460.800	38,83	1.435.199.040	61,74	1.743.358.752	100,00	2.119.486.378	DISNAKERINTRANS
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
31	**SEKRETARIAT DAERAH**												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	42.870.420.000	B	42.870.420.000	B	42.870.420.000	B	42.870.420.000	B	42.870.420.000	SETDA
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
		Persentase Pelayananan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	2.993.793.000	100%	3.384.671.000	100%	3.702.054.500	100%	4.006.759.000	100%	4.434.434.300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	100%	2.915.586.578	100%	2.983.957.899	100%	3.059.193.352	100%	3.141.952.351	100%	3.232.987.250	SETDA
		Persentase kerjasama wajib daerah	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
		Persentase serapan anggaran bantuan hibah dan bansos	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
3	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan	100%	32.075.047.762	100%	33.107.203.591	100%	34.242.575.003	100%	35.491.483.556	100%	36.865.282.964	SETDA
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan UKPBJ	100%	3.526.600.000	100%	3.604.260.000	100%	3.689.686.000	100%	3.783.654.600	100%	3.887.020.060	SETDA
		Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
		Persentase Peningkatan PAD BUMD	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
		Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
32	**SEKRETARIAT DPRD**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	31.487.920.000	B	31.487.920.000	B	31.487.920.000	B	31.487.920.000	B	31.487.920.000	SET DPRD
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	70	12.164.968.195	72	15.248.029.142	74	20.571.959.051	75	28.265.012.541	77	41.602.128.022	SET DPRD
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	1		1		1		1		1		SET DPRD
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	6		6		6		6		6		SET DPRD
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1		1		1		1		1		SET DPRD
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
33	**PERENCANAAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.935.789.000	B	3.935.789.000	B	3.935.789.000	B	3.935.789.000	B	3.935.789.000	BAPPEDA
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	Cukup	1.450.000.000	Cukup	1.550.000.000	Baik	1.650.000.000	Baik	1.750.000.000	Baik	1.850.000.000	BAPPEDA
		Persentase konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RPJMD kedalam RKPD	100%	1.450.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.850.000.000	*BAPPEDA*
		Persentase Konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD	100%		100%		100%		100%		100%		*BAPPEDA*
		Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	72%		75%		78%		80%		82%		*BAPPEDA*
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam RENJA OPD	100%	2.700.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.600.000.000	100%	3.900.000.000	*BAPPEDA*
		Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RENJA OPD	72%		75%		78%		80%		82%		*BAPPEDA*
34	**KEUANGAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	12.274.673.000	B	12.274.673.000	B	12.274.673.000	B	12.274.673.000	B	12.274.673.000	
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	4.166.647.640,00	WTP	4.583.312.404,00	WTP	5.041.643.644,40	WTP	5.545.808.008,84	WTP	6.100.388.809,72	BKD
		Persentase Penurunan SILPA	40%		7%		7%		8%		8%		
		Persentase belanja pendidikan (20%)	20%		20%		20%		20%		20%		
		Persentase belanja kesehatan (10%)	10%		10%		10%		10%		10%		
		Penetapan APBD	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyelesaian Temuan Aset Tetap	40%	1.361.801.260,00	40%	1.497.981.386,00	40%	1.647.779.524,60	40%	1.812.557.477,06	40%	1.993.813.224,77	BKD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	4,45%	76.903.082.632,00	4,39%	78.441.144.284,64	4,34%	80.009.967.170	4,29%	81.610.166.513,74	4,24%	83.242.369.844,01	BAPENDA
35	**KEPEGAWAIAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.952.034.000	B	3.312.034.000	B	3.372.034.000	B	3.432.034.000	B	3.492.034.000	BKPSDM
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase disiplin ASN	99,80%	1.351.525.000	99,80%	1.351.525.000	99,80%	1.351.525.000	99,80%	1.351.525.000	99,80%	1.351.525.000	BKPSDM
		Persentase Kapasitas Kinerja ASN	71,70%	2.713.287.550	80,00%	2.802.262.005	81,00%	2.896.843.906	82,00%	2.196.891.496	83,00%	3.108.911.596	BKPSDM
		Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan	46,13%	1.022.997.150	46,14%	1.303.747.150	46,15%	1.381.572.150	46,16%	1.467.179.650	46,17%	1.561.347.900	BKPSDM
36	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	30%	Rp 7.468.474.300,00	35%	Rp 4.687.494.200,00	40%	Rp 5.463.761.750,00	45%	Rp 4.608.870.375,00	50%	Rp 4.632.384.168,00	BKPSDM KABUPATEN KAPUAS HULU
37	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**												
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	BAPPEDA
		Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan	*100%*		*100%*		*100%*		*100%*		*100%*		BAPPEDA
38	**PENGELOLAAN PERBATASAN**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.687.355.000	B	3.687.355.000	B	3.687.355.000	B	3.687.355.000	B	3.687.355.000	BPP
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan	20	441.382.500	25	441.382.500	30	441.382.500	35	441.382.500	40	441.382.500	BPP
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
39	**INSPEKTORAT DAERAH**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3.768.430.000	B	3.768.430.000	B	3.768.430.000	B	3.768.430.000	B	3.768.430.000	INSPEKTORAT
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	86%	4.700.000.000	90%	5.170.000.000	93%	5.687.000.000	97%	6.255.700.000	100%	6.881.270.000	INSPEKTORAT
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	88%		91%		94%		97%		100%		INSPEKTORAT
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		INSPEKTORAT
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "BB"	80%	7.000.000.000	83%	7.700.000.000	85%	8.470.000.000	88%	9.317.000.000	90%	10.248.700.000	INSPEKTORAT
		Predikat Reformasi Birokrasi	CC		CC		B		B		BB		
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu	36		40		43		46		50		
7	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**												
41	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.578.849.000	B	2.578.849.000	B	2.578.849.000	B	2.578.849.000	B	2.578.849.000	BAKESBANGPOL
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	A		A		A		A		A		
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Rp 676.425.000,00	100%	Rp 744.067.500,00	100%	Rp 818.474.250,00	100%	Rp 900.321.675,00	100%	Rp 990.353.842,50	BAKESBANGPOL
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahamanan terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100%	Rp 1.523.500.800,00	100%	Rp 1.675.850.880,00	100%	Rp 1.843.435.968,00	100%	Rp 2.027.779.564,80	100%	Rp 2.230.557.521,28	BAKESBANGPOL
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaa Organisasi Kemasyarakatan	100%	Rp 381.252.000,00	100%	Rp 419.377.200,00	100%	Rp 461.314.920,00	100%	Rp 507.446.412,00	100%	Rp 558.191.053,20	BAKESBANGPOL
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	Rp 85.248.000,00	100%	Rp 93.772.800,00	100%	Rp 103.150.080,00	100%	Rp 113.465.088,00	100%	Rp 124.811.596,80	BAKESBANGPOL
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pemahaman di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik di Sosial	100%	Rp 298.341.750,00	100%	Rp 328.175.925,00	100%	Rp 360.993.517,50	100%	Rp 397.092.869,25	100%	Rp 436.802.156,18	BAKESBANGPOL
8	**UNSUR KEWILAYAHAN**												
42	**KECAMATAN**												
1	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	1.590.468.000	B	1.590.468.000	B	1.590.468.000	B	1.590.468.000	BB	1.590.468.000	KEC. PTS UTARA
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
2	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	1.587.420.000	B	1.587.420.000	B	1.587.420.000	B	1.587.420.000	BB	1.587.420.000	KEC PTS SELATAN
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
3	KECAMATAN BIKA	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC BIKA
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
4	KECAMATAN KALIS	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC KALIS
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
5	KECAMATAN EMBALOH HILIR	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC EMBALOH HILIR
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
6	KECAMATAN EMBALOH HULU	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC EMBALOH HULU
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
7	KECAMATAN BUNUT HILIR	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC BUNUT HILIR
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
8	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC BOYAN TANJUNG
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
9	KECAMATAN BUNUT HULU	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC BUNUT HULU
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
10	KECAMATAN MENTEBAH	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC MENTEBAH
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
11	KECAMATAN JONGKONG	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC JONGKONG
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
12	KECAMATAN PENGKADAN	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC PENGKADAN
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
13	KECAMATAN HULU GURUNG	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC HULU GURUNG
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
14	KECAMATAN SELIMBAU	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC SELIMBAU
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
15	KECAMATAN BADAU	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC BADAU
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
16	KECAMATAN BATANG LUPAR	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC BATANG LUPAR
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
17	KECAMATAN EMPANANG	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC EMPANANG
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
18	KECAMATAN PURING KENCANA	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC PURING KENCANA
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
19	KECAMATAN SEMITAU	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC SEMITAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
20	KECAMATAN SUHAID	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC SUHAID
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
21	KECAMATAN SEBERUANG	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC SEBERUANG
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
22	KECAMATAN SILAT HILIR	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC SILAT HILIR
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		
23	KECAMATAN SILAT HULU	Predikat SAKIP Perangkat Daerah dari Inkab	CC	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	B	624.230.456	BB	624.230.456	KEC SILAT HULU
		Tingkat penilaian realisasi keuangan	100		100		100		100		100		
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	100		100		100		100		100		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82		82		82		82		82		
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100		
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100		100		100		100		100		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapain visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	IPM	-	65,69	66,95	67,47	67,99	68,51	69,03	69,03
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,99	8,6	8,45	8,15	7,85	7,55	7,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,68	3,51	3,34	3,17	3	3
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-2,43	1,23	2	3	4	5	5
5	PDRB per Kapita	Juta Rp	40,72	41,5	47,776	50,034	52,292	54,55	54,55

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangan oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel VIII.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	**Indeks Rasa Aman**	**Indeks**	**76,31**	**93,66**	**95**	**96**	**97**	**96,08**
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	78	80	83	86	88
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	126,64	124,06	121,5	118,9	116,3
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	70	72	75	78	80
6	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**-2,43**	**1,23**	**2**	**3**	**4**	**5**
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,0	1,8	2,6	3,4	4,20
9	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
10	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	-10,52	2,88	3,24	4,53	5,58
11	**Persentase Desa Mandiri**	**%**	**13,31**	**15,47**	**17,63**	**19,78**	**21,94**	**24,10**
12	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	43	49	55	61	67
13	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**8,33**	**8,08**	**7,83**	**7,58**	**7,33**	**7,08**

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
14	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	**4,02**	**3,68**	**3,51**	**3,34**	**3,17**	**3,00**
15	Persentase pelayanan kesejahtaraan sosial	%	35,43	36,14	36,92	37,68	38,45	39,12
16	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	9,30	13,46	17,63	19,99	20,82
17	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	546,57	547,29	569,18	591,95	615,63	620,20
18	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,02	93,12	93,32	93,52	93,72
19	Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	39,30	41,63	44,75	48,25	51,36
20	**Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup**	**PREDIKAT**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**
21	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,41	74,64	74,87	74,96	75,05
22	Persentase RDTR	%	4,35	13,04	26,09	39,13	52,17	65,22
23	**Indeks Pembangunan Manusia**	**-**	**65,69**	**67,11**	**67,64**	**68,15**	**68,66**	**69,17**
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,53	12,66	12,79	12,92	13,04
25	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,91	8,07	8,23	8,39	8,54
26	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,42	73,02	73,18	73,35	73,51
27	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7,428	7.601	7.722	7.842	7.963
28	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**PREDIKAT**	**CC**	**CC**	**CC**	**B**	**B**	**BB**
29	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB	BB	BB	BB	A
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,5	80,73	80,8	80,9	81
31	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
33	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
34	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
35	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,25	48,50	49,00	49,50	50
36	**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**-**	**72,22**	**74,22**	**76,49**	**78,66**	**80,92**	**83,83**
37	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	67	70	73	76	79
38	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	60	63	65	67	69

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
39	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	79,66	81,00	82,58	84,2	87,03
40	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	75,55	77,30	78,40	79,83	82,64
41	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	74,66	77,66	80,66	83,66	86,66
42	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
43	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	43,85	50,15	56,45	62,75	69,05
44	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	61,10	66,00	70,90	75,80	80,70
45	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan**	**-**	**0,00**	**72,50**	**74,50**	**77,00**	**79,50**	**82,50**
46	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	SCORE		75	77	80	83	85
47	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	SCORE		70	72	74	76	80

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana

lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pada program pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan capaian pembangunan Tahun 2021-2026 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel VIII.2 sebagai berikut:

Tabel VIII.3
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							DISPENBUD
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							DISPENBUD
1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	55	56	57	58	59	59	DISPENBUD
2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	23,04	26,5	28,8	31,11	34,56	34,56	DISPENBUD
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,96	2,074	2,3	2,53	2,88	2,88	DISPENBUD
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,91	108,21	105,51	102,8	100	100	DISPENBUD
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,48	99,6	99,72	99.84	100	100	DISPENBUD
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,62	98,64	98,5	98,63	98,65	98,65	DISPENBUD
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,47	76,49	77	77,1	77,2	77,2	DISPENBUD
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99	99,5	99,75	99,9	100	100	DISPENBUD
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	0,04	0,02	0,01	0	0	DISPENBUD
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	DISPENBUD
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	18	13	11	10	7	7	DISPENBUD
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	DISPENBUD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja K	Target Kinerja K	Target Kinerja K	Target Kinerja K	Target Kinerja K		
13	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,73	53,41	54,09	54,77	55,45	55,45	DISPENBUD
14	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	69,86	70,77	71,68	72,59	73,5	73,5	DISPENBUD
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	75	76	77	78	79	79	DINKESPPKB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar	82	83	84	85	86	86	DINKESPPKB
3	Angka Kamatian Ibu	124/100000 KH	123/100000 KH	122/100000 KH	121/100000 KH	120/100000 KH	120/100000 KH	DINKESPPKB
4	Angka Kamatian Neonatal	12/1000 KH	11/1000 KH	10/1000 KH	9/1000 KH	8/1000 KH	8/1000 KH	DINKESPPKB
5	Angka Kematian Bayi	19/1000 KH	18/1000 KH	16/1000 KH	15/1000 KH	14/1000 KH	14/1000 KH	DINKESPPKB
6	Persentase Balita pendek dan sangat pendek (stunting)	32%	32%	31%	30,50%	30%	30%	DINKESPPKB
7	Cakupan Pelayanan PTM	75	76	77	78	79	79	DINKESPPKB
8	Insiden Rate TB	155/100000 pddk	150/100000 pddk	145/100000 pddk	140/100000 pddk	135/100000 pddk	135/100000 pddk	DINKESPPKB
9	Cakupan Penyakit Menular Berpotensi Wabah Yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
10	Persentase Puskesmas sesuai standar	73,91	78,26%	82,60%	86,95%	91,30%	91,30%	DINKESPPKB
11	Jumlah Tempat Tidur RS	198	200	220	240	255	255	DINKESPPKB
12	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	90	94	95	95	95	95	DINKESPPKB
13	Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten	85	90	90	90	90	90	DINKESPPKB
14	Persentase Balita Kurus (Wasting)	26,20%	25,70%	25,20%	24,70%	24,20%	24,20%	DINKESPPKB
15	Persentase Balita Gizi Kurang (Underweight)	11,70%	11,40%	11,10%	10,80%	10,50%	10,50%	DINKESPPKB
16	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
17	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
18	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
19	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
20	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
21	Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
22	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
23	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
24	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
25	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
26	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
27	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
28	Persentase Puskesmas dengan IDL 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
29	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang telah memiliki akreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
30	Persentase Puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
31	Kejadian Luar Biasa	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	DINKESPPKB
32	Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD	2	5	5	6	6	6	DINKESPPKB
33	Jumlah Klinik yang terakredasi	0	0	2	2	2	2	DINKESPPKB
34	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan	77	80	85	90	100	100	DINKESPPKB
35	Persentase Desa Melaksanakan STBM	95	100	100	100	100	100	DINKESPPKB
36	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	0,1	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	DINKESPPKB
37	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	0,00080	0,00082	0,00084	0,00086	0,00088	0,00088	DINKESPPKB
38	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	1	1	1	1	1	1	DINKESPPKB
39	Persentase Puskesmas dan RS yang memiliki Ijin Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
40	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	4,35%	8,70%	13,40%	74	75	75	DINKESPPKB
41	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
42	Persentase RS Rujukan Kabupaten yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (wajib ada) dan 3 dokter spesialis lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
43	Jumlah Puskesmas tanpa dokter	1	0	0	0	0	0	DINKESPPKB
44	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	200	200	200	200	200	200	DINKESPPKB

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
45	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal	71	72	73	74	75	75	DINKESPPKB
46	Persentase pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
47	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
48	Persentase rekomendasi pemberian izin produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
49	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
50	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
51	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
52	Persentase Kecamatan dengan Rumah Tangga ber PHBS ≥ 50 %	55%	60%	65%	70%	75%	75%	DINKESPPKB
53	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
54	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
55	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	74,66%	77,66%	80,66%	83,66%	86,66%	86,66%	DPUPR
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang medapatkan akses terhadap air minum	79,66%	81,00%	82,58%	84,20%	87,03%	87,03%	DPUPR
2	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,55%	77,3%	78,4%	79,83%	82,64%	82,64%	DPUPR
3	% Luas genangan air yang ditangani	4,20%	7,20%	10,20%	13,20%	16,20%	16,20%	DPUPR
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	38.039	38.039	38.039	38.039	38.039	38.039	DPUPR
4	Rasio Kepatuhan IMB (%)	100	100	100	100	100	100	DPUPR
5	Rasio Kepatuhan IMB (%)	100	100	100	100	100	100	DPUPR
6	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	67,00%	70	73	76	79	79	DPUPR
8	Indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan jasa konstruksi	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5	DPUPR
7	% Tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPUPR

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
8	Persentase luas RTH publik per luas wilayah kota / Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTDR	10	15	17	19	22	22	DPUPR
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							DPRKPPLH
1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	30	37	47	57	60	60	DPRKPPLH
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	38.039	38.039	38.039	38.039	38.039	38.039	DPRKPPLH
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATPOLPP
2	Indeks Resiko Bencana	126.64	124,06	121,05	118,9	116,30	116,30	BPBD KH
3	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD KH
4	Persentase Jumlah Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	BPBD KH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
1	Persentase Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PPKB
2	Persentase jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan uang dilakukan pemulangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PPKB
3	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PPKB
4	Jaminan Sosial Keluarga	10,267	10,470	10,682	10,890	11,110	11,110	DINSOS PPKB
5	pelayanan kesejahtaraan sosial	36,140	36,863	37,600	38,352	39,119	39,119	DINSOS PPKB
6	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi		4	6	8	10	10	DINSOS PPKB
7	Cakupan perlindungan korban bencana alam	10	15	20	25	30	30	DINSOS PPKB
8	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik diwilayah berisiko bencana	2	4	6	8	10	10	DINSOS PPKB
9	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PPKB
	SPM							DINSOS PPKB
1	Jumlah disabilitas terlantar di luar panti	0	0	0	0	0	0	DINSOS PPKB
2	Jumlah anak terlantar di luar panti (sosial dasar anak)	0	0	0	0	0	0	DINSOS PPKB
3	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti	0	0	0	0	0	0	DINSOS PPKB
4	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	0	0	0	0	0	0	DINSOS PPKB
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINSOS PPKB

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/UNIVERSITAS	76,31	77,83	79,38	80,96	82,58	82,58	DISNAKERINTRANS
2	Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISNAKERINTRANS
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan	72,85	74,31	75,79	77,31	78,85	78,85	DISNAKERINTRANS
4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100	100	100	100	100	100	DISNAKERINTRANS
5	Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	72	73	74	75	76	76	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							DINSOS PPKB
1	Meningkatnya IPG (Indeks Pembangunan Gender)	25	30	35	40	45	45	DINSOS PPKB
2	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	85%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS PPKB
3	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan PUG	3	3	3	3	5	5	DINSOS PPKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							Distan Pangan
1	Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Distan Pangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
2	persentase ketersediaan energi perkapita	70%	72%	75%	76%	79%	79%	Distan Pangan
3	Persentase penanganan kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	50%	55%	57%	61%	62%	62%	Distan Pangan
4	Persentase Pangan segar yang layak konsumsi	80%	82%	82%	85%	86%	86%	Distan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Persentase Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan	100%	1	1	1	1	1	DPRKPPLH
2	Jumlah Persetujuan Izin Lokasi Yang diterbitkan	1	1	1	1	1	1	DPRKPPLH
3	Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian tanah	100%	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
4	Jumlah Ganti Rugi yang di selesaikan	17	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
5	Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi	5	5	5	5	5	5	DPRKPPLH
6	Jumlah Bidang Tanah Kosong yang diinventarisasi	5	5	5	5	5	5	DPRKPPLH
7	Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
8	Persentase Jumlah Konflik Pertanahan Yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							DLH
1	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	18,5	22,2	25,9	29,6	33,3	33,3	DPRKPPLH
2	Persentase pemenuhan baku mutu	16,67	20	23,33	26,67	30	30	DPRKPPLH

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
3	Persentase penambahan tutupan lahan	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	3,50	DPRKPPLH
4	Persentase pelayanan pengumpulan B3 dan limbah B3	42	44	46	48	50	50	DPRKPPLH
5	Persentase usaha/kegiatan, yang komitmen terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	15	20	25	30	35	35	DPRKPPLH
6	Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal	100	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
7	Persentase peningkatan kapasitas kelompok sasaran	15	20	25	30	35	35	DPRKPPLH
8	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
9	Persentase penyelesaian pengaduan LH	100	100	100	100	100	100	DPRKPPLH
10	Persentase pemenuhan layanan persampahan	19	20	21	22	23	23	DPRKPPLH
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Kepemilikan KTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
2	Persentase Kepemilikan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
3	Persentase Kepemilikan KIA	78%	81%	84%	87%	90%	90%	DISDUKCAPIL
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	88%	95%	96%	97%	98%	98%	DISDUKCAPIL
5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	80%	82%	84%	86%	88%	88%	DISDUKCAPIL
6	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	13	17	20	23	26	26	DISDUKCAPIL

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
7	Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							DPMD
1	Persentase Penyelesaian Batas Adminisrasi Desa	38,49	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD
2	% Bumdesma	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD
3	% Batas Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD
4	% Desa Mandiri	15,47	17,63	19,78	21,94	24,10	24,10	DPMD
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							DINKESPPKB
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,26%	1,27%	1,28%	1,29%	1,30%	1,30%	DINKESPPKB
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	56,56	56,58	56,60	56,62	56,64	56,64	DINKESPPKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	4,14	DINKESPPKB
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,10	19,08	19,04	19,02	18,00	18,00	DINKESPPKB
6	Rata-rata usia kawin pertama wanita	9,93	10,28	10,64	10,99	11,35	11,35	DINKESPPKB
7	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKESPPKB
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	11,05	11,07	11,10	11,12	11,14	11,14	DINKESPPKB
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	72,05	72,06	72,07	72,08	72,09	72,09	DINKESPPKB

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
10	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	37,92	37,93	37,95	37,96	37,98	37,98	DINKESPPKB
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							DISHUB
1	Porsentase Fasilitas Angkutan Jalan	55%	60%	75%	80%	90%	90%	DISHUB
2	Rasio konektivitas Kabupaten							
3	Porsentase Fasilitas angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	50%	60%	70%	80%	90%	90%	DISHUB
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							DISKOMINFOTIK
1	Nilai indek Keterbukaan Informasi Publik	88,25	88,45	88,65	88,85	89,05	89,05	DISKOMINFOTIK
2	Indeks Penilaian SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	2,65 (Baik)	2,70 (Baik)	2,80 (Baik)	2,90 (Baik)	3,00 (Baik)	3,00 (Baik)	DISKOMINFOTIK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Persentase Usaha Simpan Pinjam	1,60%	2%	2,50%	3%	4%	4%	DKUKMP
2	Persentase Koperasi Aktif	39,30	15%	15%	17,65%	17,69%	17,69%	DKUKMP
3	% Koperasi yang di nilai	44,44%	50%	54,55%	58,33%	61,54%	61,54%	DKUKMP
4	Terselengaranaya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi	120 0rang	120 orang	160 orang	160 orang	200 orang	200 orang	DKUKMP
5	% Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi	8,57%	8,75%	8,89%	9%	9,91%	9,91%	DKUKMP
6	% Pertumbuhan Usaha Mikro	93,02%	93.12 %	93.32 %	93.52 %	93.72 %	93.72 %	DKUKMP

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
7	% UMKM naik Kelas	1%	1%	1%	1%	1%	1%	DKUKMP
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							DPMPTSP
1	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok	2 dok	2 dok	DPMPTSP
2	Jumlah minat investor	2 minat	2 minat	2 minat	3 minat	3 minat	3 minat	DPMPTSP
3	Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMPTSP
4	Prosentase kepatuhan perusahaan sampaikan LKPM	50%	50%	55%	60%	65%	65%	DPMPTSP
5	Laporan pengelolaan data dan sistem informasi	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	DPMPTSP
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							DISPORAPAR
1	Jumlah wirausaha muda	117	142	167	192	217	217	DISPORAPAR
2	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelatihan kepemudaan setiap tahun	1	1	1	1	1	1	DISPORAPAR
3	Jumlah organisasi dan kelompok/perkumpulan pemuda yang aktif	26	28	30	32	34	34	DISPORAPAR
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	116	119	127	135	143	143	DISPORAPAR
5	Cakupan pembinaan atlet muda	5	6	9	10	10	10	DISPORAPAR
6	Jumlah atlet berprestasi	4	5	5	6	6	6	DISPORAPAR
7	Jumlah prestasi olahraga	4	5	6	7	7	7	DISPORAPAR
8	Jumlah Prasarana olahraga masyarakat dan olah raga pendidikan	1234	1236	1239	1242	1245	1245	DISPORAPAR
9								
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							DISKOMINFOTIK

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
1	Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi	300 dataset	315 dataset	330 dataset	345 dataset	360 dataset	360 dataset	DISKOMINFOTIK
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Indeks Keamanan Informasi	Tingkat I/Pemenuhan Kerangka Awal	Tingkat I/ Cukup Baik	Tingkat II/Pemenuhan Kerangka Awal	Tingkat II/ Cukup Baik	Tingkat II/ Baik	Tingkat II/ Baik	DISKOMINFOTIK
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							DISPENBUD
1	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	93,75	94,06	94,34	94,59	94,83	94,83	DISPENBUD
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISPENBUD
3	Cagar Budaya yang dilestarikan	70,00	75,00	80,00	90	100	100	DISPENBUD
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Persentase Kunjungan Perpustakaan	5.414 Orang (9,37)	5.520 Orang (11,5%)	5.626 Orang(13,6%)	5.733 Orang (15,8 %)	5.839 Orang (17,9%)	5.839 Orang (17,9%)	DIPERSIP
2	persentase perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan	4 Perpustakaan (4/645x100%= 0,62%)	6 Perpustakaan (6/645x100%=0,93 %)	8 Perpustakaan (8/645x100%=1,24%)	10 Perpustakaan (10/645x100%=1,55%)	12 Perpustakaan (12/645x100%=1,86%)	12 Perpustakaan (12/645x100%=1,86%)	DIPERSIP
3	Indeks Kearsipan Daerah	CC (57)	CC (59)	CC (60)	B (61)	B (62)	B (62)	DIPERSIP
4	persentase arsip yang selamatkan	1/27 (3,7 %)	2/27 (7,40 %)	3/27 (11,11 %)	4/27 (14,8%)	5/27(18,5 %)	5/27(18,5 %)	DIPERSIP
5	persentase arsip tertutup yang dapat diakses	0	0	500 (13,37%)	750 (70,06	1000	1000	DIPERSIP
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	30	30	30	31	31	31	DISKAN
2	Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	875.000	1.000.000	1.025.000	1.035.000	1.050.000	1.050.000	DISKAN
3	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2	2	2	2	2	2	DISKAN
4	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	5			5	5	5	DISKAN
8	Jumlah Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	875.000	1.000.000	1.025.000	1.035.000	1.050.000	1.050.000	DISKAN
10	Jumlah benih yang diproduksi UPR dan Pembudidaya Mandiri dalam ekor/tahun	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	DISKAN
11	Jumlah benih yang produksi dalam jenis/macam pertahun	7	8	8	8	8	8	DISKAN
12	Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	DISKAN
13	Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor)	425.000	450.000	475.000	500.000	500.000	500.000	DISKAN
14	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2	2	2	2	2	2	DISKAN
15	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk	2	2	2	2	2	2	DISKAN
16	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	5			5	5	5	DISKAN
17	Persentase pengolah yang terdata	10	10	10	10	10	10	DISKAN

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
18	Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula (cakupan bina kelompok pengolah)	4	4	4	4	4	4	DISKAN
19	Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro	2	2	2	2	2	2	DISKAN
20	Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil	2	2	2	2	2	2	DISKAN
21	Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis)	5	5	5	5	5	5	DISKAN
22	Angka konsumsi ikan (%)	5	5	5	5	5	5	DISKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							DISPORAPAR
1	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-10,52	10.406	11.447	12.591	13.850	13.850	DISPORAPAR
2	Lama kunjungan Wisata	1,8	2,0	2,25	2,8	3,0	3,0	DISPORAPAR
3	PAD sektor pariwisata	1.152.714	1.187.295	1.240.723	1.315.167	1.413.804	1.413.804	DISPORAPAR
4	Persentase Kegiatan pada Program Pengembangan Desitinasi Pariwisata	29,52	31,43	35,24	42,86	47,62	47,62	DISPORAPAR
5	Persentase Kegiatan pada Program Kemitraan Pariwisata	6,875	7,5	9,44	15,00	20,00	20,00	DISPORAPAR
6	Persentase kunjungan wisatawan	100	10.406	11.447	12.591	13.850	13.850	DISPORAPAR
7	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISPORAPAR
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							Distan Pangan
1	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Distan Pangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
2	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Distan Pangan
3	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Distan Pangan
4	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Distan Pangan
5	Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti	75%	78%	79%	80%	81%	81%	Distan Pangan
6	Persentase Bencana pertanian yang dapat ditindaklanjuti	75%	77%	79%	80%	85%	85%	Distan Pangan
7	Jumlah perusahaan yang mendapat pelayanan baik	18 perusahaan	18 perusahaan	19 perusahaan	19 perusahaan	21 perusahaan	21 perusahaan	Distan Pangan
8	Persentase kelompok tani tingkat madya	7 poktan	7 poktan	8 poktan	8 poktan	9 poktan	9 poktan	Distan Pangan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							DKUKMP
1	Tersedianya Data Perizinan Perusahaan	80	95	100	110	125	125	DKUKMP
2	Jumlah Pelaku usaha yang sudah dan belum memeliki izin usaha.	80	95	100	110	125	125	DKUKMP
3	Jumlah Gudang yang sudah dan belum di beri surat izin TDG.	7 Gudang	10 Gudang	12 Gudang	15 Gudang	17 Gudang	17 Gudang	DKUKMP
4	Terlaksananya Pembangunan Pasar	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	DKUKMP
5	Jumlah Pasar Tradisional / Pasar yang di bangun.	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	DKUKMP
6	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kenutuhan Pokok.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	DKUKMP
7	Jumlah Hasil Laporan Monitoring.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	DKUKMP
8	Terlaksananya Pengembangan Ekspor Melalui Penyelengaraan Promosi Dagang.	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	DKUKMP

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
9	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang di ikuti.	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	DKUKMP
10	Pesersentase Pengunaan Uji Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang memenuhi Ketentuan Metrologi Legal.	31,20%	31,90%	32,50%	33,25%	34,50%	34,50%	DKUKMP
11	Terlaksanaya Tera / Tera Ulang , Pendataan dan Pengawasan UTTP .	1.350 Unit	1.400 Unit	1.500 Unit	1.600 Unit	1.700 unit	1.700 unit	DKUKMP
12	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang di pasarkan.	5 Produk Unggulan Daerah	5 Produk Unggulan Daerah	5 Produk Unggulan Daerah	5 Produk Unggulan Daerah	5 Produk Unggulan Daerah	5 Produk Unggulan Daerah	DKUKMP
13	Terlaksanaya Pemasaran Produk Unggulan Daerah	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	DKUKMP
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	DISNAKERINTRANS
2	Sektor Pengolahan Pangan	48,42	48,90	49,39	49,88	50,38	50,38	DISNAKERINTRANS
3	Sektor Pengolahan Kerajinan	52,58	53,11	53,64	54,18	54,72	54,72	DISNAKERINTRANS
4	Jumlah Industri pangan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	DISNAKERINTRANS
5	Jumlah Industri Sandang, Logam dan Aneka Kerajinan yang berkembang ke skala Industri yang lebih Besar	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	DISNAKERINTRANS
6	Pertumbuhan Data IKM	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90	DISNAKERINTRANS
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
1	Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DISNAKERINTRANS

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
2	Pembangunan permukiman Transmigrasi	0,00	0,00	1 SKP dan 2 SP	1 SKP dan 2 SP	1 SKP dan 2 SP	1 SKP dan 2 SP	DISNAKERINTRANS
3	Transmigrasi yang Mandiri	18,99	26,56	38,83	61,74	100,00	100,00	DISNAKERINTRANS
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
2	Persentase kerjasama wajib daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
3	Persentase serapan anggaran bantuan hibah dan bansos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
4	Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
5	Tingkat Kematangan UKPBJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
6	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
7	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
8	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
9	Persentase Pelayananan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SETDA
2	SEKRETARIAT DPRD							SET DPRD
1	TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	70	72	74	75	77	77	SET DPRD
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	SET DPRD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	6	6	6	6	6	6	SET DPRD
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1	1	1	1	1	1	SET DPRD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	PERENCANAAN							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	BAPPEDA
2	Persentase konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*BAPPEDA*
3	Persentase Konsistensi penjabaran Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*BAPPEDA*
4	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RPJMD	72%	75%	78%	80%	82%	82%	*BAPPEDA*
5	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
9	Persentase elemen data dan informasi pembangunan yang diinput dalam SIPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
10	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RKPD	72%	75%	78%	80%	82%	82%	BAPPEDA
11	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RKPD kedalam RENJA OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*BAPPEDA*
12	Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RENJA OPD	72%	75%	78%	80%	82%	82%	*BAPPEDA*
13	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
14	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
15	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72%	75%	78%	80%	82%	82%	BAPPEDA
16	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
17	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
18	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	72%	75%	78%	80%	82%	82%	BAPPEDA
19	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENSTRA OPD kedalam RENJA OPD Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
20	Persentase konsistensi penjabaran program dan kegiatan RENJA OPD kedalam RKA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
21	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Sasaran RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	72%	75%	78%	80%	82%	82%	BAPPEDA
2	KEUANGAN							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
2	Persentase Penurunan SILPA	40%	7%	7%	8%	8%	8%	
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
6	Persentase Penyelesaian Temuan Aset Tetap	40%	40%	40%	40%	40%	40%	BKD
7	Persentase Pengelolaan BMD secara optimal	40%	40%	40%	0	0	0	BKD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
8	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	4,45%	4,39%	4,34%	4,29%	4,24%	4,24%	BAPENDA
3	**KEPEGAWAIAN**							BKPSDM
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM
2	Persentase disiplin ASN	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	BKPSDM
3	Persentase Kapasitas Kinerja ASN	71,70%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	83,00%	BKPSDM
4	Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan	46,13%	46,14%	46,15%	46,16%	46,17%	46,17%	BKPSDM
4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
1	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	30%	35%	40%	45%	50%	50%	BKPSDM
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
1	Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
2	Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	BAPPEDA
3	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
4	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
5	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
6	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang selaras dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
6	PENGELOLAAN PERBATASAN							
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan	20	25	30	35	40	40	BPP
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
1	INSPEKTORAT DAERAH							INSPEKTORAT
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	86%	90%	93%	97%	100%	100%	INSPEKTORAT
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	88%	91%	94%	97%	100%	100%	INSPEKTORAT
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	INSPEKTORAT
4	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	INSPEKTORAT
5	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "BB"	80%	83%	85%	88%	90%	90%	INSPEKTORAT
6	Predikat Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	BB	BB	INSPEKTORAT
7	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu	36	40	43	46	50	50	INSPEKTORAT
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							BAKESBANGPOL
1	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
		K	K	K	K	K		
2	Persentase pemahamanan terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL
3	Persentase Partai Politik yang yang tidak memiliki temuan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL
4	Persentase Peningkatan Pemahaman mengenai Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL
5	Persentase Pengawasan dan Pembinaa Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL
6	Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Derah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL
7	Persentase Pemahaman di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik di Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAKESBANGPOL

8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktupencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencanapemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yangkesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII.4
Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	**PENDIDIKAN**							
01.01	PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH							
	Jumlah warga negera usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	89,12	91,24	93,36	95,48	97.60	100
01.02	PENDIDIKAN KESETARAAN							
	Jumlah Warga Negera Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.	100%	94,40	95,00	96,00	97,00	98,00	100
01.03	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							
	Jumlah Warga Negera Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	78,65	82,92	87,19	91,46	95,73	100
2	**KESEHATAN**							
02.01	PELAYANAN KESEHATAN DASAR							
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	77,7100271	100	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	86,72	100	100	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,61	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	72,14008202	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	53,55	100	100	100	100	100
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	63,69	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	77,40	100	100	100	100	100
	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,55	100	100	100	100	100
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	48,00	100	100	100	100	100
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,5	100	100	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95,97	100	100	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	88,87	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**							
04.01	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti							
	Penyandang disabilitas telantar di luar panti yang direhabilitasi	orang	0	10	15	20	25	30
04.02	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar diluar panti							
	Anak telantar di luar panti yang direhabilitasi	orang	0	0	0	0	0	0
04.03	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar diluar panti							
	Lanjut usia telantar di luar panti yang direhabilitasi	orang	0	0	0	0	0	0
04.04	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis diluar panti	orang	0	0	0	0	0	0
	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang direhabilitasi	orang	0	0	0	0	0	0
04.05	Penanggulangan Bencana Korban							
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana daerah kabupaten/kota	orang	11	15	17	20	25	30

8.3 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB /SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel VIII.5
Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

N0	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	KONDISI AWAL	TARGET PEMBANGUNAN				
										2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	**SOSIAL**	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS : (Survei Sosial Ekonomi) Kor	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	8,99	8,6	8,45	8,15	7,85	7,55
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	**SOSIAL**	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPS (Sakernas)	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00

N0	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	KONDISI AWAL	TARGET PEMBANGUNAN				
										2022	2023	2024	2025	2026
2	Tanpa Kelaparan		2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan		32,9	32	32	31	30,5	30
2	Tanpa Kelaparan		2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.	Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan		26,7	26,2	25,7	25,2	24,7	24,2

N0	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	KONDISI AWAL	TARGET PEMBANGUNAN				
										2022	2023	2024	2025	2026
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera		3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan		124	205	194	183	172	161
			3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan		12	19	18	16	15	14
					3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan		9	12	11	10	9	8

N0	TUJUAN TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	TARGET (PERPRES 59/2017)	KONDISI AWAL	TARGET PEMBANGUNAN				
										2022	2023	2024	2025	2026
	Berkurangnya Kesenjangan		10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Berkurangnya Kesenjangan		10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		37	43	49	55	61	67

BAB IX
PENUTUP

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu telah memasuki tahap pembangunan ke-4 pada pelaksanaan RPJPD. Selama 3 (tiga) tahap periode pembangunan RPJMD berbagai capaian pembangunan telah dirasakan masyarakat Kapuas Hulu dan memberikan gambaran kondisi pembangunan aKabupaten Kapuas Hulu pada saat ini. RPJMD menjadi pedoman penyelenggaran dan pembangunan pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ini, penting dipahami oleh segenap pihak terkait yaitu mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPJMD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional.

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021-2026, akan berakhir pada tahun 2024 dan akan terjadi transisi pemerintahan, sehingga diperlukan pedoman transisi pemerintahan yang akan datang. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menyatakan bahwa kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan akan dilaksanakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dam wakil Walikota pada bulan November 2024. Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2024 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah

agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dengan berakhirnya masa periode RPJMD di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada RPJMD periode 2021-2026. Pada saat masa transisi diharapkan pergantian kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD sebagaimana di maksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan ini diharapkan efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya;
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan 2026;
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap inikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi;
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
8. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang.

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN, S.H.